



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);

18. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018
Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjun Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
14. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
25. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
27. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
28. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
29. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
30. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan :
 - a. Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih; dan
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan program prioritas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) sistematika RPJMD meliputi :
 - a. BAB I
PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
 - b. BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
 - c. BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Memuat kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.
 - d. BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
Meliputi permasalahan pembangunan dan isu strategis.
 - e. BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran.
 - f. BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat strategi dan arah kebijakan.
 - g. BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

h. BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat Penetapan indikator kinerja daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

i. BAB IX

PENUTUP

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila dan sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD, dapat mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 26 - 08 - 2021

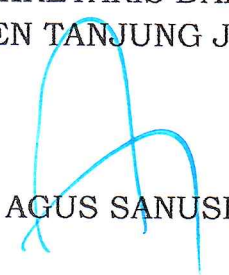
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 - 08 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,


AGUS SANUSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
PROVINSI JAMBI : (4-50/2021).

Lampiran
Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
Nomor : Tahun 2021
Tentang : Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya, untuk perencanaan pembangunan daerah terdapat tiga jenis menurut jangka waktunya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan (RKPD).

Dengan sudah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021 – 2024 pada tanggal 26 Februari 2021 maka sebagai kepala daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk masa 2021 – 2026 sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan baik nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RPJMD akan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dijabarkan kedalam Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah dan dioperasionalkan dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 merupakan tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah ke empat yang terakhir (RPJMD ke IV) dalam masa perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005 – 2025. untuk itu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 salah satunya harus memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 sebagai upaya pencapaian target – target jangka panjang pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, skenario pembangunan daerah berdasarkan berkelanjutan diintegrasikan dimulai dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program, dan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari fokus pembangunan jangka menengah daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar – dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

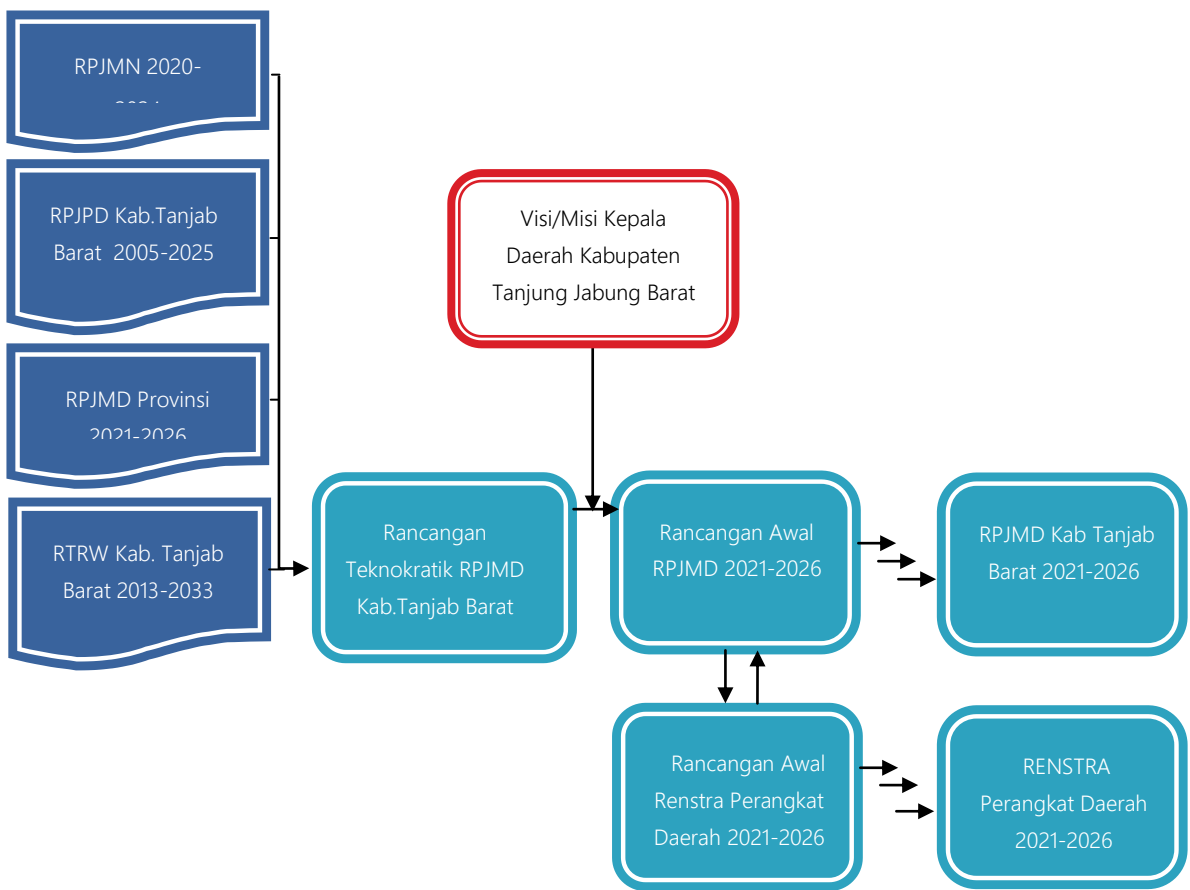
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengikthisarkan dokumen RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan baik nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, artinya ada keterkaitan antara RPJMD dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/kota.

Selain peraturan-perundangan diatas tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 12 menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan mempedomani RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Gambar 1.1.
Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kab.Tanjung Jabung Barat 2021-2026 Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



1.3.1.RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 dan RPJMN 2020 – 2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 memperhatikan tema dan agenda pembangunan jangka menengah nasional 2020 – 2024 yang sudah ditetapkan. Tema RPJMN 2020 – 2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan,yaitu :

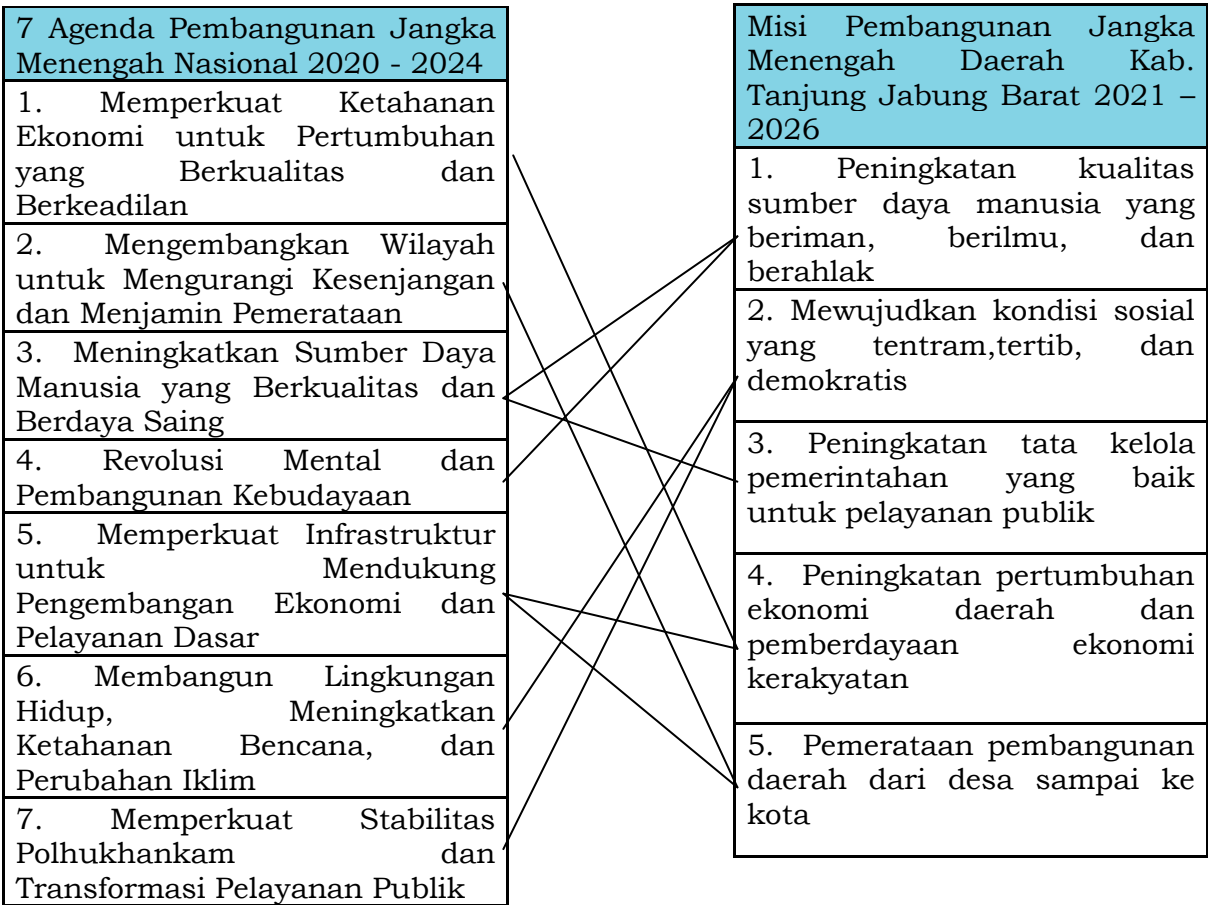
- 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
- 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- 4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
- 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- 6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
- 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tema dan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020 – 2024 diharmonisasikan kedalam visi/misi/arrah kebijakan sesuai dengan tingkat kewenangan daerah sebagai upaya mendukung pencapaian target – target jangka menengah pembangunan nasional.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia kedepan.

Gambar 1.2.

Keselarasan 7 Agenda Pembangunan jangka Menengah Nasional 2021-2024 dengan Misi RPJMD Kab.Tanjung Jabung Barat 2021-2026



1.3.2.RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 dan RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026

Pada tahun 2021 penyusunan RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 akan bersamaan waktunya dengan penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026. Dalam penyusunan RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 akan memperhatikan RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026.

Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dirumuskan Pemerintah Provinsi Jambi disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sejalan dalam upaya pencapaian sasaran jangka menengah pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, terdapat beberapa pokok bahasan yang terkait dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan ekonomi Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak) (Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 merupakan prioritas pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jambi;
2. Fasilitasi peningkatan infrastruktur penunjang Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, Talang Duku, Muara Sabak, Mendahara, dan Nipah Panjang sebagai strategi dalam mendukung pencapaian Misi 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah;
3. Pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRWN adalah merupakan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jambi untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah;
4. Penetapan kawasan lindung melalui Sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Sarolangun, untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan adalah juga merupakan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jambi;
5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan, adalah arahan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, yang didasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada;
6. Mendorong/fasilitasi pembangunan Pelabuhan Kelagian Tungkal Ulu, sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jambi di tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026.

1.3.3.RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 dan RPJPD Kab. Tanjung Jabung Barat 2005 – 2025

RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 adalah tahapan lima tahunan terakhir (RPJMD keempat) dari periode RPJPD Kab.Tanjung Jabung Barat 2005 – 2025.Pada dasarnya RPJMD ke-empat melanjutkan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan daerah jangka panjang yang telah dilaksanakan pada RPJMD ke-tiga dan diharapkan dapat menuntaskan pencapaian target – target sasaran pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005 – 2025.

Gambar 1.3.
Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005-2025



RPJMD ke-4 (periode 2021 – 2026) adalah tahapan lima tahunan yang terakhir dari periode RPJPD, target – target sasaran pembangunan daerah diharapkan dapat dicapai dalam periode ini sehingga dapat mewujudkan Tanjung Jabung Barat yang maju, berdaya saing, adil, dan sejahtera. Pencapaian target – target sasaran melalui arah kebijakan yang disajikan dibawah ini yang duraikan menurut misi RPJPD :

1. Mewujudkan SDM Yang Berkualitas Dan Berahlak Mulia, dengan arah kebijakan prioritas :
 - 1.1. Menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga dan pelayanan keluarga berencana dengan memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif

- menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas; dan menata persebaran dan mobilitas penduduk agar seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah.
- 1.2. Peningkatan dan Perluasan jalinan kerjasama dengan sekolah tinggi dalam membuka kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah.
 - 1.3. Meningkatkan kepedulian dan keaktifan masyarakat dalam menjaga kesehatan sanitasi lingkungan rumah tangga, kesehatan tempat-tempat pelayanan dan ruang publik, dan tanggap terhadap penyakit, disamping peningkatan kepedulian dan keaktifan masyarakat terhadap lingkungan juga peningkatan kesehatan ibu dan anak.
 - 1.4. Meningkatkan kualitas hidup, perlindungan dan peran perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak untuk mewujudkan pemenuhan hak anak.
 - 1.5. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik, melalui:
 1. Peningkatan upaya advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS.
 2. Menggiatkan pemuda untuk berolahraga dan berprestasi terutama pada event nasional dan internasional.
 3. Pembinaan terhadap kelompok – kelompok kemasyarakatan, kampung / daerah yang dicanangkan, dan menggiatkan kegiatan – kegiatan sosial.
 - 1.6. Memantapkan kerukunan inter dan antar umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar dan inter umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang toleran dan harmonis, disertai peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat.
 - 1.7. Mempertahankan keberadaan budaya daerah melalui penerapan nilai – nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat serta memperbanyak penyelenggaraan kegiatan / even-even budaya. Selain budaya daerah perlu dibangun budaya inovatif berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi , untuk mengecilkan ketertinggalan daerah dalam persaingan global, upaya pengembangan budaya inovatif dilakukan melalui peningkatan apresiasi masyarakat terhadap iptek. Budaya membaca dan menulis untuk mendukung penciptaan masyarakat bersikap cerdas, kritis, dan produktif.
2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Yang Berkualitas, dengan arah kebijakan prioritas :
- 2.1. Percepatan penyelesaian pembangunan jaringan infrastruktur perhubungan terintegrasi antar moda (darat, sungai, dan laut) dengan pembangunan jalan dan jembatan menuju pelabuhan Roro Kuala Tungkal, jalan poros Kecamatan Batang Asam – Kecamatan Seberang Kota, KM 91 (jalan nasional) – Desa Lumahan Kecamatan Tebing Tinggi – Kecamatan Senyerang,

- Desa Serdang Jaya – Desa Sungai Gebar – Kelurahan Betara Kiri, jalan menuju sentra – sentra produksi, jalan strategis menuju wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Batanghari, dan jalan jalur distribusi barang.
- 2.2. Membangun atau meningkatkan kapasitas dermaga-dermaga penyebrangan / bongkar muat untuk mempercepat dan memperlancar pergerakan muatan barang dan orang.
 - 2.3. Percepatan pembangunan perpipaan air minum sebagai akses pelayanan air minum hingga ke rumah penduduk terutama untuk wilayah perkotaan Kuala Tungkal, Kecamatan Betara, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Senyerang, dan Kecamatan Pengabuan yang sulit mendapatkan air minum, dengan didukung pembangunan sarana pengelola air minum yang berkapasitas besar.
 - 2.4. Mendorong dan bersinergi dengan PT.PLN dalam upaya perluasan jaringan listrik hingga ke seluruh desa dalam wilayah KabupatenTanjung Jabung Barat, dengan didukung ketersediaan energi listrik.
 - 2.5. Membangun jaringan telekomunikasi dan informasi di seluruh kecamatan dan meluaskan cakupan pelayanan telekomunikasi dan informasi hingga ke desa.
 - 2.6. Menyokong terwujudnya sistem perkeretapihan nasional yang melewati wilayah Kabupaten Tanjung Jabung barat.
 - 2.7. Memperbaiki kualitas dan melengkapi fasilitas permukiman penduduk beserta sanitasinya agar tercipta lingkungan permukiman yang nyaman, layak, dan sehat. Dan juga memberikan bantuan teknis pembangunanperumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
 - 2.8. Menyelenggarakan upaya – upaya pencegahan dan mitigasi bencana serta penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana di setiap wilayah rawan bencana.
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Dan Berkualitas Yang Berbasis Pada Agroindustri Dan SDA, dengan arah kebijakan prioritas :
 - 3.1. Percepatan pembangunan dan pengembangan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, yang lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.
 - 3.2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan dari bahan baku menjadi produk dengan memanfaatkan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, melalui penawaran kelengkapan infrastruktur pendukung, birokrasi yang efektif dan efisien serta situasi yang kondusif.
 - 3.3. Dengan memanfaatkan letak strategis yaitu berbatasan dengan Pulau Batam, negara Singapura, dan Malaysia, serta berbatasan secara interregional (Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Indragiri Hilir-Provinsi Riau), mendorong peningkatan ekspor dengan mengutamakan hasil produk olahan dan produk unggulan daerah.

- 3.4. Percepatan pembangunan pariwisata daerah yang berbasis pemanfaatan potensi sumberdaya alam kehutanan dan bahari serta pengembangan potensi budaya daerah sebagai daya ungkit baru dalam menggerakkan ekonomi di daerah wisata dan budaya.
 - 3.5. Mengarahkan Koperasi dan UMKM untuk menjadi pelaku ekonomi yang berbasis agribisnis atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir.
 - 3.6. Mendorong sektor perbankan daerah mendukung pengembangan usaha perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan yang menghasilkan produk unggulan daerah yang berdaya saing, termasuk juga Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam penguatan permodalan, dengan semakin beragamnya lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Terwujudnya masyarakat dan pemerintahan yang baik dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dengan arah kebijakan prioritas :
- 4.1. Peningkatan kemandirian melalui penguatan peran masyarakat dalam mengelola berbagai potensi baik konflik sosial maupun menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
 - 4.2. Mengawal kebebasan pers dan hak masyarakat luas untuk berpendapat agar terjaga etika berkomunikasi dan informasi.
 - 4.3. Saat ini birokrasi pelayanan publik tengah berbenah dan terus berupaya memberikan pelayanan umum, maka dalam tahapan ini perlu meningkatkan lagi kualitas pelayanan melalui pembaharuan sistem pelayanan baik proses maupun aplikasi pelayanan; pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan publik, agar tercipta pelayanan yang efektif dan efisien.
 - 4.4. Saat ini rendahnya ketahuan masyarakat terhadap produk – produk hukum daerah maka tahap ini perlu penyuluhan hukum secara intensif baik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan yang telah ada. Selain itu dalam mewujudkan supremasi hukum perlu penerapan / penegakan dan pelayanan hukum secara adil, tegas dan manusiawi.
5. Terwujudnya pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dengan arah kebijakan prioritas :
- 5.1. Melanjutkan pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kualitas sarana rumah sakit dan juga puskesmas, dan pembangunan berkelanjutan dalam penyediaan rumah sakit di wilayah / daerah yang cukup jauh jangkauannya dari RSUD yang ada yang terletak di Ibukota Kabupaten, ditujukan untuk pemerataan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
 - 5.2. Pemerataan akses pelayanan pendidikan agar setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat.

- 5.3. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan merupakan tuntutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien maka perlu ditunjang penyediaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi disetiap kecamatan hingga ke desa. Beberapa sistem tata kelola pemerintahan sudah menerapkan aplikasi berbasis internet (*online*) yang dibalut dalam satu sistem *e-goverment* seperti aplikasi perencanaan, penganggaran, SAKIP, dan lainnya.
- 5.4. Percepatan penyelesaian pembangunan jalan transportasi angkutan menuju pelabuhan Roro, dengan berfungsinya pelabuhan Roro akan meningkatkan transaksi perdagangan yaitu sebagai sumber pergerakan orang, barang, dan jasa. Diharapkan efekgandanya (*multiplier effects*) menciptakan aktivitas ekonomi baru pada daerah yang terdampak.
- 5.5. Kondisi saat ini sudah banyak tersedia akses jalan konektivitas menuju daerah yang belum berkembang atau masih tertinggal jauh dengan daerah tetangganya, maka pada tahap ini perlu peningkatan kualitas jalan untuk kelancaran arus transportasi perdagangan, kondisi jalan tanah ditingkatkan menjadi jalan timbunan / batu kerikil ; dari jalan timbunan / batu kerikil menjadi jalan aspal atau beton.
- 5.6. Pembangunan daerah dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan seimbang.
- 5.7. Menjalin kerjasama terutama daerah di perbatasan dengan daerah kabupaten tetangga yang berbatasan, dengan memanfaatkan akses perhubungan yang ada dan juga saling memanfaatkan keunggulan berdaya saing masing – masing daerah untuk saling mengisi keterbatasan / kekurangan.
- 5.8. Menciptakan kemandirian pangan dimasing-masing kecamatan dengan mengutamakan kemampuan produksi lokal untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan tingkat rumah tangga dalam jumlah yang cukup, baik mutu dan gizinya, serta terjangkau.
- 5.9. Pada periode ini diperkirakan beban yang ditanggung lingkungan semakin berat termasuk sumber daya air karena semakin meningkatnya aktivitas kehidupan manusia di semua wilayah maka perlu melakukan upaya maksimal dalam menjaga kelestarian sumber daya air diberbagai wilayah untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya, sumber daya air akan berfungsi sebagai sumber air bersih yang dialirkan ke rumah tangga, sebagai sumber air irigasi, dan ekosistem makhluk hidup.
- 5.10. Dalam tahap ini masih perlunya upaya peningkatan kesadaran masyarakat terutama bagi generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan hidup sekitarnya, dengan demikian ke depannya mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

- 5.11. Selain pembangunan sarana dan prasana diseluruh wilayah perlu juga pembangunan Sumber daya manusia nya.
- 5.12. Penguatan peran aparatur kecamatan dan desa sebagai penggerak pembangunan daerahnya, aparatur kecamatan dituntut bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsinya untuk lebih berperan dalam mencapai kemajuan daerahnya, yaitu ikut berperan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tepat, dalam pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan daerah tingkat kecamatan yang efektif dan efisien.

1.3.4 RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 dan RTRW Nasional Tahun 2008 – 2028, RTRW Provinsi Jambi 2013 – 2033 dan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2013 – 2033

Dalam perumusan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2025 menyelaraskan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten, dengan melihat kepada rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, dan penetapan kawasan strategis dimaksudkan agar adanya sinkronisasi pembagian peran dan fungsi antara kabupaten, provinsi dan nasional di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

RTRW Provinsi Jambi 2013 – 2033

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013 – 2033, menyebutkan peranan dan fungsi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai wilayah perdagangan dan jasa, Industri pengolahan dan industri skala besar, pelabuhan laut, dan perikanan dan kelautan. Sedangkan Kuala Tungkal sebagai Ibu kota Kab. Tanjung Jabung Barat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) untuk pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa regional, Industri perikanan dan kelautan, pelabuhan laut dan antar pulau-pusat pendidikan, kawasan pertahanan dan keamanan maritim Ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rincian RTRW Provinsi Jambi 2013-2033 yang terkait dengan kewilayahan kabuapten Tanjung Jabung barat sebagai berikut :

- Rencana sistem jaringan jalan, meliputi ruas :
 - Simpang Tuan-Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Batas Kabupaten Muaro Jambi-Pematang Lumut;
 - Pematang lumut-Batas Kota Kuala Tungkal
 - Jalan Sultan Thaha Kuala Tungkal;
 - Jalan Jenderal Sudirman Kuala Tungkal;
 - Jalan Prof. DR. Sri Soedewi MS Kuala Tungkal;
 - Jalan akses pelabuhan Roro Kuala Tungkal.
- Rencana sistem kepelabuhan, meliputi :
 - Pelabuhan pengumpul (pelabuhan Kuala Tungkal).
- Rencana sistem energi/kelistrikan, meliputi :
 - Pengembangan dan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2013 – 2033

Berdasarkan hasil penilaian peninjauan kembali terhadap kualitas, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2013 – 2033, yaitu sebesar 68,12 (dikategorikan kurang baik/buruk) maka direkomendasikan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2013 – 2033 perlu dilakukan revisi.

Proses Revisi RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2013 – 2033 saat ini sedang dilakukan seiring dengan penyusunan RPJMD ini, rumusan unsur- unsur pokok RPJMD, seperti sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan masih tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013–2033 dan memperhatikan rencana perubahan pada struktur dan pola ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Beberapa perubahan struktur dan pola ruang yang telah diperhatikan dalam penyusunan RPJMD seperti :

- Sistem jaringan jalan terhadap pembangunan jalan tol Jambi – Rengat, dan terhadap akses ke pelabuhan ro-ro Kuala Tungkal;
- Luasan lahan pertanian pangan mengikuti luasan yang terbaru yang ditetapkan dalam KP2B;
- Dari sebelumnya 4 (empat) kecamatan yaitu Kec. Pengabuan, Kec. Senyerang, Kec. Tungkal Ilir, dan Kec. Kuala Betara sebagai wilayah dengan potensi produksi kelapa dalam sekarang berubah menjadi 6 (enam) kecamatan, yaitu menambah 2 (dua) kecamatan ; Kec. Bram Itam dan Kec. Seberang Kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 disusun dengan maksud untuk menghasilkan rumusan unsur – unsur kunci perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meliputi tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan disertai indikator kinerja dan target, serta program perangkat daerah disertai indikator kinerja dan target, unsur – unsur kunci perencanaan tersebut adalah merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis, dan dokumen terkait.

1.4.2 Tujuan

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 disusun dengan tujuan sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk masa 2021 – 2026, yang dijabarkan kedalam RENSTRA Perangkat Daerah 2021 – 2026 dan dioperasionalkan kedalam RKPD tahunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3. Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB IX. Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Capaian Makro Kinerja RPJMD periode 2016 – 2021

a. Pertumbuhan ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator utama dalam perekonomian daerah, dapat digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2019 laju pertumbuhan PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat berfluktuasi, ditahun 2016 sebesar 3,14% terus meningkat menjadi 6,80% ditahun 2018 dan menurun menjadi 5,15% ditahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sedalam -0,64%. penurunan laju pertumbuhan PDRB tersebut disebabkan oleh dampak adanya pandemi covid-19 di Indonesia secara umum dan di Kab. Tanjung Jabung Barat.

Angka pertumbuhan ekonomi Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2020 tersebut sama dengan laju pertumbuhan PDRB Prov. Jambi (-0,64%) dan berada diatas laju pertumbuhan PDB nasional (-2,07%).

Sektor pertambangan dan penggalan sejak 2016 sampai sekarang masih menjadi sektor penyumbang terbesar pembentukan PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar 38,15% (2019), pada tahun 2020 bergeser ke sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu 30,14% kemudian diikuti sektor pertambangan dan penggalan 26,90%. Sedangkan sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi paling besar yaitu -8,14%.

b. Kemiskinan

Pada tahun 2016 penduduk miskin Kab. Tanjung Jabung Barat berjumlah 37.240 (11,81%) jiwa mengalami penurunan setiap tahunnya hingga 2020 menjadi 34.790 jiwa (10,29%). Bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 berada diurutan ke 10 dari 12 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi, serta masih jauh diatas rata – rata tingkat kemiskinan 12 kabupaten/kota (7,58%) dan masih belum mencapai target tingkat kemiskinan di tahun 2021 (akhir periode RPJMD tahun 2016 - 2021) yaitu 10,25%.

Beberapa program pembangunan daerah unggulan dalam upaya pengentasan kemiskinan seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan konektivitas antar pusat kota – kelurahan/desa, antar kecamatan, dan antar desa, serta antar kabupaten meningkatkan aktivitas perekonomian. Mendorong setiap desa melalui pendanaan dana desa untuk mengembangkan usaha kecil menengah berbasis potensi desa, selain itu penyelenggaraan pelatihan keterampilan disertai pemberian sarana kerja bagi masyarakat yang belum bekerja.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2019 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tahun 2020 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Pada tahun 2016 pencapaian IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 65,91 menjadi 67,54 pada

tahun 2019 dan 2020, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,95 persen pertahun. Bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, IPM Kab. Tanjung Jabung Barat berada di urutan ke 11 dari 12 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi, serta masih dibawah rata – rata IPM Prov. Jambi (71,29) dan Nasional (71,94). Sedangkan target IPM di tahun 2021 (akhir periode RPJMD tahun 2016 - 2021) adalah 67,83.

IPM metode baru menggunakan empat variabel dalam perhitungannya, sebagaimana dikutip dari “Indeks Pembangunan Manusia 2015, BPS 2016”, yaitu Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dan per Kapita

Usia Harapan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2015 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan dari angka 67,66 menjadi 68,12. Nilai rata-rata peningkatan Usia Harapan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode tahun 2015-2020 adalah sebesar 0,0925 tahun per tahun.

Rata – rata lama sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 masih tergolong rendah yaitu hanya selama 7,71 tahun, artinya rata – rata penduduk hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 1 atau 2 pada jenjang sekolah menengah pertama. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah (AHL) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak Penduduk Tanjung Jabung Barat yang bersekolah. Pada Tahun 2019 Harapan Lama Sekolah mencapai 12,61 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau Diploma 1.

Untuk pengeluaran per kapita penduduk untuk makanan/pangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 setiap tahunnya mengalami peningkatan, dari 393.722 rupiah menjadi 520.817, sedangkan Untuk pengeluaran per kapita penduduk untuk bukan makanan/non pangan berfluktuasi naik-turun. Ini menggambarkan pengeluaran per Kapita penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat lebih besar untuk membeli makanan dibanding bukan makanan. Pada tahun terakhir 2019 perbandingan pengeluaran per kapita penduduk antara makanan dan bukan makanan sebesar 58,18% untuk makanan dan 41,82%, kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

d. Tingkat pengangguran

Pada tahun 2020 persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,16%, mengalami penurunan dari tahun 2019 (TPT sebesar 2,67%). Bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di urutan terkecil kedua dari atas dari 12 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Serta masih dibawah rata – rata tingkat penganggura terbuka 12 kabupaten/kota (5,13%). Target tingkat pengangguran terbuka di tahun 2021 (akhir periode RPJMD tahun 2016 - 2021) adalah 1,32%.

Berdasarkan Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, pengangguran dilihat tingkat pendidikan yang ditamatkan, pengangguran di Kab. Tanjung Jabung didominasi dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 39,03% dan SMK sebesar 19,52%, ini sejalan dengan komposisi

penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat didominasi oleh penduduk usia remaja dan dewasa.

e. Ketimpangan pendapatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat

Pada tahun 2019 ketimpangan pendapatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat dalam kategori sedang, ditunjukkan dengan Indeks Gini Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 0,29. Bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, Indeks Gini Kab. Tanjung Jabung Barat berada di urutan ke 4/5/6/7 bersama tiga kabupaten lain dari 12 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Berbanding dengan indeks gini provinsi Jambi dan nasional, indeks gini Kab. Tanjung Jabung Barat lebih rendah dari indeks gini Prov. Jambi (0,324) dan Nasional (0,38). Sedangkan target indeks gini di tahun 2021 (akhir periode RPJMD tahun 2016 - 2021) adalah 0,30.

f. Indeks Infrastruktur

Pada tahun 2020 indeks infrastruktur Kab. Tanjung jabung Barat masih tergolong rendah yaitu 69,33%. Hal ini menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pelayanan umum (layanan air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi) belum cukup terpenuhi, masih ada sebagian besar masyarakat tidak mendapat akses terhadap layanan air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi.

Layanan air bersih mencapai 70,84% rumah tangga (KK) atau sejumlah 59.256 rumah tangga mendapatkan akses pelayanan air bersih melalui penyediaan air bersih jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi . Sampai tahun 2020 ini masih ada dua kecamatan yang belum mendapatkan layanan air bersih perpipaan (PDAM) yaitu Kec. Kuala Betara dan Kec. Seberang Kota.

Layanan sanitasi, rendahnya sanitasi masyarakat. Sanitasi disini pengertiannya sesuai nomenklatur MDGs adalah pembuangan tinja menurut beberapa para ahli, jamban jenis septic tank merupakan jamban yang paling memenuhi persyaratan sebagai jamban sehat. Berdasarkan data Profil Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2020, Proporsi perilaku benar buang air besar pada penduduk umur ≥ 3 tahun di Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 54,02%.

Layanan listrik, Capaian Rasio Elektrifikasi Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 sebesar 87,58% atau sejumlah 70.767 rumah tangga pelanggan pengguna listrik, artinya masih ada penduduk yang belum terlayani listrik.

Layanan telekomunikasi, pada tahun 2020 cakupan layanan telekomunikasi Kab. Tanjung Jabung Barat mencakup 89 desa (84,76%) dan masih ada 16 desa lagi yang mengalami kesulitan bahkan tidak mendapat sama sekali layanan telekomunikasi. Desa – desa yang belum terjangkau tersebut sebagian besar berada dalam kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Senyerang dan Kecamatan Renah Mendaluh.

Tabel. 2.1.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat

NO	Aspek/Fokus/bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daeah	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Kesejahteraan Masyarakat							
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
	a. Pertumbuhan PDRB	3,14	4,48	6,80	5,35	-0,64		
	b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,91	66,15	67,13	67,54	67,54		
	c. Indeks Gini	0,33	0,29	0,36	0,29	0,31		
	d. Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	11,81	11,32	11,10	10,56	10,26		
	e. Laju Inflasi	4,54	2,68	3,02	1,27	3,01		
1.2	Kesejahteraan Sosial							
	a. Angka rata-rata lama sekolah	7,43	7,44	7,56	7,70	7,71		
	b. Angka harapan lama sekolah	12,21	12,27	12,60	12,61	12,62		
	c. Angka Partisipasi Kasar PAUD	53,01	37,24	40,11	40,48	34,50		
	d. Angka Partisipasi Kasar SD/MI	112,14	107,71	114,00	105,53	102,63		
	e. Angka Partisipasi Kasar SLTP/MTs/Paket B	96,62	92,03	93,29	99,71	91,26		
	f. Angka Partisipasi Kasar SLTA/MAN	81,34	83,51	75,61	84,09	87,57		
	g. Angka Partisipasi Murni SD/MI	98,22	97,01	99,77	94,93	92,80		
	h. Angka Partisipasi Murni SLTP/MTs	80,94	80,67	81,91	73,94	65,73		
	i. Angka Partisipasi Murni SLTA/MAN	62,45	60,45	65,19	62,19	66,51		
	j. Angka Melek Aksara Penduduk (> 15 tahun)	91,67	97,26	99,47	99,49	99,52		
	k. Angka Kematian Bayi	12	5.8	12	5.2	12		

NO	Aspek/Fokus/bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	1. Angka Usia Harapan Hidup	67,71	67,75	67,87	68,03	68,12		
	m. Rasio Penduduk Yang Bekerja		70,24	75,42	70,56	74,83		
1.3	Seni Budaya dan Olahraga							
	a. Jumlah Group Kesenian	31	31	66	67	227		
2	Pelayanan Umum							
2.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib (berkaitan Pelayanan Dasar)							
2.1.1	Pendidikan							
	a. Angka Partisipasi Sekolah (7-12 Tahun)	99,65	99,88	99,77	99,67	99,94		
	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 Tahun)	95,39	95,26	95,91	96,41	96,77		
	b. Rasio Ketersediaan Ruang Kelas Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SD)	23	22	22	21	20		
	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SMP)	27	27	26	24	24		
	c. Rasio Guru/Murid (SD)	13	14	13	13	14,93		
	d. Rasio Guru/Murid (SMP)	15	15	17	17	11,63		
	e. Persentase SD dengan akreditasi minimal B	26,03	30,23	36,74	53,70	57,21		
	f. Persentase SMP dengan akreditasi minimal B	37,7	35,95	50,00	53,03	51,52		
2.1.2	Kesehatan							
	a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	45,9	78	109,5	66,6	78,7		
	b. Rasio Puskesmas per 30.000	1,52	1,49	1,46	1,43	1,51		
	Rasio Dokter umum per 100.000 penduduk	23.5	25.73	26	20.06	27		

NO	Aspek/Fokus/bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	c. Rasio Rumah sakit per 100.000 penduduk	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6		
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	a. Kondisi Jalan Baik	161,18	-	161,50	177,37	177.382 (14,02%)		
	b. Kondisi Jalan Sedang	348	-	389,69	310,53	310.481 (24,54%)		
	c. Kondisi Jalan Rusak Ringan	501,41	-	501,64	22,28	22.280 (1,76%)		
	d. Kondisi Jalan Rusak Berat	254,56	-	212,35	755,01	755.013 (59,68%)		
2.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	255,20 ha	128,65 ha	-	-	126,5 ha		
2.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat							
	a. Pelanggaran K3 yang selesaikan	50	40	42	67	52		
	b. Pelanggaran k3	50	60	60	67	52		
	c. Kejadian Kebakaran	20	27	42	33	17		
2.1.6	Sosial							
2.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib (tidak berkaitan Pelayanan Dasar)							
2.2.1	Tenaga Kerja yang ditempatkan	172	260	200	456	330		
2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan pelindungan Anak							
	a. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,81	85,44	85,87	85,70	85,68		
	b. Indeks Pemberdayaan (IDG)	60,93	61,93	63,10	63,10	68,31		
	c. Rasio KDRT	0,029	0,017	0,011	0,005	0,007		
2.2.3	Pangan							
	a. Skor Pola Pangan Harapan	79,80	81,20	83,40	88,80	90,00		

NO	Aspek/Fokus/bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daeah	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.4	Lingkungan Hidup							
	a. Jumlah Sampah yang ditangani (ton)	10.650	10.800	14.400	14.887	16.425		
	b. Jumlah pengaduan tertangani	8	11	6	3	6		
2.2.5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	a. Jumlah BUM Desa	80	82	95	111	113		
2.2.6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	a. Rasio Akseptor KB	87	86	82	85	70		
	b. Cakupan Peserta KB Aktif	86,87	85,78	82	84,25	62,70		
	c. Rasio PLKB/PKB	9,7	14,92	20,89	80,89	89,74		
	d. Perkembangan Jumlah Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	34.743	35.102	34.303	40.384	34.940		
2.2.7	Perhubungan							
	a. Jumlah arus penumpang angkutan umum darat		48.974	49.364	46.304	45.225		
	b. Jumlah arus penumpang angkutan umum laut		403.479	419.476	408.226	406.232		
	c. Jumlah dermaga sungai dalam kondisi	10	13	14	14	14		
2.2.8	Komunikasi dan Informatika							
	a. Desa/Kelurahan terjangkau layanan telekomunikasi	81	88	88	89	90		
2.2.9	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
	a. Jumlah Koperasi	368	373	383	268	268		
	b. Daya Serap tenaga kerja	8.814	9.221	9.959	10.168	10.268		
2.2.10	Penanaman Modal							
2.2.11	Kepemudaan dan Olahraga							
	a. Jumlah organisasi pemuda yang	9	9	9	9	9		

NO	Aspek/Fokus/bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	aktif							
	b. Jumlah prestasi cabor yang dimenangkan dalam 1 tahun	20	23	44	15	0		
	c. Jumlah atlet berprestasi	180	207	285	145	140		
2.2.12	Perpustakaan							
	a. Jumlah Pengunjung	13.615	16.045	12.573	12.593	4.927		
	b. Jumlah koleksi buku	24.114	24.364	26.628	27.665	28098		
2.2.13	Kearsipan							
	a. Jumlah Dokumen yang dilestarikan	8.048	4.987	5.623	5.080	4.860		
2.3	Layanan urusan pemerintah pilihan							
2.3.1	Perikanan							
	a. Perkembangan budidaya perikanan	1.730,22	1.626,80	1.660,53	1.295,80	1,135,00		
	b. Jumlah Produksi Benih	976.416	824.730	764.517	725.380	746.000		
2.3.2	Pariwisata							
	a. Jumlah Kunjungan wisata	3.032	12.147	16.834	8.770	15.283		
2.3.3	Pertanian							
	a. Luas lahan pertanian (ha)	14.972 ha	10.818 ha	10.317	9.461	8.876,5		
	b. - Produksi padi (ton)	48.345	47.129	53.047	47.222	43.013		
	- Produksi Jagung (ton)	2.508	2.024	2.058	3.183	2.522		
	- Kacang Tanah (ton)	17	7	7	3	12		
	- Kacang hijau (ton)	13	7	0	0	0		
	- Ubi kayu (ton)	4.069	3.147	3.273	2.871	4.647		
	- Ubi jalar (ton)	181	146	146	107	318		
	- Cabai merah (ton)	108	416	363	85	48		
	- Cabai hijau (ton)	107	263	181	50	29		
	- Petai (ton)	555	14	59	67	39		

NO	Aspek/Fokus/bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daeah	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	- Nanas (ton)	63	26	50	41	45		
	- Nangka/cempedak (ton)	4.348	845	1.236	446	274		
	- Pepaya (ton)	233	526	644	227	282		
	- Semangka (ton)	39	53	19	158	49		
	- Pisng (ton)	574	1.286	8.891	6.597	13.715		
	- Jeruk (ton)	2.037	1.756	2.352	2.766	436		
	- Luas tanam tanaman Padi	9.905	9.667	12.119	9.372	12.337		
	- Luas tanam tanaman Jagung	752	582	725	566	481		
	- Luas tanam tanaman Kacang tanah	18	7	2	8	19		
	- Luas tanam tanaman kacang hijau	9	4	0	0	0		
	- Luas tanam tanaman ubi kayu	182	160	108	117	133		
	- Luas tanam tanaman ubi jalar	18	17	5	14	17		
	- Luas tanam tanaman cabai merah	65	121	59	93	61		
	- Luas tanam tanaman cabai hijau	55	71	42	72	50		
	- Luas tanam tanaman petai	1	9	22	17	23		
	- Luas tanam tanaman bayam	30	32	21	45	9		
	- Luas tanam tanaman nangka	88	83	171	83	174		
	- Luas tanam tanaman pepaya	4	8	10	6	12		
	- Luas tanam tanaman jeruk	61	77	231	4119	307		
	- Luas tanam tanaman semangka	36	25	17	43	12		
2.3.4	Perdagangan dan perindustrian							
	a. Nilai Impor	10.516,2 3	11.341,8 6	13.494,8 2	14.662,7 2	13.684,7 4		
	b. Nilai Ekspor	27.914,4	32.337,7	39.332,9	41.048,2	34,189,5		

NO	Aspek/Fokus/bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
		5	3	1	7	5		
	c. Jumlah kelompok pengerajin		12	37	62	62		
	d. Jumlah kelompok pengerajin mendapat bantuan		10	17	17	17		
2.4	Daya saing daerah							
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi daerah							
	a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	873.007	846.071	902.684	895.197	942.833,-		
	b. Nilai Tukar Petani*			97,37	102,17	117,83		
2.4.2	Fokus Fasilitas wilayah/infrastruktur							
	a. Potensi luas wilayah banjir (kategori tinggi)	19.006,18	121.517,64	121.517,64	121.517,64	121.517,64		
	b. Potensi luas wilayah kekeringan (kategori tinggi)	398.468,04	398.468,04	398.468,04	398.468,04	398.468,04		
	c. Jenis dan jumlah bank dan cabang							
	BUMN (Persero)	12	13	13	13	14		
	BPD	1	1	1	2	2		
	Bank Swasta	4	4	7	7	7		
	BPR	1	1	1	2	2		
	d. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel							
	Hotel berbintang			2	2	2		
	Hotel non berbintang	12	12	10	10	10		
	Penginapan	3	3	3	3	3		
	e. Jumlah pelanggan PDAM	4439	6551	8015	8019	8746		
	f. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	55,25	60,00	72,17	77,39	87,58		
2.4.3	Fokus Iklim berinvestasi							
	a. Angka Kriminalitas							

NO	Aspek/Fokus/bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daeah	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
	- Banyaknya Terdakwa/ Tertuduh Tindak Pidana Kejahatan yang Mendapat Keputusan Pengadilan Negeri	232	164		234	239		
	b. Jumlah demonstrasi	0	0	2	6	2		
	c. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	8,77%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%		
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia							
	a. Kualitas Penduduk							
	Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan S1/D4	5980	6202	6658	6929	7.330		
	Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan S2	127	154	167	176	184		
	Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan S3	3	4	5	6	6		
	b. Tingkat ketergantungan	48,65	43,28	47,43	46,89	46,39*		

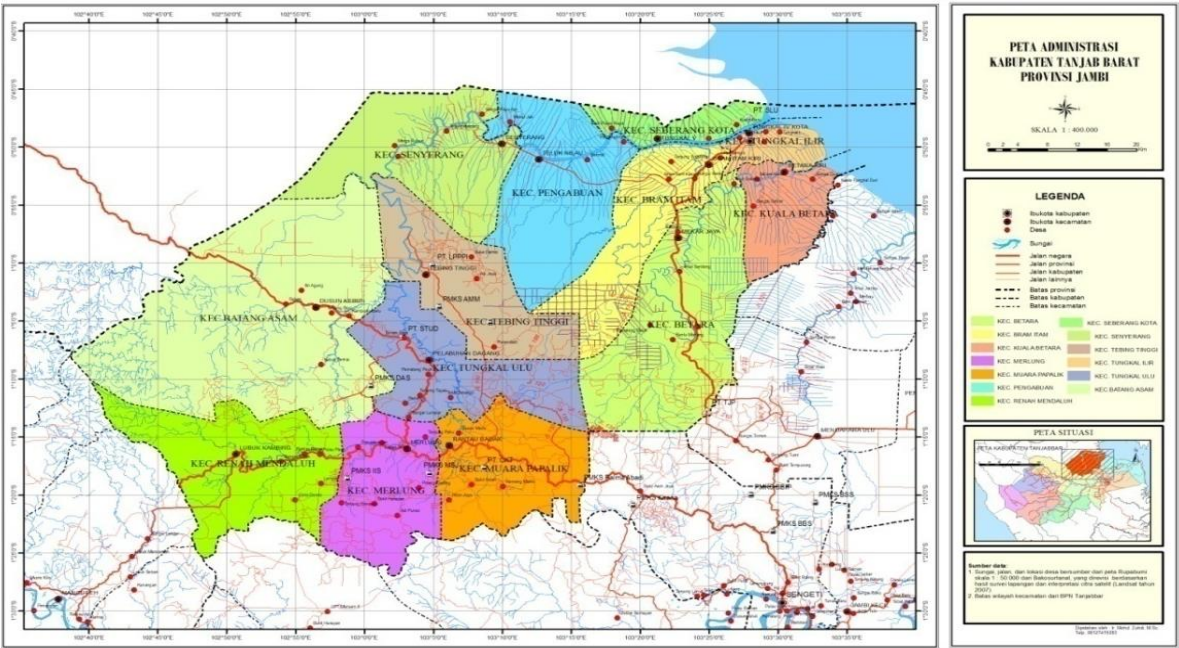
2.2. Aspek Geografi dan Demografi
2.2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
2.2.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak antara 0°53’ – 01°41’ Lintang Selatan dan antara 103° 23’ - 104°21’ Bujur Timur. dengan total luas 5.009,83 km², dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Laut Cina Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo.

Gambar 2.1.

Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 kecamatan, 20 kelurahan, dan 114 desa, berikut rincian nama ibukota, luas wilayah, jumlah kelurahan, dan desa masing – masing kecamatan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.
Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km2)	Kelurahan	Desa
1. Tungkai Ulu	Pelabuhan Dagang	345,69	1	9
2. Merlung	Merlung	311,65	1	9
3. Batang Asam	Dusun Kebun	1.042,37	1	10
4. Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	342,89	1	9

5. Renah Mendaluh	Lubuk Kambing	473,72	1	9
6. Muara Papalik	Rantau Badak	336,38	1	9
7. Pengabuan	Teluk Nilau	440,13	1	12
8. Senyerang	Senyerang	426,63	1	9
9. Tungkal Ilir	Tungkal IV Kota	100,31	8	2
10. Bram Itam	Bram Itam Kiri	312,66	1	9
11. Seberang Kota	Tungkal V	121,29	1	7
12. Betara	Mekar Jaya	570,21	1	11
13. Kuala Betara	Betara Kiri	185,89	1	9
Jumlah		5.009,82	20	114

Sumber : Kab.Tanjung Jabung Barat dalam Angka 2020, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

2.2.1.2. Topografi

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 500 meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Provinsi Riau, untuk dataran rendah yang berkisar pada ketinggian 0 – 25 meter di atas permukaan laut, maka struktur tanahnya sebagian besar merupakan tanah gambut dan dipengaruhi oleh pasang/surutnya air laut.

Tabel 2.3.
Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Dibedakan Menurut Klasifikasi Ketinggian.

Topografi/ Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/ Kabupaten
	Ha	%	
Dataran Rendah (0 - 25)	213.424	42,8	Kecamatan Pengabuan, Senyerang, Tungkal Ilir, Bram Itam, Seberang Kota, Betara dan Kuala Betara.
Dataran sedang (25 – 500)	273.090	54,8	Kecamatan Tungkal Ulu, Merlung, Sebagian Batang Asam, Tebing Tinggi, Sebahagian Renah Mendaluh dan Kecamatan Muara Papalik.
Dataran Tinggi (>500)	11.910	2,4	Sebahagian Batang Asam, Sebahagian Renah Mendaluh
Jumlah	500.982	100	

Sumber : RTRW Kab. Tanjab Barat Tahun 2013 - 2033

2.2.1.3. Geologi dan Hidrologi

Kondisi geografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya pada dataran rendah yang terpengaruh langsung oleh pasang surutnya air laut sebagian besar terdiri dari lapisan tanah gambut dan lumpur pada permukaan tanahnya sehingga hal ini berpengaruh pada kedalaman air tanah (kedalaman lebih dari 100 meter) dengan kondisi air tanah yang mengandung mineral dan warna yang relatif tinggi sehingga memerlukan biaya produksi yang relative tinggi untuk diolah menjadi air minum yang memenuhi syarat kesehatan sedangkan pada dataran sedang dan tinggi

adalah perbukitan dengan unsur penyusun utama terdiri dari tanah liat sehingga kualitas air tanahnya relatif lebih baik dibandingkan dengan dataran rendah. Selanjutnya pada tabel berikut dapat dilihat jenis tanah dan penyebarannya di masing - masing kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebagian besar atau 65,03 persen jenis tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah jenis tanah podzolik, kemudian 14,52 persen adalah jenis tanah organosol dan 11,98 persen adalah tanah endapan sebagian besar jenis tanah ini terdapat Kecamatan Tungkal Ilir, Pengabuan dan Betara. Jenis tanah ini relatif lebih subur, sehingga sesuai untuk sektor pertanian, terutama untuk padi, sayur-sayuran dan tanaman muda lainnya. Selanjutnya untuk jenis tanah gleisol luasnya hanya 8,47 persen atau 41.630 Ha., sedangkan untuk jenis tanah andosol dan latosol tidak terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tabel 2.4.
Penyebaran Jenis Tanah Menurut Kecamatan di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kecamatan	Jenis Tanah			
	Organosol	Hedro Metrik	Podzolik	Gley Humic
	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1. Tungkal Ulu		15.942	18.627,4	
2. Merlung	-	-	24.348,7	-
3. Batang Asam	5.657,4	19.108,6	68.421,7	11.049,1
4. Tebing Tinggi	4.766,4	6.992,6	10.485	12.044,8
5. Renah Mendaluh	*	*	50.691,4	*
6. Muara Papalik	*	*	36.865,7	*
7. Pengabuan	27.936,8	1.289,2	-	14.787,2
8. Senyerang	27.039	-	-	15.624,3
9. Tungkal Ilir	2.187	-	-	6.432,5
10. Bram Itam	19.235,8	3.142,6	-	7.644
11. Seberang Kota	2.644,4	-	-	8.519,8
12. Betara	13.755,5	13.469,2	17.168,8	11.583
13. Kuala Betara	10.199,3	-	-	7.647,7
Jumlah	113.421,7	59.944,2	226.608,7	95.032,4
%	22,76	12,03	45,46	19,07

Sumber : Kab.Tanjung Jabung Barat dalam Angka 2018, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

2.2.1.4. Klimatologi

Keadaan iklim di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim di wilayah Provinsi Jambi pada umumnya. Berdasarkan klasifikasi menurut *Schmidt dan Ferguson*, iklim di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Type Afa, yaitu type iklim hujan tropis. Suhu udara rata-rata sebesar 29,9° C, suhu udara maksimum mencapai 32° C dan suhu udara minimum 21° C. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 2.324 - 2.373 mm per tahun.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber diketahui bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk daerah belokan angin atau daerah perputaran arah awan basah sehingga peluang untuk hujan lebih tinggi baik dalam hal frekuensi maupun intensitasnya, dari informasi tersebut dapat diasumsikan bahwa air hujan adalah salah satu alternatif penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat (khususnya wilayah kecamatan klasifikasi dataran

rendah dan sedang) sehingga perlu adanya beberapa usaha nyata untuk menjaga kualitas air hujan agar tidak menurun kualitasnya oleh adanya pencemaran udara.

2.2.1.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih didominasi oleh daerah terbangun dengan total luas 258.830 Ha atau 51,62% dari luas total Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari luas daerah terbangun tersebut masih didominasi oleh lahan tegalan/Ladang dengan total seluas 10,36%, kemudian diikuti lahan sawah (7,45 %), lahan kebun kelapa sawit (7,21 %) dan lahan bangunan dengan luas 7,17%. Sedangkan sisa penggunaan lahan lainnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah lahan kawasan hutan dengan total luas 245.663 Ha atau 49,04% dari luas total Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 2.5.
Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan Lahan Existing

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
Kawasan Hutan			
1	Hutan Produksi	179.635	33,4
2	Hutan Produksi Terbatas	35.585	6,62
3	Hutan Lindung Gambut	15.050	2,80
4	Hutan Cagar Alam	126,09	0,03
5	Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	11.520	2,14
6	Konservasi Kerang Darah	365,30	0,07
	Jumlah	245.663	49,04
Daerah Terbangun			
1	Permukiman	2.952	0,59
2	Bangunan	65.904	7,17
3	Sawah	47.382	7,45
4	Tegalan/Ladang	51.918	10,36
5	Kebun Campuran	3.269	0,65
6	Semak Belukar	14.567	2,91
7	Kebun Kelapa Sawit	36.100	7,21
8	Kebun Kelapa Dalam	34.009	6,79
9	Kebun Karet	22.755	4,54
10	Kebun Kopi	4.500	0,90
11	Kebun Pinang	8.325	1,66
12	Sungai/Rawa	6.989	1,40
	Jumlah	258.830	51,62
Total Luas Penggunaan Lahan : 500.982,00			

Sumber : RTRW Kab. Tanjab Barat Tahun 2013 - 2033

2.2.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial,

budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sudut Ekonomi, kepentingan sosial dan budaya dan/atau lingkungan adalah :

1. Kawasan Strategis Ekonomi adalah : Kawasan Perkotaan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir, Kawasan Sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten, Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi, Kawasan Minapolitan Sungai Dualap di Kecamatan Kuala Betara dan Kawasan Pelabuhan di Kecamatan Tungkal Ilir.
2. Kawasan Strategis Kepentingan Sumber Daya Alam adalah kawasan Pertambangan Minyak, Batu Bara dan Gas Bumi yang tersebar di Kecamatan Betara, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tungkal Ulu.
3. Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terbagi dua, yaitu :
 - a.Cagar alam hutan bakau pantai timur yang terletak di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara.
 - b.Kawasan lindung gambut yang juga merupakan kawasan strategis nasional terletak di Kecamatan Betara, Bram Itam dan Pengabuan.

Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau) yang berada di Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam.

2.2.3. Wilayah Rawan Bencana

Dari data yang dihimpun bencana yang sering terjadi di beberapa daerah, yaitu bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), angin puting beliung dan kebakaran rumah penduduk. Ada beberapa daerah yang sering mengalami bencana yang sama setiap tahunnya.

Tabel 2.6.
Daftar Kecamatan dan Kelurahan/Desa Rawan Bencana
dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Bencana Karhutla	Bencana Banjir/Abrasi	Bencana Angin Puting Beliung
1. Kecamatan Kuala Betara : Desa Sungai Gebar Barat, dan Suak Labu, Desa Sungai Dungun, Desa Sungai Dualap 2. Kecamatan Betara : Desa Pematang Lumut, Desa	Bencana Banjir : 1. Kecamatan Muara Papalik : Desa Intan Jaya, Desa Rantau Badak, Desa Lubuk Sibontan, Desa Lubuk Petai, Desa Kemang Manis, dan Desa Pematang Pauh 2. Kecamatan Tungkal	1. Kecamatan Betara : Desa Mandala jaya, Desa Serdang Jaya, 2. Kecamatan Kuala Betara : desa suak labu, Desa Sungai Dualap 3. Kecamatan Pengabuan : Kelurahan Teluk

Bencana Karhutla	Bencana Banjir/Abrasi	Bencana Angin Puting Beliung
mandala Jaya, Desa Bunga Tanjung, Desa Serdang jaya, Kelurahan Mekar Jaya, desa Sungai terap, Desa Teluk Kulbi, Desa Muntialo, Desa Terjun Jaya, dan Desa Lubuk Terentang, Desa Kampung Baru, dan Desa Pematang Buluh 3. Kecamatan Bram Itam : Desa Bram Itam Kanan, Desa Bram Itam raya, Desa Semau, Desa Jati Mas, dan Desa Tanjung Senjulang 4. Kecamatan Pengabuan : Desa Suak samin, Desa Parit Bilal, Desa Parit Pudir, desa Sungai Baung, Desa Sungai Jering, Desa Karya Maju, dan desa Teluk Nilau, Desa Sungai Serindit, 5. Kecamatan Senyerang : desa Margo Rukun, desa Lumahan, dan Kelurahan Senyerang, desa Sungai Rambai, Desa Teluk Ketapang, Desa Kempas Jaya, Desa kayu Aro, Desa Sungai Landak, Desa Sungai Kepayang, dan Desa Sungsang 6. Kecamatan Tebing Tinggi : Desa Kelagian, Desa Dataran Kempas, desa Teluk Pengkah, Desa Talang Makmur, Desa Delima, Desa	Ulu : Desa Pematang Pauh, Desa Kuala asal, dan Desa Tanjung Tayas 3. Kecamatan Batang Asam : Desa Sungai Penoban, Desa Rawang Kempas, Desa Tanjung Bojo, Desa Dusun Kebun, Desa Lubuk Bernai, dan Lubuk Lawas Bencana Abrasi : 1. Kecamatan Tungkal Ilir : Desa Tungkal I 2. Kecamatan Seberang Kota 3. Kecamatan Kuala Betara	Nilau, dan Desa Parit Bilal 4. Kecamatan Bram Itam : Kelurahan Bram Itam Kiri 5. Kecamatan Tungkal Ilir : Kel. Tungkal IV Kota, Kel. Sriwijaya, Kel. Tungkal I, dan Kel. Tungkal III. 6. Kecamatan Tungkal Ulu : Kelurahan Pelabuhan Dagang

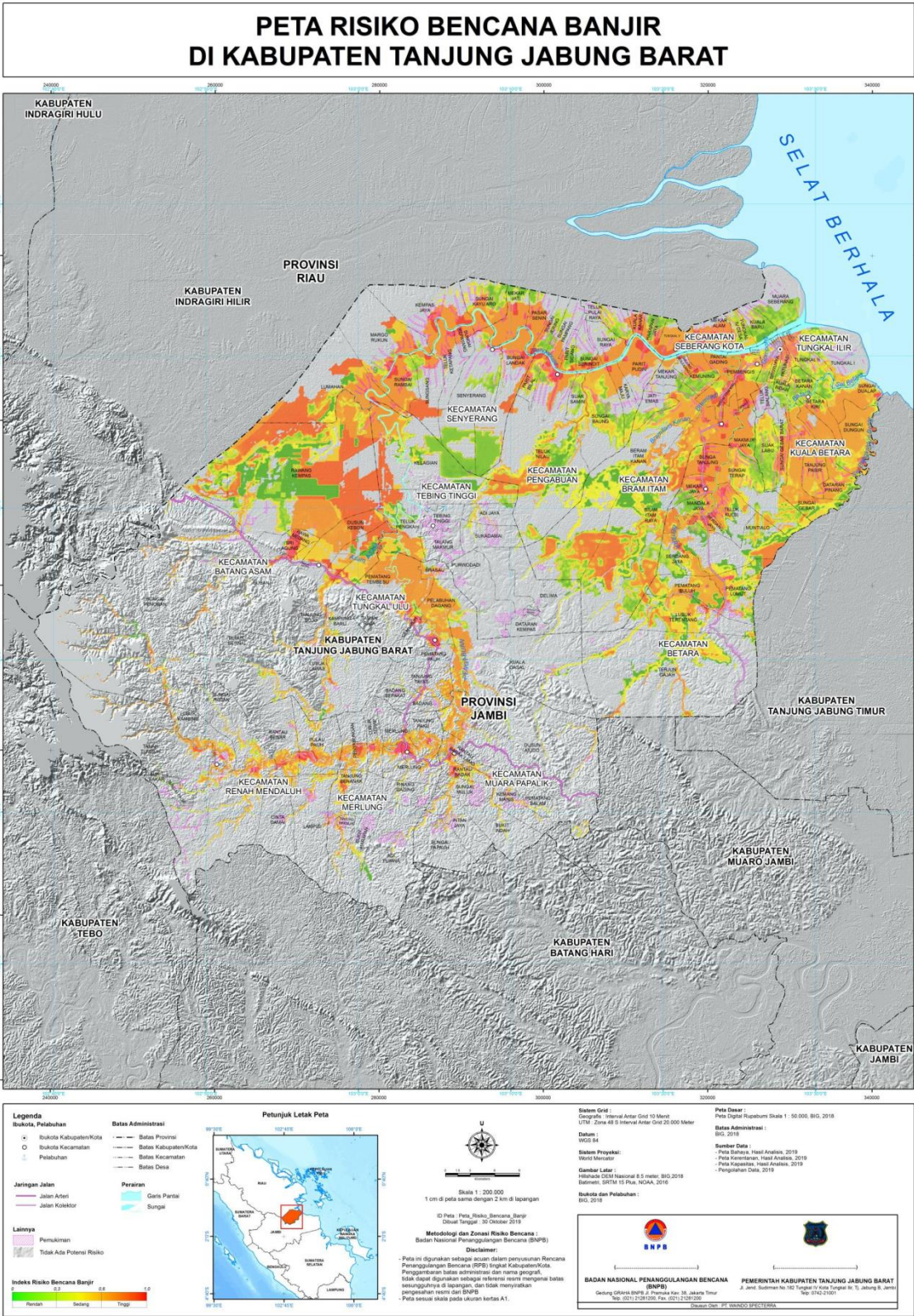
Bencana Karhutla	Bencana Banjir/Abrasi	Bencana Angin Puting Beliung
Purwodadi, Desa Adi Jaya, Desa Suka Damai, Desa Sungai Keruh, dan Kelurahan Tebing Tinggi 7. Kecamatan Batang Asam : desa Suban, desa Sungai Panoban, Desa Rawang Kempas, Desa Sri Agung, desa Lubuk Bernai, Desa Tanjung Bojo, Desa Lubuk Lawas, Desa Kampung baru, Desa Rawa Medang, dan desa Sungai Badar 8. Kecamatan Renah Mendaluh : Kel. Lubuk Kambing, desa Bukit Bakar, Desa Muara Danau, Desa Cinta Damai, Desa Lampisi, Desa Pulau Pauh, Desa Rantau Benar, Desa Sungai Puar, Desa Sungai Rotan, dan Desa Tanah Tumbuh 9. Kecamatan Seberang Kota : Kel. Tungkal V, Desa Harapan Jaya, Desa Mekar Alam, Desa Kuala Kahar 10. Kecamatan Tungkal Ilir : Kelurahan Sungai Nibung, dan desa Tungkal I		

Sumber : BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat, 2020

Potensi banjir dapat terjadi akibat limpasan air permukaan di wilayah dengan topografi datar-bergelombang dengan kelerengan daerah kurang dari 15%. Peningkatan debit air permukaan dipengaruhi pula oleh jenis tanah lempungan, dimana resapan air relatif kecil. Pada musim penghujan dimana curah hujan cenderung tinggi, genangan air permukaan semakin meningkat pada daerah-daerah tersebut. Di beberapa wilayah kecamatan dengan karakteristik alam seperti itu, jaringan drainase seringkali belum ada, sehingga sering terjadi banjir. Untuk wilayah perkotaan banjir semakin berpotensi terjadi karena diperburuk kondisi drainase dibeberapa jalur / jalan tidak berfungsi.

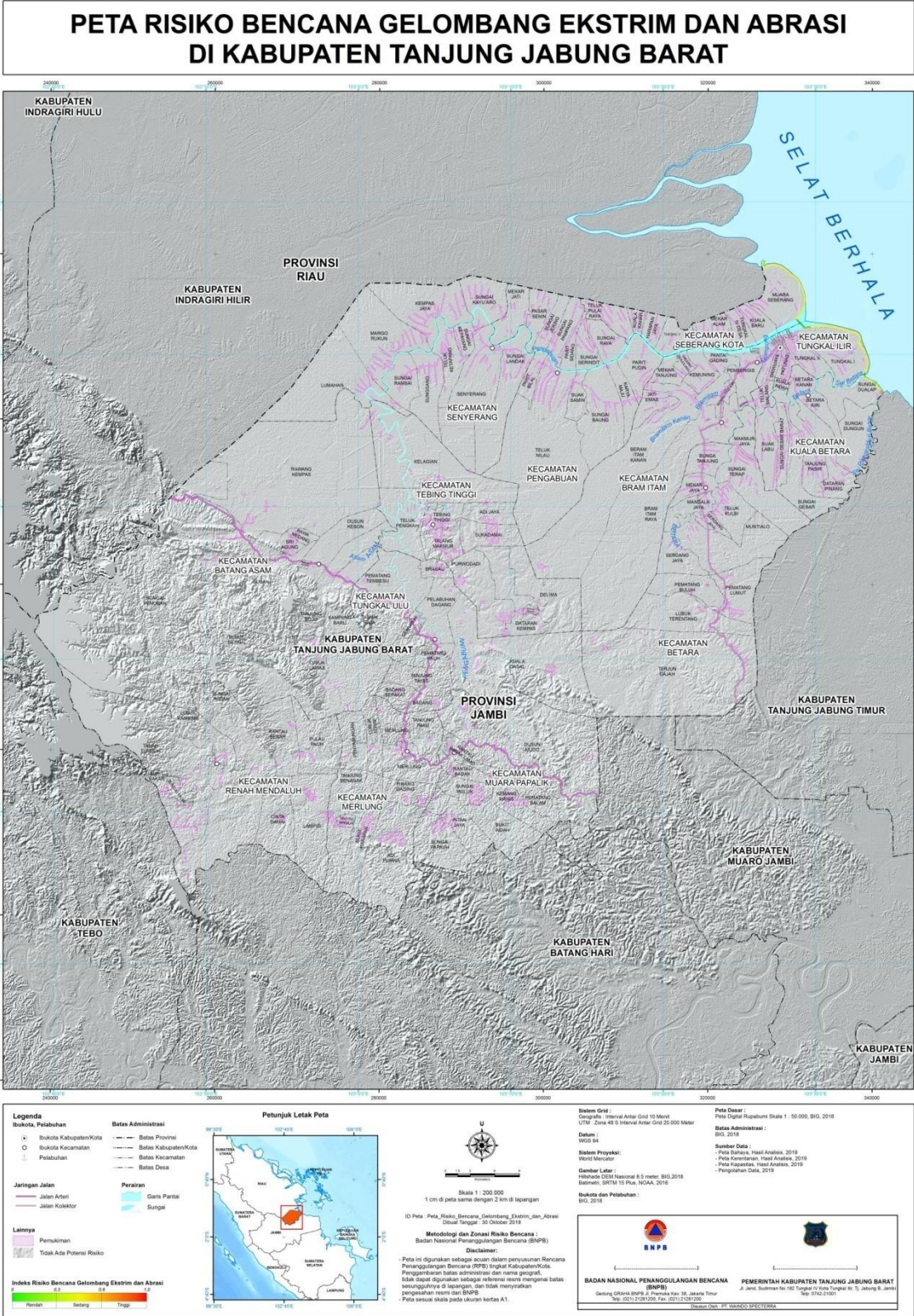
Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di daerah – daerah tersebut diatas lebih banyak disebabkan faktor manusia, yang dengan sengaja membakar hutan atau lahan untuk membuka lahan pada saat musim kemarau. Dengan kondisi alam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian berkontur tanah rawa menyebabkan api kebakaran sulit dipadamkan dan menyulitkan petugas pemadam dan sarana dalam memadamkan kebakaran.

Gambar 2.2.
Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

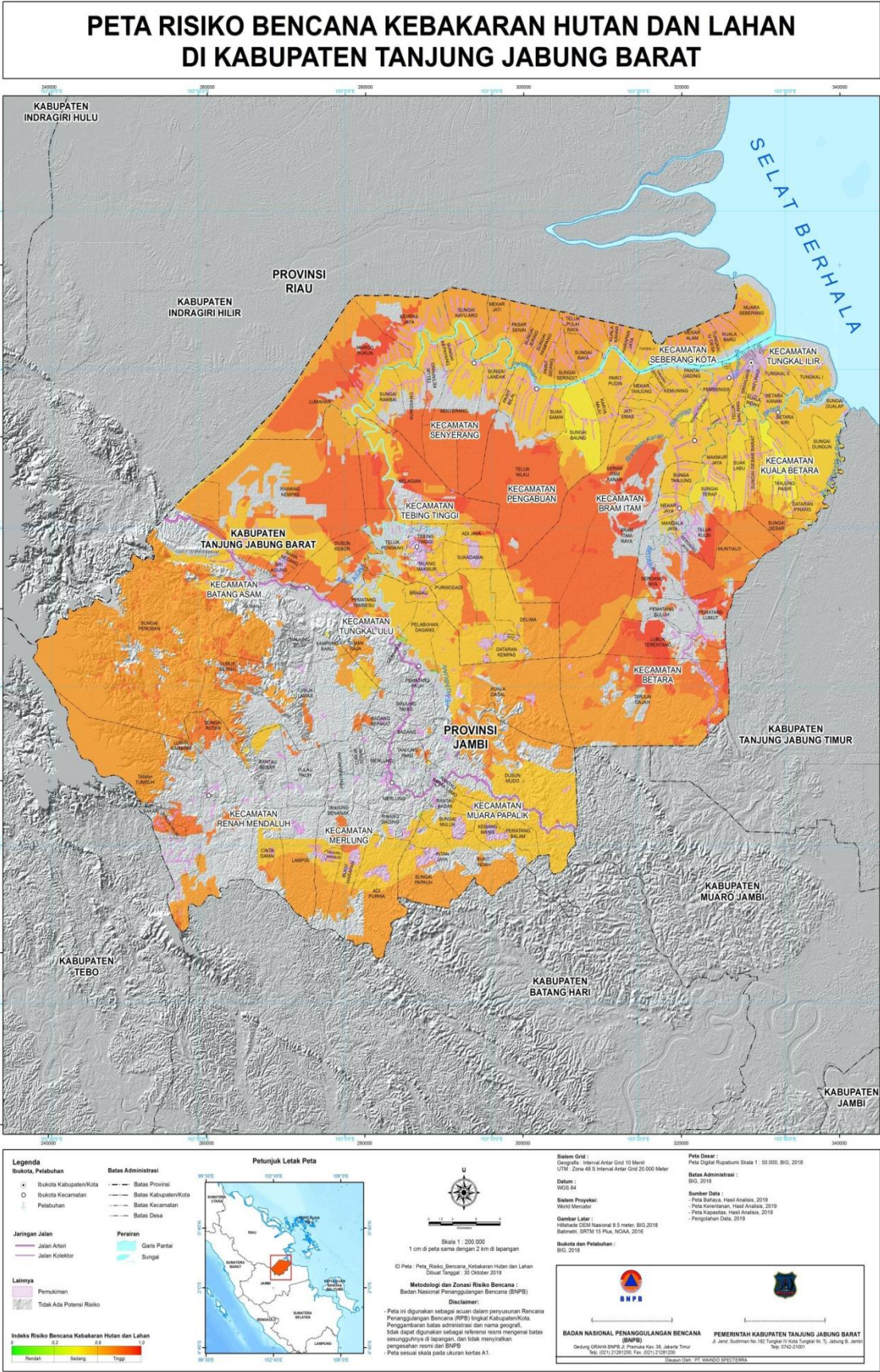


Sumber : Dokumen Peta Resiko Bencana dan Kajian Resiko Bencana Kab. Tanjung Jabung Barat 2020-2024

Gambar 2.3.
Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di
Kab. Tanjung Jabung Barat

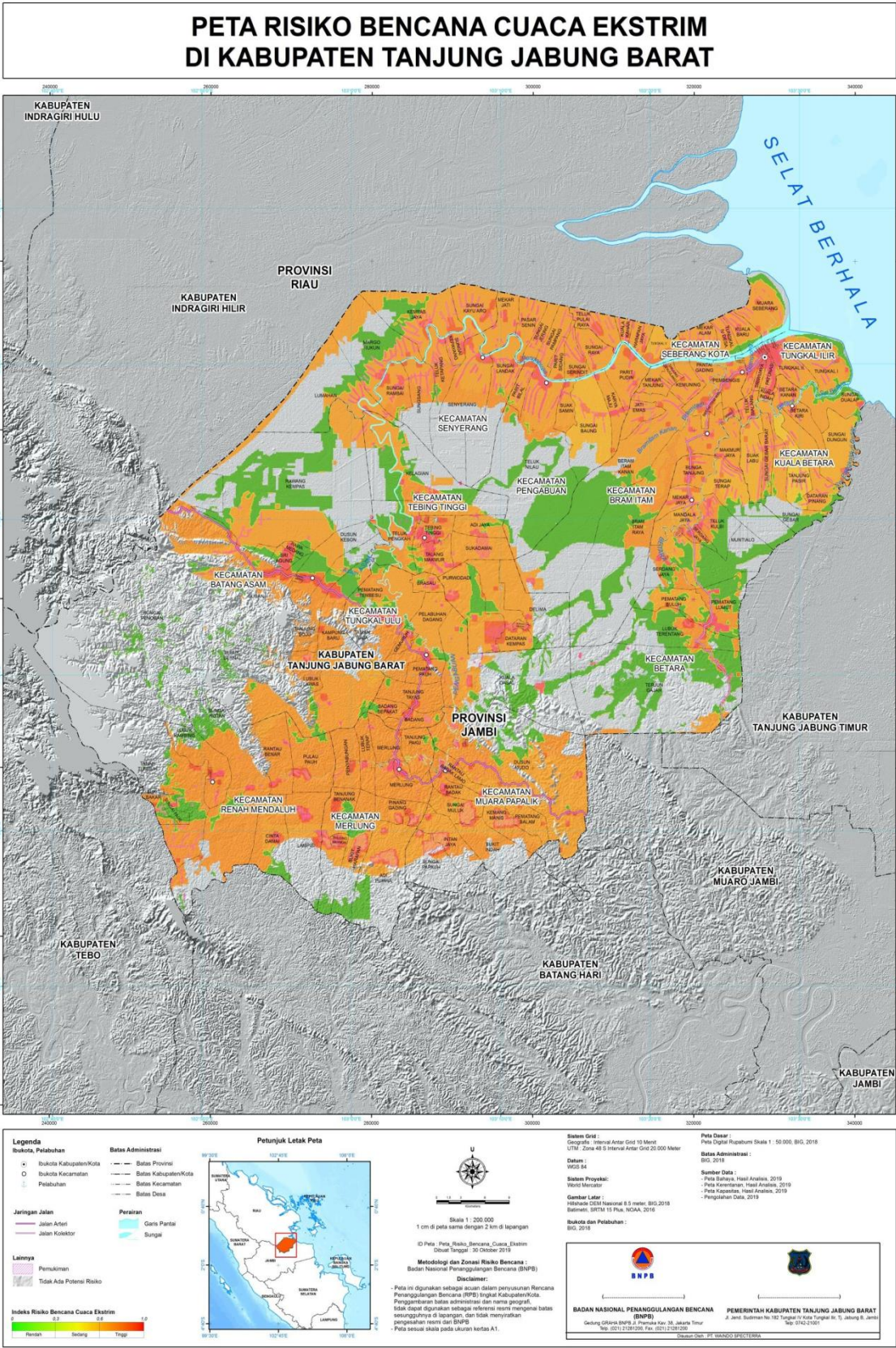


Gambar 2.4.
Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di
Kab. Tanjung Jabung Barat



Sumber : Dokumen Peta Resiko Bencana dan Kajian Resiko Bencana Kab. Tanjung Jabung Barat 2020-2024

Gambar 2.5.
Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Sumber : Dokumen Peta Resiko Bencana dan Kajian Resiko Bencana Kab. Tanjung Jabung Barat 2020-2024



2.2.4. Kondisi Demografis

Pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 317.498 jiwa, berdasarkan sensus penduduk terakhir dilaksanakan pada tahun 2010 dimana jumlah penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat berjumlah 278.741 jiwa, selama kurun waktu 2010 – 2020 terjadi pertumbuhan penduduk dengan rata – arata pertahun sebesar 1,37%.

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat Pada Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk Th. 2020	Rata-rata Pertumbuhan Penduduk 2010- 2020 (%)
1. Tunkal Ulu	14.520	1,44
2. Merlung	16.196	0,57
3. Batang Asam	32.423	3,18
4. Tebing Tinggi	36.228	0,60
5. Renah Mendaluh	15.166	2,55
6. Muara Papalik	10.831	0,50
7. Pengabuan	25.514	0,87
8. Senyerang	24.249	0,85
9. Tunkal Ilir	72.795	0,93
10. Bram Itam	18.345	2,22
11. Seberang Kota	8.824	0,73
12. Betara	29.180	2,03
13. Kuala Betara	13.227	2,46
Jumlah Total / Rata-rata	317.498	1.37

Sumber: Kab.Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2021, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

Perkembangan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan pada suatu wilayah, dengan luas wilayah 5.503,5 km², dan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 317.498 jiwa, maka dilihat dari sisi kepadatannya termasuk daerah yang belum padat penduduknya, yaitu rata-rata 63 jiwa per Km². Meskipun demikian dilihat dari trend perkembangannya cenderung semakin meningkat kepadatannya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut kecamatan dalam
Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan penduduk per km ² tahun
1. Tungkal Ulu	14.520	4,57	42
2. Merlung	16.196	5,10	52
3. Batang Asam	32.423	10,21	31
4. Tebing Tinggi	36.228	11,41	106
5. Renah Mendaluh	15.166	4,78	32
6. Muara Papalik	10.831	3,41	32
7. Pengabuan	25.514	8,04	58
8. Senyerang	24.249	7,64	57
9. Tungkal Ilir	72.795	22,93	726
10. Bram Itam	18.345	5,78	59
11. Seberang Kota	8.824	2,78	73
12. Betara	29.180	9,19	51
13. Kuala Betara	13.227	4,17	71
Jumlah Total / Rata-rata	317.498	100	63

Sumber: Kab.Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2021, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Pertumbuhan PDRB

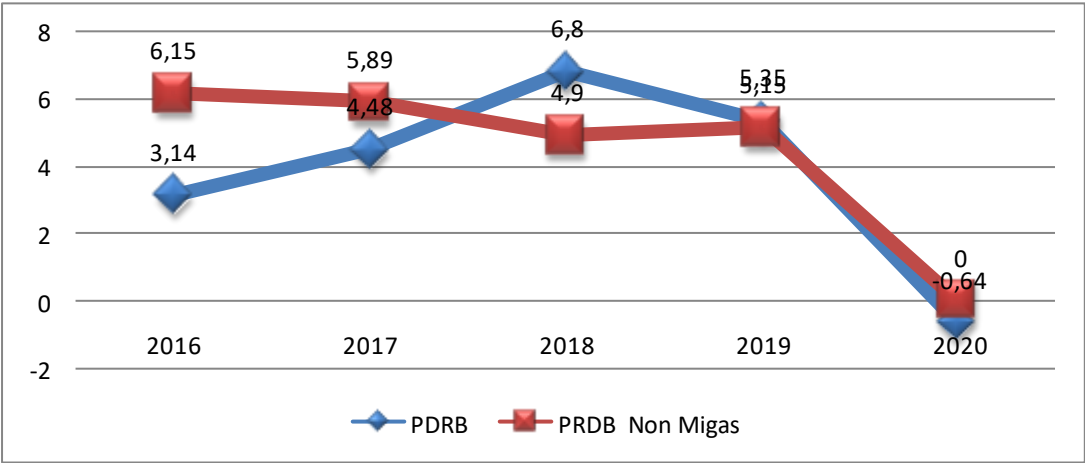
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator utama dalam perekonomian daerah, dapat digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018 mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan tahun 2017. Laju pertumbuhan PDRB dengan migas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai 6,80 persen. Perekonomian kabupaten ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,41 persen dibandingkan pertumbuhan di tahun 2017. Hal ini disebabkan terjadi peningkatan produksi migas pada tahun 2018. Jika dilihat pertumbuhan ekonomi non migas, terjadi perlambatan pertumbuhan dimana pertumbuhan ekonomi non migas pada tahun 2018 sebesar 4,90 persen. Perlambatan ini tidak berarti bahwa perkembangan kategori lapangan usaha non migas menurun namun peningkatan produksi migas pada tahun 2018 jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan produksi dari kategori lapangan usaha lainnya. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan PDRB mengalami penurunan yaitu mencapai 5,15 disebabkan penurunan produksi migas, Untuk pertumbuhan ekonomi non migas mengalami peningkatan mencapai 5,35%, kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan kontribusi pertumbuhan tertinggi, kemudian diikuti sektor konstruksi, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pada tahun 2020 pertumbuhan

PDRB berkontraksi hingga -0,64, Pandemi covid-19 telah mengakibatkan krisis multi-dimensi diseluruh dunia yang dampaknya bukan saja pada kemerosotan ekonomi tapi juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Negara Indonesia tak lepas juga ikut terserang virus corona ini begitu juga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Gambar 2.7.

Perkembangan PDRB dan PDRB Non Migas Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2020



Sumber data : PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Menurut Lapangan Usaha 2016-2020, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

Besaran nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara nominal terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 43.302,86 milyar rupiah,. Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan harga konstan 2010 juga mengalami peningkatan. Diketahui bahwa nilai PDRB kabupaten ini atas dasar harga konstan 2010 meningkat 1,482 milyar rupiah dibandingkan tahun 2018. Nilai PDRB kabupaten ini tahun 2019 sebesar 30.794,17 milyar rupiah, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 30.548,35 milyar rupiah.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun terakhir masih didominasi kategori Pertambangan dan Penggalian. Hal ini terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana sumbangan terbesar pada tahun 2019 berasal dari kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 38,15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kategori Pertambangan dan Penggalian menjadi penopang terbesar dalam roda perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peranan yang besar dari kategori ini disebabkan adanya sumber daya alam migas yang melimpah di kabupaten ini. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu kabupaten penghasil migas terbesar di Provinsi Jambi. Disisi

lain peranan kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan dari tahun – tahun sebelumnya, salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Tabel 2.9
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 s.d 2019 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.431,86	21,33	5.813,31	22,15	6.147,25	22,42	6.452,40	22,01	6.760,69	21,95
2	Pertambangan dan Penggalan	10.826,63	42,51	10.857,36	41,37	11.239,16	40,99	12.322,75	42,04	13.146,14	42,69
3	Industri Pengolahan	5.027,00	19,74	5.096,43	19,42	5.253,03	19,16	5.397,12	18,41	5.479,71	17,79
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,30	0,01	3,62	0,01	3,77	0,01	3,94	0,01	4,10	0,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	13,55	0,05	14,22	0,05	14,79	0,05	15,40	0,05	16,02	0,05
6	Konstruksi/	982,19	3,86	1.079,53	4,11	1.196,43	4,36	1.303,63	4,45	1.401,80	4,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/	762,61	2,99	823,62	3,14	869,80	3,17	931,16	3,18	988,58	3,21
8	Transportasi dan Pergudangan	188,04	0,74	200,14	0,76	214,06	0,78	223,40	0,76	234,90	0,76
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	98,60	0,39	105,69	0,40	113,89	0,42	122,71	0,42	130,59	0,42
10	Informasi dan Komunikasi	388,53	1,53	420,38	1,60	453,94	1,66	490,62	1,67	527,66	1,71
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	256,60	1,01	273,96	1,04	285,97	1,04	287,00	0,98	304,68	0,99
12	Real Estat	153,57	0,60	162,95	0,62	173,12	0,63	186,12	0,63	197,08	0,64
13	Jasa Perusahaan	270,04	1,06	285,70	1,09	299,73	1,09	315,13	1,08	330,56	1,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	368,56	1,45	391,68	1,49	407,17	1,48	430,35	1,47	446,45	1,45
15	Jasa Pendidikan	426,92	1,68	451,74	1,72	472,73	1,72	500,41	1,71	520,03	1,69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110,25	0,43	118,42	0,45	125,44	0,46	133,43	0,46	142,06	0,46
17	Jasa lainnya	137,88	0,54	146,45	0,56	151,50	0,55	159,44	0,54	163,14	0,53
	PDRB	25.466,12	100,00	26.245,20	100,00	27.421,79	100,00	29.311,39	100,00	30.794,17	100,00
	PDRB NON MIGAS	11.865,96	46,60	12.405,08	47,27	13.143,99	47,93	13.854,34	47,27	14.516,81	47,14

Sumber data : PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Menurut Lapangan Usaha 2015-2019, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

Tabel 2.10.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**Dalam juta rupiah*

No	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.519,91	25,52	8.717,10	27,72	9.744,14	27,32	10.215,94	24,59	10.898,14	25,17
2.	Pertambangan & Penggalian	10.480,06	35,56	10.386,77	33,03	12.293,73	34,46	16.315,63	39,28	16.521,42	38,15
3.	Industri Pengolahan	5.960,35	20,23	6.064,32	19,29	6.634,22	18,60	7.199,33	17,33	7.332,81	16,93
4.	Pengadaan Listrik & gas	5,24	0,02	6,41	0,02	7,36	0,02	8,45	0,02	9,55	0,02
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	19,26	0,07	21,33	0,07	23,36	0,07	25,55	0,06	27,93	0,06
6.	Konstruksi	1.226,38	4,16	1.415,57	4,50	1.607,35	4,51	1.840,30	4,43	2.022,91	4,67
7.	Perdagangan Besar dan eceran: resparasi mobil dan sepeda motor	1.098,97	3,73	1.278,58	4,07	1.433,64	4,02	1.593,47	3,84	1.725,00	3,98
8.	Transportasi & pergudangan	248,78	0,84	280,79	0,89	311,99	0,87	331,53	0,80	356,34	0,82
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	128,46	0,44	147,63	0,47	171,37	0,48	198,91	0,48	225,38	0,52
10.	Informasi dan Komunikasi	503,80	1,71	593,67	1,89	684,76	1,92	789,09	1,90	891,69	2,06
11.	Jasa Keuangan & asuransi	340,10	1,15	376,27	1,20	403,33	1,13	421,60	1,01	452,85	1,05
12.	Real estat	203,08	0,69	231,81	0,74	258,40	0,72	288,22	0,69	319,48	0,74
13.	Jasa Perusahaan	365,83	1,24	402,63	1,28	438,14	1,23	476,65	1,15	515,89	1,19
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	534,50	1,81	591,49	1,88	638,99	1,79	712,14	1,71	789,55	1,82
15.	Jasa Pendidikan	537,55	1,82	598,44	1,90	659,57	1,85	729,92	1,76	790,27	1,82
16.	Jasa kesehatan & kegiatan sosial	136,89	0,46	154,56	0,49	170,72	0,48	189,07	0,45	208,65	0,48
17.	Jasa Lainnya	159,35	0,46	176,00	0,56	189,90	0,53	205,27	0,49	214,99	0,50
	PDRB	29.468,51	100,00	31.443,37	100,00	35.670,94	100,00	41.541,07	100,00	43.302,86	100,00
	PDRB non Migas	15.494,28	52,58	17.507,62	55,68	19.464,41	54,76	20.865,63	50,00	22.431,91	51,80

Sumber data : PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Menurut Lapangan Usaha 2015-2019, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

Tabel 2.11
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 s.d. 2019 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan
Harga Konstan (Hk) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,34	5,90	15,92	7,02	11,78	5,74	4,84	4,96	6,68	4,78
2	Pertambangan dan Penggalian	-15,99	1,86	-0,89	0,28	18,36	3,52	32,72	9,64	1,26	6,68
3	Industri Pengolahan	8,85	2,62	1,74	1,38	9,40	3,07	8,52	2,74	1,85	1,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	24,47	8,91	22,33	9,70	14,82	4,14	14,81	4,51	13,02	4,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	11,65	3,51	10,75	4,94	9,52	4,01	9,38	4,12	9,32	4,03
6	Konstruksi/	8,44	6,66	15,43	9,91	13,55	10,83	14,49	8,96	9,92	7,53
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/	20,44	9,06	16,34	8,00	12,13	5,61	11,15	7,05	8,25	6,17
8	Transportasi dan Pergudangan	16,03	8,75	12,87	6,43	11,11	6,96	6,26	4,36	7,48	5,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,27	3,51	14,92	7,19	16,08	7,76	16,07	7,74	13,31	6,42
10	Informasi dan Komunikasi	18,63	8,26	17,84	8,20	15,34	7,98	15,24	8,08	13,00	7,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,82	3,24	10,64	6,77	7,19	4,38	4,53	0,36	7,41	6,16
12	Real Estat	14,88	5,05	14,15	6,11	11,47	6,24	11,54	7,51	10,85	5,89
13	Jasa Perusahaan	11,76	3,93	10,06	5,80	8,82	4,91	8,79	5,14	8,23	4,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	26,04	9,07	10,66	6,27	8,03	3,95	11,45	5,69	10,87	3,74
15	Jasa Pendidikan	8,40	3,39	11,33	5,81	10,21	4,65	10,67	5,86	8,27	3,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,28	13,69	12,91	7,41	10,46	5,93	10,75	6,37	10,36	6,47
17	Jasa lainnya	12,73	7,18	10,45	6,22	7,90	3,45	8,09	5,24	4,74	2,32
	PDRB	0,79	3,72	6,70	3,06	13,45	4,48	16,46	6,89	4,24	5,06
	PDRB NON MIGAS	14,25	7,65	12,99	4,54	11,18	5,96	7,20	5,40	7,51	4,78

Sumber data : PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat Menurut Lapangan Usaha 2014-2018 ; 2015-2019, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

Tabel 2.12.
Rata – Rata Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2015 s.d. Tahun 2019
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Sektor	Rata – Rata Pertumbuhan	
		Hb (%)	Hk (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,11	5,68
2	Pertambangan dan Penggalian	7,09	4,40
3	Industri Pengolahan	6,07	2,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,89	6,26
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	10,12	4,12
6	Konstruksi/	12,37	8,78
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,66	7,18
8	Transportasi dan Pergudangan	10,75	6,33
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,73	6,52
10	Informasi dan Komunikasi	16,01	8,02
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,32	4,18
12	Real Estat	12,58	6,16
13	Jasa Perusahaan	9,53	4,93
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,41	5,75
15	Jasa Pendidikan	9,78	4,72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,15	7,97
17	Jasa lainnya	8,78	4,88
	PDRB	8,33	4,64
	PDRB NON MIGAS	10,63	5,67

Sumber data : Data diolah dari Tabel 2.11. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 s.d. 2019 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

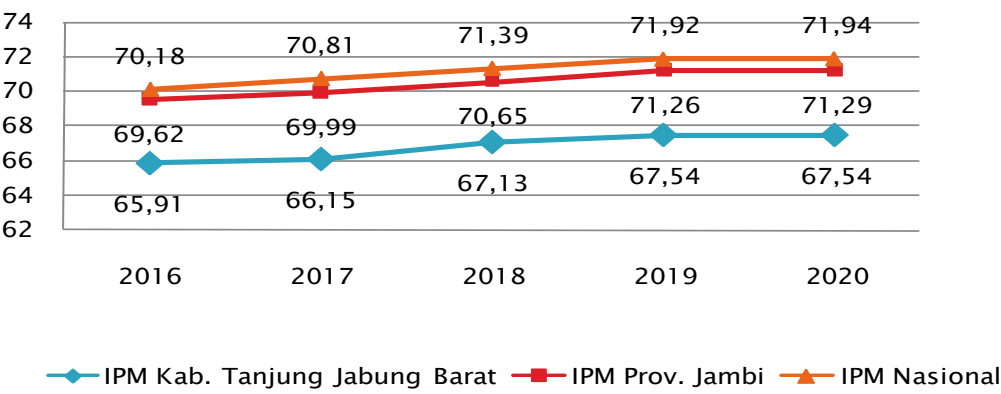
- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah / negara
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Selama ini IPM kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, angka IPM hanya dipandang sebatas informasi baku dari IPM itu sendiri tanpa adanya ulasan perbandingan tingkat keberhasilan hingga faktor – faktor penyebab dan pendukung pencapaian IPM, sudah seharusnya IPM menjadi salah satu variabel utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun ketahun selalu meningkat, pada tahun 2015 pencapaian IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 65,03 menjadi 67,54 dan pada tahun 2019, dari tahun 2019 ke tahun 2020 tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan. dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,95 persen pertahun dalam kurun waktu 2016-2020.

Gambar 2.8.

Perkembangan IPM Kab.Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi, dan Indonesia Tahun 2016 - 2020



Sumber data : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

Berbanding dengan kabupaten/kota lain dalam Prov. Jambi, Pada tahun 2016-2020 IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat menempati urutan ke 10 dari 11 kabupaten/kota dalam Prov. Jambi. Pada tahun terakhir 2020 IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat (67,54) masih berada dilevel “Sedang” dimana lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Jambi (71,29) dan Indonesia (71,94) yang sudah berhasil berada di level “Tinggi”.

Tabel 2.13

Perkembangan IPM Kabupaten/kota dalam Prov. Jambi, dan Indonesia Tahun 2016 - 2020

Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IPM				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94
Jambi	69,62	69,99	70,65	71,26	71,29
Kerinci	69,68	70,03	70,59	70,95	71,21
Merangin	67,86	68,30	68,81	69,07	69,19
Sarolangon	68,73	69,03	69,41	69,72	69,86
Batanghari	68,70	68,92	69,33	69,67	69,84
Muaro Jambi	67,55	67,86	68,34	69,01	69,18
Tanjung Jabung Timur	61,88	62,61	63,32	63,92	64,43
Tanjung Jabung Barat	65,91	66,15	67,13	67,54	67,54
Tebo	68,05	68,16	68,67	69,02	69,14
Bungo	68,77	69,04	69,42	69,86	69,92
Kota Jambi	76,14	76,74	77,41	78,26	78,37
Kota Sungai Penuh	73,35	73,75	74,67	75,36	75,42

Sumber data : Badan Pusat Statitik Prov. Jambi, 2021

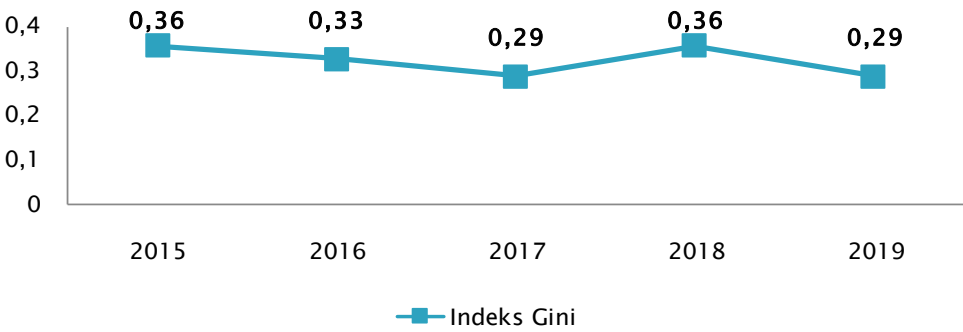
c. Indeks Gini

Indikator utama yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran/pendapatan secara menyeluruh adalah Indeks Gini. Semakin tinggi nilai koefisien gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi (Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1).

Indeks Gini Kab. Tanjung Jabung Barat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi namu pada tahun terakhir 2019 mengalami penurunan dari 0,36 di tahun 2018 menjadi 0,29 di tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat. Jika diamati menurut besarnya koefisien gini dari tahun 2015 hingga 2019, maka rata-rata ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 0,32 per tahun adalah masuk kategori sedang. Tingginya kesenjangan di Kabupaten ini bisa disebabkan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor tertentu yang tidak dinikmati oleh masyarakat luas. Bisa juga akibat tidak meratanya perkembangan antar kecamatan, sehingga kesenjangan (*gap*) antar wilayah kecamatan semakin tampak.

Gambar 2.9.

Perkembangan Indeks Gini Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dalam provinsi Jambi Indeks Gini Kab. Tanjung Jabung Barat di tahun 2019 menempati posisi urutan ke 4/5/6/7 bersama tiga kabupaten lain. Dan dilihat secara provinsi maupun secara nasional angka indeks gini Kab. Tanjung Jabung Barat di tahun terakhir 2019 berada dibawah angka indeks gini provinsi maupun nasional.

Tabel 2.14.

Perkembangan Indeks Gini Nasional, Provinsi Jambi, dan Kabuapten / Kota Dalam Provinsi jambi Tahun 2015 - 2019

Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Indeks Gini				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	0,40	0,394	0,391	0,384	0,380
Jambi	0,34	0,346	0,334	0,335	0,324
Kerinci	0,32	0,28	0,28	0,32	0,32
Merangin	0,36	0,33	0,30	0,35	0,29

Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Indeks Gini				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sarolangon	0,39	0,34	0,36	0,29	0,29
Batang Hari	0,26	0,30	0,25	0,30	0,31
Muaro Jambi	0,34	0,34	0,32	0,31	0,27
Tanjung Jabung Timur	0,29	0,26	0,28	0,29	0,29
Tanjung Jabung Barat	0,36	0,33	0,29	0,36	0,29
Tebo	0,37	0,32	0,27	0,31	0,28
Bungo	0,35	0,34	0,34	0,32	0,26
Kota Jambi	0,39	0,38	0,39	0,33	0,33
Kota Sungai Penuh	0,33	0,33	0,32	0,30	0,34

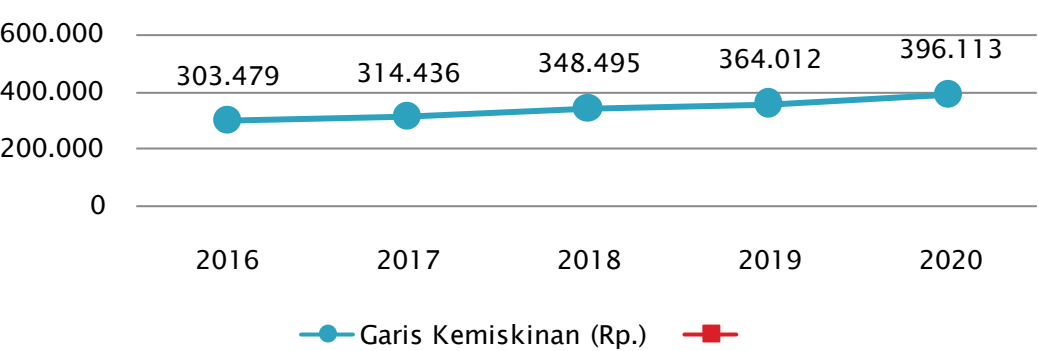
Sumber data : BPS Pusat dan BPS Prov. Jambi.

d. Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan.

Gambar 2.10.

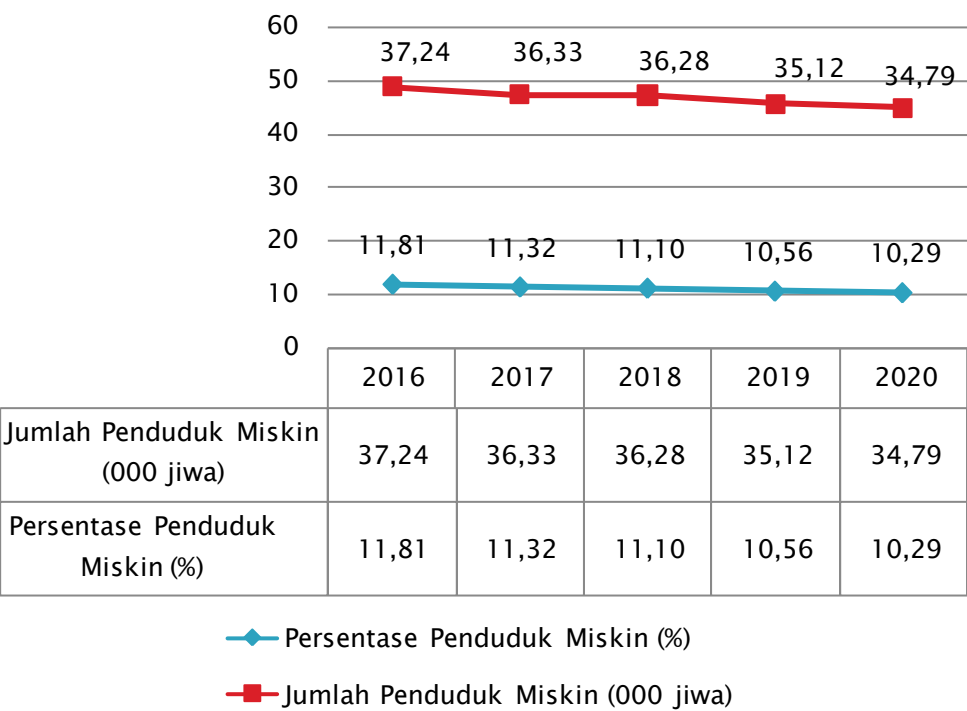
Garis Kemiskinan (rupiah) Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2020



Sumber Data : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

Selama periode tahun 2016-2020, angka garis kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cenderung naik. Garis kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016 sebesar Rp. 303.479,- per kapita per bulan naik menjadi Rp. 396.113,- per kapita per bulan pada tahun 2020 atau rata-rata naik sebesar 6,29% per tahun. Artinya pada tahun 2020, penduduk yang nilai pengeluaran di bawah garis kemiskinan (Rp. 396.113,- per kapita per bulan) maka dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Gambar 2.11.
Statistik Kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2020



Sumber Data : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selama periode tahun 2016-2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 terdapat 37.2400 jiwa menurun hingga menjadi 34.790 jiwa ditahun terakhir 2020, dengan rata – rata penurunan sebesar 610 jiwa setiap tahunnya. Bila penurunan jumlah penduduk miskin berbanding dengan jumlah penduduk setiap tahunnya, maka persentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 11,81% dan terus mengalami penurunan menjadi 10,29% ditahun 2020.

Terdata 7 kecamatan yang berada di wilayah ilir atau daerah berkontur tanah rawa dari 13 kecamatan yang ada, menempati urutan teratas jumlah penduduk fakir miskin terbanyak. 7 kecamatan tersebut adalah Kec.Tungkal Ilir (5680 jiwa), Kec. Pengabuan (4881 jiwa), Kec. Senyerang (3981 jiwa), Kec. Bram Itam (3091 jiwa), Kec. Kuala Betara (2930 jiwa), Kec. Betara (2416 jiwa), dan Kec. Seberang Kota (2137 jiwa), dimana kecamatan tersebut diatas adalah kecamatan yang berada diwilayah ilir atau didaerah dengan kontur tanah rawa. Sedangkan untuk kecamatan – kecamatan yang berada diwilayah ulu atau didaerah dengan kontur tanah keras memiliki jumlah penduduk fakir miskin lebih sedikit.

Tabel 2.15.
Jumlah Penduduk Fakir Miskin Menurut Desa/Kelurahan
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019/2020

No	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk Fakir Miskin (jiwa)
Kec. Tungkal Ulu		665
1	Kel. Pelabuhan Dagang	49
2	Badang	67
3	Taman Raja	133
4	Gemuruh	75
5	Badang Sepakat	14
6	Brasau	28
7	Tanjung Tayas	68
8	Kuala Dasal	56
9	Pematang Pauh	108
10	Pematang Tembesu	67
Kec. Tungkal Ilir		5680
1	Kel. Tungkal Harapan	987
2	Kel. Tungkal IV Kota	305
3	Kel. Tungkal III	497
4	Kel. Tungkal II	895
5	Tungkal I	313
6	Teluk Sialng	532
7	Kel. Sungai Nibung	287
8	Kel. Sriwijaya	227
9	Kel. Patunas	244
10	Kel. Kampung Nelayan	1393
Kec. Pengabuan		4881
1	Kel. Teluk Nilau	458
2	Suak Samin	386
3	Sungai Serindit	651
4	Sungai Jering	329
5	Parit Pudin	651
6	Mekar Jati	281
7	Sungai Raya	494
8	Parit Bilal	203
9	Pasar Senin	265
10	Sungai Pampang	140
11	Parit Sidang	137
12	Sungai Baung	376
13	Karya Maju	510
Kec. Betara		2416
1	Kel.Mekar Jaya	84
2	Muntialo	80
3	Teluk Kulbi	266
4	Lubuk Terentang	94

No	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk Fakir Miskin (jiwa)
5	Desa Bunga Tanjung	448
6	Terjun Gajah	155
7	Pematang Lumut	124
8	Makmur Jaya	502
9	Serdang Jaya	239
10	Pematang Buluh	90
11	Sungai Terap	255
12	Mandala Jaya	79
Kec. Merlung		1113
1	Tanjung Benanak	19
2	Tanjung Makmur	12
3	Kel. Merlung	272
4	Bukit Harapan	18
5	Tanjung Paku	270
6	Lubuk Terap	66
7	Penyabungan	93
8	Adi Purwa	63
9	Pinang Gading	26
10.	Merlung	274
Kec. Tebing Tinggi		658
1	Sungai Keruh	0
2	Talang Makmur	19
3	Dataran Kempas	7
4	Purwodadi	21
5	Adi Jaya	11
6	Kelagian	286
7	Teluk Pengkah	186
8	Delima	0
9	Suka Damai	6
10	Kel. Tebing Tinggi	122
Kec. Batang Asam		1528
1	Lubuk Bernai	190
2	Sungai Badar	33
3	Lubuk Lawas	39
4	Rawang Kempas	51
5	Sri Agung	97
6	Kampung Baru	195
7	Sungai Penoban	198
8	Suban	302
9	Tanjung Bojo	132
10	Rawa Medang	179
11	Kel.Dusun Kebun	112
Kec. Renah Mendaluh		2313
1	Kel. Lubuk Kambing	888

No	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk Fakir Miskin (jiwa)
2	Cinta Damai	16
3	Pulau Pauh	193
4	Rantau Benar	83
5	Lampisi	84
6	Sungai Rotan	108
7	Muara Danau	538
8	Tanah Tumbuh	165
9	Sungai Paur	119
10	Bukit Bakar	119
Kec. Muara Papalik		239
1	Kel. Rantau badak	25
2	Kemang Manis	10
3	Dusun Mudo	58
4	Intan Jaya	28
5	Lubuk Sebontan	22
6	Sungai Muluk	0
7	Bukit Indah	26
8	Rantau Badak Lamo	45
9	Sungai Papauh	19
10	Pematang Balam	6
Kec. Seberang Kota		2137
1	Kel. Tungkal V	296
2	Harapan Jaya	274
3	Teluk Pulai Raya	366
4	Kuala Kahar	77
5	Kuala Baru	245
6	Tungkal IV Desa	295
7	Mekar Alam	274
8	Muara Seberang	310
Kec. Bram Itam		3091
1	Kel. Bram Itam Kiri	800
2	Kemuning	297
3	Tanjung Senjulang	192
4	Semau	139
5	Pantai Gading	258
6	Bram Itam Kanan	544
7	Pembengis	495
8	Bram Itam Raya	104
9	Jati Emas	138
10	Mekar Tanjung	124
Kec. Kuala Betara		2930
1	Kel. Betara Kiri	601
2	Betara Kanan	312
3	Kuala Indah	152

No	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk Fakir Miskin (jiwa)
4	Sungai Dungun	239
5	Sungai Dualap	365
6	Sungai Gebar	164
7	Dataran Pinang	286
8	Tanjung Pasir	436
9	Sungai Gebar Barat	99
10	Suak Labu	276
Kec. Senyerang		3981
1	Kel. Senyerang	834
2	Kempas Jaya	393
3	Sungai Kepayang	89
4	Sungai Rambai	277
5	Teluk Ketapang	370
6	Sungai Kayu Aro	224
7	Sungsang	224
8	Margo Rukun	436
9	Lumahan	560
10	Sungai Landak	574

Sumber data : Dinas Sosial Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

Berdasarkan Buku Analisis Kemiskinan Provinsi Jambi 2019 yang dipublikasikan oleh BPS Prov. Jambi, disimpulkan bahwa :

- Rumah tangga miskin cenderung mempunyai anggota rumah tangga lebih banyak. Sementara itu, terkait dengan distribusi umur, rata-rata umur kepala rumah tangga miskin tercatat 49,07 tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata umur kepala rumah tangga tidak miskin yang sebesar 46,74 tahun. Sementara untuk rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin lebih rendah dibandingkan dengan kepala rumah tangga tidak miskin, yaitu 6,38 tahun banding 8,37 tahun.
- Persentase rumah tangga yang dikepalai perempuan lebih banyak ditemui di rumah tangga miskin dibanding rumah tangga tidak miskin. Dari seluruh rumah tangga yang kepala rumah tangganya perempuan, *Head Count Index* tercatat sebanyak 8,23 persennya adalah miskin. Kondisi ini lebih tinggi dibanding *Head Count Index* untuk rumah tangga yang dikepalai laki-laki yaitu sebesar 7,54 persen. Pola seperti ini terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan.
- Tingkat pendidikan juga berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih tinggi biasanya akan mempunyai peluang yang lebih rendah untuk menjadi miskin. Kepala rumah tangga pada rumah tangga miskin yang tergolong buta huruf (tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan/atau huruf lainnya) tercatat sebesar 4,36 persen lebih tinggi dibanding rumah tangga tidak miskin (2,07 persen).
- Pada Umumnya Rumah Tangga Miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian Secara umum, rumah tangga yang kepala rumah tangganya tidak bekerja (11,74 persen), selanjutnya rumah tangga yang sumber penghasilan utamanya dari sektor pertanian (9,19 persen), rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor

lainnya (5,51 persen). Berikutnya rumah tangga yang penghasilan utama kepala rumah tangganya berasal dari perdagangan (4,52 persen), dan terakhir rumah tangga yang penghasilan utama kepala rumah tangganya bekerja di sektor industri (3,77 persen).

- Rumah tangga miskin lebih tinggi proporsinya pada rumah tangga yang kepala rumah tangganya sebagai pekerja bebas. Hal berbeda untuk di perdesaan, dimana nilai *Head Count Index* tertinggi untuk rumah tangga yang kepala rumah tangganya tidak bekerja.

Tabel 2.16
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut
Kabupaten / Kota Dalam Provinsi Jambi Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Kerinci	17,48	7,30
Merangin	33,92	8,63
Sarolangon	25,79	8,42
Batang Hari	26,54	9,65
Muaro Jambi	17,30	3,83
Tanjung Jabung Timur	24,23	10,95
Tanjung Jabung Barat	34,79	10,29
Tebo	22,47	6,26
Bungo	22,07	5,80
Kota Jambi	50,44	8,27
Kota Sungai Penuh	2,78	3,03
Provinsi Jambi	277,80	7,58

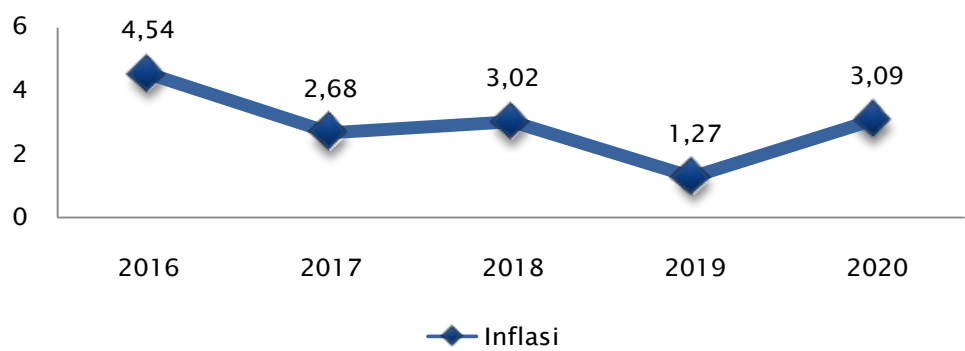
Sumber : Buku Analisis Kemiskinan Prov. Jambi, 2020 – BPS Prov. Jambi

Dari 11 kabupaten/kota posisi Kab. Tanjung Jabung Barat menempati urutan ke 10 baik dari segi jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Angka persentase penduduk miskin (10,29%) jauh di atas rata-rata Provinsi Jambi (7,58%). Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan masih merupakan permasalahan dan isu strategis daerah dalam pembangunan Kab. Tanjung Jabung Barat, perlu upaya-upaya yang tepat dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan di Kab. Tanjung Jabung Barat.

e. Laju Inflasi

Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga saat ini masih berpegang pada laju inflasi Kota Jambi yang dapat dilihat dari data IHK Kota Jambi sebagaimana ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.12.
Inflasi Kota Jambi (*Year On Year*) Tahun 2016 - 2020



Sumber Data : BPS Provinsi Jambi

Dalam kurun waktu tahun 2016 - 2020, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,50 %, tiga kelompok yang memberikan andil/sumbangan terjadinya inflasi sepanjang triwulan IV tahun 2016. Kelompok tersebut ialah Kelompok Bahan Makanan; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar; serta Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Tingkat inflasi yang cukup besar terjadi di bulan Oktober (2016) dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi pada Kelompok Bahan Makanan serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar. Kondisi ini disebabkan pada bulan tersebut terjadinya penurunan stok komoditas cabai merah. Selain itu, kenaikan tarif listrik yang terjadi pada bulan Oktober 2016 turut menyumbang inflasi.

Pada tahun 2020 inflasi *year on year* Kota Jambi sebesar 3,09 persen, inflasi di Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 5 (lima) kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,33 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,46 persen.

2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

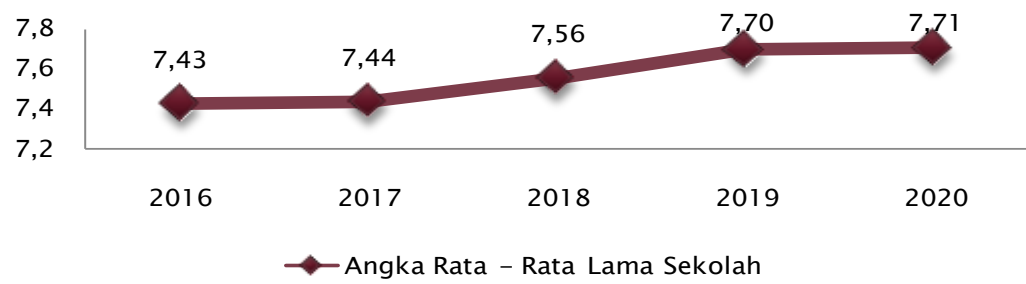
a. Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Sebelum indikator Rata – rata lama sekolah digunakan sebagai metode baru untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator yang digunakan adalah Angka Melek Huruf (AMH), Angka Melek Huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena Angka Melek Huruf disebagian daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

IPM dengan Metode Baru dari dimensi pendidikan memasukkan indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Rata – rata lama sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 masih tergolong rendah yaitu hanya selama 7,71 tahun, artinya rata – rata penduduk hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 1 atau 2 pada jenjang sekolah menengah pertama.

Gambar 2.13.

Angka Rata – Rata Lama Sekolah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2020



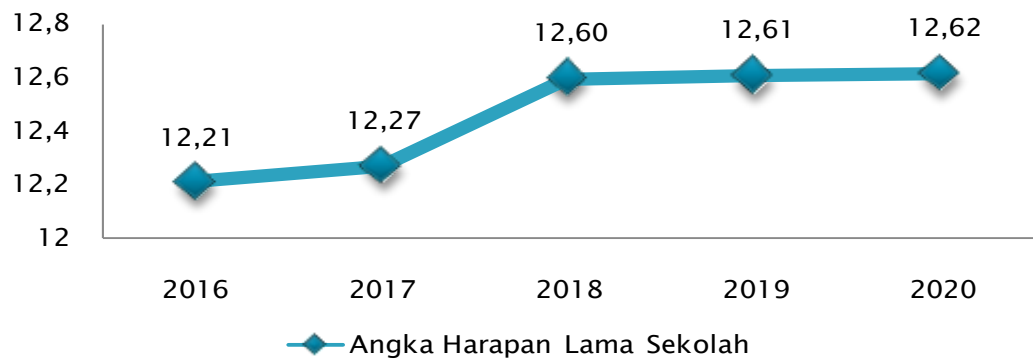
Sumber : Kab.Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2021, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak Penduduk Tanjung Jabung Barat yang bersekolah. Pada Tahun 2020 Harapan Lama Sekolah mencapai 12,62 tahun yang berarti bahwa anak anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau Diploma 1.

Gambar 2.14.

Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2020



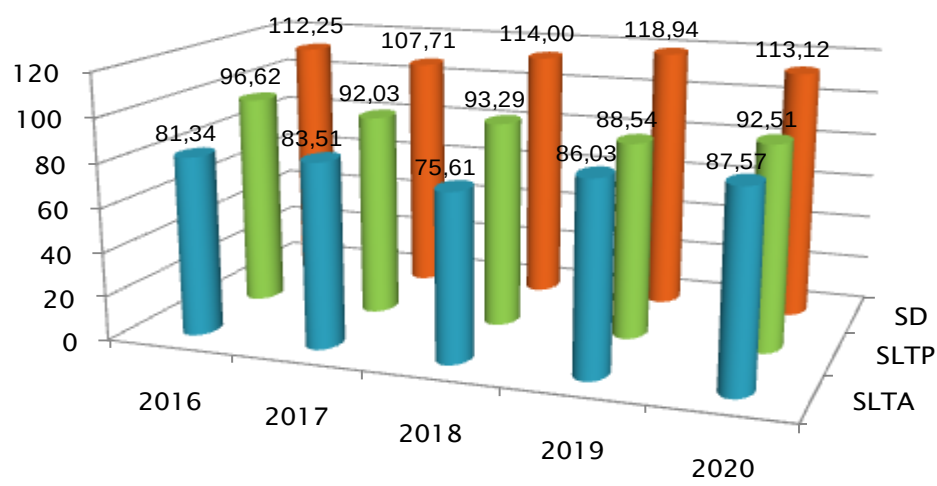
Sumber : Kab.Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2021, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat

c. Angka Partisipasi Kasar

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan digunakan Angka Partisipasi Kasar (APK). Dimana APK merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah.

Rata – rata capaian APK SD dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah diatas 100%, Kondisi ini karena populasi siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di KabupatenTanjung Jabung Barat selama tahun 2016 – 2020 mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI yaitu anak bersekolah di SD/MI berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Untuk capaian APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dari tahun 2016 – 2020 adalah rata – rata masih dibawah 100%, ini menandakan cukup banyak lulusan SD/MI tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs, begitu juga cukup banyak lulusan SMP/MTs tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/MA.

Gambar 2.15.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2020



Sumber data : Kab. Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

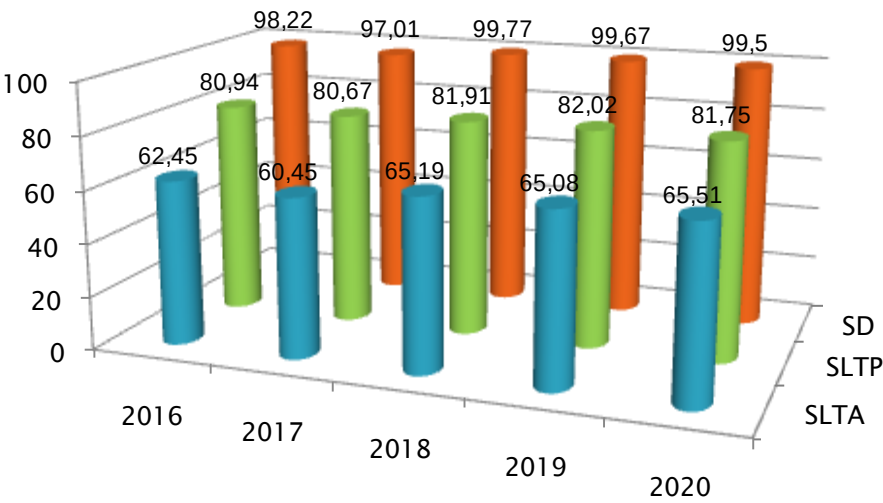
Untuk melihat penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia tertentu di jenjang pendidikan tertentu, dimana nilai idealnya adalah 100%.

Capaian APM untuk SD/MI KabupatenTanjung Jabung Barat selama tahun 2016 - 2020 dengan rata - rata capaian diatas 90% dan masih dibawah 100% pertahunnya, artinya tidak seluruh anak usia SD yang dapat bersekolah di SD/MI tepat waktu. Untuk capaian APM SMP/MTs yang rata – rata capaiannya masih dikisaran nilai 70% < 90% pertahunnya, dan begitu juga terhadap capaian APM SMA/SMK/MA yang rata – rata capaiannya dikisaran 60% < 70% pertahunnya. Berdasarkan

data tersebut terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah APM atau semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah tidak tepat waktu.

Gambar 2.16.

Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2020



Sumber data : Kab. Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, 2016 - 2020

e. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pengendalian berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat Angka Kematian Bayi dan Neonatal. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

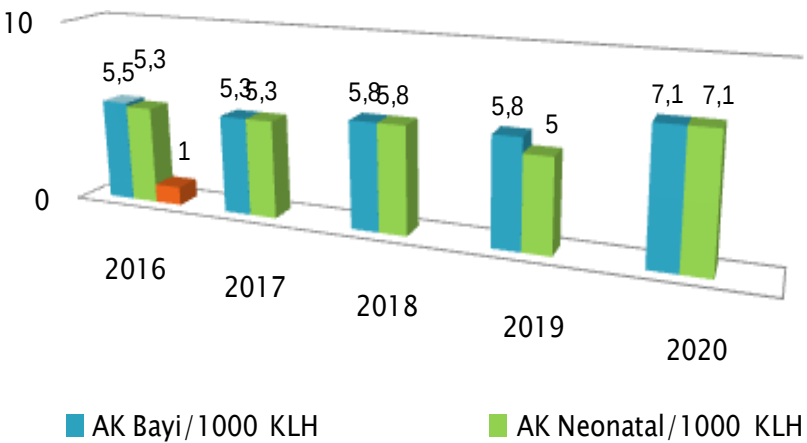
Capaian terakhir tahun 2020 menunjukkan penurunan angka kematian Bayi dan Neonatal, pada nilai yang lebih rendah dari tahun – tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 ditemukan 35 kasus kematian bayi dari 6007 kelahiran hidup (AKB 5,8/1000 KLH) menjadi 33 kasus kematian bayi dari 6353 kelahiran hidup (AKB 5,2/1000 KLH), dimana penyebab kematian terbesar disebabkan oleh Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 18 kasus (54,54%) dan Kekurangan oksigen (asfiksia) 5 kasus (15,15%). Sedangkan sisanya sebesar 30,31% disebabkan faktor penyebab tidak langsung seperti keterlambatan dalam proses rujukan dikarenakan akses yang dipengaruhi oleh faktor geografis (daerah perairan dan pasang surut), Belum terbentuknya Regionalisasi rujukan kasus maternal dan neonatal ditingkat puskesmas, Berkurangnya kelengkapan Tim PONED (Pelayanan Obsetri Neonatal Esensial Dasar) Puskesmas yang sudah dibentuk dan dilatih dikarenakan pindah tempat bertugas sehingga dibutuhkan pelatihan tim yang baru, Masih ada beberapa desa yang belum maksimal menjalin kemitraan bidan dengan

dukun bayi sehingga masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun bayi yang seharusnya ditolong oleh tenaga kesehatan

Penurunan angka kematian bayi dan neonatal pada tahun 2020 ini sebagai hasil dari terlaksananya penguatan kapasitas pelayanan komplikasi neonatal dan bayi. Disamping itu rutinitas pemantauan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan penggunaan Jaminan persalinan dengan kasus Rujukan terus dilakukan, dan ditambah dengan koordinasi lintas program dan sektor pada 13 kecamatan. Adapun bentuk – bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menurunkan AKB, Neonatal dan Balita diantaranya Audit Maternal Antenatal (AMP), Pertemuan BBLR (Penatalaksanaan Bayi Berat Badan Lahir Rendah), dan PWSKIA (Pemantau Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak).

Gambar 2.17.

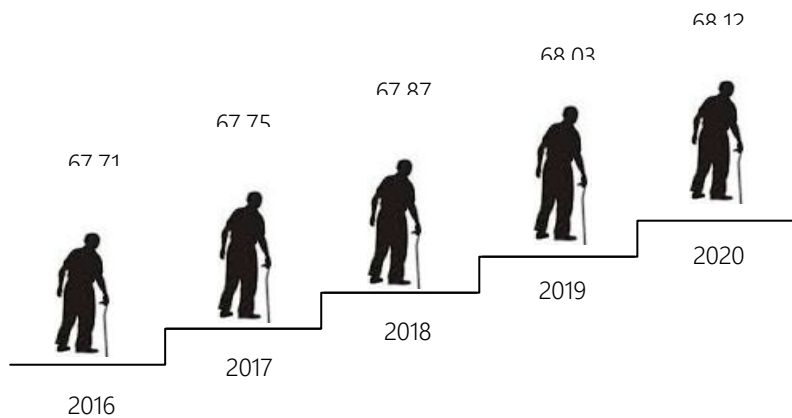
Angka Kematian Bayi, Neonatal, dan Balita / 1000 KLH
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2020



Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat

Dapat dikatakan seseorang akan bertahan hidup lebih panjang apabila memiliki harapan hidup yang tinggi saat lahir (status gizi dan kesehatan prenatal dan postnatal), selalu sehat, atau jika sakit dapat segera berobat untuk mempercepat kesembuhannya. Hasil analisis Ayunanda dan Zain (2013) beberapa variabel yang mempengaruhi aspek kesehatan adalah jumlah sarana kesehatan, rumah tangga dengan akses air bersih. Usia Harapan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan dari angka 67,71 menjadi 68,12 pada tahun 2020. Nilai rata-rata peningkatan Usia Harapan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode tahun 2016-2020 adalah sebesar 0,1025 tahun per tahun.

Gambar 2.18.
Angka Usia Harapan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016 - 2020



Sumber data : Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

Meskipun Usia Harapan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus naik, tetapi berdasarkan ranking Angka Usia Harapan Hidup yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Jambi pada tahun 2020, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 (68,12 tahun) menempati posisi urutan ke 9 dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan 8 Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jambi kecuali dibandingkan dengan dua Kabupaten lain yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur (66,23 tahun) dan Kabupaten Bungo (67,74 tahun).

Pada Tahun 2020 Usia Harapan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat (68,12 tahun) lebih rendah dibandingkan dengan UHH Provinsi Jambi yang telah mencapai 71,16 tahun, dan juga masih lebih rendah dibandingkan dengan UHH Nasional yang telah mencapai Usia 73,40 tahun.

Tabel 2.17.
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2016 s.d. Tahun 2020
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kab/Kota	USIA HARAPAN HIDUP				
	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Jambi	70,71	70,76	70,89	71,06	71,16
Kerinci	69,41	69,52	69,65	69,82	69,93
Merangin	70,93	70,94	71,04	71,18	71,26
Sarolangun	68,80	68,83	68,94	69,09	69,17
Batanghari	70,03	70,12	70,26	70,44	70,56
Muara Jambi	70,86	70,90	71,02	71,18	71,27
Tanjung Jabung Timur	65,56	65,69	65,86	66,08	66,23
Tanjung Jabung Barat	67,71	67,75	67,87	68,03	68,12
Tebo	69,66	69,67	69,77	69,91	69,99
Bungo	67,18	67,27	67,42	67,61	67,74
Kota Jambi	72,32	72,33	72,43	72,57	72,56
Kota Sungai Penuh	71,66	71,71	71,84	72,01	72,11
Nasional	70,90	71,06	71,20	71,34	73,40

Sumber Data : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

g. Rasio Penduduk Yang Bekerja.

Pada tahun 2020 komposisi Penduduk Tanjung Jabung Barat masih didominasi oleh penduduk kelompok muda/dewasa dengan usia 25 – 39, jumlah penduduk usia ini cukup signifikan sehingga ikut mempengaruhi besaran partisipasi angkatan kerja. Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabuapten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019 sebelumnya yaitu dari 70,56% meningkat menjadi 74,83%, ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sedangkan sisanya sebesar 25,17% bisa diinterpretasikan sebagian penduduk fokus untuk bersekolah, mengurus rumah tangga, berstatus lanjut usia, atau mengabdikan sebagai pekerja sosial atau kegiatan diluar kegiatan ekonomi. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Seiring dengan peningkatan angka TPAK dari tahun 2019 ke tahun 2020, diikuti juga dengan penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu dari 2,67% menjadi 2,16%. Bertambahnya jumlah penduduk angkatan kerja dan terbatasnya lapangan pekerjaan masih menjadi penyebab adanya pengangguran.

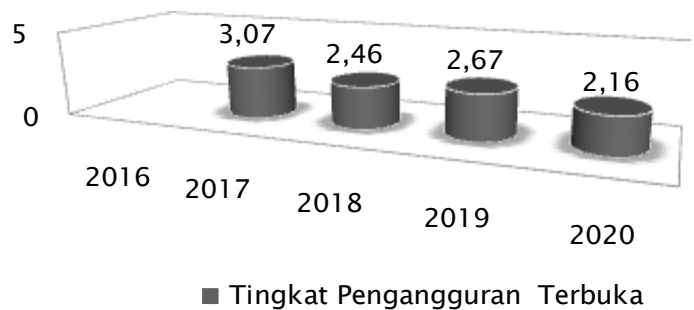
Upaya – upaya nyata untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja atau menurunkan tingkat pengangguran seperti melalui pemberian informasi kepada masyarakat atau para pencari kerja tentang Sistem Pelayanan Pencari Kerja Berbasis Teknologi dengan Informasi Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK I) dan informasi lowongan kerja secara online, yang juga dikenal dengan Informasi Pasar Kerja (IPK). Disamping dari pengusaha kerja dari sumber luar melalui Dinas Tenaga Kerja Kabuapten Tanjung Jabung Barat juga mengupayakan terciptanya pekerja dengan usaha mandiri yaitu dengan menyelenggarakan berbagai jenis Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi melalui APBD dan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi melalui APBN dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal bagi Perusahaan-Perusahaan yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang bertempat di PT. Wirakarya Sakti (WKS) yang ditindaklanjuti dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Perusahaan-Perusahaan yang beroperasi di dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Gambar 2.19.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2020



Gambar 2.20.
Tingkat Pengangguran Terbuka

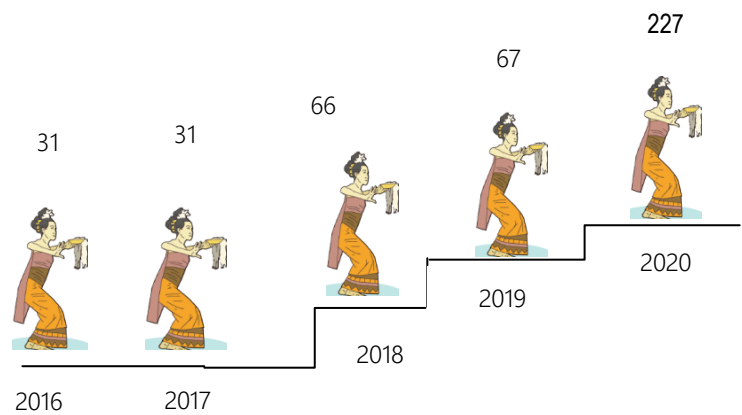


Sumber data : Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

2.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
a. Jumlah Grup Kesenian

Grup seni budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2016-2020 mengalami perkembangan mulai dari berjumlah 31 grup pada tahun 2016 menjadi 227 grup pada tahun 2020. Perkembangan cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 dari berjumlah 67 grup pada tahun 2019 menjadi 227 grup, ini karena adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap masyarakat penggiat seni dan budaya lewat penyelenggaraan acara – acara pertunjukkan dan perlombaan seni budaya.

Gambar 2.21.
Perkembangan Grup Seni Budaya



Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

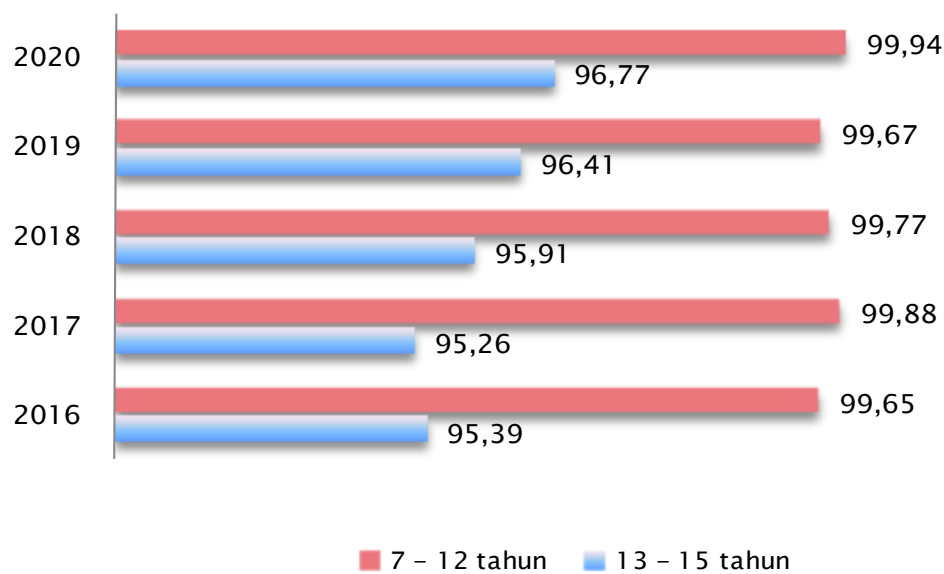
Hingga tahun 2020 keberadaan grup seni budaya dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbilang sebanyak 227 buah, dalam era globalisasi dan teknologi yang semakin maju sekarang ini keberadaan grup seni budaya tersebut merupakan sesuatu yang berhasil dalam upaya melestarikan seni budaya khususnya bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.4. Aspek Pelayanan Umum
2.4.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib (Berkaitan Pelayanan Dasar)
2.4.1.1. Pendidikan
a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Ketersediaan sekolah dan guru mewujudkan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat hingga ke daerah – daerah, semakin banyak dan merata jumlah sekolah dan tenaga pendidik artinya akan semakin banyak anak usia sekolah dapat bersekolah. Indikator angka partisipasi sekolah untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 besaran Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs berfluktuatif, pada tahun 2020 APS usia 7 – 12 tahun atau SD/MI sebesar 99,94 dan APS usia 13 – 15 tahun atau SMP/MTs sebesar 96,77 artinya masih ada penduduk usia sekolah (7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13 – 15 untuk SMP/MTs) yang belum mengenyam pendidikan SD/MI dan MTs.

Gambar 2.22.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2016 s.d. 2020 Kab. Tanjung Jabung Barat



Sumber data : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

b. Rasio Ketersediaan Ruang Kelas Sekolah/Penduduk Usia Sekolah.

Sesuai dengan pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, jumlah peserta didik di dalam satu rombongan ketentuannya telah diatur dimana untuk jenjang pendidikan SD didalam satu kelas jumlah peserta didik paling sedikit ialah 20 dan paling banyak ialah 28 peserta didik. Sedangkan untuk jenjang Pendidikan SMP didalam satu kelas jumlah peserta didik paling sedikit ialah 20 dan paling banyak ialah 32 peserta didik.

Capaian rasio Kabupaten Tanjung Jabung Barat bila dilihat secara jumlah keseluruhan antara jumlah ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 2016 sampai dengan 2020 ialah masih berada dalam kisaran jumlah peserta didik dalam satu kelas yang sesuai ketentuan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tersebut diatas baik pada jenjang pendidikan SD/MI maupun SMP/MTs, dimana rata – rata Rasio SD/MI adalah 22 dan rata – rata Rasio SMP/MTs adalah 26 artinya satu ruangan kelas SD/MI diisi sebanyak 22 peserta didik dan satu ruangan kelas SMP/MTs diisi sebanyak 26 peserta didik. Dilihat dari grafik pada Gambar 2.14. Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs Terhadap Jumlah Murid SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016 s.d. 2020 Kab. Tanjung Jabung Barat, rasio SD/MI dan SMP/MTs terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 dikarenakan jumlah peserta didik setiap tahunnya menurun sedangkan jumlah ruang kelas bertambah setiap tahunnya.

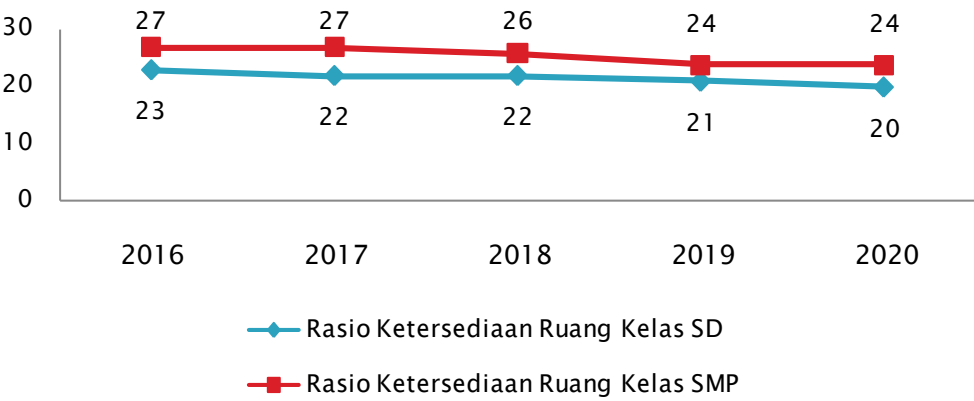
Tabel 2.18.
Ketersediaan Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs dan Jumlah Murid
SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016 s.d. Tahun 2020
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah ruang kelas	1588	1639	1641	1712	1735
1.2.	Jumlah murid	36.353	36.392	36.112	35.561	35.063
1.3.	Rasio	23	22	22	21	20
2.	SMP / MTs					
2.1.	Jumlah ruang kelas	389	399	396	418	420
2.2.	Jumlah murid	10.423	10.591	10.433	10.006	9.922
2.3.	Rasio	27	27	26	24	24

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat

Gambar 2.23.

Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs Terhadap Jumlah Murid SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016 s.d. 2020 Kab. Tanjung Jabung Barat



Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat

Rasio ketersediaan ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Murid SD/MI dan SMP/MTs menurut kecamatan dapat memberikan gambaran lebih detail mengenai besaran ketersediaan ruang kelas terhadap jumlah murid dalam wilayah kecamatan.

Tabel 2.19.
Ketersediaan Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs dan Jumlah Murid SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2020 Menurut Kecamatan Dalam Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tungkal Ulu	79	1641	21	19	499	26
2	Merlung	94	1976	21	29	700	24
3	Batang Asam	173	4827	28	56	1511	27
4	Tebing Tinggi	180	4229	23	72	1656	23
5	Renah Mendaluh	85	1937	23	26	571	22
6	Muara Papalik	78	1206	15	15	331	22
7	Pengabuan	159	2528	16	26	463	18
8	Senyerang	135	2567	19	23	521	23
9	Tungkal Ilir	307	7677	25	73	2220	30
10	Bram Itam	97	1777	18	11	124	11
11	Seberang Kota	64	851	13	9	178	20
12	Betara	166	3547	21	43	1109	26
13	Kuala Betara	95	1109	12	16	262	16

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

Dari tabel diatas secara keseluruhan terlihat kondisi ketersediaan ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2020 di kecamatan – kecamatan masih dalam batasan sesuai ketentuan. Rasio tertinggi untuk SD/MI ada di Kecamatan Batang Asam yaitu sebesar 28, angka ini sudah menyentuh nilai batas tertinggi untuk rasio SD/MI.

c. Rasio Guru/Murid

Jumlah tenaga pengajar yang tersedia pada suatu sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu sekolah, semakin besar rasio jumlah guru berbanding jumlah murid maka semakin menurun pula efektivitas dalam proses belajar – mengajar. Sama halnya dengan ketentuan batasan tertinggi jumlah murid SD/MI dan SMP/MTs per kelas dengan ketentuan batasan tertinggi jumlah murid SD/MI dan SMP/MTs per kelas terhadap guru. Pada tabel 2.14. dibawah ini dilihat secara cakupan kabupaten dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 baik rasio SD/MI dan SMP/MTs masih dalam batasan jumlah murid yang di tangani oleh satu orang guru sesuai ketentuan peraturan tersebut diatas.

Untuk melihat Ketersediaan Guru SD/MI dan SMP/MTs terhadap Jumlah Murid SD/MI dan SMP/MTs pada 2020 di kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 2.15 dibawah ini. Dari tabel tersebut secara keseluruhan terlihat kondisi ketersediaan Guru SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2020 di kecamatan – kecamatan masih dalam batasan sesuai ketentuan. Rasio tertinggi untuk SD/MI begitu juga SMP/MTs ada di Kecamatan Batang Asam yaitu sebesar 25 dan 19,

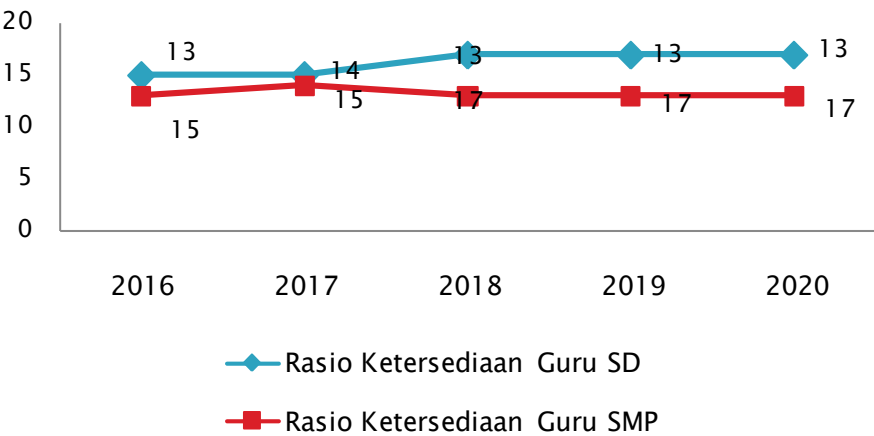
angka – angka ini masih dibawah nilai batasan tertinggi untuk rasio SD/MI dan SMP/MTs.

Tabel 2.20.
Ketersediaan Guru SD/MI dan SMP/MTs dan Jumlah Murid SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016 s.d. Tahun 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	2419	2387	2165	2070	2094
1.2.	Jumlah Murid	36.353	36.392	36.112	35.561	35.063
1.3.	Rasio	15	15	17	17	17
2.	SMP / MTs					
2.1.	Jumlah Guru	777	776	780	773	768
2.2.	Jumlah Murid	10.423	10.591	10.433	10.006	9.922
2.3.	Rasio	13	14	13	13	13

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

Gambar 2.24.
Rasio Ketersediaan Guru SD/MI dan SMP/MTs Terhadap Jumlah Murid SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016 s.d. 2020 Kab. Tanjung Jabung Barat



Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

Tabel 2.21.
Ketersediaan Guru SD/MI dan SMP/MTs dan Jumlah Murid SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2020 Menurut Kecamatan Dalam Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tungkal Ulu	93	1641	18	46	499	11
2	Merlung	109	1976	18	60	700	12
3	Batang Asam	194	4827	25	80	1511	19
4	Tebing Tinggi	195	4229	22	101	1656	16
5	Renah Mendalu	94	1937	21	46	571	12
6	Muara Papalik	86	1206	14	30	331	11
7	Pengabuan	175	2528	14	45	463	10
8	Senyerang	147	2567	17	70	521	7
9	Tungkal Ilir	444	7677	17	133	2220	17
10	Bram Itam	117	1777	15	16	124	8
11	Seberang Kota	74	851	12	17	178	10
12	Betara	223	3547	16	97	1109	11
13	Kuala Betara	119	1109	9	32	262	8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat

2.4.1.2. Kesehatan

Pandemi covid-19 telah mengakibatkan krisis multi-dimensi diseluruh dunia yang dampaknya bukan saja pada kemerosotan ekonomi tapi juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Negara Indonesia tak lepas juga ikut terserang virus corona ini begitu juga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan data pantauan di situs resmi Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan 24 Mei 2021, dilaporkan :

- ✓ 34 orang dengan status suspek;
- ✓ 740 dengan status terkonfirmasi;
- ✓ 461 orang dinyatakan sembuh;
- ✓ 16 orang meninggal.

Upaya – upaya pencegahan meluasnya wabah Covid-19 telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti mengeluarkan surat Himbauan Bupati Tanjung Jabung Barat, melalui tim gugus tugas Covid-19 aktif melakukan advokasi kepada masyarakat untuk menggunakan masker dan menjaga jarak interaksi, pengaturan kerja dirumah/*work from home* bagi aparatur sipil negara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan lainnya.

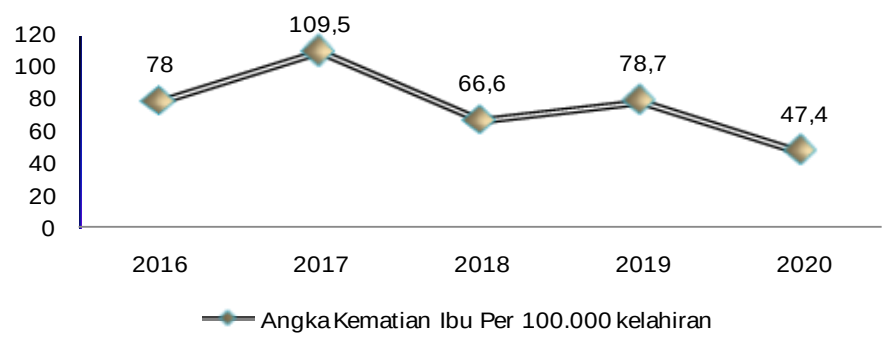
Selain Angka Kematian Bayi, Neonatal dan Balita ada Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate (MMR)* berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)*, target AKI adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Capaian AKI Kabupaten Tanjung Jabung dari

tahun 2016 mengalami fluktuasi hingga tahun 2020 dengan rata – rata AKI ialah 76,04 kasus kematian per 100.000 kelahiran hidup. Dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 Angka kematian ibu tertinggi terjadi di tahun 2017 yaitu 109,5 kasus kematian, dan angka kematian ibu terendah terjadi di tahun 2020 yaitu 47,4 kasus. Bila dibandingkan dengan target *SDGs* diatas artinya baik secara rata – rata AKI maupun kondisi capaian terakhir tahun 2019 belum mencapai target *SDGs*.

Gambar 2.25.

Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016 s.d. 2020 Kab. Tanjung Jabung Barat



Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

Untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan dalam memenuhi pelayanan kesehatan kepada penduduk menurut standar pelayanan minimal kesehatan, diantaranya dengan melihat rasio rumah sakit, puskesmas, dan dokter per satuan penduduk. Untuk standar rasio rumah sakit daerah ialah Tersedianya minimal 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah terakreditasi Nasional sesuai dengan peraturan dan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk standar rasio jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terhadap jumlah penduduk ialah rasio ideal sebesar 1,16 puskesmas : 30.000 penduduk, dan untuk rasio tenaga dokter per satuan penduduk berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dimana rasio idealnya adalah 1 dokter : 2.500 penduduk.

Terdapat dua rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu RSUD KH. Daud Arif dan RSUD Surya Kharuddin Merlung. RSUD KH. Daud Arif telah terakreditasi Nasional, dan RSUD Surya Kharuddin Merlung masih dalam tahap pemenuhan akreditasi. Capaian Rasio Rumah Sakit Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah terpenuhi menurut ketentuan peraturan dan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

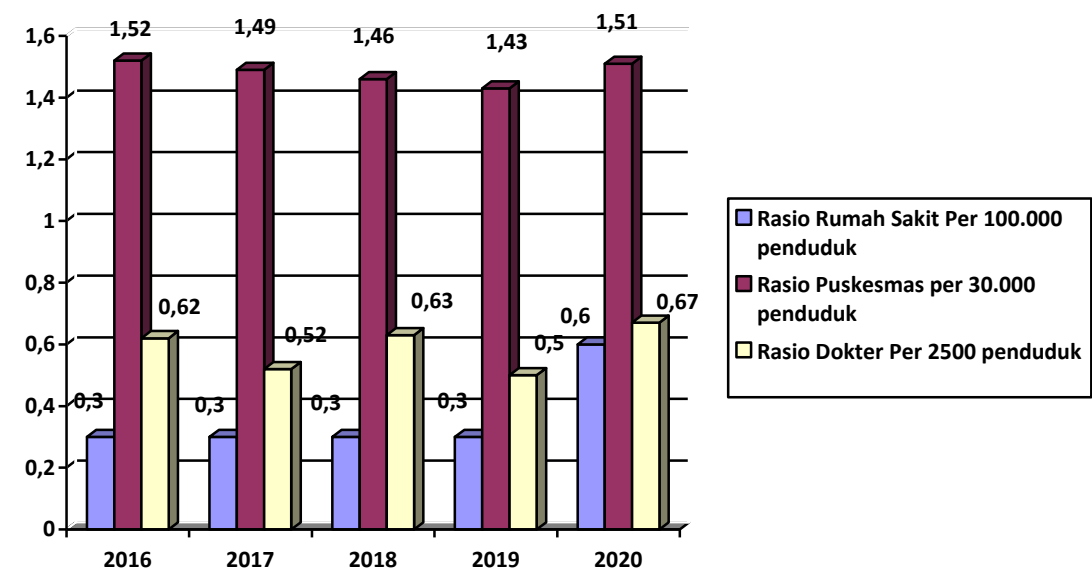
Untuk puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 16 puskesmas yang tersebar di 13 kecamatan, capaian Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang mana setiap tahunnya berada diatas rasio ideal yaitu diatas angka 1,16.

Keberadaan puskesmas secara rasio telah memenuhi cakupan pelayanan kesehatan namun berbeda halnya dengan ketercukupan tenaga dokter yang belum terpenuhi, capaian terakhir di tahun 2020 rasio dokter per 2500 penduduk yaitu 0,67 bila dibandingkan dengan rasio Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yaitu 1 dokter : 2500 penduduk maka

capaian tersebut masih sangat jauh. Kurangnya minat para dokter luar Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk bekerja di rumah sakit / puskesmas yang ada sekarang, dan atau membuka usaha dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat apalagi di daerah kecamatan. Selain itu pengaruh pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung yang setiap tahunnya terus ada, ikut mempengaruhi perhitungan besaran rasio.

Gambar 2.26.

Rasio Rumah Sakit, Rasio Puskesmas, dan Rasio Dokter Tahun 2016 s.d. 2020
Kab. Tanjung Jabung Barat

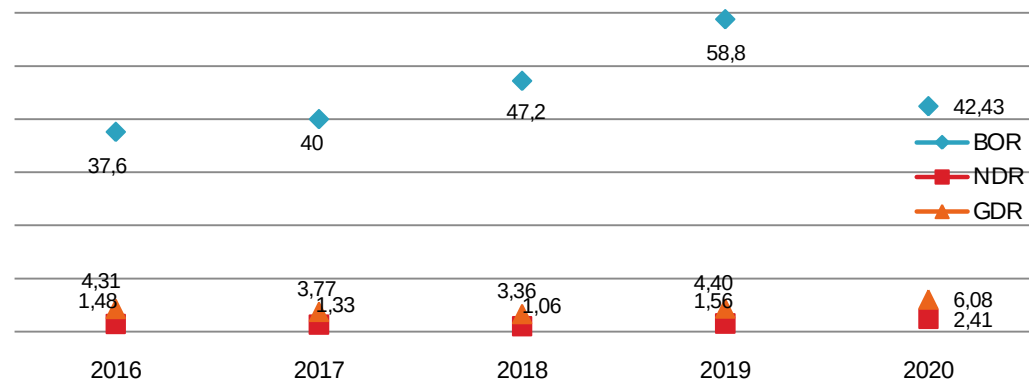


Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

Gambaran kinerja dan perkembangan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah KH Daud Arif Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Gambar 2.27.

BOR, NDR, dan GDR Pada RS. KH.DAUD ARIF Kuala Tungkal Tahun 2016 s.d. 2020



Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat

1. BOR (*Bed Occupation Rate*) adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011). Indikator ini untuk mengukur tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur. Ada kecenderungan peningkatan cukup signifikan di dua tahun terakhir 2018 dan 2019 dari 40% ditahun 2017 meningkat menjadi 47,2% di tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi 58,8% ditahun 2019, dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 42,43%. Sedangkan standar Nasional untuk BOR berkisar antara 60% – 85%. BOR juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah tempat tidur. Pemanfaatan tempat tidur tertinggi terdapat di kelas III sehingga terjadi kecenderungan pemanfaatan tempat tidur yang tidak merata antara kelas III, II,I dan VIP.
2. GDR (*Gross Death Rate*) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011). Nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar (Kementerian Kesehatan 2011). Capaian GDR RSUD KH. Duad Arif pada tahun 2018 dan 2019. Angka GDR berfluktuasi dari tahun 2006 sampai dengan 2021, pada tahun 2020 angka GDR berada pada capaian tertinggi dari tahun – tahun sebelumnya yaitu 6,08.
3. NDR (*Net Death Rate*) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 (Kementerian Kesehatan 2011). Capaian NDR RSUD KH. Duad Arif dari tahun 2016 sampai dengan 2020 setiap tahunnya masih dibawah angka 25, dengan rata – rata yaitu 13,96.

2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur merupakan unsur penting dalam menunjang perekonomian masyarakat sekaligus peluang untuk meningkatkan investasi. Ketersediaan Infrastruktur yang menghubungkan seluruh sumber perekonomian masyarakat akan meningkatkan perputaran barang dan jasa antar daerah, kondisi jalan yang baik akan mengurangi biaya operasional bagi para pelaku usaha. Kesemuanya itu pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Pada tahun 2016 dilakukan pengukuran ulang baik panjang maupun kondisi ruas jalan dalam jaringan jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat, sehingga terjadi pergeseran data dari data sebelum tahun 2016, Untuk panjang jalan sebelum tahun 2016 adalah 1.824,82 km begitu juga untuk perhitungan panjang jalan aspal, kerikil, dan tanah serta kondisi jalan.

Panjang jalan kabupaten 1.265,20 km ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 600/707/DPU/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Dalam Jaringan Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang terdiri dari Jalan aspal sepanjang 253,05 km (20%), jalan kerikil / koral sepanjang 392,23 km (30,99%), dan jalan tanah sepanjang 506,86 km (40,00%), dan jalan perkerasan rigid/beton sepanjang 113,05 (8,93%), sedangkan jalan

dengan kondisi jalan baik sepanjang 177,38 km (13,99%), jalan dengan kondisi sedang sepanjang 310,48 km (24,51%), jalan dengan kondisi rusak sepanjang 22,28 km (1,74%), dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 755,01 (59,68%).

Tabel.2.22.
Panjang Jalan Kabupaten Kab. Tanjung Jabung Barat menurut jenis permukaan dan kondisi jalan Tahun 2016 s.d. 2020

Keadaan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
I. Jenis Permukaan					
a. Aspal	442,69*		176,306	218,09	253,05
b. Kerikil	587,05		673,024	475,67	392,23
c. Tanah	235,45		415,00	563	506,86
d. Perkerasan Rigid/Beton	0		0,874	8,52	113,05
*(dalam kilometer)					
Jumlah	1265,20	1265,20	1265,20	1265,20	1265,20
II. Kondisi jalan					
a. Baik	161,18*		175,87	161,50	177,38
b. Sedang	348		368,19	389,69	310,48
c. Rusak	501,41		499,95	501,64	22,28
d. Rusak berat	254,56		221,18	212,35	755,01
*(dalam kilometer)					
	1265,20	1265,20	1265,20	1265,20	1265,20
III. Kelas jalan					
a. Kelas I					
b. Kelas II					
c. Kelas III					
d. Kelas IIIA					
e. Kelas IIIB			1265,20*	1265,20	1265,20
f. Kelas IIIC					
*(dalam kilometer)					
			1265,20	1265,20	1265,20

Sumber Data : Dinas PUPR Kab. Tanjung Jabung Barat

Mulai tahun 2018 perkerasan rigid/beton mulai diterapkan untuk peningkatan struktur jalan, penggunaan perkerasan rigid/beton dianggap lebih baik dari perkerasan aspal, bila dilihat secara jangka panjang *life-cycle-cost* lebih murah dibanding dengan perkerasan aspal. Data kondisi jalan terakhir tahun 2020 menunjukkan relatif kecilnya persentase jalan dalam kondisi baik terhadap panjang jalan keseluruhan dan cukup besarnya persentase jalan dalam kondisi rusak Berat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kreteria dan Penetapan Status Irigasi, terdapat delapanbelas daerah dalam wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan menjadi daerah irigasi permukaan (DI) dan daerah irigasi rawa (DIR) yang menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten, dan Daerah Irigasi Sei. Suban yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Tabel. 2.23.
Daerah Irigasi dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

JENIS DAERAH IRIGASI	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (Ha)
I. Daerah Irigasi (Teknis)	<u>Kewenangan Provinsi</u>	
	1. D.I. Sei.Suban	1.121
	<u>Kewenangan Kabupaten</u>	
	1. D.I. Sei. Bungin – Kec. Renah Mendaluh	125
	2. D.I. Sei. Melawai – Kec. Tungkal Ulu	150
II. Daerah Irigasi Rawa	<u>Kewenangan Pemerintah Pusat</u>	
	1. D.I.R Parit Pudir – Kec. Pengabuan	4.342
	2. D.I.R Pematang Lumut – Kec. Betara	3.000
		1.318
	<u>Kewenangan Provinsi</u>	1.250
	1. D.I.R Senyerang – Kec. Senyerang	
	2. D.I.R. Teluk Ketapang – Kec. Senyerang	1.510
	3. D.I.R. Teluk Nailau – Kec. Pengabuan	
		315
		315
	<u>Kewenangan Kabupaten</u>	535
	1. D.I.R. Bram Itam – Kec. Bram Itam	825
	2. D.I.R. Betara – Kec. Betara	241
	3. D.I.R. Kayu Aro Kanan – Kec. Senyerang	100
	4. D.I.R. Kayu Aro Kiri – Kec. Senyerang	808
		980
	5. D.I.R. Kelagian Baru – Kec. Tebing Tinggi	142
		736
	6. D.I.R. Kempas Jaya – Kec. Senyerang	600
		222
	7. D.I.R. Lumahan – Kec. Tebing Tinggi	500
	8. D.I.R. Margo Rukun – Kec. Senyerang	875
	9. D.I.R. Mekarjati – Kec. Pengabuan	450
		82
	10. D.I.R. Pasar Senen – Kec. Pengabuan	
	11. D.I.R. Rawa Asam	
	12. D.I.R. Srindit – Kec. Pengabuan	
	13. D.I.R. Sungai Gebar – Kec.	

JENIS DAERAH IRIGASI	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (Ha)
	Kuala Betara 14. D.I.R. Sungai Rambai – Kec. Senyerang 15. D.I.R. Sungai Raya – Kec. Pengabuan 16. D.I.R. Tebing Tinggi – Kec. Tebing Tinggi	

Sumber Data : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 14/PRT/M/2015

Melihat perkembangan pertanian hingga tahun 2020 ini, sebagian besar desa – desa di setiap kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki lahan pertanian baik lahan pertanian pangan maupun perkebunan, namun tidak diikuti pembangunan irigasi baru yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan air. Bagi desa – desa yang belum tercantum dalam tabel diatas maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengelolaan secara lebih baik, untuk itu perlu ditetapkan/peningkatan jumlah status daerah irigasi guna mendukung kinerja pertanian.

Irigasi ditujukan untuk mengairi lahan pertanian, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat pertanian jenis lahan basah dan pertanian lahan kering, pertanian lahan basah seperti persawahan dan tanaman bakau, dan pertanian lahan kering seperti perkebunan dan tanaman hortikultura. Untuk lahan pangan (persawahan), hampir semua lahan – lahan persawahan tidak terairi dengan cukup.

Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat sampai saat ini masih merupakan prioritas utama kerja pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk karakteristik sumber air bersih yang berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini adalah air leding (PDAM), hingga tahun berjalan ini penyediaan akses perpipaan air bersih ke rumah – rumah penduduk (perpipaan) terus ditingkatkan. Sulitnya mendapatkan air bersih yang layak pada saat musim kemarau terutama bagi masyarakat perkotaan, maka sangat besar harapan masyarakat terhadap akses pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan yang diprogramkan pemerintah daerah.

Sampai dengan tahun 2019, terdapat 11 kecamatan yang sudah tersedia akses perpipaan air bersih, sedangkan 2 kecamatan yang belum adalah Kec. Kuala Betara dan Kec. Seberang Kota. Faktor letak geografis menjadi persoalan utama dalam pembangunan sistem perpipaan air, seperti tidak tersedianya sumber air baku yang bisa dikelola dan kondisi / struktur permukaan daerah yang cukup menyulitkan dalam pembangunan jalur/jalan akses perpipaan, selain itu faktor kebutuhan pendanaan yang cukup besar juga menjadi persoalan.

Tabel. 2.24.
Kecamatan Terdapat Akses Pelayanan Air Bersih Dengan Sistem
Perpiaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kecamatan	Akses Pelayanan Air Bersih	Kapasitas IPA		SR Terpasang
		Liter/detik	Kapasitas SR	
1. Kec. Senyerang	IPA Sei.Rambai	5	400	181
2. Kec. Pengabuan	IPA Teluk Nilau	5	400	760
	IPA Talang Makmur	200		
3. Kec. Seberang Kota	Belum ada IPA	-	-	-
4. Kec. Tebing tinggi	IPA Talang Makmur	100	8.000	726
5. Kec. Tungkal Ulu	IPA Pelabuhan Dagang	10	800	555
6. Kec. Batang Asam	IPA Tanjung Bojo	10	800	586
7. Kec. Merlung	IPA Merlung	10	800	698
8. Kec. Muara Papalik	IPA Rantau Badak	20	1.600	331
9. Kec. Renah Mendaluh	IPA Lubuk Kambing	10	800	370
10. Kec. Betara	Belum ada IPA	-	-	-
11. Kec. Tungkal Ilir	IPA Talang Makmur	200	16.000	5.375
12. Kec. Kuala Betara				
13. Kec. Bram Itam				

Sumber Data : Perumda Air Minum TIRTA PENGABUAN Kab. Tanjung Jabung Barat

1.4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan pada Lampiran I peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018-2038, tercatat jumlah rumah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 72.986 unit, dari 72.986 unit tersebut sebanyak 52.946 unit (72,54%) yang memenuhi syarat sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya, dan sebanyak 20.040 unit (27,46%) yang tidak memenuhi syarat sebagai tempat tinggal/Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

Berdasarkan SK Bupati Nomor 438/Kep.Bup/Bappeda.2017 tentang Penetapan Lokasi Perkumuhan Dan Permukiman Kumuh, ditetapkan lokasi kawasan kumuh menurut kelurahan/kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 2.25.
Luas Kawasan Kumuh Menurut Kelurahan/Kecamatan dalam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Kecamatan	Kelurahan	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan	Legalitas Lahan	Prioritas Penanganan
1.	Tungkal Ilir	Tungkal Harapan	Pusat Kota Kuala Tungkal	122,9	Kumuh Berat	Legal	Prioritas 1
		Patunas					
		Sriwijaya					
		Tungkal IV Kota					
2.	Tungkal Ilir	Tungkal II	Pusat Kota Kuala Tungkal	77,3	Kumuh Berat	Legal	Prioritas 1
		Tungkal III					
		Kampung Nelayan		35,1	Kumuh Sedang		
		Sungai Nibung		9,85			
3.	Bram Itam	Bram Itam Kiri	Pusat Kota Bram Itam Kiri	10,05	Kumuh Sedang	Legal	Prioritas 1
	Luas Total Kawasan Kumuh			255,2			

Sumber Data : SK Bupati Tanjung Jabung Barat No. 438/Kep.Bup/BAPPEDA/2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kawasan kumuh (di perkotaan) sebagian besar berada dalam pusat Kota Kuala Tungkal (Ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat), seperti Kel. Tungkal Harapan, Kel. Patunas, Kel. Sriwijaya, dan Kel. Tungkal IV Kota, dengan luas kumuh 122,9 ha (48,16%) dengan tingkat kekumuhan “kumuh berat”.

Pada tahun 2020 luas kawasan kumuh berkurang dari 255,20 ha (ditetapkan) menjadi 126,50 ha atau berkurang sebesar 50,43%. Beberapa upaya penanganan kawasan kumuh yang telah dilakukan seperti peningkatan/perbaikan jalan, pembangunan drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, rehabilitasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan reahabilitas gedung sekolah/pembangunan RKB, serta peningkatan kesehatan masyarakat.

Tabel. 2.26.
Luas Kawasan Kumuh Menurut Kelurahan/Kecamatan dalam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2016, 2017, dan 2020

No	Uraian	Tahun (Ha)		
		2016	2017	2020
1	Kelurahan Tungkal Harapan	37.48	21,32	40,22
2	Kelurahan Patunas	24.50	11,36	
3	Kelurahan Sriwijaya	32.10	20,23	
4	Kelurahan Tungkal IV Kota	30.32	14,81	
5	Kelurahan Tungkal II	43.15	17,58	67,95
6	Kelurahan Tungkal III	34.15	9,66	
7	Kelurahan Kampung Nelayan	35.10	27,71	5,33
8	Kelurahan Sungai Nibung	7.90	1,12	7,81
9	Kelurahan Bram Itam Kiri	10.50	4,86	5,20
Jumlah		255.20	128,65	126,50

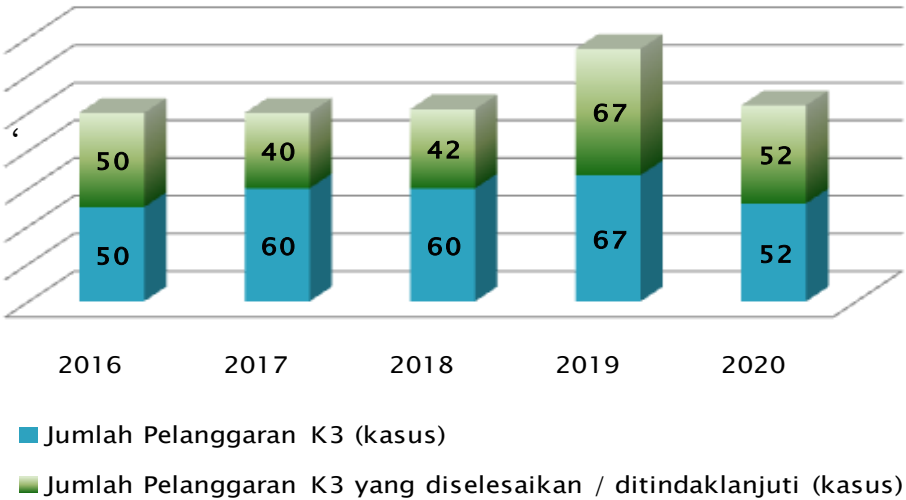
Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Barat

2.4.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan masyarakat

.Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerbitkan peraturan daerah terkait pengaturan sebagai upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban diantaranya Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, Perda No. 9 Tahun 2016 Tentang Pelarangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila, dan lainnya.

Gambar 2.28.

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan keindahan) Kab. Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2016 - 2020



Sumber data : Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Jenis pelanggaran yang banyak ditemukan atau teridentifikasi adalah pelanggaran terhadap ketertiban seperti pelanggaran KTP, usaha warnet, , izin tower, bangunan liar, cafe, hotel/penginapan, pedagang K5. dan pedagang dan pedagang pasar yang berjualan sampai ke bahu jalan, selain pelanggaran ketertiban, ada juga pelanggaran ketenteraman seperti anak jalanan ngelem, komunitas anak punk / gelandangan yang berkumpul atau bertingkah laku yang meresahkan masyarakat.

Tabel.2.27.
Cakupan Layanan Petugas Perlindungan Masyarakat / Pol PP
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Petugas Pol PP	260	260	260	260	260
2	Jumlah Wilayah Kerja	13 kec.	13 kec.	13 kec.	13 kec.	13 kec.

Sumber Data : Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, 20 (dua puluh) Kelurahan, 144 (seratus empat belas) Desa, dengan jumlah personil sebanyak 260 orang, jumlah tersebut tidak bertambah dan berkurang sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dengan jumlah tersebut seluruh wilayah kerja masih dapat terlayani, Kota Kuala Tungkal sebagai ibu kota kabupaten mendapatkan porsi terbanyak keberadaan petugas Polisi Pamong Praja.

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan juga merupakan bagian dari bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 11/KPTS/2000 Tanggal 1 Maret 2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan, bahwa waktu tanggap layanan pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditentukan tidak melebihi 15 (lima belas) menit, dan luasan daerah layanan setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km, diluar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang tidak dapat terlayani/terjangkau.

Adapun cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 10,8%, dimana hanya ada 2 (dua) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu Pos pelayanan pemadam kebakaran Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Pengabuan, sisanya 11 (sebelas) kecamatan lain belum terdapat pos pelayanan pemadam kebakaran.

Tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) untuk pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, penentuan lokasi dan pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air / penyemprotan air pertama). Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 35% di tahun 2016 menjadi 90% ditahun 2020.

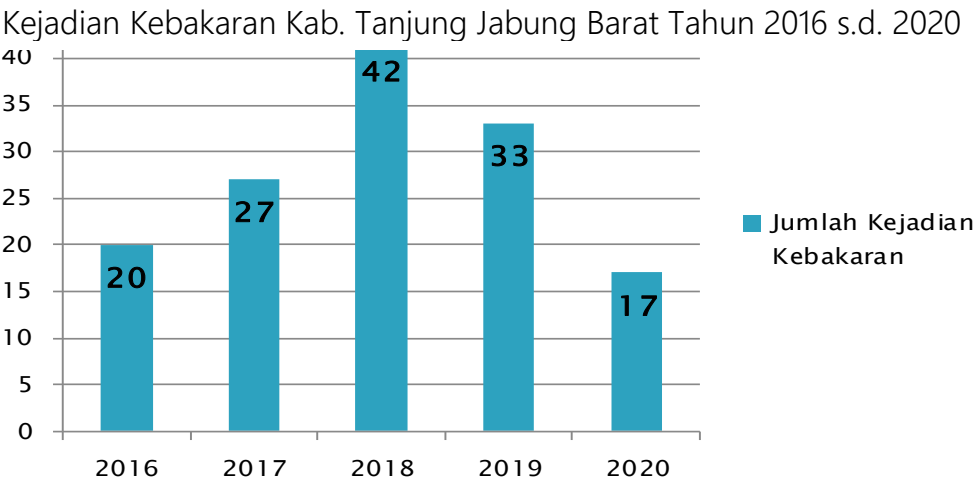
Tabel.2.28
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap
(*Respon Time Rate*) Wilayah Manajemen Kebakaran
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pelayanan wilayah bencana kebakaran kabupaten	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%
2	Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK	35%	44,4%	76,92%	92,85%	90%

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

Jumlah kejadian kebakaran permukiman dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 sampai dengan 2020 berfluktuasi, dari 20 kejadian di tahun 2016 meningkat menjadi 42 kejadian di tahun 2018 kemudian mengalami peurunan ditahun 2019 dan 2020 hingga menjadi 17 kejadian. Sebagian besar penyebab terjadinya kebakaran adalah karena faktor manusia, sering lalainya dan kesengajaan dalam berperilaku/bertindak yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran, seperti lalai terhadap kompor saat memasak, sengaja membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan, tidak awas terhadap penggunaan lilin, salah pemanfaatan sarana listrik, dan lainnya.

Gambar 2.29.



Sumber data : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat

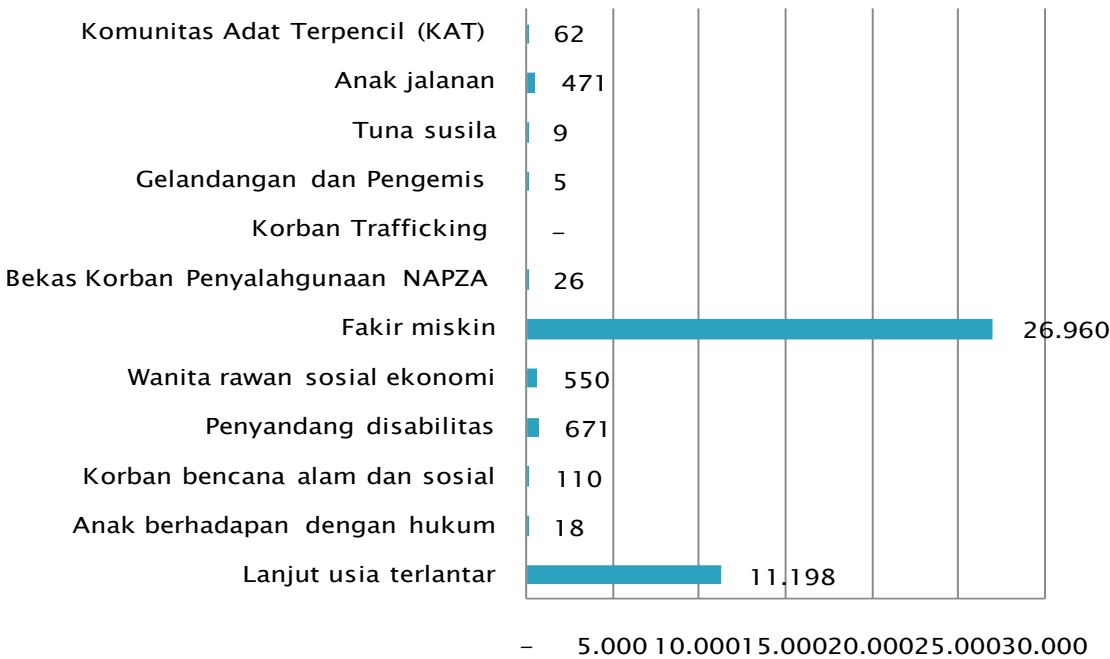
1.4.1.5. Sosial

Pada tahun 2020 fakir miskin merupakan kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan persentase sebesar 69,26%, kemudian diikuti kelompok lanjut usia terlantar sebesar 27,94%. Kemiskinan adalah permasalahan yang sangat kompleks memerlukan

upaya penanganan yang komprehensif dan jelas, dan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri namun harus bersama – sama.

Gambar 2.30.

Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2020



Sumber data : Dinas Sosial Kab. Tanjung Jabung Barat

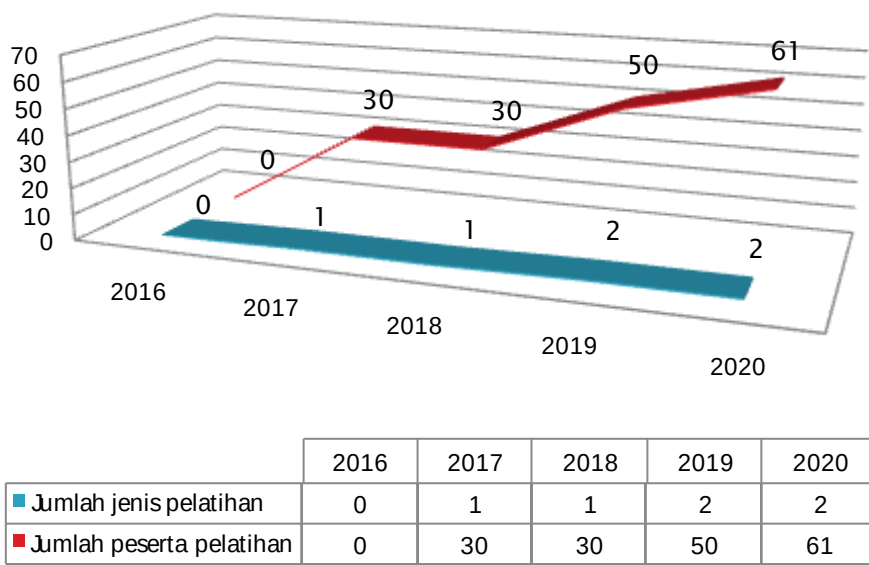
2.4.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib (Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar)

2.4.2.1. Tenaga Kerja

Upaya - upaya pengurangan jumlah pengangguran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan melalui perangkat daerah yang menangani urusan tenaga kerja diantaranya melalui Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan peningkatan tenaga kerja dan melalui penyelenggaraan pelatihan bagi penduduk usia kerja. Melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dapat menempatkan tenaga kerja lokal ke dunia usaha. Sampai sekarang ini hanya mekanisme AKL saja yang baru diterapkan sedangkan mekanisme AKAD masih dalam proses pembahasan. Capaian penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL dari tahun 2016 sampai dengan 2019 berjumlah 1.088 orang, sedangkan capaian tenaga kerja yang dilatih berjumlah 110 orang.

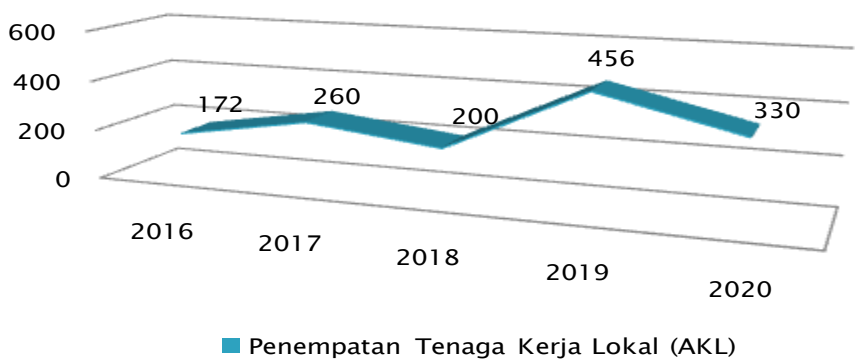
Bila dikorelasikan antara capaian di tahun 2018 maupun 2019 terhadap jumlah penduduk usia kerja yang tidak bekerja / pengangguran di tahun 2018 yaitu sejumlah 4.936 orang (Tingkat Pengangguran Terbuka = 2,46%) dapat dikatakan hasil dari upaya tersebut diatas dalam pengurangan jumlah pengangguran tidak signifikan.

Gambar 2.31.
Jumlah Jenis Pelatihan dan Jumlah Peserta Pelatihan Tahun 2016 s.d. 2020
Kab. Tanjung Jabung Barat



Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat

Gambar 2.32.
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2016 s.d. 2020 Kab. Tanjung Jabung Barat



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat

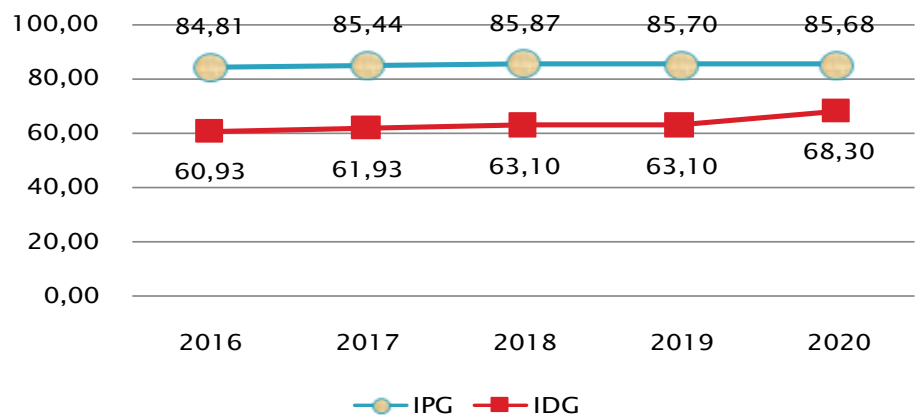
2.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;

Salah satu indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ingin dicapai adalah kesetaraan gender, perlu upaya bagi negara Indonesia umumnya dan kabupaten/kota khususnya dalam pencapaiannya. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2020 pada angka 85,68, belum mencapai 100 artinya masih terdapat kesenjangan dalam pembangunan manusia laki – laki dan perempuan, dimana peran kaum laki – laki dalam aktivitas publik seperti bersekolah dan bekerja lebih dominan daripada kaum perempuan.

Untuk melihat sejauh mana peranan aktif perempuan dalam kehidupan baik dibidang ekonomi maupun politik dapat dilihat dari capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG kab. Tanjung Jabung Barat terus mengalami peningkatan selama 5 tahun, dari 60,93 di tahun 2016 menjadi 68,30 di tahun 2020, menunjukkan ada peningkatan keterlibatan perempuan di lembaga legislatif, sebagai pimpinan / pejabat dalam struktur organisasi, dan meningkatnya penghasilan perempuan.

Gambar 2.33.

Perkembangan Indeks Pembangunan gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020

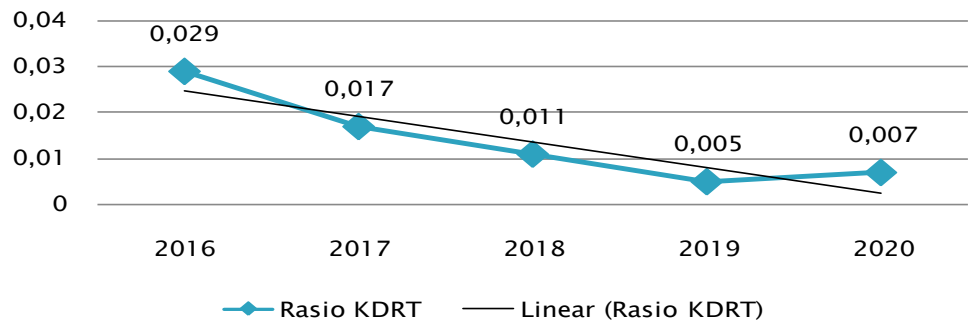


Sumber : Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

Berdasarkan data Sistem Informasi Online (Simfoni) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kab. Tanjung Jabung Barat terus mengalami penurunan yang cukup signifikan mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020, dari rasio KDRT sebesar 0,031 di tahun 2016 menurun hingga menjadi 0,007 di tahun 2020 atau sebesar 83,87%. Penurunan jumlah kasus KDRT diantaranya disebabkan adanya budaya kearifan lokal dimana korban kekerasan tidak mengadukan ke pihak berwenang seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P2TP2A), dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres, serta telah tersosialisasinya undang – undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Gambar 2.34.

Perkembangan Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020



Sumber : Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat

Jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2020, dengan rata – rata berjumlah 34,4 kasus pertahunnya. Untuk jumlah perempuan korban kekerasan mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 maka Rasio Kekerasan terhadap perempuan ikut menurun, Dari semua kasus yang terjadi telah ditindaklanjuti /diselesaikan baik secara hukum maupun kekeluargaan. Terbentuknya unit – unit layanan pengaduan tindak kekerasan seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres, unit layanan di Puskesmas dan RSUD, unit Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang berada di setiap kecamatan dan kabupaten sangat membantu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Perhatian Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat terhadap anak juga melalui penerbitan Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2018 tentang Kabupaten layak Anak (KLA), dimana pembangunan kabupaten Tanjung Jabung Barat mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Tabel.2.29.
Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (TKPA) dan tindaklanjutnya Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus TKPA	34	38	35	28	25
2	Jumlah perempuan korban kekerasan	46	29	41	20	30
3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan	30	18	25	12	18

Sumber Data: Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat

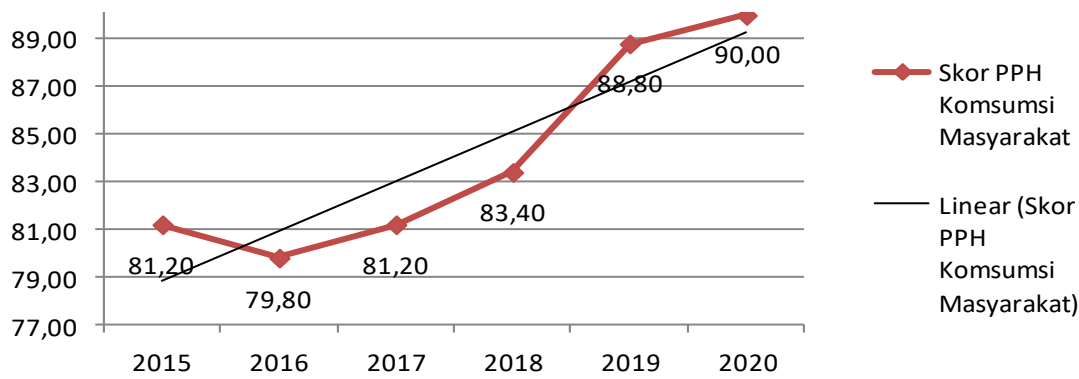
1. Pangan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100.

Skor PPH Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu lima tahun dari 2015 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan, yaitu dari 81,20 menjadi 90,00 namun masih dibawah angka ideal 100, hal ini menunjukkan konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam dimana masih tingginya konsumsi padi – padian, masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur, buah, kacang – kacangan, dan umbi – umbian.

Gambar 2.35.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Komsumsi Masyarakat
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 s.d. 2020



Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat

Kelompok padi – padian yaitu beras dan jagung, merupakan kelompok tertinggi penyumbang energi selain kelompok minyak dan lemak. Dari sebelas komoditi pangan utama tersebut dibawah ini yang dihasilkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat empat komoditi yang sudah mampu mencukupi kebutuhan penduduk, yaitu beras, jagung, daging unggas, dan ikan.

Tabel.2.30.
Ketersediaan Pangan Utama Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun 2015 s.d. 2020

No	Uraian	Ketersediaan Pertahun (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	Pangan Nabati					
	1. Beras	28.517	26.649	30.501	27.152	26.141
	2. Jagung	2.817	1.801	1.710	2.504	2.823
	3. Kedelai	68	1.416	1.920	2.006	1.901
	4. Kacang Tanah	10	117	6	3	4
	5. Ubi Kayu	3.541	3.017	3.138	2.977	3.450
	6. Ubi Jalar	174	128	973	1.080	1.301
	7. Sayuran	6.661	5.912	3.612	3.673	3.637
	8. Buah-buahan	43.865	5.735	37.277	37.911	37.911
II	Pangan Hewani					
	1. Daging Sapi/Kerbau	310	240	253	257	257
	2. Daging Ayam	3.112	3.832	3.914	3.908	4.381
	3. Telur	878	1.039	791	805	818
	4. Susu	-	752.439	818	-	831
	5. Ikan	16.107	21.619	23.979	24.387	23.125

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat, 2020

Adapun gambaran ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi dapat ditunjukkan dari hasil Neraca Bahan Makanan (NBM), di tahun 2020 ketersediaan bahan pangan energi Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 3.558 kkal/kapita/hari sudah melampaui angka anjuran atau

angka ideal nasional yaitu 2.400 kkal/kapita/hari. Namun belum berimbang dimana ketersediaan energi tersebut lebih didominasi oleh pangan nabati sebesar 3.258 kkal/kapita/hari (95%), dan pangan hewani hanya sebesar 183 kkal/kapita/hari (5%).

Berdasarkan data terakhir tahun 2020, ketersediaan protein Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 66,00 gram/kapita/hari, angka ini telah memenuhi bahkan melebihi angka kecukupan protein yang di anjurkan secara nasional yaitu 63 gram/kapita/hari. Dimana ketersediaan protein lebih didominasi bersumber dari protein nabati sebesar 66%, dan bersumber dari pangan hewani sebesar 34%.

Tabel.2.31.
Ketersediaan Energi dan Protein
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Energi (kkal)	4.189	2.146	3.724	3.442	3.588
2	Protein (Gram) :					
	- Nabati	51,10	41,94	45,36	44,05	42,98
	- Hewani	17,12	17,13	23,89	25,60	23,02
	Total Protein (gram)	68,22	56,95	69,25	69,65	66,00

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan hasil analisis NBM dalam emapt tahun terakhir periode 2016-2020, bahwa rata-rata kuantitas ketersediaan pangan perkapita perhari untuk energi mencapai 3.418 kkal/kapita/hari dan protein 66,01 gram, sudah melebihi angka rekomendasi hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII untuk ketersediaan energi 2.400 kilokalori dan protein 63 gram.

2.4.2.5. Lingkungan Hidup

Sesuai Undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah disetiap tingkatan wajib menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dalam UU tersebut pada pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem masih banyak lagi tujuan lainnya.

Sejak diberlakukannya Undang – undang nomor 32 tahun 2009 sampai dengan saat ini Kab. Tanjung Jabung Barat belum menyusun dokumen RPPLH. Beberapa hal yang menjadi alasan bagi perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup terhadap belum tersusunnya RPPLH seperti besarnya biaya penyusunan, belum cukupnya sumber daya manusia yang berkompeten menurut bidangnya, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kerja penyusunan RPPLH.

Tabel.2.32.
Ketersediaan Dokumen RPPLH Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016 s.d. 2020

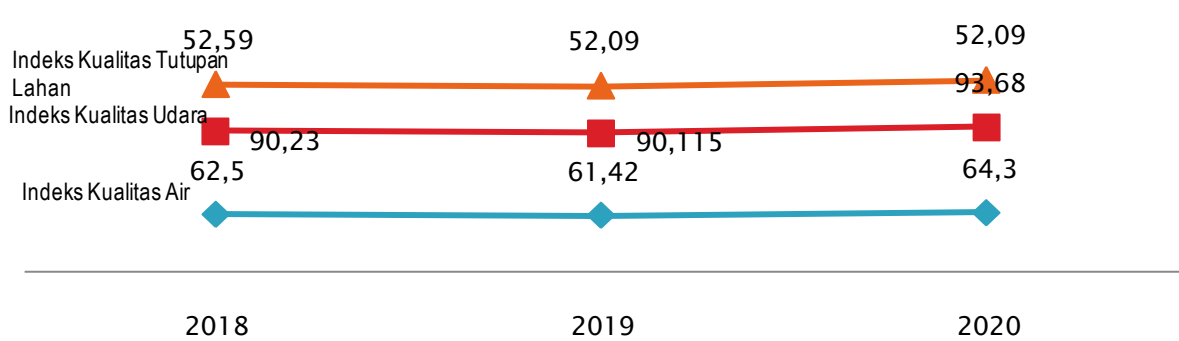
Ketersediaan Dokumen RPPLH	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Hasil pengukuran kualitas air (IKA) dan udara (IKU) dalam wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018 s.d. 2020, menunjukkan kualitas air berada dalam klasifikasi sedang dan kualitas udara dalam klasifikasi baik/sangat baik. Dimana pengukuran kualitas udara tersebut dilakukan bukan pada saat terjadi kebakaran hutan /lahan. Pada tahun terakhir 2020 terdapat 38 perusahaan PMA/PMDN dengan skala usaha sedang-besar yang beroperasi dalam wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat, cara pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang selenggarakan perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap kualitas air, udara, dan tutupan lahan.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) Kab. Tanjung Jabug barat masih berpedoman pada hasil pengukuran ditingkat provinsi Jambi, pada tahun 2020 IKTL terjadi penurunan dari 52,59 ditahun 2018 menjadi 52,09, secara umum penurunan IKTL disebabkan berkurangnya luasan tutupan lahan hijau akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan infrastruktur yang mana tak sebanding bertambahnya luas tutupan melalui aktivitas penghijauan.

Gambar 2.36.
Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 s.d. 2020



Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat , 2021

Tabel.2.33.
Nilai Klasifikasi Mutu Air Menurut PP 82/2001
Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Skor	Klasifikasi	Kesesuaian dengan nilai Kreteria Mutu Air dalam PP 82/2001
$100 \leq I < 90$	Sangat Baik	
$90 \leq I < 80$	Baik	Kelas I
$80 \leq I < 70$	Cukup Baik	Kelas II
$70 \leq I < 51$	Sedang	Kelas III
$51 \leq I < 36$	Marginal	Kelas IV
$36 \leq I < 0$	Buruk	

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat

Tabel.2.34.
Nilai Klasifikasi Mutu Udara Menurut PP 41/1999
Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Skor	Klasifikasi
$90 < X \leq 100$	Sangat Baik
$70 < X \leq 90$	Baik
$50 < X \leq 70$	Cukup
$30 < X \leq 50$	Kurang
$X < 30$	Sangat Kurang

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat

Sampah yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat adalah kategori sampah rumah tangga yang dapat terangkut untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Jumlah sampah yang tertangani terus meningkat dari sejumlah 10.800 ton di tahun 2017 meningkat menjadi 16.425 ton di tahun 2020. Meningkatnya jumlah sampah yang ditangani seiring dengan bertambahnya ketersediaan sarana penanganan sampah seperti bak – bak sampah dan kendaraan pengangkut sampah.

Tempat pembuangan sampah (TPS) yang ada belum dikelola dengan pola *Reduce, Reuse, Recycle* (3R), Berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dimana penyelenggaraan TPS menggunakan pola 3R mutlak harus dilakukan, pengolahan sampah pada TPS 3R adalah untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

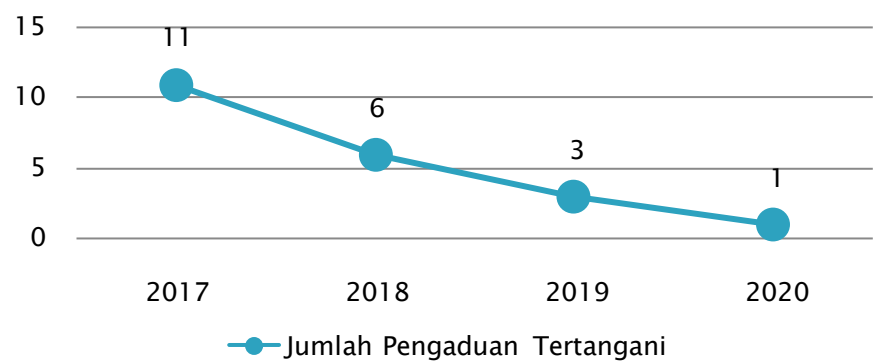
Tabel.2.35.
Jumlah sampah yang ditangani dan terkelola 3R
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 s.d. 2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampah yang ditangani	10.800 ton	14.400 ton	14.887 ton	16.425 ton
2	Jumlah sampah yang terkelola 3R	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat

Terus meningkatnya kesadaran baik dunia usaha maupun masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, salah satu indikator penurunan jumlah pengaduan terkait lingkungan hidup yang masuk dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dapat mencerminkan bahwa telah terjadi penurunan kasus / perilaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Gambar 2.37.
Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup Tertangani
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 s.d. 2020



Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat , 2021

2.4.2.6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Data kependudukan yang digunakan adalah data teregistrasi yang diolah dan dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB) di Server Data Center Pusat oleh Kementerian Dalam Negeri, dan data kependudukan dari lintas sektor terkait.

Untuk rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2020 adalah 98,30 persen artinya belum seluruh Kepala Keluarga yang ada telah memiliki Kartu Keluarga, hanya 1,7% yang belum memiliki KK, hal ini menggambarkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya mendaftarkan diri sebagai penduduk dan memiliki dokumen kependudukan.

Tabel.2.37.
Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dalam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah yang memiliki KK	Jumlah yang belum memiliki KK	Rasio Kepemilikan KK (%)
1. Tungkal Ulu	4.244	4.124	120	97,17
2. Merlung	5.154	5.029	125	97,57

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah yang memiliki KK	Jumlah yang belum memiliki KK	Rasio Kepemilikan KK (%)
3. Batang Asam	9.634	9.421	213	97,79
4. Tebing Tinggi	10.319	10.143	176	98,29
5. Renah Mendaluh	4.579	4.483	96	97,90
6. Muara Papalik	3.125	3.073	52	98,34
7. Pengabuan	7.956	7.888	68	99,15
8. Senyerang	7.704	7.602	102	98,68
9. Tungkal Ilir	21.584	21.204	380	98,24
10. Bram Itam	5.610	5.522	88	98,43
11. Seberang Kota	2.849	2.797	52	98,17
12. Betara	8.695	8.582	113	98,70
13. Kuala Betara	4.192	4.153	39	99,07
Jumlah	95.645	94.021	1.624	98,30

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk disuatu wilayah administrasi Indonesia. Berdasarkan Undang – undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, KTP el wajib dimiliki oleh semua penduduk yang berusia diatas 17 tahun keatas atau mereka yang berumur dibawah 17 tahun tetapi sudah pernah menikah, dimana KTP el berlaku seumur hidup. Pada tahun 2020 rasio kepemilikan KTP dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 99,82% artinya masih ada sebesar 0,18% penduduk wajib KTP belum memiliki KTP.

Tabel.2.38.
Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020

Kecamatan	Wajib KTP	Sudah memiliki KTP	Belum memiliki KTP	Rasio Kepemilikan KTP (%)
1. Tungkal Ulu	9.730	9.812	-82	100,84
2. Merlung	11.087	11.023	64	94,42
3. Batang Asam	21.707	20.823	884	95,93
4. Tebing Tinggi	23.977	23.988	-11	100,05
5. Renah Mendaluh	10.221	10.105	116	98,87
6. Muara Papalik	7.030	7.091	-61	100,87
7. Pengabuan	19.177	19.250	-73	100,38
8. Senyerang	18.190	17.860	330	98,19
9. Tungkal Ilir	52.315	53.107	-792	101,51
10. Bram Itam	13.350	13.571	-221	101,66
11. Seberang Kota	6.728	6.923	-195	102,90
12. Betara	20.243	19.739	504	97,51
13. Kuala Betara	9.743	9.802	-59	100,61
Jumlah	223.498	223.094	404	99,82

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

2.4.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih memfokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pemberdayaan masyarakat ini mendukung upaya-upaya penurunan angka kemiskinan. Selain fokus pada bidang ekonomi pemberdayaan masyarakat juga menyentuh bidang sosial budaya, yang difokuskan pada penguatan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai sosial budaya, penguatan kelembagaan pemerintahan desa, dan penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan masyarakat desa, serta peningkatan taraf pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta lainnya.

Salah satu upaya pemerintah daerah bersama masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan peran keluarga dan perempuan dalam pembangunan yaitu melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).

Tabel 2.39.
Jumlah Tim Penggerak PKK dari Tingkat Kabupaten sampai
Tingkat Kelompok Dasa Wisma, Tahun 2017 – 2020

No.	Tingkatan PKK	Jumlah kelompok			
		2017	2018	2019	2020
1.	TP PKK Kabupaten	1	1	1	1
2.	TP PKK Kecamatan	13	13	13	13
3.	TP PKK Kelurahan / Desa	134	134	134	134
4.	Kelompok PKK Dusun / Lingkungan	167	309	309	309
5.	Kelompok PKK RT	779	1126	1126	1126
6.	Kelompok Dasawisma	1528	2674	2674	2674

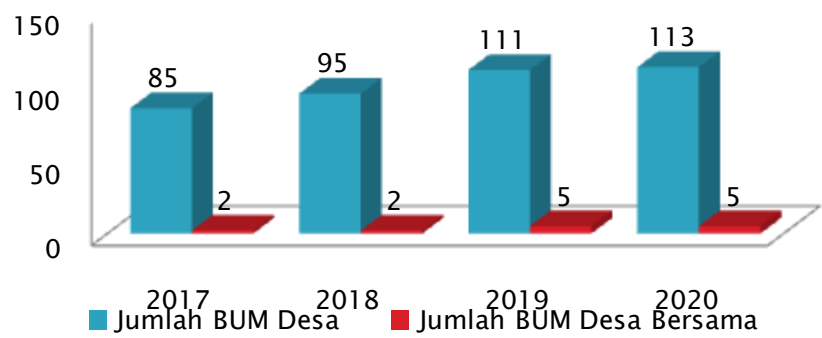
Sumber Data: Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

Ada 148 TP PKK dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, keseluruhannya aktif dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat berpedoman pada 10 program pokok PKK seperti kegiatan penyuluhan peraturan perundang – undangan, pengadaan lomba – lomba terkait kegiatan 10 program pokok PKK, pembinaan, pelatihan peningkatan keterampilan, dan kegiatan memperingati hari PKK dan BBGRM.

Pengembangan potensi dan sumber daya perdesaan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan seperti pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa), Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesa Bersama), Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan / Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes / Posyan TTG). Posyantekdes/Posyan TTG ini dikembangkan berbagai teknologi ramah lingkungan yang ditujukan untuk mengembangkan potensi an sumber daya yang ada di sekitar masyarakat perdesaan tersebut.

Gambar 2.38.

Jumlah BUM Desa dan BUM Desa Bersama dalam
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 s.d. 2020



Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanjung Jabung Barat

Pada tahun 2020 dari 114 desa yang ada, terdapat lima desa yang membentuk BUM Desa yaitu Desa Penyabungan, Desa Muara Seberang, dan Desa Pulau Pauh. Sedangkan untuk BUM Desa Bersama yang terbentuk baru ada lima, dari lima BUM Desa Bersama tersebut hanya tiga BUM Desa Bersama yang aktif yaitu BUM Desa Bersama di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Betara, dan Kecamatan Bram Itam, yang belum aktif yaitu di Kecamatan Merlung, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Tungkal Ilir, dan Kecamatan Tungkal Ilir.

2.4.2.8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;

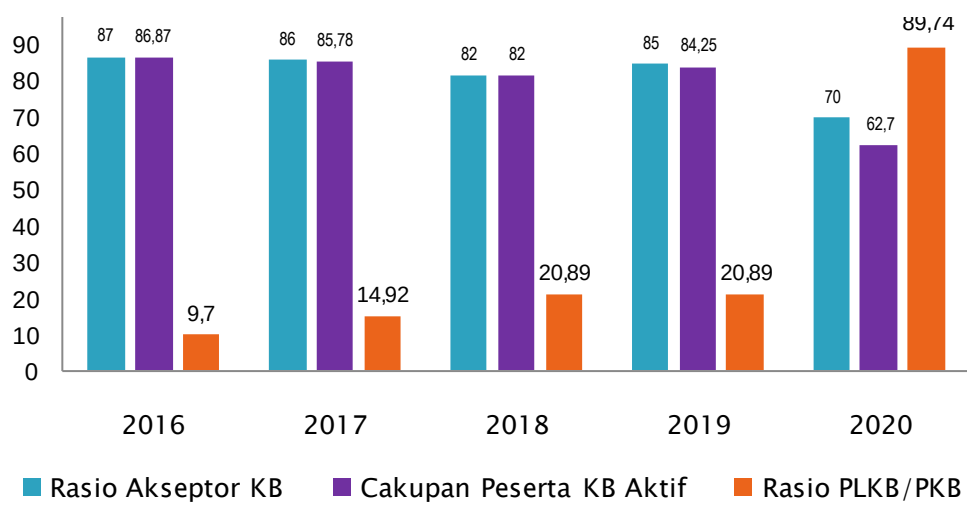
Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB, besaran angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan ada atau tidaknya pengendalian jumlah penduduk. Jumlah anggota masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 berfluktuasi, dengan rata – rata rasio akseptor KB sebesar 86,4%, artinya tidak semua pasangan usia subur sebagai akseptor KB.

Peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan atau obat kontrasepsi dalam kurun tahun 2016 sampai dengan 2020 juga berfluktuasi, dengan rata - rata pertahunnya sebesar 86,08%, artinya tidak semua pasangan menikah/pasangan usia subur terus menerus menggunakan alat dan atau obat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan.

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) diperlukan tenaga PLKB/PKB yang memadai. Rasio ideal tenaga PLKB/PKB adalah 1 orang membina 2 desa/kelurahan. Pada tahun 2020 terakhir ada 28 orang PLKB/PKB di Kab. Tanjung Jabung Barat, sedangkan desa/kelurahan berjumlah 134, maka kondisi ideal ketersediaan PLKB/PKB adalah 67 orang.

Gambar 2.39.

Perkembangan Rasio Akseptor KB, Cakupan Peserta KB Aktif, dan Rasio Petugas Lapangan KB / Penyuluh KB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020



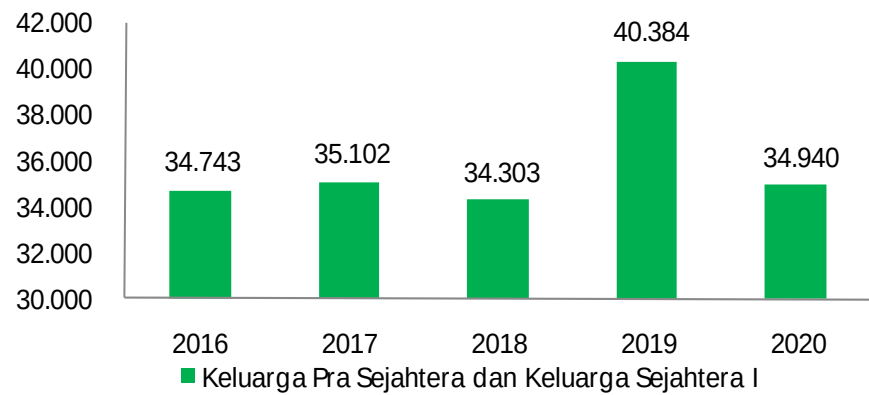
Sumber Data : Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat

Keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, transportasi, dan interaksi dengan lingkungan tempat tinggal.

Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I selama kurun waktu tahun 2016 sampai 2020 berfluktuasi namun pada tahun terakhir 2020 terjadi penurunan dari 40.384 KK di tahun 2019 menjadi 34.940 KK ditahun 2020 dari jumlah KK sebanyak 73.975.

Gambar 2.40.

Perkembangan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020



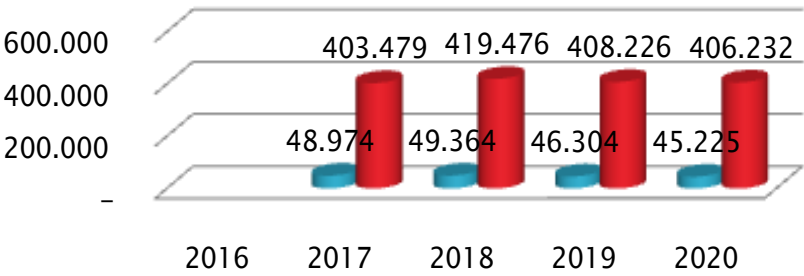
Sumber Data : Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat

2.4.2.9. Perhubungan

Arus penumpang darat maupun laut (datang dan pergi) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfluktuasi dalam 4 tahun terakhir, 2018 sampai dengan 2020, dengan rata – rata arus penumpang angkutan umum darat dan laut sebesar 47.467 orang dan 406.232 orang. Penurunan arus penumpang baik darat maupun laut, hal ini sebagai salah satu indikator bahwa akses transportasi jalan darat semakin terbuka dan sebagian masyarakat mulai menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilisasinya.

Gambar 2.41.

Jumlah Arus Penumpang angkutan Umum Darat dan laut
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020



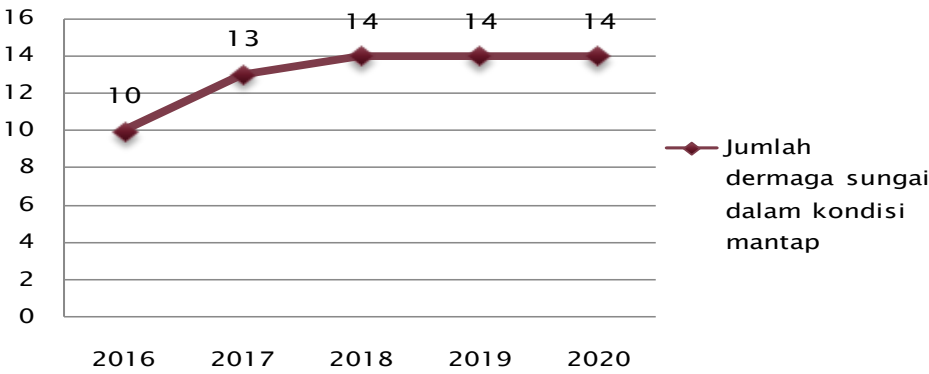
■ Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Darat

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

Dengan kondisi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memiliki dua sungai besar dan puluhan anak sungai maka keberadaan dermaga - dermaga baik yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah sangatlah mendukung kelancaran kegiatan perekonomian berbasis sungai. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 14 (empat belas) dermaga sungai dalam kondisi mantap yang tersebar di beberapa desa/kecamatan.

Gambar 2.42.

Jumlah Dermaga Sungai Dalam Kondisi Mantap
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020



Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

Pelabuhan Ro-Ro adalah salah satu dermaga penyeberangan orang dan barang dengan menggunakan kapal Ro-Ro, ditahun 2020 terdapat tiga kapal Ro-Ro yang beroperasi melayani angkutan orang dan barang/kendaraan dari Kuala Tungkal menuju Dabo Singkep dan Batam.

Gambar 2.423
Pelabuhan Ro-Ro Kuala Tungkal –
Kab. Tanjung Jabung Barat



Gambar 2.44.
Aktivitas Bongkar di Pelabuhan Ro-Ro



Sumber gambar : Google

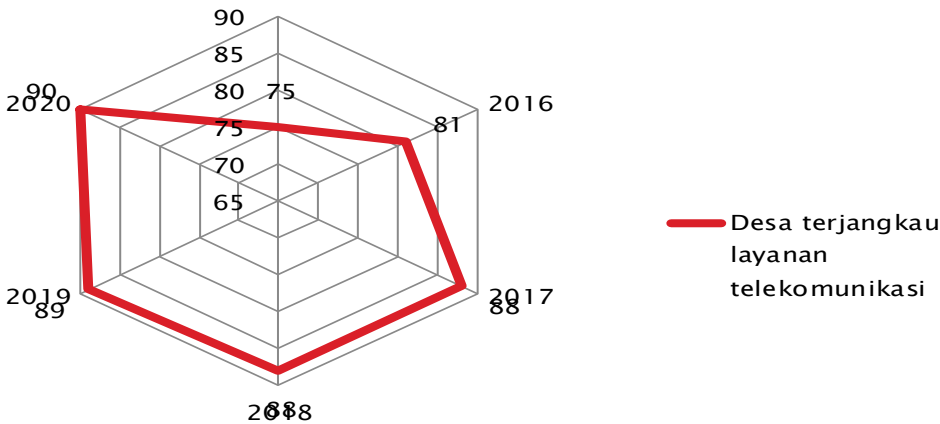
2.4.2.10. Komunikasi Dan Informatika;

Di era kemajuan teknologi komunikasi dan informatika sekarang ini, penggunaan akan media telekomunikasi atau telepon seluler dan menggunakan internet sudah merupakan suatu kebutuhan dalam berbagai macam aktivitas dalam kehidupan sehari – hari. Bagi desa, dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika secara benar dapat memberi dampak kemajuan bagi desa tersebut.

Cakupan layanan telekomunikasi Kab. Tanjung Jabung Barat terus bertambah, dari 75 desa di tahun 2015 menjadi 90 desa ditahun 2020 (78,94%), dan masih ada 24 desa (21,05%) dalam wilayah kab. Tanjung Jabung Barat yang belum terjangkau layanan telekomunikasi. Desa – desa yang belum terjangkau tersebut sebagian besar berada dalam kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Senyerang dan Kecamatan Renah Mendaluh.

Gambar 2.45.

Cakupan Layanan Telekomunikasi Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 s.d. 2020



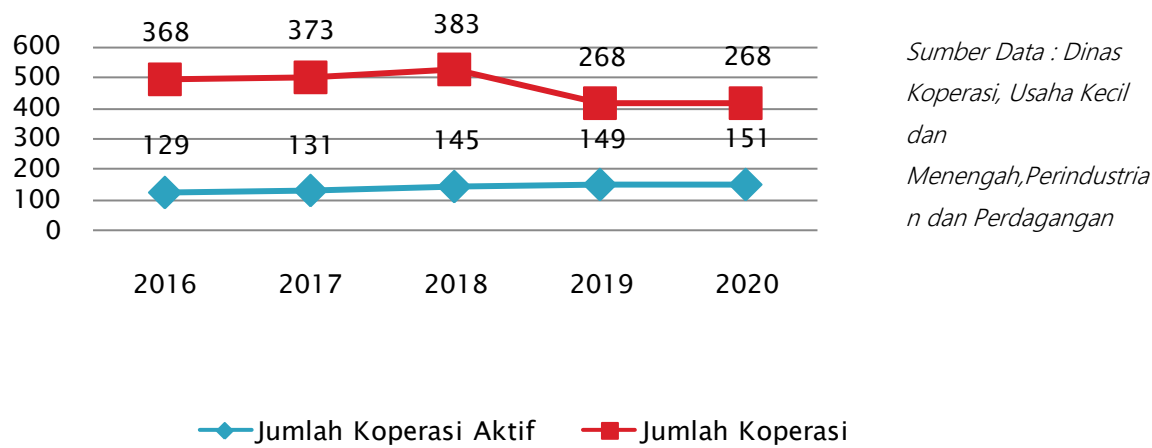
Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Tanjung Jabung Barat

2.4.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Hakekatnya koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, yang diharapkan ikut andil besar dalam aktivitas perekonomian terutama di daerah pedesaan. Kenyataannya saat ini struktur perekonomian baik perkotaan maupun pedesaan terlalu didominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, banyak koperasi – koperasi yang didirikan tidak dapat aktif dalam masa yang lama, dan tidak terkelola sebagai usaha dengan karakteristik modern, professional dan bagus yang seharusnya mampu bersaing dengan usaha BUMN dan swasta.

Gambar 2.46.

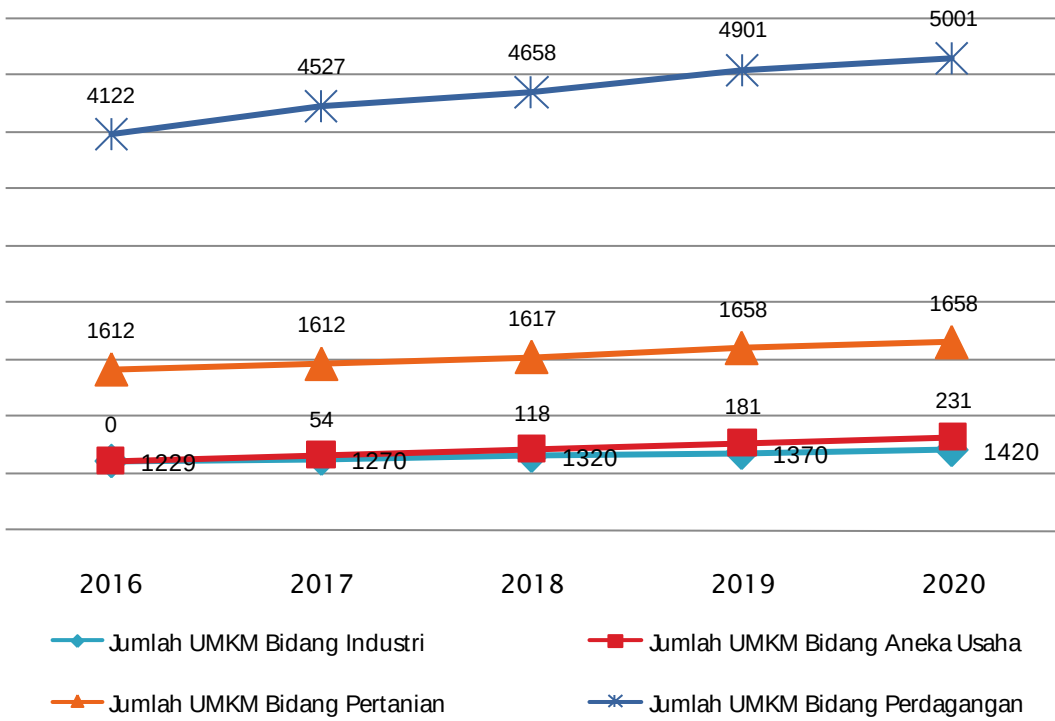
Jumlah Koperasi Aktif Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020



Dalam perkembangannya dari tahun 2015 sampai dengan 2017, jumlah koperasi aktif dihitung secara rata- rata tidak sampai setengahnya dari jumlah koperasi yang terdaftar, yaitu hanya sebesar 34,57%. Pada tahun 2017 dilakukan pembubaran koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan pada surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor.65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017 tentang Pembubaran Koperasi Tidak Aktif Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebanyak 114 koperasi. Pada terakhir tahun 2020 koperasi aktif berjumlah 151 koperasi atau sebesar 56,34%.

Gambar 2.47.

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri, dan Aneka Usaha Aktif Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020



Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perekonomian daerah banyak melahirkan pelaku usaha baru, ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah UMKM setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Saat ini UMKM adalah merupakan kelompok usaha dengan jumlah terbesar dan berdampak besar bagi kehidupan orang banyak, sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan terhadap UMKM.

Pada tahun 2016 UMKM berjumlah 6013 terus bertambah setiap tahunnya hingga menjadi 8.310 di tahun 2020, dengan rata – rata pertambahan pertahunnya selama kurun waktu 5 tahun sebanyak 337 UMKM atau 4,54%. UMKM bidang perdagangan adalah UMKM dengan jumlah terbanyak, kemudian diikuti UMKM bidang pertanian, UMKM bidang industri, dan UMKM bidang aneka usaha adalah yang paling sedikit.

Tabel.2.40
Daya Serap Tenaga Kerja UMKM Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016 s.d. 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Daya serap tenaga kerja	8.814	9.221	9.959	10.168	10.268

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Barat

Peningkatan jumlah UMKM memberi dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, setiap UMKM yang berdiri sudah tentu memperdayakan sumber daya manusia dalam aktivitas pengelolaannya. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2015 sebesar 7.551 orang dan bertambah setiap tahunnya menjadi 10.268 orang pada tahun 2020, dengan rata – rata peningkatan pertahunnya sebesar 364 orang.

2.4.2.12 Penanaman Modal;

Penyelenggaraan penanaman modal diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif dengan pelayanan perizinan usaha yang mudah, cepat dan transparan; pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah. Sedangkan penciptaan iklim investasi yang kondusif diharapkan mampu merangsang tumbuhnya usaha-usaha baru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja. Dengan menerapkan Sistem *Online Single Submission (OSS)* bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, secara langsung memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Terus bertambahnya jumlah kegiatan/usaha PMDN/PMA dari 14 PMDN dan 5 PMA di tahun 2017 menjadi 34 PMDN dan 8 PMA di tahun 2020, ini menunjukkan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari faktor sumber daya alam dan faktor dukungan investasi menjadi daya tarik bagi investor untuk membuka kegiatan/usaha, Peningkatan daya serap tenaga kerja akan sejalan dengan peningkatan investasi usaha, karena dengan adanya kegiatan/usaha baru pasti akan membutuhkan tenaga kerja. Rata – rata tenaga kerja yang diserap seiring dengan peningkatan jumlah PMDN/PMA dari tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah 2758 orang.

Tabel.2.41.
Perkembangan PMDN / PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 s.d. 2020

No .	Uraian		Tahun			
			2017	2018	2019	2020
1	Keberadaan PMDN/PMA :					
	Jumlah PMDN	14	20	30	34	
	Jumlah PMA	5	8	8	8	
2	Realisasi Investasi :					
	PMD N	Rp.1.375.277.065.250,99	Rp.462.757.301.536,00	Rp.536.641.405.699,63	Rp.532.625.592.018,89	
	PMA	US\$51,033,927.66	US\$452,562.57	US\$3,704,615.88	US\$120,332,93	
3	Penyerapan Tenaga Kerja :					
	TKI	2.880	3.141	3.636	1.376	
	TKA	46	61	3	-	

Sumber Data : DPMPSTSP Kab.Tanjung Jabung Barat, 2021

Penambahan nilai investasi PMDN/PMA berasal dari kegiatan/usaha yang bergerak disektor Primer Tanaman Pangan dan

Perkebunan, Sektor Sekunder pada sektor industri Minyak Kelapa Sawit (CPO), Industri Minyak Mentah Inti (Crude Palm Kernel Oil), sektor industri kayu dan industri kertas, sektor Tersier Sektor Listrik Gas dan Air serta dari sektor Perdagangan.

2.4.2.13 Kepemudaan Dan Olah Raga;

Pemuda adalah bagian terpenting dalam sejarah baik kemerdekaan Indonesia maupun pembangunan, peran pemuda lewat ide, gagasan, dan pergerakan ikut memberikan sumbangsih dalam kemajuan zaman. Dari 29 organisasi pemuda yang ada di Kab. Tanjung Jabung barat tidak semuanya aktif, pada tahun 2020 hanya ada 9 organisasi pemuda yang aktif atau sebesar 30%.

Adapun 9 organisasi tersebut adalah :

- 1. LSM Ikatan Pemuda Bersatu (LSM IPB)
- 2. Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor)
- 3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
- 4. Gerakan Muda Sriwijaya (GM Sriwijaya)
- 5. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
- 6. Ikatan Pemuda Karya (IPK)
- 7. Ikatan Pemuda Indonesia (IPI)
- 8. Forum Peduli Remaja Jambi (FPRJ)
- 9. Pramuka

Tabel.2.42.
Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda
Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	9	9	9	9	9
2	Jumlah organisasi pemuda	29	29	29	29	29
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	30%	30%	30%	30%	30%

Sumber Data : DISPARPORA Kab.Tanjung Jabung Barat, 2021

Selain dari organisasi kepemudaan sebagaimana tersebut diatas, terdapat pemuda Kab. Tanjung Jabung Barat yang berprestasi baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional diantaranya :

- Juara ke-3 (ketiga) Nasional Pemuda Pelopor bidang Inovasi dan Teknologi, atas nama Khairunnisa Akmalia Putri
- Berjumlah 4 (empat) orang anggota Paskibraka Kab. Tanjung Jabung Barat yang lulus tingkat provinsi Jambi, dan 1 (satu) orang dari keempat orang tersebut yang masuk dalam Paskibraka tingkat nasional.

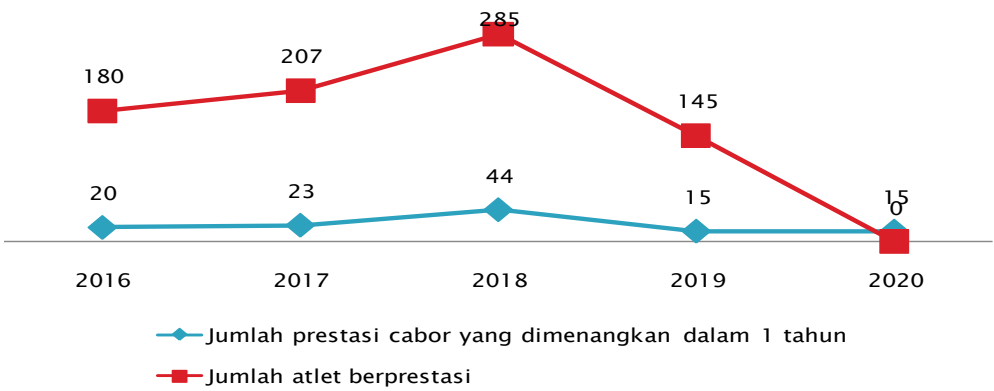
Prestasi cabang olahraga dan atlet berprestasi Kab. Tanjung Jabung barat selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 berfluktuasi, namun perolehan terakhir pada tahun 2019 lebih kecil dibanding tahun – tahun sebelumnya, untuk prestasi cabang olahraga

yang dimenangkan dalam 1 tahun berjumlah 15 prestasi, dan atlet berprestasi berjumlah 145 atlet. Namun pada tahun 2020 tidak ada event kejuaraan yang diselenggarakan yang disebabkan adanya pandemi Covid-19.

Adapun nama – nama kejuaraan yang sering diikuti seperti PARPROV, PEPAPROV, POPDA, Gubernur Cup, Piala Menpora, KEJURNAS (kewenangan provinsi), KEJURDA, dan kejuaraan diluar provinsi.

Gambar 2.48.

Jumlah Prestasi Cabor yang dimenangkan dalam 1 tahun dan jumlah atlet berprestasi Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020



Sumber Data : DISPAPORA Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

2.4.2.14. Statistik;

Urusan statistik daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Data dan informasi yang dikeluarkan oleh BPS adalah data dan informasi statistik dasar, sedangkan untuk statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 ada empat statistik dasar yang selalu dikeluarkan oleh BPS Kab. Tanjung Jabung Barat yaitu Buku Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Dalam Angka, dan Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat. Selain statistik dasar ada juga statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah seperti Bappeda bersama BPS mengeluarkan buku seperti Indeks Kemahalan Harga Konstruksi (IKHK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel.2.43.

Ketersediaan Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020

No.	Jenis Statistik	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	Angka					
2	PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Kecamatan Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : BPS Kab.Tanjung Jabung Barat

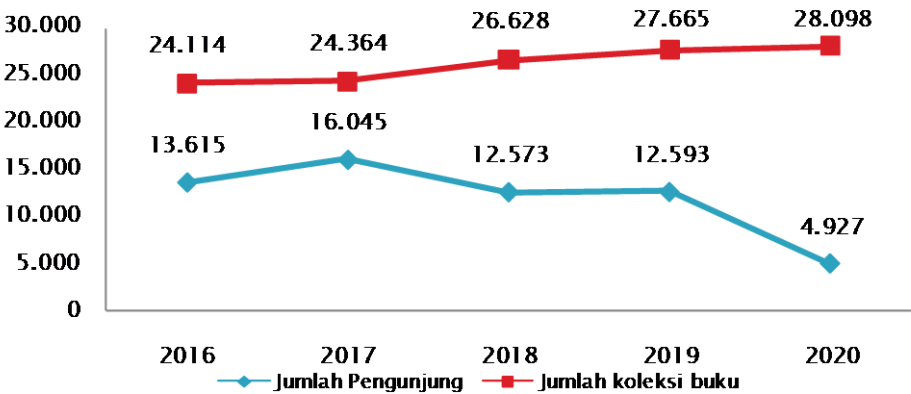
2.4.2.15. Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi dari 13.615 pengunjung di tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 16.045 di tahun 2017 kemudian menurun menjadi 12.573 di tahun 2018 dan meningkat sedikit di tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami penurunan pengunjung yang cukup drastis yaitu menjadi 4.927 pengunjung. Penurunan disebabkan ada pandemik Covid-19, aktivitas belajar-mengajar sekolah dalam bentuk daring (dalam jaringan), pemberlakuan pembatasan interaksi sosial, serta masyarakat mengurangi beraktivitas diluar rumah mengakibatkan sepi pengunjung perpustakaan. Dengan rata – rata pengunjung pertahunnya adalah 11.951 pengunjung atau 41 pengunjung perharinya. Hampir sebagian besar pengunjung perpustakaan daerah adalah penduduk usia sekolah yaitu mulai dari anak – anak tingkat sekolah PAUD, tingkat SD hingga perguruan tinggi, sedangkan pengunjung perpustakaan dari masyarakat umum hanya sebagian kecil saja. ini menunjukkan sarana perpustakaan lebih banyak digunakan untuk keperluan akademis sekolah.

Untuk menambah daya tarik agar masyarakat semakin ingin berkunjung ke perpustakaan daerah maka jumlah koleksi buku baik dari judul buku maupun jumlah bukunya terus diperbanyak, dari 13.615 buku di tahun 2016 meningkat menjadi 28.098 buku ditahun 2020, dengan rata – rata peningkatan sebesar 996 buku. Penambahan koleksi buku ada yang berasal dari hibah masyarakat, anggota perpustakaan, pinjam pakai dan rotasi buku dari Dinas Perustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Jambi, serta dari pembelian oleh Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan Kab. Tanjung Jabung Barat.

Gambar 2.49.

Jumlah Pengunjung dan Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d 2020



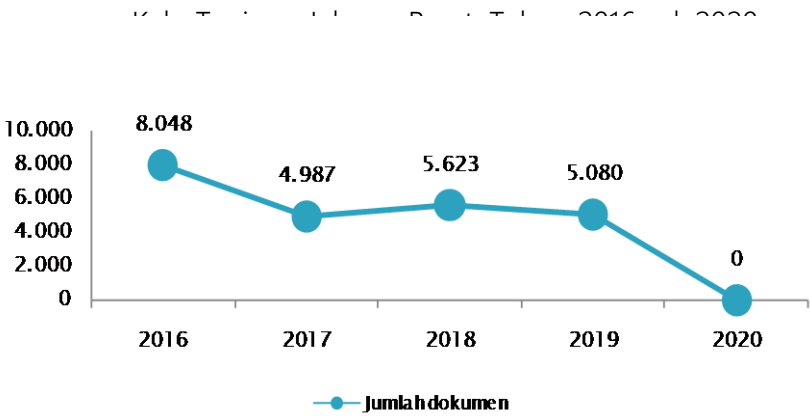
2.4. *Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021*

Setiap tahunnya dilakukan pelestarian dan penyimpanan atau penyelamatan dokumen/arsip baik berupa dokumen cetak maupun dokumen elektronik. pelestarian dan penyimpanan atau penyelamatan dokumen/arsip telah dilakukan sejak tahun 2015 sampai saat ini, ada sekitar 26.479 dokumen/arsip yang telah tersimpan di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Barat.

Kondisi terakhir di tahun 2020 ruang penyimpanan dokumen/arsip yang tersedia hampir tidak memadai lagi seiring terus bertambahnya dokumen/arsip cetak yang dilestarikan, untuk itu perlu disediakan/ditambah ruang penyimpanan dokumen/arsip.

Gambar 2.50

Jumlah Dokumen Yang Dilestarikan Oleh Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan



Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.4.3.1. Perikanan

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanjung jabung Barat, terdiri dari rawa, dataran rendah, pegunungan dan kawasan pantai, sebagian dari wilayah tersebut memiliki sumberdaya alam yang potensial untuk usaha sektor perikanan, baik perikanan laut, perikanan perairan umum, dan perikanan budidaya.

Potensi perikanan laut ditopang dari kawasan pantai yang terbentang sepanjang ± 30,90 Km (menurut Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi Tahun 2019-2039) terbentang mulai dari Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Tungkal Ilir sampai Kecamatan Seberang Kota, dan beberapa wilayah kecamatan di kawasan hulunya yang mempunyai potensi pengembangan usaha perikanan air tawar.

Kegiatan utama sektor kelautan dan perikanan adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya (tawar dan payau) dan usaha pengolahan hasil perikanan. Ketiga usaha tersebut memberikan kontribusi dalam penyediaan dan keragaman bahan pangan dari protein hewani, dengan demikian pengembangan usaha penangkapan, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu mendapat perhatian yang serius.

Perikanan laut Kab. Tanjung Jabung Barat dan secara umum laut Provinsi Jambi adalah merupakan bagian dari laut Cina selatan, sehingga

perhitungan potensi perikanan laut tidak terbatas pada potensi laut kewenangan provinsi, selain itu potensi perikanan laut juga meliputi pemanfaatan pada perairan lepas pantai wilayah pengelolaan perikanan, bahkan termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Cina selatan. Besaran potensi perikanan laut tersebut dapat dirinci yaitu potensi laut provinsi sebesar 77.980 ton/tahun ; potensi pemanfaatan laut natuna dan ZEE laut Cina selatan sebesar $\pm$ 1.000.000,- ton/tahun.

Potensi perikanan perairan umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperkirakan sebesar 1.000 ton/tahun, yang tersebar di tiga sungai besar yaitu sungai Pengabuan, sungai Betara dan sungai Pangkal Duri serta anak-anak sungai dari ketiga sungai tersebut dan rawa-rawa pada kawasan basah.

Sedangkan potensi perikanan budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri dari perikanan budidaya tambak dan budidaya kolam. Potensi pengembangan tambak di Kab. Tanjung Jabung Barat seluas 5.000 Ha yang tersebar di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara. Kondisi lahannya maupun perairan pantainya cukup baik untuk pengembangan tambak. Sedangkan potensi budidaya kolam di Kab. Tanjung Jabung Barat diperkirakan sejumlah 2.000 Ha tersebar di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara papalik dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Potensi budidaya ikan dalam Keramba di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 1.000 Ha (10.000 unit) terutama di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, Batang Asam, Pengabuan, Betara dan Bram Itam. Komoditas Ikan yang cocok dikembangkan dalam Keramba adalah Nila, Lele dan Patin (Kecamatan Pengabuan dan Betara) sedangkan untuk ikan yang tidak mempunyai kemampuan adaptasi tinggi cocoknya dikembangkan di Daerah Ulu, seperti Kecamatan Tungkal Ulu, Batang Asam, dan Kecamatan Merlung.

Potensi Pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sangat potensial untuk dikembangkan, hal ini didukung dengan adanya Sentra Pengolahan Hasil Perikanan yang terus dikembangkan, dengan harapan produk hasil olahan perikanan semakin beragam dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, sekaligus meningkatkan PAD Kabupaten.

Semua potensi tersebut diatas didukung dengan cukup besarnya jumlah pelaku usaha perikanan (nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar) di Daerah, dimana sampai dengan Tahun 2020 besaran jumlah pelaku usaha perikanan dapat di rinci sebagai berikut :

Tabel 2.44.
Jenis Usaha Perikanan Berdasarkan Jumlah

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Nelayan (Perairan Laut dan Umum)	3.234 Orang
2.	Pembudidaya Ikan/Udang	1.252 Orang
3.	Pengolah dan Pemasar	715 Orang
4.	Pemasar Hasil Perikanan	120 Orang

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Barat

Sedangkan jumlah kelompok menurut kelas (pemula dan madya (Berbadan Hukum) sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel. 2.45
Jumlah Kelompok Usaha Perikanan

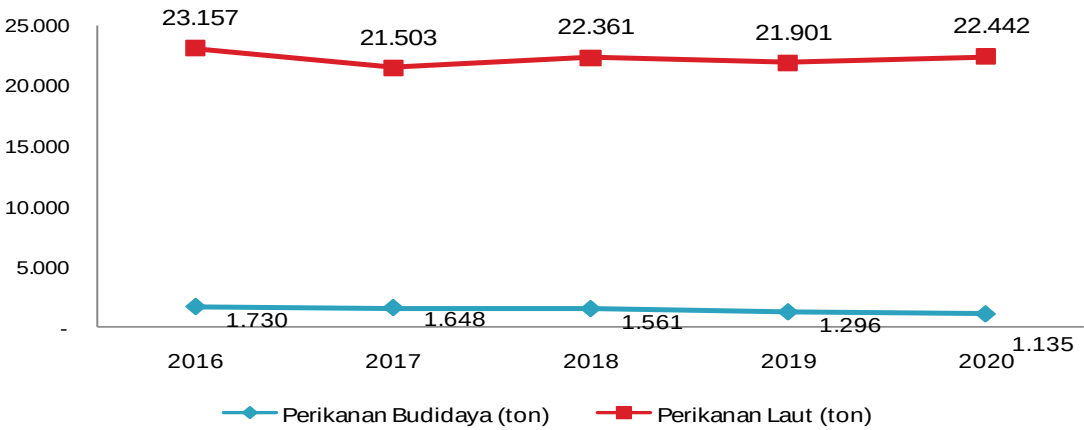
No	Jenis Usaha	Jumlah	Pemula	Madya (Berbadan Hukum)
1.	Nelayan (Perairan Laut dan Umum)	254	216	38
2.	Pembudidaya Ikan Ikan/Udang	114	103	11
3.	Pengolah dan Pemasar	116	110	6

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Barat

Produksi perikanan terbesar berasal dari hasil perikanan laut (perikanan tangkap), dimana setiap tahunnya hasil perikanan laut berada diatas 20.000 ton per tahun, dengan rata – rata hasil perikanan laut dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah 21.566 ton pertahun. Sedangkan hasil perikanan budidaya selama kurun waktu 5 tahun tersebut sebesar 1.627 ton pertahun, hasil perikanan budidaya terus mengalami penurunan dari 1.823,20 ton di tahun 2015 menjadi 1.135,00 ton di 2020.

Gambar 2.51.

Perkembangan Produksi Ikan Kab. Tanjung Jabung Barat, Tahun 2016 s.d. 2020



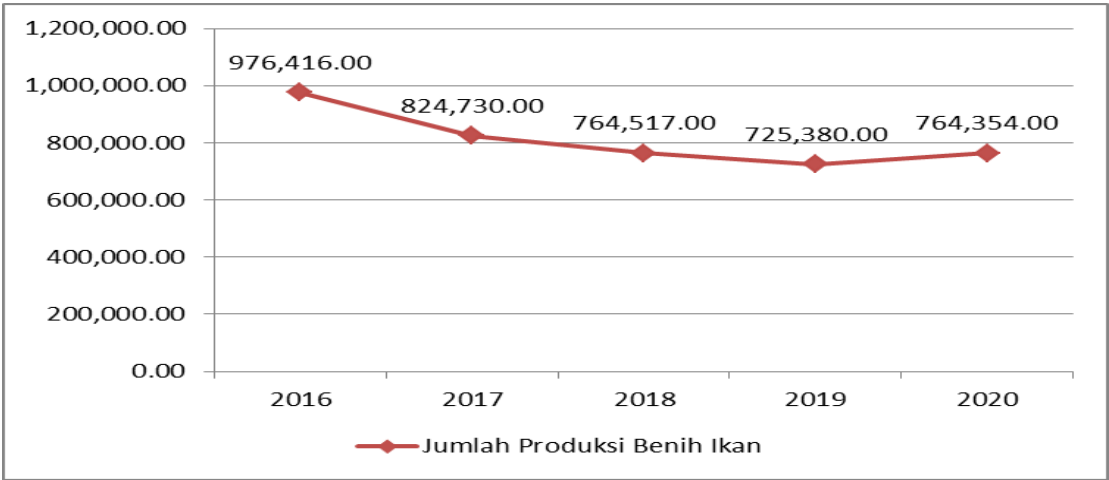
Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Barat

Sejalan dengan semakin besarnya permintaan benih ikan, di beberapa tempat mulai terdapat UPR (Unit Pembenihan Rakyat) ikan. Unit pembenihan rakyat ini berfungsi sebagai penyedia kebutuhan benih bagi pembudidaya ikan. Namun demikian, benih yang dihasilkan tersebut belum optimal dalam memenuhi permintaan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga para pembudidaya ikan masih banyak yang mencari benih keluar daerah. Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai tugas untuk membina UPR dan memenuhi ketersediaan benih bagi

masyarakat pembudidaya air tawar baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

Gambar 2.52.

Perkembangan Produksi Benih Ikan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020



Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Barat

2.4.3.2. Pariwisata

Berdasarkan Perpres No 13 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sumatra terdapat beberapa kawasan prioritas pembangunan pariwisata dengan tema-tema pembangunan berdasarkan kepada karakteristik wilayah masing-masing. Secara umum terdapat beberapa kawasan prioritas pembangunan dalam lingkup provinsi Jambi yang telah ditentukan dalam Perpres no 13 tahun 2012, salah satunya yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masuk kedalam strategi operasional perwujudan kawasan peruntukan pariwisata. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Barat (RIPPARKAB) telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 – 2026. Sejalan dengan waktu sampai dengan tahun 2020 beberapa potensi wisata alam yang tercantum dalam RIPPARKAB mengalami penurunan, dimananya kondisinya tidak sesuai lagi yang disebabkan terutama tidak terkololanya potensi wisata alam tersebut, bahkan beberapa potensi wisata alam menjadi hilang.

Potensi Pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tersebar di beberapa kecamatan berdasarkan data tahun 2020, antara lain :

Potensi wisata alam, antara lain :

- 1) Wisata mangrove Pangkal Babu, Kecamatan Tungkal Ilir;
- 2) Pemandian air panas, Wisata rawa Jembatan Karindangan, Sukorejo di Pematang Buluh Kecamatan Betara;
- 3) Air terjun Pehlang, Danau Jabung dan danau Cermin Kecamatan Tungkal Ulu;
- 4) Danau Payo Lebar di Kecamatan Merlung;

- 5) Air terjun Ratu Calista Irawan (Air terjun Lubuk Bernai), air terjun Gemuruh, air terjun Bukit Pianang Bawah, dan Air Terjun Suban di Kecamatan Batang Asam;
- 6) Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, air terjun Bukit Kautsar, air terjun Danau Alo, danau biru, air terjun Tembulun, air terjun lampirin Kecamatan Renah Mendaluh;

Potensi wisata Buatan antara lain :

- 1) Water Front City di Kecamatan Tungkal Ilir, Taman Ancol, dan Kuliner Pujasera di Kecamatan Tungkal Ilir;
- 2) Kolam Renang dan Taman Bermain Sukowati di Kecamatan Tungkal Ulu;
- 3) Wisata Taman Riak Runai Green, dan Jembatan Gantung Desa Lubuk Terap di Kecamatan Merlung;
- 4) Kolam renang Alam Asri di Purwodadi, dan Taman Wisata Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi;
- 5) Wisata Perkemahan Bukit Pematang Genting Kec. Batang Asam
- 6) Jembatan Gantung Desa Rantau Badak di Kecamatan Muara Papalik;
- 7) Pusat Adaptasi Orang Hutan di Kecamatan Renah Mendaluh;

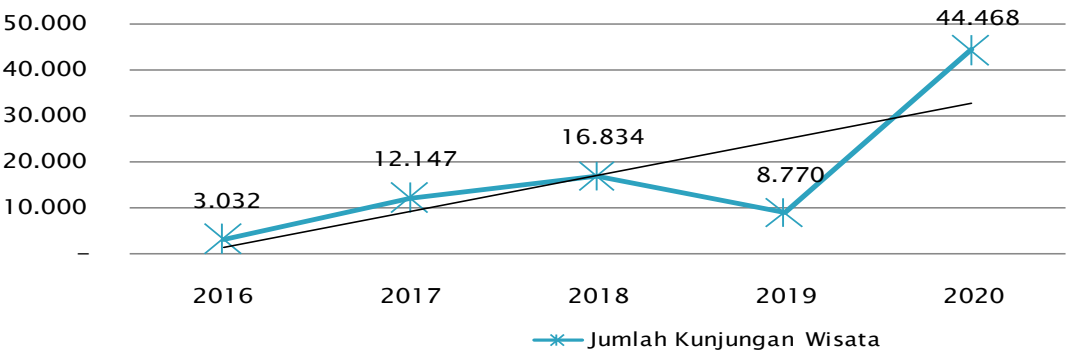
Potensi wisata Budaya yang antara lain :

- 1) Festival arakan sahur, festival takbir idul fitri, festival takbir idul adha, haul Syech Abdul Qadir Al Jaelani, Wisata kuliner Kawasan Warung Kopi parit 1, Klenteng Jwan Kong Gio dan Leng sam King Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir, dan wisata barang bekas Parit 1;
- 2) Makam keramat Desa Muaro Seberang, Makam keramat Desa parit Tengah;
- 3) Makam Keramat Idar (dahlan Bin Ali) Kec. Pengabuan;
- 4) Makam Rajo (makam panjang sembilan) Kec. Tungkal Ulu;
- 5) Makam mayang Lubuk Petai, dan kesenian Tari Barahui Kec. Muara Papalik.

Kunjungan wisata selama kurun waktu 5 tahun dari 2016 sampai dengan 2020 berfluktuasi namun dilihat dari perkembangannya jumlah kunjungan wisata mengalami peningkatan, dengan rata – rata jumlah kunjungan wisata sebesar 17.050 orang pertahun.

Gambar 2.53.

Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata Kab. Tanjung Jabung Barat, Tahun 2016 s.d. 2020



Sumber Data : DISPARPORA Kab. Tanjung Jabung Barat

2.4.3.3. Pertanian

Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selain tenaga kerja yang terserap cukup besar, sektor ini juga masih mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2019, PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kab. Tanjung Jabung Barat atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar 10,898,14 milyar rupiah (kontribusi sebesar 25,17%), kedua terbesar setelah sektor pertambangan dan penggalian. Meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB dibanding sektor lainnya, tetapi jumlah produksi tanaman pangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir justru cenderung mengalami penurunan.

Permasalahan yang paling mendasar penyebab turunnya produksi tanaman pangan ini adalah semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, dari lahan – lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan perkebunan, permukiman, pembangunan infrastruktur, ataupun industri. Data statistik pertanian menunjukkan bahwa selama tahun 2013 s/d 2019, terjadi konversi lahan sawah menjadi lahan perkebunan maupun lahan non pertanian mencapai $\pm$ 9.556 Ha. Kebijakan impor pangan oleh pemerintah pusat juga berdampak pada ketahanan pangan dan melemahkan petani, akibatnya banyak petani padi mengalihkan lahan sawah mereka menjadi lahan perkebunan.

Harga komoditi perkebunan yang lebih menjanjikan bagi petani juga menjadi faktor pemicu alih fungsi lahan, selain itu pemicu lain adalah harga jual lahan yang cukup tinggi menggiurkan petani / pemilik lahan untuk melepasnya ke investor. Akibat dari semua itu kemampuan produksi pangan lokal semakin tidak mampu lagi memenuhi tekanan *demand* pangan yang cukup tinggi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2019, produksi padi di Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 47.222 ton, dengan nilai konversi 64,02% maka diperoleh beras sejumlah 29.627 ton. Sedangkan jumlah kebutuhan beras berdasarkan konsumsi beras perkapita per tahun sebesar 30.232 ton, artinya masih terdapat kekurangan beras sejumlah 1.173 ton untuk bisa memenuhi kebutuhan beras penduduk kab. Tanjung Jabung Barat.

Tabel. 2.46.

Luas Lahan Baku Lahan Sawah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016 s/d 2020

No.	Kecamatan	Tahun (dalam Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tungkal Ilir	417	467	467	344	155,2
2	Bram Itam	815	817	817	534	619,1
3	Seberang Kota	155	110	110	206	201,6
4	Betara	277	392	392	415	411
5	Kuala Betara	665	405	405	183	218,7
6	Pengabuan	2.853	2.426	2.426	2.604	2,624,3
7	Senyerang	3.764	3.216	3.216	3.179	3.332,1
8	Tungkal Ulu	60	81	81	82	82,8

No.	Kecamatan	Tahun (dalam Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	Batang Asam	951	1.069	1.069	1.007	1.006,3
10	Tebing Tinggi	300	318	318	200	100,3
11	Renah Mendaluh	60	160	160	125	0,0
	Total	10.317	9.461	9.461	8.879	8.876,5

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Tanjung Jabung Barat

Luas tanam padi baik padi sawah maupun padi ladang dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 berfluktuasi dengan rata-rata 10.680 ha, namun pada tahun terakhir 2019 luas tanam berada pada jumlah terkecil dari tahun-tahun sebelumnya, secara umum luas tanam padi mengalami penurunan, hal ini disebabkan kegiatan alih fungsi lahan padi, dari sawah menjadi perkebunan, bangunan, dan lainnya. Menurunnya luas tanam padi tidak diikuti dengan penurunan luas panen bahkan luas panen padi sawah mengalami peningkatan sehingga provitas (Kw/ha) tidak jauh dari rata – rata dalam kurun waktu lima tahun tersebut, melalui penggunaan variatas unggul (genetik), pemanfaatan teknologi budidaya, dan adaptasi spesifik lokasi, serta lainnya.

Tabel 2.47.
Perkembangan Produktivitas Padi
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi Sawah					
	- Luas Tanam (Ha)	9.905	9.667	12.119	9.372	12.337
	- Produksi (Ton GKG)	48.345	47.129	53.047	47.222	43.013

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Tanjung Jabung Barat

Tabel 2.48.
Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2020

No.	Tanaman	Tahun (dalam ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi	48.345	47.129	53.047	47.222	43.013
2	Jagung	2.508	2.024	2.058	3.183	2.552
3	Kacang Tanah	17	7	7	3	12
4	Kacang Hijau	13	7	0	0	0
5	Ubi Kayu	4.069	3.147	3.273	2.871	4.647
6	Ubi Jalar	181	146	146	107	318

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Tanjung Jabung Barat

Tabel 2.49.
Perkembangan Produksi Tanaman Buah – buahan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2020

No.	Tanaman	Tahun (dalam ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jeruk	2.037	1.756	2.352	2.766	436
2	Nangka / cempedak	4.348	845	1.236	446	274
3	Nanas	63	26	50	41	45
4	Pepaya	233	526	644	227	282
5	Pisang	574	1.286	8.891	6.597	13.715
6	Semangka	39	53	19	158	49

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Tanjung Jabung Barat

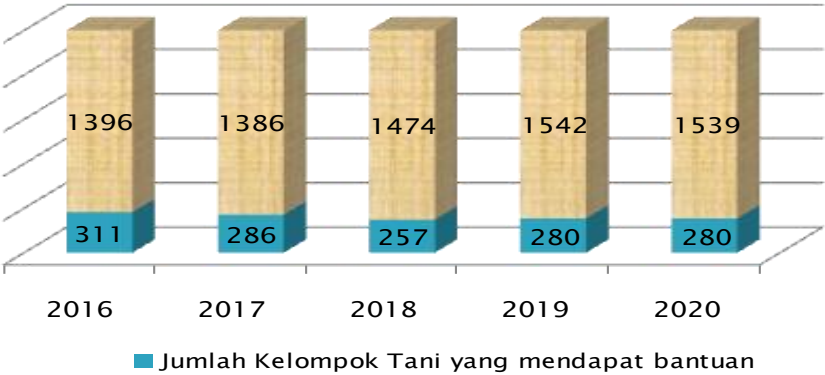
Tabel 2.50.
Perkembangan Produksi Tanaman Sayur
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2020

No.	Tanaman	Tahun (dalam ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cabe Merah	108	416	363	85	48
2	Cabe Rawit	107	263	181	50	29

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Tanjung Jabung Barat

Jumlah kelompok tani yang ada di Kab. Tanjung Jabung Barat setiap tahunnya bertambah dari 1.361 kelompok di tahun 2015 menjadi 1.542 kelompok di tahun 2019. Namun tidak semua kelompok petani dapat diberikan bantuan karena terbatasnya anggaran, rata – rata kelompok tani yang diberikan bantuan setiap tahunnya sebanyak 274 kelompok. Bentuk bantuan yang diberikan kepada kelompok tani berupa alat produksi pertanian (alsintan), benih, sarana penunjang pertanian seperti pompa air, dan lainnya.

Gambar 2.54.
Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan
Kab. Tanjung Jabung Barat. Tahun 2016 s.d 2020



Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat

Pada subsektor peternakan, populasi 5 (lima) jenis ternak (sapi, kerbau, kambing, ayam buras, dan itik) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari kelima jenis ternak tersebut, sapi lebih menjadi komoditas prioritas dalam program pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan asal hewani. Sejauh ini peternakan domestik belum mampu memenuhi permintaan daging dalam negeri. Timpangnya antara pasokan dan permintaan ternyata masih tinggi.

Pada tiga tahun terakhir 2018, 2019, dan 2020 rata – rata peningkatan jumlah populasi setiap ternak pertahunnya sebagai berikut ; sapi sebanyak 129 ekor, kerbau sebanyak 10 ekor, kambing sebanyak 350 ekor, ayam buras sebanyak 11.508, dan itik sebanyak 2.325.

Tabel 2.51
Perkembangan Populasi Ternak
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2020

No.	Jenis Ternak	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi	8.306	8.522	8.673	8.795	8.908
2	Kerbau	680	699	709	722	729
3	Kambing	40.728	46.221	46.464	47.174	47.271
4	Ayam buras	1.079.709	1.168.355	1.197.070	1.240.215	1.202.879
5	Itik	85.171	88.446	91.448	95.055	95.421

Sumber Data : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat, 2021

Pada subsektor perkebunan, terdapat 5 komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kopi, dan pinang. Dilihat dari peranan (kontribusi) sektor pertanian (salah satu subsektornya adalah perkebunan) terhadap besaran nilai PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat, sebesar 25,17% atau berada pada urutan kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian, artinya sektor pertanian memegang peranan cukup besar dalam perkembangan perekonomian khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020, perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan baik luas tanam dan maupun produksi. Selain kelapa sawit, pinang juga terus mengalami peningkatan, namun berbeda halnya dengan dengan karet dan kopi yang mengalami penurunan atau perkembangan yang tidak signifikan, faktor harga yang rendah menjadi penyebab utama bagi minat petani untuk berkebun karet dan kopi. Sedangkan kelapa dalam tidak mengalami peningkatan atau penurunan yang cukup signifikan, kondisi sekarang ini tanaman kelapa dalam yang ada adalah merupakan tanaman warisan keluarga atau nenek moyang dimana banyak tanaman kelapa dalam yang tidak produktif lagi.

Tabel 2.52.
Perkembangan produksi 5 komoditi unggulan perkebunan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Produksi kelapa sawit (ton)	140.442	154.058	151.892	159.462	119.586
2	Produksi karet (ton)	6.416	4.597	4.047	4.422	3.822
3	Produksi kelapa dalam (ton)	50.414	53.712	53.343	54.430	54.999
4	Produksi kopi (ton)	1.171	1.079	1.354	1.171	1.185
5	Produksi pinang (ton)	9.433	9.958	9.981	10.274	10.666

Sumber Data : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat, 2021

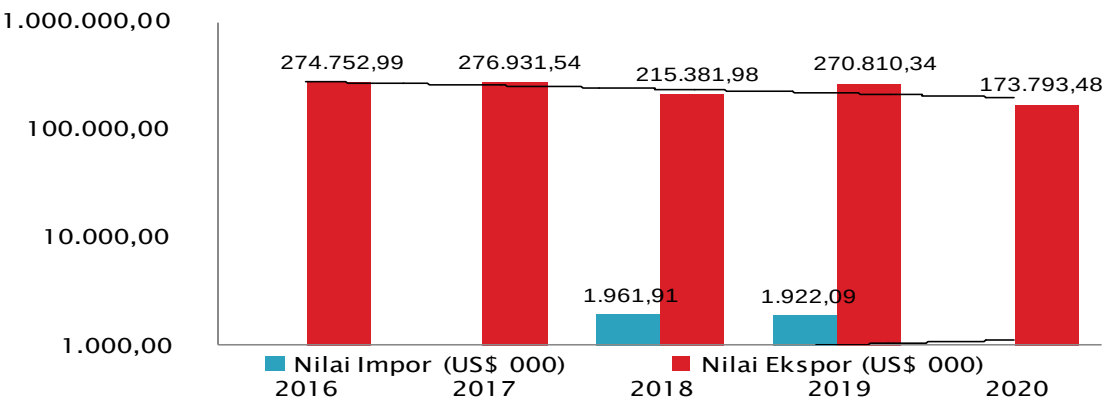
2.4.3.4. Perdagangan Dan Perindustrian;

Perkembangan ekspor Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 sampai dengan 2020 berfluktuasi, rata – rata ekspor pertahunnya sebesar US\$,242,334,065.22. Pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan ekspor sebesar 22% dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh salah satu perusahaan eksportir komoditi pinang mengalami masalah pada manajemennya hingga tidak beroperasi lagi.

Adapun komoditi utama yang diekspor seperti Migas, pinang, kelapa, pulp dan kertas, kayu lapis, minyak nabati, batu bara, dan ikan dan udang. Negara – negara tujuan utama ekspor adalah Singapura, India, pakistan, Malasya, Cina, dan Hongkong.

Gambar 2.55.

Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d 2020



Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Tanjung

Untuk mendukung distribusi dan kelancaran proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen serta mempertemukan penjual dan pembeli diperlukan keberadaan pasar. Jumlah pasar rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2020 sebanyak 72 unit, dengan kategori pasar yang sudah representatif sebanyak 18 unit (25%).

Dalam era persaingan bebas sekarang ini, diperlukan suatu pasar rakyat dengan kondisi layak dan memadai sebagai upaya mengangkat citra dan eksistensi pasar, agar memiliki daya saing dan mampu bertahan. Revitalisasi pasar adalah salah satu bentuk untuk memulihkan peran penting pasar dalam memacu pergerakan ekonomi masyarakat.

Tabel 2.53.
Kondisi Pasar Menurut Kecamatan Dalam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020

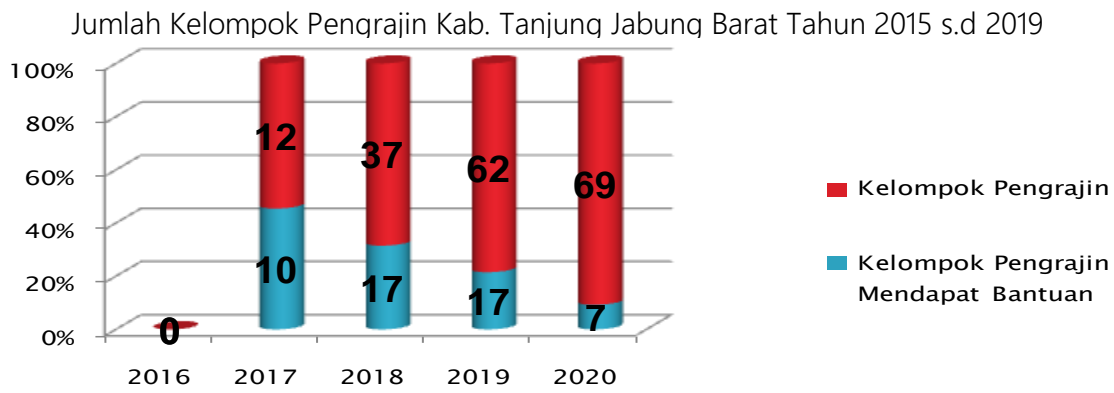
No	Kecamatan	Jumlah Pasar (unit)	Kondisi Pasar		
			Baik	Sedang	Kurang
1.	Kecamatan Tungkal Ilir	5	1	3	1
2.	Kecamatan Betara	6	1	-	4
3.	Kecamatan Pengabuan	9	1	1	7
4.	Kecamatan Merlung	5	2	1	2
5.	Kecamatan Tungkal Ulu	3	1	2	-
6.	Kecamatan Seberang Kota	1	1	-	-
7.	Kecamatan Bram Itam	4	1	-	3
8.	Kecamatan Kuala Betara	7	1	2	4
9.	Kecamatan Senyerang	6	1	-	5
10.	Kecamatan Muara Papalik	5	2	1	2
11.	Kecamatan Renah Mendaluh	7	2	1	4
12.	Kecamatan Tebing Tinggi	7	1	-	6
13.	Kecamatan Batang Asam	7	2	1	4
	Jumlah	72	18	12	42

Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Tanjung Jabung Barat

Jumlah kelompok pengrajin terus meningkat setiap tahunnya, dari 12 kelompok ditahun 2017 bertambah menjadi 37 kelompok ditahun 2018, dan bertambah menjadi 69 kelompok ditahun 2020, dengan rata – rata peningkatan pertahunnya sebesar 19 kelompok. Jumlah kelompok pengrajin bertambah cukup signifikan, menunjukkan keberhasilan giat pemberdayaan masyarakat baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

Namun tidak semua kelompok pengrajin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan bantuan, jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan terakhir pada tahun 2020 sebanyak 7 kelompok (10,14%) dari 69 kelompok pengrajin yang ada.

Gambar 2.56.



Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Tanjung
Jabung Barat, 2021

2.5. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari :

2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran perkapita sebagai satu salah indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Lebih jauh penggunaan indikator ini dapat memberi pentunjuk sampai sejauh mana dampak luas pemanfaatan anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) . Ada 2 (dua) jenis pengeluaran per kapita yaitu pengeluaran per Kapita penduduk untuk makanan dan pengeluaran per kapita penduduk untuk bukan makanan.

Untuk pengeluaran per kapita penduduk untuk makanan/pangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 setiap tahunnya mengalami peningkatan, dari 393.722 rupiah menjadi 520.817, sedangkan Untuk pengeluaran per kapita penduduk untuk bukan makanan/non pangan berfluktuasi naik-turun. Ini menggambarkan pengeluaran per Kapita penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat lebih besar untuk membeli makanan dibanding bukan makanan. Pada tahun terkahir 2019 perbandingan pengeluaran per kapita penduduk antara makanan dan bukan makanan sebesar 58,18% untuk makanan dan 41,82%, kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.54.
Rata-rata pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah) Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2020

Jenis Pengeluaran	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
Pangan / Makanan	459.493	▲	487.556	▲	492.756	▲	520.817	▲	547.358	▲
Non Pangan / Bukan Makanan	413.514	▲	358.515	▼	409.928	▲	374.380	▼	395.475	▲
Jumlah	873.007	▲	846.071	▼	902.684	▲	895.197	▼	942.833	▲

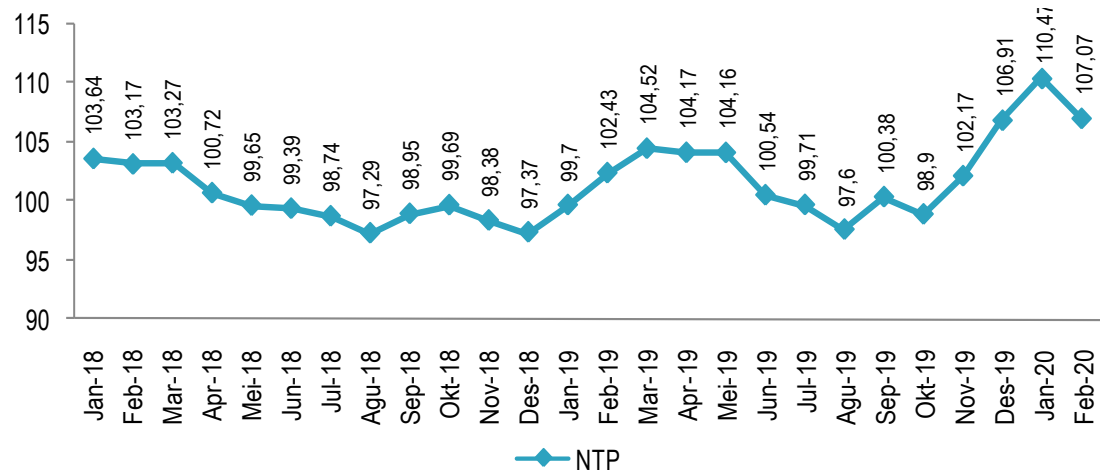
Sumber Data : Tanjung Jabung Barat dalam Angka, BPS, 2021

b. Nilai Tukar Petani

Pada prinsipnya keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya dilihat dari peningkatan produksi komoditas produk pertaniannya saja, tetapi juga peningkatan tingkat kesejahteraan petaninya. Peningkatan kesejahteraan petani salah satunya dapat diukur menggunakan indeks Nilai Tukar Ptani (NTP). Nilai tukar petani adalah persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Nilai tukar petani juga digunakan untuk mengukur kemampuan daya beli petani. Semakin tinggi daya beli petani terhadap kebutuhan konsumsi maka semakin tinggi nilai tukar petani dan berarti secara relatif petani lebih sejahtera. NTP khusus Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai sekarang belum pernah dilakukan perhitungan atau dipublikasikan oleh BPS, sehingga masih mengacu pada NTP Provinsi Jambi yang secara resmi dipublikasikan oleh BPS Provinsi Jambi.

Gambar 2.57.

Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi dari Januari 2018 sampai dengan Februari 2020



Sumber Data : BRS No.17/03/15/Th.XIV, 02 Maret 2020

2.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Ketaatan Terhadap RTRW;

Rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, dan penetapan kawasan strategis Kab. Tanjung Jabung Barat di tuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033. Permohonan rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah yang diajukan oleh pemohon guna melengkapi persyaratan administrasi perizinan, tercatat sebanyak 41 permohonan yang masuk dari tahun 2017 sampai dengan 2020, dan 4 permohonan dari 41 permohonan tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan rencana peruntukkan tata ruang wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat.

Tabel 2.55.
Jumlah Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang wilayah tahun 2017 s.d. 2020 Kab. Tanjung Jabung Barat

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah permohonan rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah	13	12	10	6
Jumlah rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah yang di keluarkan	12	12	8	5
Jumlah permohonan kesesuaian rekomendasi tataruang wilayah yang di tolak	1	0	2	1

Sumber data : Dinas PUPR Kab. Tanjung Jabung Barat

b. Luas Wilayah Produktif;

c. Luas Wilayah Industri;

*Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi:

1. Industri besar berupa industri pengolahan produksi hasil pertanian dan kehutanan meliputi :
 - Pengolahan bubur kertas (industri pulp) di Kecamatan Tebing Tinggi.
 - Pengolahan sawit (industri CPO) di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Merlung, dan Kecamatan Tungkal Ulu.
 - Pembangunan industri bio diesel di Kecamatan Tebing Tinggi.
 - Pengembangan industri pengolahan karet di Kecamatan Tungkal Ulu.
2. Industri menengah meliputi:
 - a. Pengembangan industri pengolahan pakan ikan/ternak di Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Batang Asam;
 - b. Pembangunan dan pengembangan industri pengolahan kelapa dalam dan turunannya meliputi:
 1. Kecamatan Pengabuan;
 2. Kecamatan Senyerang;

3. Kecamatan Tungkal Ilir; dan
 4. Kecamatan Kuala Betara;
 - c. Pembangunan dan pengembangan industri pengolahan kopi meliputi:
 1. Kecamatan Tungkal Ilir;
 2. Kecamatan Bram Itam;
 3. Kecamatan Betara;
 4. Kecamatan Kuala Betara; dan
 5. Kecamatan Pengabuan.
 - d. Pembangunan dan pengembangan industri kelapa sawit dan turunannya meliputi:
 1. Kecamatan Tungkal Ulu;
 2. Kecamatan Tebing Tinggi;
 3. Kecamatan Merlung;
 4. Kecamatan Renah Mendaluh;
 5. Kecamatan Muara Papalik; dan
 6. Kecamatan Betara.
3. Industri kecil meliputi:
- a. Pengembangan industri pengolahan makanan berupa pengolahan pisang berada di Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Pengabuan;
 - b. Pengembangan industri pengolahan ikan/udang berupa kerupuk ikan/udang di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Pengabuan;
 - c. Pengembangan industri gula kelapa di Kecamatan Kuala Betara;
 - d. Pengembangan industri kerajinan batik, anyaman purun, anyaman rotan, anyaman pandan dan kerajinan batok kelapa (tempurung) meliputi:
 1. Kecamatan Tungkal Ilir;
 2. Kecamatan Kuala Betara;
 3. Kecamatan Bram Itam;
 4. Kecamatan Merlung;
 5. Kecamatan Renah Mendaluh;
 6. Kecamatan Muara Papalik; dan
 7. Kecamatan Betara;
 - e. Pengolahan pinang berada di Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Betara.

Pengembangan kawasan peruntukan Industri diarahkan untuk industri rumah tangga dan kerajinan serta industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan. Sedangkan Kawasan industri hilir berlokasi di Kecamatan Tungkal Ilir Desa Tungkal I (Satu).

d. Luas Wilayah Kebanjiran

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian besar tergolong kedalam area rawan banjir dengan kelas tinggi, terutama wilayah dibagian timur yang memiliki topografi rendah seperti Kecamatan Betara, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Bram Itam. Sedangkan wilayah dengan topografi sedang dan tinggi memiliki area yang berpotensi tergenang air hanya melingkupi daerah di dekat aliran sungai, seperti kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Merlung, dan Kecamatan

Tungkal Ulu. Banjir yang terjadi disebabkan luapan air sungai, pasang surut air laut, dan curah hujan tinggi yang berlangsung lama.

Menurut luasan bahaya yang terdampak di masing – masing kecamatan maka dapat dikategorikan semua kecamatan dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki klasifikasi bahaya yang tinggi. Selain itu berdasarkan data bencana banjir kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan setiap tahunnya terjadi bencana banjir.

Berdasarkan data analisis, Kecamatan Betara memiliki potensi area rawan banjir terluas dengan kelas bahaya tinggi, dikarenakan sebagian besar wilayahnya memiliki topografi datar, dan terdapat aliran Sungai Betara (sungai primer). Kemudian Kecamatan Batang Asam menempati urutan kedua terluas potensi area rawan banjir disebabkan adanya aliran Sungai Pengabuan.

Tabel 2.56.
Potensi Luas Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kab. Tanjung Jabung Barat*

No.	Kecamatan	Luas Resiko (ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Betara	8.103,17	6.285,56	23.126,96	37.515,70	Tinggi
2	Batang Asam	4.067,10	4.331,95	21.429,74	29.828,79	Tinggi
3	Pengabuan	5.141,94	1.322,65	13.948,57	20.423,16	Tinggi
4	Bram Itam	8.759,17	4.680,70	12.225,13	25.665,00	Tinggi
5	Kuala Betara	4.974,85	3.532,71	11.899,54	20.407,10	Tinggi
6	Senyerang	6.301,99	5.568,30	10.342,25	22.212,54	Tinggi
7	Tungkal Ulu	479,77	1.305,09	7.174,38	8.959,24	Tinggi
8	Tebing Tinggi	124,62	2.090,46	5.167,82	7.382,90	Tinggi
9	Renah Mendaluh	2.746,22	1.315,79	4.533,30	8.595,31	Tinggi
10	Seberang Kota	3.783,77	281,40	4.190,43	8.255,60	Tinggi
11	Merlung	444,89	3.584,09	3.410,16	7.439,15	Tinggi
12	Muara Papalik	451,60	2.085,11	3.259,20	5.795,90	Tinggi
13	Tungkal Ilir	2.468,59	2.612,37	810,14	5.891,10	Tinggi
Kab. Tanjung Jabung Barat		47.847,68	19.006,18	121.517,64	208.371,49	Tinggi

Sumber : Hasil Analisis, 2019 (Dokumen Peta Risiko Bencana Dan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 – 2024)

e. Luas Wilayah Kekeringan;

Kekeringan merupakan bencana yang diakibatkan oleh tingkat curah hujan rendah dari curah hujan normal. Semua daerah kecamatan dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki potensi luas bahaya kategori sedang, dan tidak terdapat kategori tinggi. Adapun tiga Kecamatan dengan potensi luas bahaya kekeringan terluas adalah kecamatan Batang Asam, kemudian kecamatan Betara, dan kecamatan Pengabuan.

Tabel 2.57.
Potensi Luas Bahaya Kekeringan Menurut Kecamatan di
Kab. Tanjung Jabung Barat*

No.	Kecamatan	Luas Resiko (ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Betara	13.366,53	90.870,47	-	104.237,00	Sedang
2	Batang Asam	-	54.190,00	-	54.190,00	Sedang
3	Pengabuan	-	31.486,00	-	31.486,00	Sedang
4	Bram Itam	-	21.421,00	-	21.421,00	Sedang
5	Kuala Betara	17.877,29	13.287,71	-	31.165,00	Sedang
6	Senyerang	-	33.638,00	-	33.638,00	Sedang
7	Tungkal Ulu	1.360,19	42.652,81	-	44.013,00	Sedang
8	Tebing Tinggi	-	12.129,00	-	12.129,00	Sedang
9	Renah Mendaluh	20.291,90	22.371,10	-	42.663,00	Sedang
10	Seberang Kota	225,21	34.063,79	-	34.289,00	Sedang
11	Merlung	-	9.811,00	-	9.811,00	Sedang
12	Muara Papalik	2.444,31	32.124,69	-	34.569,00	Sedang
13	Tungkal Ilir	46.949,54	422,46	-	47.372,00	Sedang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat		102.514,96	398.468,04	-	500.983,00	Sedang

Sumber : Dokumen Peta Risiko Bencana Dan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 – 2024.

f. Luas Wilayah Perkotaan;

Pusat Kegiatan Wilayah di Perkotaan Kuala Tungkal sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, perdagangan dan jasa skala regional, pusat kesehatan, pusat pemerintahan skala kabupaten, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat industri pengolahan perikanan, pusat peribadatan, dan simpul pelayanan transportasi.

Tabel 2.58
Rencana Kawasan Perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Pada Tahun 2030. *

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan Yang Termasuk Kawasan Perkotaan	Luas (Ha)	Pusat Pelayanan
1	Tungkal Ilir	- Tungkal IV Kota - Tungkal II - Tungkal III - Tungkal Harapan	- 673,2 - 538,5 - 897,6 - 810,7	PKW
2	Seberang Kota	- Tungkal V	- 5.270,4	PPL
3	Betara	- Mekar Jaya - Pematang Lumut - Serdang Jaya	- 32.115 - 210 - 238,5	PKL
4	Tebing Tinggi	- Tebing Tinggi	- 13.702	PKL

		- Purwodadi	- 3500	
5	Bram Itam	- Bram Itam Kiri	- 872,6	PPK
		- Pembengis	- 423,9	
6	Pengabuan	- Teluk Nilau	- 25.246,2	PPK
7	Senyerang	- Senyerang	- 25.246,2	PPL
8	Kuala Betara	- Betara Kiri	- 34.662,9	PPL
9	Muara Papalik	- Rantau Badak	- 11.060	PPL
10	Merlung	- Merlung	- 92.200	PKL
		- Tanjung Paku	- 65.800	
11	Tungkal Ulu	- Pelabuhan Dagang	- 731	PPK
12	Renah Mendaluh	- Lubuk Kambing	- 33.640	PPL
13	Batang Asam	- Dusun Kebun	- 7.480	PPK

Sumber data : RTRW Kab. Tanjung Jabung Barat 2013-2033

g. Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang;

Cukup pesatnya perkembangan perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama sektor perdagangan dan industri baik dipusat kota maupun di kecamatan menarik minat para pelaku usaha jasa keuangan bank untuk membuka kantor cabang terutama di wilayah – wilayah dengan *velositas* yang cukup tinggi seperti di Kota Kuala Tungkal, Kecamatan Betara, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Merlung, Kecamatan Tungkal ulu, dan Kecamatan Batang Asam. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah kantor cabang terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.59.
Jenis dan jumlah bank dan cabang di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016 – 2020

Jenis Bank	Jumlah Kantor Cabang				
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Bank	10	10	10	11	11

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018, dan Media informasi, 2021

h. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Penginapan/Hotel;

Perkembangan jumlah hotel / penginapan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan dari berjumlah 15 buah di tahun 2016 berkurang menjadi 11 hotel/penginapan ditahun 2020, sampai dengan tahun 2020 terdapat hotel dengan klasifikasi berbintang sebanyak 2 hotel.

Tabel 2.60.
Jumlah Hotel/Penginapan Dalam Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016 s.d. 2020

No.	Jenis Hotel /	Tahun

	Penginapan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hotel Berbintang	-	-	2	2	2
2	Hotel/Penginapan Non Bintang	15	15	13	13	9
Jumlah		15	15	15	15	11

Sumber Data : Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2017s.d.2021

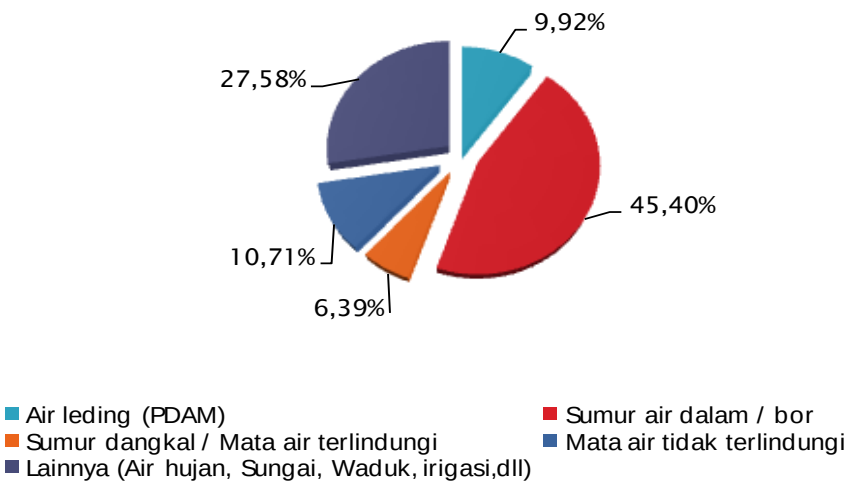
i. **Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih;**

Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat sampai saat ini masih merupakan prioritas utama kerja pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat . Air bersih yang baik kualitasnya dari segi kesehatan adalah air yang dapat dijadikan air minum, ada banyak sumber air bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu air leding (PDAM), air hujan, air sumur dalam/bor dan sumur dangkal / mata air terlindung, air kemasan / isi ulang, dan mata air tidak terlindung dan lainnya tapi tidak semua air dari sumber – sumber air tersebut bersih dan bisa dijadikan air minum.

Sebagian rumah tangga banyak menggunakan air leding dan air sumur untuk keperluan mandi dan mencuci, sedangkan untuk kebutuhan minum dan masak sebagian besar penduduk menggunakan air produksi / isi ulang dan air hujan. Untuk daerah tanah keras (wilayah ulu) berbeda dengan wilayah Ilir yang berkontur tanah rawa, daerah tanah keras biasanya mengandalkan air sumur dangkal / mata air terlindung dan juga tidak terlindung untuk keperluan minum, masak, dan mencuci. Sedangkan daerah tanah rawa mengandalkan air hujan, air sumur dalam/bor, dan air leding (PDAM).

Gambar 2.58.

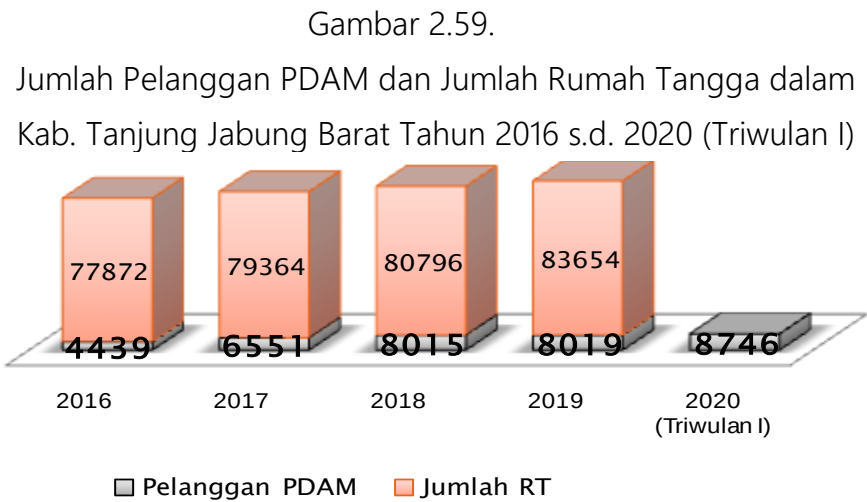
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Dalam Memenuhi Kebutuhan Air Bersih Dalam Kab. Tanjung Jabung Barat, 2020



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tanjung Jabung Barat, 2019 (diolah)

Untuk karakteristik sumber air bersih yang berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini adalah air leding (PDAM), bagi masyarakat perkotaan sangat mengandalkan air leding (PDAM) dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Bila dilihat pada grafik dibawah ini, jumlah rumah tangga yang menggunakan air leding (PDAM) sebagai

sumber utama dalam memenuhi kebutuhan air bersih masih cukup kecil, pada tahun 2018 dari 80.796 rumah tangga hanya sejumlah 8.015 pelanggan PDAM atau 9,92%.



Sumber : Bagian Ekonomi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat

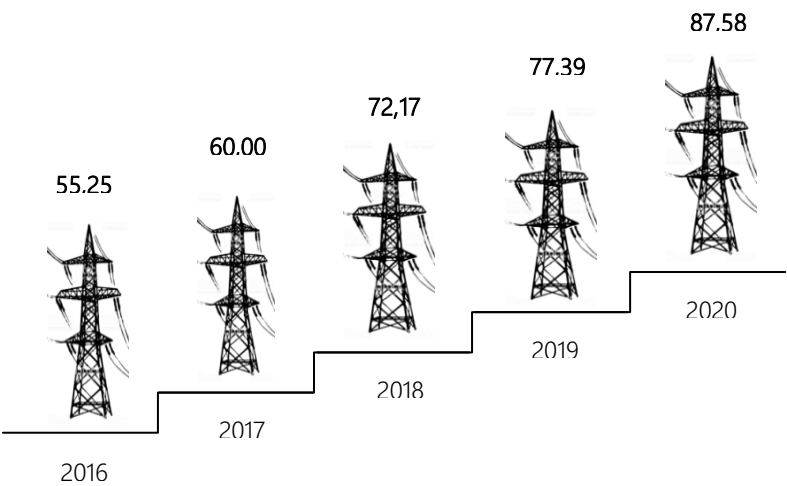
j. **Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik**

Capaian rumah tangga yang menggunakan listrik dapat dilihat dari Rasio Elektrifikasi yang terlihat pada gambar dibawah ini, Rasio elektrifikasi Kab. Tanjung Jabung Barat terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2020, dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 8,08%. Capaian terakhir pada tahun 2020 ialah 87,58%, artinya masih ada rumah tangga yang belum mendapatkan akses ke sumber energi, masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan bersama antara Pemerintah Daerah bersama pihak pengelola listrik, karena penerangan menggunakan energi listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harusnya terpenuhi.

Capaian ini didukung perluasan jaringan distribusi listrik, serta pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) termasuk melalui pembangunan EBT skala kecil.

Gambar 2.60.

Rasio Elektrifikasi Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020



Sumber : Bagian Energi dan SDA Setda Kab. Tanjung Jabung Barat

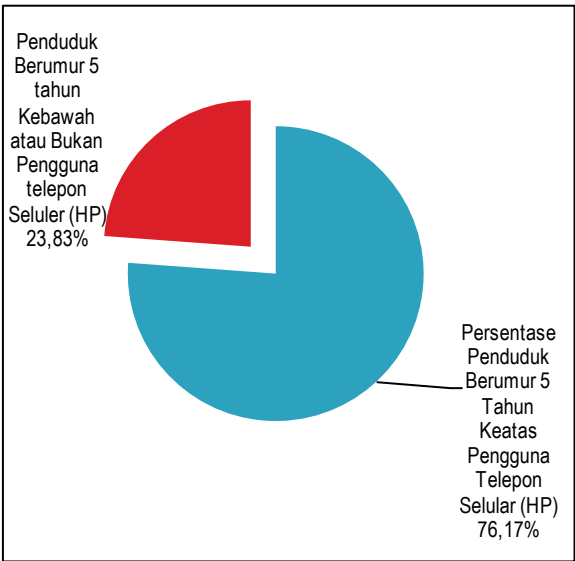
k. Persentase Penduduk yang menggunakan Telepon Seluler (HP) dan Mengakses Internet (Facebook, Whatsapp, Twitter, BBM, dan lainnya)

Telepon seluler atau biasa disebut dengan *handphone* adalah merupakan alat komunikasi yang paling banyak digunakan masyarakat luas, alat komunikasi sudah merupakan kebutuhan dasar bagi kebanyakan orang dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari – hari, karena mampu memudahkan kita dalam berkomunikasi dimanapun berada tanpa harus berjumpa secara langsung.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk berumur 5 tahun keatas 289.428 orang, berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Jambi Tahun 2020 dari jumlah penduduk tersebut sebesar 76,17%-nya atau 220.457 orang sebagai pengguna telepon seluler (HP), dan secara umum dari 289.428 orang tersebut sebesar 45,62%-nya atau 132.037 orang adalah penduduk berumur 5 tahun keatas pengakses internet (FB, twitter, BBM, WA, dan lainnya) dengan menggunakan telepon selular (*smartphone*). Ini menggambarkan tidak semua pengguna telepon seluler (HP) menggunakan jenis telepon seluler *smartphone*.

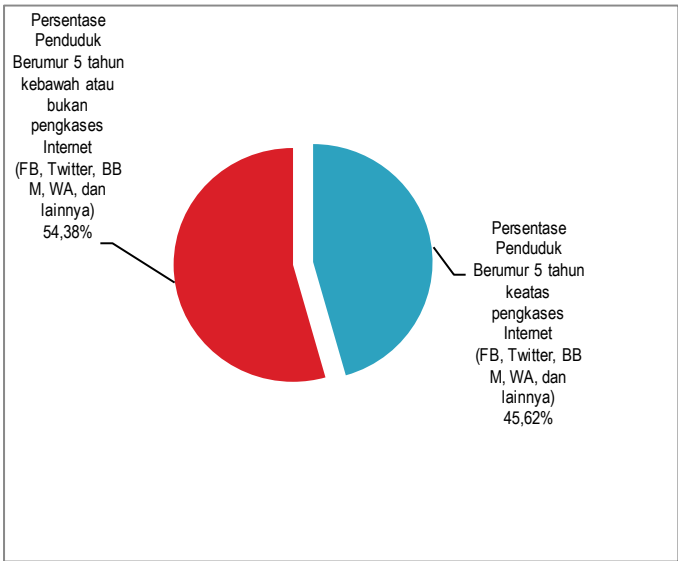
Gambar 2.61.

Persentase Penduduk Berumur 5 tahun keatas Pengguna Telepon Seluler (HP) dalam Kab.Tanjung Jabung Barat



Gambar 2.62.

Persentase Penduduk Berumur 5 tahun keatas Pengakses Internet (FB, Twitter, BBM, WA, dan Lainnya) dalam Kab.Tanjung Jabung Barat



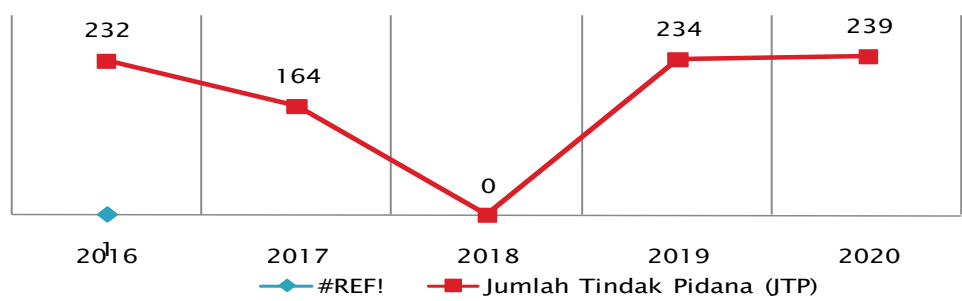
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, 2020

2.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi
a. Angka Kriminalitas

Dilihat dari grafik Jumlah Tindak Pidana (JTP) dalam wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 sampai dengan 2020 berfluktuasi, dua tahun terakhir mengalami peningkatan dari 234 ditahun 2019 menjadi 239 ditahun 2020. Secara umum dari keseluruhan kasus tindak pidana yang terjadi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 ada tiga jenis kasus tindak pidana yang selalu dominan ditangani oleh Polres Tanjung Jabung Barat yaitu pencurian dengan pemberatan (curat), penyalahgunaan Narkotika, dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Gambar 2.63.

Banyaknya Terdakwa/ Tertuduh Tindak Pidana Kejahatan yang Mendapat Keputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat



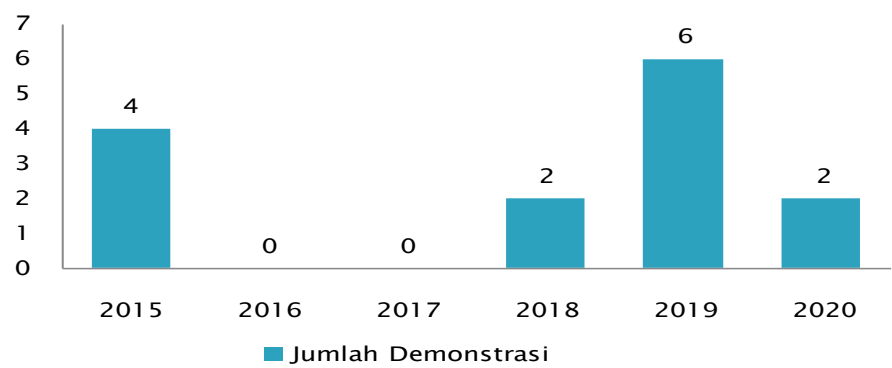
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

b. Jumlah Demonstrasi;

Demo yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2015 – 2020 adalah terkait berbagai permasalahan seperti permasalahan listrik, air bersih, sengketa lahan, tuntutan ganti rugi, dugaan korupsi, dan penentangan terhadap kebijakan atau peraturan pemerintah daerah, dan lainnya. Adapun lembaga – lembaga yang dituju untuk menyampaikan pendapat oleh pendemo seperti Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Kejari, Kantor Pertanahan, dan Dinas PUPR , selain itu ada juga diluar lembaga – lembaga pemerintah seperti perusahaan seperti Petro China dan WKS.

Gambar 2.64.

Jumlah Demonstrasi Dalam Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat, 2020

c. Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perizinan;

Pada tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyelenggaraan perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian dilakukan perubahan atas peraturan Bupati tersebut diatas menjadi Peraturan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018. Adapun jumlah izin yang didelegasikan berdasarkan peraturan tersebut sebanyak 181 izin, dimana 127 izin melalui OSS, 42 izin dan 12 non izin melalui non OSS.

Berikut jenis - jenis perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

Tabel 2.61.
Jenis Perizinan Dan Non Perizinan

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan	Keterangan
I. Standar Pelayanan Perizinan			
1.	Pertanian	1. Izin Usaha Perkebunan 2. Izin Usaha Hortikultura 3. Izin Usaha Tanaman Pangan 4. Izin Usaha Peternakan 5. Pendaftaran Usaha Perkebunan 6. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan 7. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura 8. Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha
2.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Izin Lingkungan 2. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk usaha jasa 3. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk penghasil limbah B3 4. Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Usaha Izin Usaha Izin Komersial atau operasional Izin Komersial atau operasional

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan	Keterangan
3.	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Izin Usaha Jasa konstruksi 2. Izin Mendirikan Bangunan 3. Sertifikat Laik Fungsi 4. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)	Izin Usaha Izin Usaha Izin Komersial atau operasional Izin Usaha
4.	Kelautan dan Perikanan	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 4. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil 5. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan 6. Tanda Daftar Usaha Pengaraman bagi Petambak Garam Kecil 7. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Usaha Izin Komersial atau operasional Izin Komersial atau operasional Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha
5.	Sektor Kesehatan	1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional 2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 3. Sertiifkat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional 4. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT 5. Izin Toko Alat Kesehatan 6. Izin Operasional Klinik 7. Izin Apotek 8. Izin Toko Obat 9. Iizin Mendirikan Rumah Sakit 10. Izin Operasional Rumah Sakit 11. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus 12. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional
6.	Perdagangan	1. Surat Izin Usaha Perdagangan 2. Tanda Daftar Perusahaan 3. Tanda Daftar Gudang 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Usaha Pendaftaran Izin Usaha Izin Usaha

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan	Keterangan
		5. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Izin Usaha
		6. Surat Keterangan Penjual Langsung Minum Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Izin Usaha
7.	Perindustrian	1. Izin Usaha Industri 2. Izin Usaha Kawasan Industri 3. Izin Perluasan	Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha
8.	Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 2. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau 3. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas 4. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (angkutan di perairan) 5. Perawatan dan perbaikan kapal	Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha
9.	Pariwisata	A. Bidang Daya Tarik Wisata 1. Pengelolaan Museum 2. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala 3. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami 4. Pengelolaan Goa 5. Wisata Agro 6. Pengelolaan Permukiman dan/atau lingkungan adat 7. Pengelolaan Objek Ziarah B. Bidang Kawasan Pariwisata 8. Kawasan Pariwisata C. Bidang Jasa Transportasi Wisata 9. Angkutan Jalan Wisata 10. Angkutan Wisata Dengan Kereta Api 11. Angkutan Wisata dalam Negeri 12. Angkutan Laut Internasional Wisata 13. Angkutan Wisata di Sungai dan Danau D. Bidang Jasa Perjalanan Wisata 14. Agen Perjalanan Wisata 15. Biro Perjalanan Wisata E. Bidang Makanan dan	Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan	Keterangan
		Minuman	Izin Usaha
		16. Restoran dan Rumah Makan	Izin Usaha
		17. Jasa Boga	Izin Usaha
		18. Pusat Penjualan Makanan	
		19. Bar / Pub	Izin Usaha
		20. Kafe	Izin Usaha
		F. Bidang Penyediaan Akomodasi	
		21. Hotel	Izin Usaha
		22. Pondok Wisata	Izin Usaha
		23. Bumi Perkemahan	Izin Usaha
		24. Persinggahan Karavan	Izin Usaha
		25. Vila	Izin Usaha
		26. Kondomonium Hotel	Izin Usaha
		27. Apartemen Servis	Izin Usaha
		28. Rumah Wisata	Izin Usaha
		29. Jasa Manajemen Hotel	Izin Usaha
		30. Hunian Wisata Senior / Lanjut Usia	Izin Usaha
		G. Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	
		31. Sanggar seni	Izin Usaha
		32. Jasa Impresariat / Promotor	Izin Usaha
		33. Galeri Seni	Izin Usaha
		34. Gedung Pertunjukan Seni	Izin Usaha
		35. Rumah Bilyar	Izin Usaha
		36. Lapangan Golf	Izin Usaha
		37. Gelanggang Bowling	Izin Usaha
		38. Gelanggang Renang	Izin Usaha
		39. Lapangan Sepak Bola / Futsal	Izin Usaha
		40. Lapangan Tenis	Izin Usaha
		41. Wisata Olahraga minat khusus	Izin Usaha
		42. Wisata Petualangan Alam	Izin Usaha
		43. Taman Bertema	Izin Usaha
		44. Taman Rekreasi	Izin Usaha
		45. Kelab Malam	Izin Usaha
		46. Diskotik	Izin Usaha
		47. Karaoke	Izin Usaha
		48. Arena Permainan	Izin Usaha
		49. Panti / Rumah Pijat	Izin Usaha
		H. Bidang Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	
		50. Penyelenggaraan pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	Izin Usaha

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan	Keterangan
		I. Bidang Jasa Informasi Pariwisata 51. Jasa Informasi Pariwisata.	Izin Usaha
		J. Bidang Jasa Konsultan pariwisata 52. Jasa Konsultan Pariwisata	Izin Usaha
		K. Bidang Jasa Pramuwisata 53. Jasa Pramuwisata	Izin Usaha
		L. Bidang wisata Tirta 54. Wisata Arung Jeram 55. Wisata Selam 56. Wisata Dayung 57. Wisata Selancar 58. Wisata Olahraga Tirta 59. Wisata Memancing 60. Dermaga Wisata	Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha
		M. Bidang SPA 61. SPA	Izin Usaha
10.	Pendidikan dan Kebudayaan	1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan. 2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.	Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional
11.	Ketenagakerjaan	1. BPJS Ketenagakerjaan 2. Pengesahan RPTKA 3. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) 4. Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 5. Izin Tempat Penampungan Pekerja Migran Indonesia. 6. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 7. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga. 8. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). 9. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	Pendaftaran Pendaftaran Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional
12.	Sektor Perkoperasian	1. Izin Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Izin Usaha

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan	Keterangan
	dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah	Koperasi 2. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 5. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi.	Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional
13.	Pertanahan	1. Izin Lokasi	Izin Usaha
II. PERIZINAN NON OSS			
1.	Pertanian	1. SIVET (Surat Izin Usaha Veteriner) 2. SIP DRH (Surat Izin Praktik Dokter Hewan) 3. SIPP Keswan (Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan) 4. SIPP Inseminator (Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator) 5. SIPP PKb (Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan) 6. SIPP ATR (Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi) 7. Izin Rumah Potong Hewan	
2.	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. IZin Medirikan Bangunan Non usaha	
3.	Kesehatan	1. Surat Izin Praktik Dokter (SIP) 2. Izin Optikal 3. Izin Balai Pengobatan 4. Izin Praktik Fisioterapi 5. Izin Pengobatan Tradisional Menetap	

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan	Keterangan
		6. Izin Pengobatan Tradisional Tidak Menetap 7. Izin Praktik Perawat 8. Izin Praktik Bidan 9. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 10. Izin Praktik Apoteker 11. Izin Praktik Tenaga Gizi 12. Izin Praktik Tenaga Sanitarian 13. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 14. Izin Praktik Radiografer 15. Izin Praktik Perawat Anestesi 16. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 17. Izin Praktik Laboratorium Medik 18. Izin Pekerjaan Tukang Gigi 19. Izin Operasional Puskesmas 20. Izin Unit Tranfusi Darah 21. Izin Elektromedis (SIP-E) 22. Izin Refraksionis Oftisien (SiKRO) 23. Izin Perekam Medis	
4.	Perhubungan	1. Izin Trayek Angkot/Angdes Dalam Kabupaten 2. Izin Usaha Bongkar Muat Barang 3. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan 4. Izin Usaha Angkutan Darat.	
5.	Komunikasi dan Informatika	1. Izin Warung Internet (Warnet) 2. Izin Menara Telekomunikasi	
6.	Ekonomi	1. Surat Izin Tempat Usaha 2. Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet 3. Izin Reklame	
7.	Sosial	1. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Izin Pemakaian Tanah Pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas	
NON PERIZINAN			

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan	Keterangan
1.	Pertanian	1. Persetujuan Perubahan Luas Lahan 2. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman 3. Persetujuan Perubahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan 4. Persetujuan Diversifikasi Usaha Perkebunan 5. Rekomendasi Untuk Memperoleh RMU 6. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) 7. Surat Keterangan Perjalanan Hewan	
2.	Kesehatan	1. Sertifikat Laik Hygene Air Isi Ulang 2. Sertifikat Laik Hygene sanitasi Hotel 3. Sertifikat Laik Hygene Jasa Boga 4. Sertifikat Laik Hygene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran	
3.	Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Surat Keterangan Penelitian (SKP)	
4. Surat keterangan yang mendukung kegiatan pemerintah dan kegiatan sosial			

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Barat

d. Jumlah Dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, ditetapkan 11 jenis pajak daerah yaitu :

- 1. Pajak Hotel
- 2. Pajak Restoran
- 3. Pajak Hiburan
- 4. Pajak Reklame
- 5. Pajak Penerangan Jalan
- 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7. Pajak Parkir
- 8. Pajak Air Tanah
- 9. Pajak Hasil Sarang Burung Walet
- 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan
- 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Untuk retribusi yang ditarik oleh Pemerintah Kab. Tanjung jabung Barat terdiri dari :

- I. Retribusi jasa umum :
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan
 - c. Retribusi penggantian akte catatan sipil
 - d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - e. Retribusi pelayanan pasar
 - f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - g. Retribusi pengujian kapal perikanan
 - h. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- II. Retribusi jasa usaha :
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi tempat pelelangan ikan
 - c. Retribusi terminal
 - d. Retribusi khusus parkir
- III. Retribusi perizinan tertentu :
 - a. Retribusi IMB
 - b. Retribusi izin trayek
 - c. Retribusi izin usaha perikanan
 - d. Retribusi perpanjangan IMTA

Dari 11 jenis pajak dan 16 retribusi tersebut diatas, terdapat 4 jenis pajak yang nilai kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019, 2020, dan usulan rencana pendapatan tahun 2021 diatas satu milyar yaitu (1) pajak penerangan jalan, (2) pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), (3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan, (4) pajak restoran.

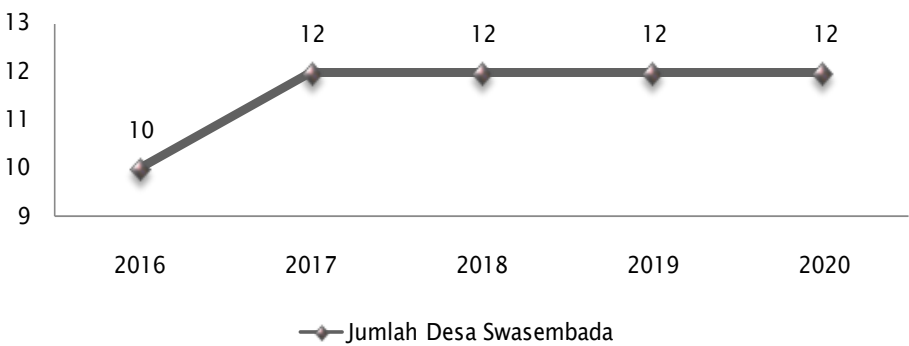
e. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa.

Dari 134 kelurahan/desa yang ada dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 12 desa yang digolongkan sebagai desa swasembada yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu desa Tanjung Tayas, desa Pinang Gading, desa Lubuk Lawas, desa Purwodadi, desa Lubuk Sebontan, desa Sungai Muluk, desa Pematang Balam, desa Suak Samin, desa pembengis, desa Tanjung Pasir, desa Parit Bilal, dan desa Harapan Jaya.

Kelurahan/desa tersebut diatas dapat dikatakan sebagai daerah perdesaan yang maju dimana masyarakatnya lebih mampu dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya daerahnya.

Gambar 2.65.

Jumlah Desa Swasembada dalam Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 s.d. 2020



Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanjung Jabung Barat , 2020

Selain desa swasembada ada juga kelompok desa swakarya yang berjumlah 95 desa, serta masih terdapat kelompok desa swadaya yang berjumlah 7 desa. Ketujuh desa swadaya tersebut adalah desa Sungai Badar, desa Rantau Badak Lamo, desa Sungai Papauh, desa Sungai Jering, desa Tanjung Paku, desa Suban, dan desa Pulau Pauh.

2.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia
a. Kualitas Penduduk (Rasio Tingkat Pendidikan)

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi, dan didukung dengan perhatian yang besar dari pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibidang pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kab. Tanjung Jabung Barat.

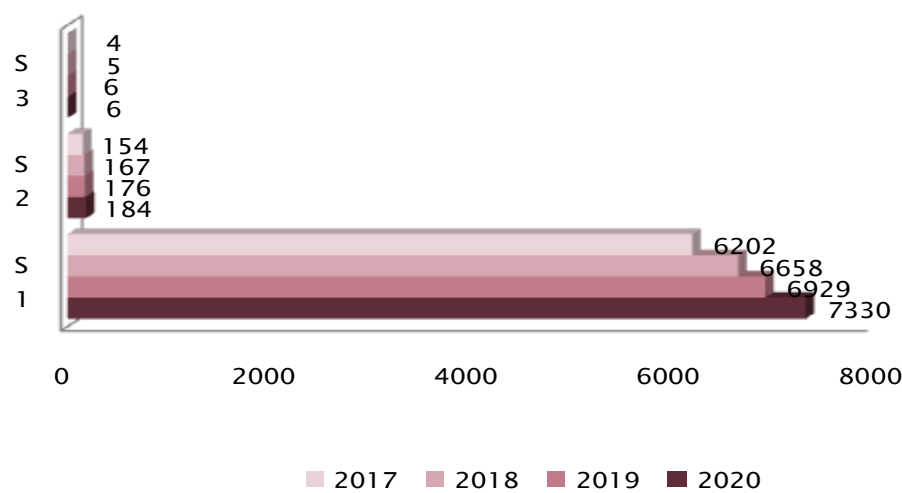
Untuk melihat meningkatnya kesadaran masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat akan pendidikan dapat dilihat dari jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi , pada tahun 2016 jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 5.980 orang meningkat menjadi 7.330 orang pada tahun 2020, untuk S2 dari berjumlah 127 orang di tahun 2016 menjadi 184 orang di tahun 2020, dan untuk S3 dari berjumlah 3 orang di tahun 2016 menjadi 6 orang di tahun 2020.

Tabel 2.62.
Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016 s.d. 2020

Pendidikan Terakhir	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jml Penduduk	%	Jml Penduduk	%	Jml Penduduk	%	Jml Penduduk	%	Jml Penduduk	%
Tidak / Belum sekolah	45.570	14,38	65.939	20,39	71.039	21,90	74.564	23,29	77.782	24.20
Tidak Tamat SD	39.887	12,59	40.502	12,52	40.256	12,41	39.474	12,33	38.350	11,93
Tamat SD	109.200	34,47	102.353	31,65	99.664	30,73	95.304	29,77	93.221	29,00
SLTP / MTs	47.363	14,95	52.646	16,28	51.554	15,90	49.457	15,45	49.668	15,45
SLTA / Sederajat	64.756	20,44	52.326	16,18	51.745	15,95	50.979	15,93	51.671	16,07
Diploma	3.929	1,24	3.283	1,02	3.244	1,00	3.219	1,01	3.260	1,01
Strata I	5.980	1,89	6.202	1,92	6.658	2,05	6.929	2,16	7.330	2,28
Strata II	127	0,04	154	0,05	167	0,05	176	0,05	184	0,05
Strata III	3	0,0009	4	0,0012	5	0,0015	6	0,0019	6	0,00
Total	316.815	100,00	323.409	100,00	324.332	100,00	320.108	100,00	321.472	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

Gambar 2.66.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan S1, S2, dan S3
Dalam Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 s.d. 2020

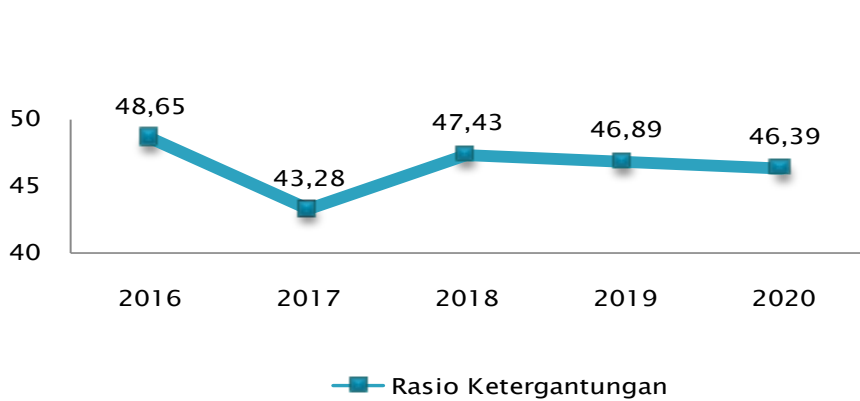


Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat , 2020

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Gambar 2.67.
Rasio Ketergantungan Tahun 2016 s.d. 2020 Kab. Tanjung Jabung Barat



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/kota Provinsi Jambi 2010-2020

Rasio ketergantungan Kab. Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuasi, dengan rata – rata rasio ketergantungan yaitu 46,52. Rasio ketergantungan terakhir di tahun 2020 ialah 46,39 berarti setiap penduduk usia produktif menanggung sejumlah 46 – 47 orang penduduk tidak usia produktif.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dituangkandalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja lebih memfokuskan pada pencapaian Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dari program / kegiatan. Perencanaan dan penganggaran disusun dalam suatu struktur APBD yang menggambarkan besaran pendanaan atas berbagai sasaran yang ingindicapai, tugas - tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil dimasyarakat untuk suatu tahun tertentu.

3.1.1.Kinerja Pelaksanaan APBD

Sesuai dengan kondisi faktual yang ada, Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih mempunyai ketergantungan pada pendapatan daerah yang bersumber dari luar Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti dana perimbangan baik Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2020 Peranan Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dalam pembiayaan daerah bila dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat, dengan proporsi PAD terhadap total pendapatan hanya sebesar 8,13%. Tahun 2020 sumber PAD berasal dari 11 jenis pajak daerah diantaranya adalah pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan dan bea perolehan hak atas dan bangunan (BPHTB), pajak hotel, pajak hiburan, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018 sampai dengan 2019 cukup signifikan. Realisasi PAD tahun 2018 sebesar Rp. 101.840.551.797,52 mengalami peningkatan sebesar 18,05% menjadi Rp. 120.220.481.667,74 pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.

115.556.810.302,20 (-3,88%), Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 terdiri dari atas penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 s/d 2020 Kab. Tanjung Jabung Barat

No.	Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	Rata-rata pertumbuh an (%)
1.	Pendapatan	1.240.729.170.150,30	1.287.049.668.686,61	1.383.043.412.834,65	1.642.338.243.283,71	1.421.415.183.080,31	9,94%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	85.934.484.184,94	98.779.362.060,27	101.840.551.797,52	120.220.481.667,74	115.556.810.302,20	11,70%
1.1.1	Pajak Daerah	27.471.080.669,28	27.267.183.231,75	31.358.808.219,70	35.428.274.303,50	30.830.489.374,00	10,82%
1.1.2	Retribusi Daerah	20.894.827.778,00	5.705.640.600,00	2.483.932.068,00	2.407.132.348,00	1.896.201.671,00	-26,42%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	8.712.576.330,97	10.104.075.106,56	10.429.377.311,40	10.948.042.702,44	10.663.362.645,85	3,38%
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	28.855.999.406,69	55.702.463.121,96	57.568.434.198,42	71.437.032.313,80	72.166.756.611,35	30,49%
1.2.	Dana Perimbangan	1.049.466.185.966,00	1.037.376.490.573,00	1.096.229.881.989,00	1.306.126.943.112,00	1.059.212.967.160,00	10,23%
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak	137.284.107.290,00	115.040.633.279,00	105.796.317.817,00	117.601.645.321,00	130.522.695.657,00	0,14%
	Dana bagi hasil bukan pajak	293.123.323.566,00	294.757.606.326,00	341.213.472.966,00	489.024.722.923,00	268.399.109.936,00	13,49%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	507.980.253.000,00	506.589.288.000,00	506.466.327.157,00	536.177.694.000,00	487.550.827.000,00	5,61%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	111.078.502.110,00	120.988.962.968,00	142.753.764.049,00	163.322.880.868,00	172.740.334.567,00	395,74%
1.3.	Lain – lain pendapatan daerah yang sah	105.328.499.999,36	150.893.816.053,34	184.972.979.048,13	216.002.438.503,97	246.645.405.618,11	13,74%
1.3.1.	Hibah		4.500.000.000,00	-	40.875.600.000,00	49.482.290.424,00	414,70%
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	33.848.239.999,36	45.004.123.053,34	49.911.489.707,53	60.873.030.503,97	53.850.760.594,11	7,65%
1.3.4.	Dana Penyesuaian	71.480.260.000,00	90.349.693.000,00	89.944.914.000,00	106.213.808.000,00	135.272.354.600,00	8,44%
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-			8.040.000.000,00	8.040.000.000,00	27,31%
1.3.6.	Pendapatan Lainnya		11.040.000.000,00	45.116.575.340,60	-		308,66%
2	Belanja	1.002.765.518.262,0	1.267.089.251.808,85	1.346.000.378.534,	1.702.411.600.008,04	1.390.378.974.972,	7,82%

No.	Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	Rata-rata pertumbuh an (%)
		8		87		75	
2.1	Belanja Tidak Langsung	549.398.656.165,00	580.285.309.830,00	574.930.070.914,00	670.451.816.610,91	727.743.148.797,50	8,28%
2.1.1	Belanja pegawai	405.495.564.422,00	383.902.114.493,00	386.565.076.903,00	427.158.692.501,91	432.007.609.457,00	2,36%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-		
2.1.3.	Belanja Subsidi	7.000.000.000,00	5.854.197.000,00	6.251.000.000,00	6.137.871.352,00	4.898.400.000,00	15,64%
2.1.4	Belanja Hibah	5.754.932.050,00	8.180.832.000,00	9.223.693.235,00	9.488.382.840,00	46.479.084.751,94	46,86%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	1.802.500.000,00	1.715.000.000,00	-15,37%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah, Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	628.749.000,00	181.198.666.497,00	171.690.442.500,00	3.262.852.560,00	203.052.798.981,00	5727,15%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan pada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa & Partai Politik	128.006.032.340,00	1.066.375.840,00	1.036.477.200,00	222.601.517.357,00	1.071.390.400,00	2866,85%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.513.378.353,00	83.124.000,00	163.381.076,00	-	38.518.865.207,56	293,17%
2.2.	Belanja Langsung	453.366.862.097,08	686.803.941.978,85	771.070.307.620,87	1.031.959.783.397,13	662.635.826.175,25	9,48%
2.2.1.	Belanja Pegawai	64.425.690.390,00	56.800.831.250,00	81.884.325.190,00	57.978.909.797,96	71.575.142.212,80	72536,77%
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.829.986.151,50	211.989.939.816,00	269.528.102.992,62	276.750.628.040,44	237.091.733.041,40	1,62%
2.2.3.	Belanja Modal	225.111.185.555,58	418.013.170.912,85	419.657.879.438,25	697.230.245.558,73	353.968.950.921,05	17,35%
3	Pembiayaan	(19.295.109.829,86)	213.668.542.058,36	229.385.760.171,12	266.428.794.470,90	206.355.437.746,57	-265,24%
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.662.255.952,44	218.668.542.058,36	233.695.760.171,12	266.428.794.470,90	206.355.437.746,57	371,78%
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	29.957.365.782,30	5.000.000.000,00	4.310.000.000,00	-	-	-10,06%

Sumber data : BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat, 2021

Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menganalisa laporan keuangan adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca. Pada dasarnya perhitungan rasio-rasio keungan adalah untuk menilai kinerja keuangan suatu organisasi di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar dan rasio cepat Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu tahun 2015-2020 mempunyai nilai lebih dari satu, yang berartibahwa pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kemampuan memenuhi kewajiban yangjatuh tempo. Rasio lancar dan rasio cepat terakhir pada tahun 2020 mencapai 1436,14% dan 1327,81%. Sedangkan Rasio solvabilitas, rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang, dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhiseluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rata-rata rasio total kewajiban terhadap total asetdan total ekuitas adalah dibawah angka 1, hal ini menunjukkan bahwa total kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 3.2.
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio likuiditas :					
a. Rasio lancar (Current Ratio)	14607,88 %	6122,05%	2752,54%	930,74%	1436,14%
b. Rasio Cepat (Quick Ratio)	13852,84 %	5682,15%	2632,66%	873,59%	1327,81%
Rasio Solvabilitas					
a. Rasio Hutang Terhadap Aktiva (Total Debt to Asset Ratio)	0,0920%	0,1281%	0,3095%	0,6210%	0,4267%
b. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio)	0,092%	0,128%	0,310%	0,625%	0,4285%

Perkembangan aset, kewajiban, ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 sampai dengan 2020 pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3. Rata – rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 sampai dengan 2020

No.	Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	Rata-rata pertumbuhan (%)
1	ASET	3.072.138.832.053,39	3.649.381.086.626,18	3.796.985.925.236,02	4.278.433.917.846,69	4.341.579.907.257,99	8,85%
1.1	ASET LANCAR	412.992.628.417,68	286.278.860.315,41	323.504.110.547,28	270.800.433.205,65	266.032.042.433,38	155,55%
1.1.1	Kas	218.736.023.158,36	233.763.241.271,12	266.428.794.470,90	206.434.550.356,57	237.415.647.426,13	404,11%
1.1.2	Piutang	172.910.099.469,32	31.944.895.623,29	42.985.809.649,38	45.786.166.743,04	8.070.213.534,37	125,55%
1.1.3	Persediaan	21.346.505.790,00	20.570.723.421,00	14.089.506.427,00	18.579.716.106,04	20.068.283.612,36	8,70%
1.1.4	Investasi jangka panjang	136.805.498.750,71	144.708.137.930,97	143.922.615.844,97	150.093.495.313,17	144.635.843.523,35	8,85%
1.2	ASET TETAP	2.473.415.996.486,33	3.088.779.263.847,17	3.258.682.166.830,52	3.795.541.162.585,50	3.897.935.122.502,09	8,09%
1.2.1	Tanah	132.286.676.102,50	155.987.296.587,50	153.075.333.510,50	162.719.722.534,17	162.884.266.784,17	4,65%
1.2.2	Peralatan dan mesin	327.326.378.694,58	279.443.509.195,69	299.054.544.203,59	325.737.512.260,59	390.431.176.092,86	3,14%
1.2.3	Gedung dan bangunan	760.809.503.910,23	799.950.887.881,91	801.311.808.291,96	948.947.607.676,66	1.059.135.982.698,78	9,18%
1.2.4	Jalan,irigasi, dan jaringan	2.367.280.016.630,32	2.638.112.232.695,42	2.803.746.637.675,67	3.627.159.739.440,97	3.780.660.014.301,21	10,53%
1.2.5	Aset tetap lainnya	31.786.143.021,75	14.897.856.537,75	23.445.450.800,03	27.807.565.596,56	25.541.619.594,03	20,05%
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	305.360.527.879,56	313.048.190.317,56	425.540.132.286,30	94.367.674.241,28	78.657.179.026,94	-10,55%
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	(1.451.433.249.752,61)	(1.112.660.709.368,66)	(1.247.491.739.937,53)	(1.391.198.659.164,73)	(1.599.375.115.995,90)	9,59%
1.3	ASET LAINNYA	48.924.708.398,67	129.614.824.532,63	70.877.032.013,25	61.998.826.745,37	32.976.898.799,17	1063,35%
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran						
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian						

No.	Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	Rata-rata pertumbuhan (%)
	daerah						
1.3.3	Kemitraan dengan pihak kedua						
1.3.4	Aset tak berwujud	916.814.000,00	1.284.594.000,00	1.428.894.000,00	950.668.792,00	2.232.859.256,00	30,63%
1.3.5	Aset Lain-lain	48.758.608.398,67	197.541.486.747,16	187.096.296.561,74	61.048.157.953,37	106.778.545.270,39	76,85%
1.3.6	Akumulasi Amortisasi	(750.714.000,00)	(990.370.000,00)	(1.066.331.000,00)		(1.474.399.516,00)	19,80%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang di Reklas ke aset lainnya		(68.220.886.214,53)	(116.581.827.548,49)		(74.560.106.211,22)	70,89%
	JUMLAH ASET DAERAH	3.072.138.832.053,39	3.649.381.086.626,18	3.796.985.925.236,02	4.278.433.917.849,69	4.341.579.907.257,99	8,85%
2	KEWAJIBAN	2.827.190.327,00	4.676.193.867,00	11.752.935.541,00	26.476.988.437,00	18.524.077.324,42	44,34%
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.827.190.327,00	4.676.193.867,00	11.752.935.541,00	26.476.988.437,00	18.524.077.324,42	44,34%
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	67.481.100,00	67.481.100,00		79.112.610,00	24.001.572,00	-26,23%
2.1.2	Uang muka dari kas daerah						
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka			573.056.333,00	477.823.602,00	464.832.587,00	-9,67%
2.1.4	Utang kepada pihak ketiga	19.414.700,00					-99,93%

No.	Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	Rata-rata pertumbuhan (%)
2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.740.294.527,00					
2.1.6	Utang Belanja		4.608.712.767,00	11.179.879.208,00	25.920.052.225,00	18.035.243.165,42	81,34%
3	EKUITAS DANA	3.069.311.641.726,39	3.644.704.892.759,18	3.785.232.989.695,02	4.224.707.437.857,62	4.323.055.829.933,57	8,96%
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	3.069.311.641.726,39	3.644.704.892.759,18	3.785.232.989.695,02	4.224.707.437.857,62	4.323.055.829.933,57	8,96%
3.1.1	SILPA	3.069.311.641.726,39	3.644.704.892.759,18	3.785.232.989.695,02	4.224.707.437.857,62	4.323.055.829.933,57	8,96%
3.1.2	Cadangan piutang						
3.1.3	Cadangan persediaan						
3.1.4	Dst.....						
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI						
3.2.1	Diinvestasikan dalam asset tetap						
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset lainnya						
3.2.3	Dst.....						
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.072.138.832.053,39	3.649.381.086.626,18	3.796.985.925.236,02	4.251.184.426.294,62	4.341.579.907.257,99	8,85%

Sumber data : BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu

Pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah (2) dana perimbangan dan bagi hasil dari Provinsi dan (3) penerimaan lain-lain daerah yang sah. ternyata Dana Perimbangan/bantuan pemerintah pusat memberikan kontribusi yang cukup besar. Sementara sumber penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) kontribusinya masih relatif kecil dibanding dengan bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, ketergantungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih cukup tinggi dari pemerintah pusat.

Langkah-langkah kebijakan untuk mengurangi secara bertahap ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui usaha intensifikasi, antara lain (1) Melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutahiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal (2) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan dengan cara menekan biaya operasionalnya (3) Melakukan upaya penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi yang menunggak melalui tim khusus yang dibentuk oleh OPD terkait.

Arah Kebijakan Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung (BTL) selalu diapresiasi sebagai belanja konsumtif, karena tidak berimplikasi pada aktivitas perekonomian, terutama dalam kaitannya dengan penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini cukup beralasan, karena dalam pos Belanja Tidak Langsung sangat didominasi oleh belanja pegawai.

Belanja Langsung (BL) lebih menganggarkan keberpihakan APBD terhadap kesejahteraan masyarakat, karena alokasi anggarannya diarahkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur dasar dan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.4.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Uraian	Total belanja pegawai (Rp.)	Total pengeluaran (Belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp).	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2017	440.702.945.743,00	1.272.089.251.808,85	34,64
2	Tahun Anggaran 2018	468.449.402.093,00	1.350.310.378.534,87	34,69
3	Tahun Anggaran 2019	485.139.592.049,87	1.702.422.320.008,04	28,50
4	Tahun Anggaran 2020	503.582.751.669,80	1.390.378.974.972,75	36,22

Sumber data : BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Tabel 3.5.
Defisit Rill Anggaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.287.049.668.686,61	1.383.043.412.834,65	1.642.348.963.283,71	1.421.415.183.080,31
	(Dikurangirealisasi)				
2.	Belanja Daerah	1.267.089.251.808,85	1.346.000.378.534,87	1.702.422.320.008,04	1.390.378.974.972,75
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000,00	4.310.000.000,00	-	
	Defisit rill	14.960.416.877,76	32.733.034.299,78	(60.073.356.724,33)	31.036.208.107,56

Sumber data : BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat

Tabel 3.6.
Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Uraian	Proporsidari total defisit rill			
		2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-	100,00	-
2.	Pencarian Dana Cadangan	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekeayaan Daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-

4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-

Sumber data : BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat

Tabel 3.7.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Uraian	2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	233.628.958.936,12	100,00	266.428.794.470,90	100,00	206.355.437.746,57	100,00	237.391.645.854,13	100,00
2.	Pelampauan penerimaan PAD	15.448.106.869,27	6,61	15.393.365.226,52	5,78	15.983.834.782,74	7,75	12.103.102.632,20	5,87
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	68.768.248.603,00	29,43	137.851.826.989,00	51,74	45.921.768.884,00	22,25	100.485.552.901,00	48,70
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	7.273.263.526,34	3,11	8.349.343.584,53	3,13	(12.765.600.000,00)	(6,19)	(821.302.626,00)	(0,40)
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	218.668.542.058,36	93,60	233.628.958.936,12	87,69	266.428.794.470,90	129,11	206.355.437.746,57	100,00
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	4.676.193.867,00	2,00	11.179.879.208,00	4,20	25.920.052.225,00	12,56	18.524.077.324,42	8,98
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data : BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat

3.3. Kerangka Pendanaan
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Tabel 3.8.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	Pertum buhan	2023 (Rp.)	Pertum buhan	2024 (Rp.)	Pertum buhan	2025 (Rp.)	Pertum buhan	2026 (Rp.)	Pertu mbuha n
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.247.761.849.420,00	1.150.000.000.000,00	-7,83%	1.199.800.001.000,00	4,33%	1.243.840.001.500,00	3,67%	1.299.812.800.000,00	4,49%	1.364.803.440.500,00	5%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	120.000.000.000,00	96.135.351.000,00	-19,88%	101.660.000.000,00	5,74%	111.945.600.000,00	10,11%	123.482.215.500,00	10,30%	136.480.344.500,00	10,52%
1.1.1.	Pajak daerah	36.596.319.500,00	36.304.197.500,00		38.122.500.000,00		41.979.600.000,00		45.688.419.500,00		49.815.325.500,00	
1.1.2.	Retribusi daerah	3.175.100.000,00	2.295.170.000,00		3.558.100.000,00		5.597.280.000,00		7.408.933.000,00		9.553.624.500,00	
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.238.139.900,00	11.226.000.000,00		12.707.500.000,00		13.993.200.000,00		15.435.277.000,00		17.060.043.000,00	
1.1.4.	Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah	66.990.440.600,00	46.309.983.500,00		47.271.900.000,00		50.375.520.000,00		54.949.586.000,00		60.051.351.500,00	
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.088.436.649.420,00	1.010.039.349.000,00	-7,20%	1.052.342.562.500,00	4,18%	1.083.807.091.000,00	2,98%	1.125.838.908.500,00	3,87%	1.175.306.836.500,00	4,39%
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	795.854.594.000,00	713.375.889.000,00		745.736.304.500,00		766.907.606.500,00		795.688.549.000,00		829.997.891.000,00	
1.2.1.1	Dana perimbangan	661.415.499.000,00	596.612.737.000,00		606.929.699.500,00		621.033.656.000,00		642.313.052.500,00		668.654.127.000,00	
1.2.1.2	Dana insentif daerah	25.251.347.000,00	7.575.404.000,00		25.251.347.000,00		27.776.482.000,00		30.554.129.500,00		33.609.542.500,00	
1.2.1.3	Dana otonomi khusus	-	-		-		-		-		-	
1.2.1.4	Dana keistimewaan	-	-		-		-		-		-	
1.2.1.5	Dana desa	109.187.748.000,00	109.187.748.000,00		113.555.258.000,00		118.097.468.500,00		122.821.367.000,00		127.734.221.500,00	
1.2.2.	Transfer antar daerah	48.116.796.420,00	52.144.709.000,00		54.751.944.500,00		57.489.541.500,00		60.364.018.500,00		63.382.219.500,00	
1.22.1.	Pendapatan bagi hasil	46.616.796.420,00	52.144.709.000,00		54.751.944.500,00		57.489.541.500,00		60.364.018.500,00		63.382.219.500,00	
12.2.	Bantuan keuangan	1.500.000.000,00	0,00		0,00							

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	Pertum buhan	2023 (Rp.)	Pertum buhan	2024 (Rp.)	Pertum buhan	2025 (Rp.)	Pertum buhan	2026 (Rp.)	Pertu mbuha n
2.												
1.3.	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.325.200.000,00	43.825.300.000,00	11,44%	45.797.438.500,00	4,50%	48.087.310.500,00	5%	50.491.676.000,00	5%	53.016.259.500,00	5%
1.3.1.	Hibah	39.325.200.000,00	43.825.300.000,00		45.797.438.500,00		48.087.310.500,00		50.491.676.000,00		53.016.259.500,00	
1.3.2.	Dana darurat	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.3.	Lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan	-	-		-		-		-		-	
2	BELANJA DAERAH	1.298.220.221.125,-	1.350.149.029.970,-		1.404.154.991.169,-		1.460.321.190.816,-		1.518.734.038.448,-		1.579.483.399.986,-	
2.1.	BELANJA OPERASI	833.361.284.621,-	866.695.736.005,-		901.363.565.446,-		937.418.108.064,-		974.914.832.386,-		1.013.911.425.682,-	
2.1.1.	Belanja pegawai	483.263.425.735,-	502.593.962.764,-		522.697.721.275,-		522.697.721.275,-		543.605.630.126,-		565.349.855.331,-	
2.1.2.	Belanja barang dan jasa	330.054.809.836,-	343.257.002.229,-		356.987.282.319,-		371.266.773.611,-		386.117.444.556,-		401.562.142.338,-	
2.1.3.	Belanja subsidi	7.043.441.650,-	7.325.179.316,-		7.618.186.489,-		7.922.913.948,-		8.239.830.506,-		8.569.423.726,-	
2.1.4.	Belanja hibah	12.999.607.400,-	13.519.591.696,-		14.060.375.364,-		14.060.375.364,-		14.622.790.378,-		15.207.701.994,-	
2.2.	BELANJA MODAL	275.738.203.118,-	286.767.731.242,-		298.238.440.492,-		310.167.978.112,-		322.574.697.237,-		335.477.685.126,-	
2.2.1.	Belanja modal peralatan dan mesin	48.859.073.332,-	50.813.436.265,-		52.845.973.716,-		54.959.812.665,-		57.158.205.171,-		59.444.533.378,-	
2.2.2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.518.033.698,-	70.218.755.045,-		73.027.505.248,-		75.948.605.458,-		78.986.549.676,-		82.146.011.663,-	
2.2.3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.739.402.976,-	160.928.979.095,-		167.366.138.259,-		174.060.783.789,-		181.023.215.141,-		188.264.143.746,-	
2.2.4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.621.693.112,-	4.806.560.836,-		4.998.823.270,-		5.198.776.201,-		5.406.727.249,-		5.622.996.339,-	
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.888.376.736,-	4.043.911.805,-		4.205.668.278,-		4.373.895.009,-		4.548.850.809,-		4.730.804.841,-	
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	3.888.376.736,-	4.043.911.805,-		4.205.668.278,-		4.373.895.009,-		4.548.850.809,-		4.730.804.841,-	
2.4.	BELANJA TRANSFER	185.232.356.650,-	192.641.650.916,-		200.347.316.953,-		208.361.209.631,-		216.695.658.016,-		225.363.484.337,-	
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	3.659.631.950,-	3.806.017.228,-		3.958.257.917,-		4.116.588.234,-		4.281.251.763,-		4.452.501.834,-	

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	Pertum buhan	2023 (Rp.)	Pertum buhan	2024 (Rp.)	Pertum buhan	2025 (Rp.)	Pertum buhan	2026 (Rp.)	Pertu mbuha n
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	181.572.724.700, -	188.835.633.688, -		196.389.059.036 ,-		204.244.621.397 ,-		212.414.406.25 3 ,-		220.910.982.503 ,-	
3	Pembiayaan daerah											
3.1.	Penerimaan pembiayaan											
3.2.	Pengeluaran pembiayaan											

Sumber data : BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat, dan Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat

Tabel 3.9.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Uraian	Proyeksi (Tahun)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	579.26 6.067.0 35,-	454.76 4.386.3 20,-	476.75 4.962.7 72,-	512.78 1.070.5 94,-	539.51 1.511.8 58,-	574.09 0.100.8 32,-
2	Prioritas I	81.887. 500.00 0,-	84.029. 347.98 7,-	88.500. 000.00 0,-	93.180. 000.00 0,-	100.44 0.000.0 00,-	103.60 0.000.0 00,-
3	Prioritas II	155.41 8.600.0 00,-	180.25 6.800.0 00,-	188.14 0.000.0 00,-	200.50 0.000.0 00,-	200.00 0.000.0 00,-	200.00 0.000.0 00,-
4	Prioritas III	341.95 9.967.0 35,-	190.47 8.238.3 33,-	200.11 4.962.7 72,-	219.10 1.070.5 94,-	239.07 1.511.8 58,-	270.49 0.100.8 32,-

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

a. Permasalahan pokok daerah.

1. Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 10,26%. Bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di urutan ke 11 dari 12 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Serta masih jauh diatas rata – rata tingkat kemiskinan 12 kabupaten/kota (7,52%). Target tingkat kemiskinan di tahun 2021 (akhir periode RPJMD tahun 2016 - 2021) adalah 10,25%.

Beberapa penyebab kemiskinan di Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- Masih terdapat orang tidak bekerja / pengangguran, Pada Tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,16%, atau sebanyak 4.555 orang pengangguran terbuka (dari jumlah penduduk angkatan kerja).
 - Berpenghasilan rendah, Pada tahun 2020, pengeluaran perkapita Kab. Tanjung Jabung Barat pertahun sebesar Rp.9.480.000,- , bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, Kab. Tanjung Jabung Barat menempati urutan ke 10 dari 12 dan masih dibawah rata-rata pengeluaran perkapita Prov. Jambi.
 - Dukungan infrastruktur yang buruk di beberapa wilayah kecamatan, masih terdapat dua kecamatan dengan kondisi infrastruktur dasar yang kurang seperti jalan, jembatan, air bersih, akses telekomunikasi, akses listrik, dan lainnya serta dengan akses buruk menuju ibu kota kabupaten, yaitu Kec. Kuala Betara dan Kec. Seberang Kota.
2. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, Tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 67,54, yang juga angka yang sama pada tahun 2019,

artinya tidak terdapat peningkatan (ukuran) kualitas sumber daya manusia Kab. Tanjung Jabung Barat. Bila menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, IPM Kab. Tanjung Jabung Barat berada di urutan ke 11 dari 12 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Serta masih dibawah rata – rata IPM Prov. Jambi (71,26) dan Nasional (71,92).

3. Tingginya angka Prevalensi Stunting Kab. Tanjung Jabung Barat tergolong tinggi. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 Provinsi Jambi, Prevalensi stunting Kabupaten Tanjung Jabung Barat menempati posisi tertinggi dibanding dengan kabupaten/kota dalam Prov. Jambi yaitu 43,99%, angka ini diatas angka prevalensi stunting nasional dan provinsi Jambi. Kondisi prevalensi stunting terakhir pada tahun 2020 menurun menjadi 21,81%, namun masih termasuk kategori tinggi.
- b. Permasalahan menurut urusan penyelenggaraan pemerintah
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Akses dan mutu layanan pendidikan usia dini (PAUD), dasar (SD) dan pertama (SMP) yang tidak merata, PAUD, SD, dan SMP tersebar di 13 kecamatan baik di kelurahan maupun desa, sebagian SD, dan SMP terutama yang terletak di desa – desa dengan akses jalan yang buruk dan dengan fasilitas layanan dasar yang minim seperti pada desa – desa yang ada di Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Senyerang, dan Kecamatan Renah Mendaluh. Tidak meratanya kualitas layanan pendidikan PAUD, SD, dan SMP disebabkan oleh faktor belum tercukupinya kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kondisi sarana dan prasarana sekolah yang tidak bagus lagi, dan tidak meratanya sebaran guru yang berkompetensi. Banyak guru yang berkompetensi mengajar di sekolah – sekolah dalam Kecamatan Tungkal Ilir.
 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Mutu dan pelayanan kesehatan belum memenuhi standar. Rumah sakit dan puskesmas masih mengalami kekurangan tenaga sumber daya medis terutama dokter spesialis di rumah sakit, dan belum terpenuhinya 9 jenis SDM Kesehatan di setiap Puskesmas. Selain kekurangan tenaga medis, rumah sakit baik RSUD KH.Daud Arif-Kuala Tungkal dan RSUD Kahiruddin Suryah-Merlung yang masih tergolong baru masih kekurangan gedung pelayanan kesehatan rawat inap instalasi penunjang. Puskesmas – puskesmas yang ada belum menerapkan manajemen perencanaan berbasis ASPAK dalam pemenuhan sarana prasarana, sumber daya kesehatan serta obat-obatan, vaksin serta BMHP untuk pelayanan kesehatan di puskesmas.
 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, kondisi jalan berdasarkan panjang jalan kabupaten, dengan panjang jalan 1.265 km yang ditetapkan dengan SK Bupati No.

600/707/DPU/2016, tentang Status Jalan Kabupaten, ditahun 2020 dengan kondisi baik masih terbilang rendah yaitu sebesar 22,70%, dalam kondisi sedang sebesar 34,03%, dan sisanya dalam kondisi rusak/rusak berat.

- Masih terdapat dua Ibu kota kecamatan yang belum dapat diakses oleh kendaraan roda empat, yaitu Kec. Kuala Betara dan Kec. Seberang Kota.
- Hanya sekitar 70,84% rumah tangga (KK) atau sejumlah 59.256 rumah tangga mendapatkan akses pelayanan air bersih melalui penyediaan air bersih jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi. Sampai tahun 2020 ini masih ada dua kecamatan yang belum mendapatkan layanan air bersih perpipaan (PDAM) yaitu Kec. Kuala Betara dan Kec. Seberang Kota

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- Masih terdapat kawasan permukiman kumuh di perkotaan, Berdasarkan SK Bupati Nomor 438/Kep.Bup/Bappeda.2017 tentang Penetapan Lokasi Perkumuhan Dan Permukiman Kumuh, teridentifikasi dua kecamatan yang memiliki kawasan permukiman kumuh yaitu Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Bram Itam, dengan luasan kawasan permukiman kumuh sebesar 255,2 Ha. Pada tahun 2020 luasan kawasan permukiman kumuh masih tersisa sebesar 126,5 Ha.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- Kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan – perundang-undangan dan norma yang berlaku, terakhir dalam tahun 2020, terdapat 42 kasus Pelanggaran Perda dan gangguan ketentraman dan ketertiban. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah. Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Banyaknya jumlah/jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kab. Tanjung Jabung Barat, jumlah/jenis PPKS terbanyak adalah fakir miskin (26.960 jiwa) kemudian lanjut usia terlantar (11.198 jiwa), dari jumlah tersebut untuk PPKS jenis fakir miskin baru terlayani sekitar 16.933 atau

62.80%. sedangkan PPKS jenis usia lanjut terlantar baru terlayani sekitar 1.718 jiwa atau 15,3%. Selain itu pelayanan kesejahteraan sosial untuk PPKS jenis penyandang disabilitas, wanita rawan sosial ekonomi, dan anak jalanan juga masih terbilang sangat kecil.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Rendahnya kualitas tenaga kerja, banyak tenaga kerja baik dari tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau dari penduduk yang ingin bekerja tidak memiliki keahlian atau keterampilan. Penduduk laki – laki maupun perempuan kebanyakan bekerja pada lapangan pekerjaan pertanian yaitu sebesar 61,89%, sisanya pada lapangan pekerjaan jasa (30,91%) dan lapangan pekerjaan manufaktur (7,20%). Porsi terbesar orang yang bekerja pada lapangan pekerjaan pertanian bekerja pada jenis buruh tani yang tidak memerlukan keahlian atau keterampilan tertentu, dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Masih terdapat kesenjangan kesetaraan gender antara laki – laki dan perempuan terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 85,68%.
- Pemenuhan hak – hak anak belum optimal, Tahun 2020 berdasarkan kriteria capaian indikator – indikator Kota Layak Anak (KLA) masih belum mencapai status pratama, diantara indikator-indikator KLA tersebut yang masih belum dapat dipenuhi seperti Jaminan atas hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruangruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya, Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya, Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, dan lainnya.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Rendahnya mutu beras, beras hasil produksi pertanian Kab. Tanjung Jabung Barat tidak banyak diminati masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat sendiri begitu juga Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tidak banyak menyerap beras local dikarenakan tidak memenuhi standar kualitas. Penanganan padi pasca produksi sangat mempengaruhi mutu beras, kurangnya sarana dan prasarana seperti trasher, lantai jemur, Rice Milling Unit dan rumahnya akan mengurangi mutu beras.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- Kualitas lingkungan hidup Kab. Tanjung Jabung Barat dinilai dari kualitas air udara. dan tutupan lahan. Hasil pengukuran kualitas air sungai di tahun 2020 berada pada klasifikasi “sedang” atau kelas III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Sedangkan hasil pengukuran kualitas udara berada pada klasifikasi “Baik”, dan kualitas tutupan lahan mengalami penurunan setiap tahunnya, secara umum penurunan kualitas tutupan lahan disebabkan berkurangnya luasan tutupan lahan hijau akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan infrastruktur yang mana tak sebanding bertambahnya luas tutupan melalui aktivitas penghijauan.
- Belum maksimalnya pelayanan penanganan sampah di 13 Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Pelayanan maksimal baru hanya di 1 kecamatan, yaitu :
 1. Kecamatan Tungkal Ilir
- Pelayanan manual di 4 kecamatan yaitu :
 1. Kecamatan Muara Papalik
 2. Kecamatan Merlung
 3. Kecamatan Tungkal Ulu
 4. Kecamatan Tebing Tinggi
- Belum dilayani dalam penanganan sampah di 8 kecamatan, yaitu :
 1. Kecamatan Bram Itam
 2. Kecamatan Kuala Betara
 3. Kecamatan Betara
 4. Kecamatan Pengabuan
 5. Kecamatan Senyerang
 6. Kecamatan Seberang Kota
 7. Kecamatan Batang Asam
 8. Kecamatan Renah Mendaluh

Jumlah timbulan sampah rumah tangga dan dunia usaha semakin bertambah setiap tahunnya disebabkan: Bertambahnya jumlah penduduk, perluasan daerah pemukiman penduduk, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya sementara Sarana dan prasarana dalam penanganan sampah tidak memadai seperti kendaraan operasional yang sudah tua, tempat pembuangan sampah sementara yang letaknya tidak strategis, urangnya tong sampah kemudian program tidak berjalan maksimal dalam penanganan sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Penduduk yang tempat tinggalnya jauh dari Kantor Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil-Kuala Tungkal, seperti penduduk di Kecamatan Tebing Tinggi, Tungkal Ulu, Kec Batang Asam, Kec. Merlung, Kec. Muara Papalik, dan Renah Mendaluh, serta Kec. Senyerang cukup mengalami hambatan dalam

mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipilnya, faktor waktu/lama mengurus, harus menunggu giliran, kurang bahan administrasi yang dipersyaratkan akibat ketidaktahuan, dan tidak mempunyai tempat untuk menginap apabila pengurusan tidak selesai dalam satu hari serta kehabisan material/bahan cetak administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Desa di Kab. Tanjung Jabung Barat dengan status desa berkembang masih cukup banyak yaitu berjumlah 91 desa, dan masih terdapat 2 desa dengan status desa tertinggal yaitu desa Rawang Kempas dan Lubuk Lawas, sedangkan desa dengan status desa maju berjumlah 18 desa, dan desa dengan status desa mandiri berjumlah 3 desa.

Indikasinya bahwa 131 desa belum tercapai dalam pemenuhan komponen – komponen dalam indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Permen desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Maju. Beberapa penyebabnya yaitu Rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Belum optimalnya pemberdayaan potensi yang dimiliki desa untuk membangun dan mengembangkan desa.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Angka Kelahiran Remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) masih tinggi yaitu 69 per 1.000 perempuan, beberapa faktor penyebabnya yaitu perkawinan pada usia dini dan rendahnya pemakaian kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS). Kelahiran pada usia remaja bila tidak terkendali dengan baik oleh kedua pasangan sebagai orang tua maka dapat mengakibatkan dampak buruk terutama bagi perkembangan anak dan atau keberlangsungan rumah tangga.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) belum optimal, kondisi geografis Kab. Tanjung Jabung Barat di sebagian wilayah timur terdapat banyak sungai – sungai baik besar maupun kecil yang memisahkan desa dan atau kecamatan. Untuk menghubungkan dengan baik antar desa/kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat masih Banyak diperlukan dermaga / halte sungai, selain itu kondisi sekarang dermaga / halte sungai sebagian dalam kondisi rusak.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Masih terdapat desa – desa yang belum mendapat akses layanan telekomunikasi atau sangat kurang, yaitu ada sekitar 54 desa yang terbagi di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Seberang Kota,

Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang. Pemenuhan akses layanan telekomunikasi ini sangat bergantung pada pihak swasta (perusahaan – perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi), untuk itu perlu dukungan dan dorongan dari Pemerintah Daerah agar pemangku kepentingan mau meluaskan jaringan telekomunikasinya hingga menjangkau desa – desa yang dimaksud diatas.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi tidak aktif cukup banyak, dari sekitar 417 koperasi yang terdaftar hanya sebesar 56% koperasi yang aktif atau sekitar 233 koperasi aktif, jumlah ini hampir setengahnya dari jumlah koperasi yang terdaftar. Beberapa penyebab koperasi menjadi tidak aktif yaitu dikarenakan tidak adanya usaha koperasi, kurangnya kemampuan pengurus/pengelola koperasi dalam mengembangkan usaha koperasi, dan rendahnya pengawasan dari internal koperasi terhadap pengelolaan keuangan koperasi.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menarik minat investor masih belum cukup, semua kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk dikelola, namun perlu adanya sarana/prasarana yang disediakan Pemerintah Daerah untuk mempermudah berjalannya kegiatan investasi, sarana/prasarana tersebut berupa jalan, jembatan, dermaga, dan lainnya.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Masih sedikitnya kegiatan pembinaan kepemudaan oleh Pemerintah daerah, dari 29 organisasi kepemudaan yang terdata di Kab. Tanjung Jabung Barat, hanya ada sekitar 9 organisasi yang aktif atau sekitar 30 persennya, seluruh organisasi kepemudaan terdiri atas pemuda, yang mana diketahui bahwa sifat dan sikap pemuda cenderung labil maka perlu pembinaan jangka panjang.
- Masih rendahnya perolehan medali pada kejuaraan olahraga.

19. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai daerah majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman bisa menjadi kekuatan bisa juga menjadi kelemahan bagi pembangunan daerah, kebudayaan seharusnya mampu mendukung proses pembangunan bukan sebaliknya. Disisi lain di era globalisasi, dengan tidak terbedungnya lagi arus informasi dari dunia luar menyebabkan jati diri dan karakter bangsa semakin tergerus, perlu melakukan pelestarian dan perlindungan budaya daerah.

20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Sistem Satu Data daerah belum berjalan, data – data dan informasi yang di tampilkan tidak melalui prosedur ssitem satu data, ini memungkinkan terjadi ketidakakurasian data/informasi yang

disampaikan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, akibatnya perencanaan yang kurang tepat.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan.

21. **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Rendahnya minat masyarakat berkunjung ke perpustakaan, sebagian besar pengunjung perpustakaan daerah Kab. Tanjung Jabung Barat adalah mahasiswa dan pelajar, yang berkunjung ke perpustakaan dengan tujuan mencari materi penyelesaian tugas yang diberikan oleh guru. Hanya sebagian kecil pengunjung perpustakaan yang bukan mahasiswa atau pelajar, ini bisa menandakan budaya gemar membaca masyarakat masih rendah.

22. **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Pengelolaan arsip secara digital atau elektronik masih belum optimal, sebagian besar penyimpanan arsip atau dokumen dilakukan secara konvensional atau berbentuk fisik. Seharusnya dokumen atau arsip yang biasanya disimpan berbentuk fisik juga harus disimpan secara digital atau elektronik. Arsip yang sudah berbentuk digital lebih efisien, tak perlu mengeluarkan biaya pemeliharaan khusus, jauh dari resiko kerusakan, kemudahan pelayanan baik kepada pemilik, pengelola, dan konsumen. Sekarang ini dokumen atau arsip lainnyayang ada sekarang terusbanyak dan menumpuk sehingga menimbulkan persoalan, selain itu kemungkinan besar dokumen/arsip yang biasanya dalam bentuk kertasakan usang, robek, lusuh dan tak jelas.

23. **Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Produksi Perikanan Budidaya masih rendah, pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya Kab. Tanjung Jabung Barat berjumlah sekitar 1.135 ton, jumlah produksi tersebut tidak sebanding dengan potensi perikanan budidaya yang ada. Potensi perikanan budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri dari perikanan budidaya tambak dan budidaya kolam. Potensi pengembangan tambak di Kab. Tanjung Jabung Barat seluas 5.000 Ha yang tersebar di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara. Kondisi lahannya maupun perairan pantainya cukup baik untuk pengembangan tambak. Sedangkan potensi budidaya kolam di Kab. Tanjung Jabung Barat diperkirakan sejumlah 2.000 Ha tersebar di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara papalik dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Potensi budidaya ikan dalam Keramba di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 1.000 Ha (10.000 unit) terutama di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, Batang Asam, Pengabuan, Betara dan Bram Itam. Komoditas Ikan yang cocok dikembangkan dalam Keramba adalah Nila, Lele dan Patin (Kecamatan Pengabuan dan Betara) sedangkan untuk ikan yang tidak mempunyai kemampuan adaptasi

tinggi cocoknya dikembangkan di Daerah Ulu, seperti Kecamatan Tungkal Ulu, Batang Asam, dan Kecamatan Merlung.

24. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pengembangan potensi wisata belum optimal, beberapa potensi wisata seperti wisata mangrove Pangkal Babu, pemandian air panas, Wisata rawa Jembatan Karindangan, Sukorejo di Pematang Buluh Kecamatan Betara; Air terjun Pehlang, Danau Jabung dan danau Cermin Kecamatan Tungkal Ulu; Danau Payo Lebar di Kecamatan Merlung; Air terjun Ratu Calista Irawan (Air terjun Lubuk Bernai), air terjun Gemuruh, air terjun Bukit Pianang Bawah, dan Air Terjun Suban di Kecamatan Batang Asam; Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, air terjun Bukit Kautsar, air terjun Danau Alo, danau biru, air terjun Tembulun, air terjun lampirin Kecamatan Renah Mendaluh; kurang mendapat perhatian, berupa penyediaan sarana/prasarana objek wisata, infrastruktur jalan/jembatan untuk akses menuju onjek wisata, dan penyediaan sumber daya manusia kepariwisataan.

25. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Berkurangnya lahan-lahan pertanian tanaman pangan oleh aktivitas ekonomi masyarakat terutama untuk pengembangan lahan perkebunan, permukiman, pembangunan infrastruktur ataupun industri. Data statistik pertanian menunjukkan bahwa selama tahun 2013 s/d 2020, terjadi konversi lahan sawah menjadi lahan perkebunan maupun lahan non pertanian mencapai ± 9.556 Ha. Terakhir pada tahun 2022 luas lahan baku sawah sebesar 8.879 ha menurun dari luas 18.435 ha di tahun 2013, dampaknya produksi padi juga ikut menurun. Salah satu upaya menambah kembali luas lahan pertanian tanaman pangan adalah dengan membuka baru lahan pertanian melalui program cetak sawah baru.

Disamping itu sebagian besar tanggul – tanggul yang berfungsi untuk pengairan pertanian/perkebunan mengalami kedangkalan dan penyempitan sehingga tidak berfungsi secara normal, yang dampaknya terhadap produktivitas hasil pertanian/perkebunan.

26. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Belum tersedianya unit penera alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) di Kab. Tanjung Jabung Barat, karena belum dibentuk unit kerja yang menangani bidang metrologi legal. Sampai saat peneraan UTTP dilakukan di Kota Jambi atau dengan mendatangkan petugas penera. Selain tujuan peneraan untuk menumbuhkan budaya tertib ukur pada pedagang pasar tradisional dalam hal mengukur, menakar dan menimbang pada kegiatan jual beli, juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah.

27. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Rendahnya daya saing produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Terbukanya pasar bagi pelaku usaha yang ingin berbisnis tentunya akan menjadi tekanan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah Kab. Tanjung Jabung Barat (lokal), produk dengan kualitas bagus dan harga yang lebih rendah sudah barang pasti menjadi daya tarik bagi pembeli.

Beberapa penyebab rendahnya daya saing produk usaha industri kecil dan menengah (IKM) lokal yaitu SDM yang terampil masih minim, rendahnya kreativitas dan inovasi pelaku IKM, dan kurangnya pemasaran / tidak memanfaatkan media elektronik.

28. **Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan**

Perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal, dengan bergantungnya peraturan perundang – undangan mengenai perencanaan serta penggunaan sistem perencanaan berbasis aplikasi (SIPD) yang efektif/mutlak dilaksanakan ditahun 2021 ini.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menjadi dasar baru bagi perencanaan daerah dalam memilih program, kegiatan, dan sub kegiatan, dan diinputkan kedalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Semua pihak terkait perlu penyesuaian dan pembelajaran dalam penerapannya sehingga butuh waktu dan mengalami beberapa kendala.

29. **Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian**

Rendahnya profesionalitas ASN Kab. Tanjung Jabung Barat, ditunjukkan dengan angka indeks profesionallitas ASN sebesar 59,0 (kategori sangat rendah), beberapa indikator yang menyebabkan rendahnya profesionalitas seperti data – data individu ASN tidak semua terinput di SAPK, kesadaran ASN untuk berdisiplin rendah, kurangnya komitmen pimpinan OPD dalam menegakkan kedisiplinan. kurangnya pengawasan terhadap kedisiplinan ASN, adanya budaya kerja bermalas – malasan sudah tertanam dilingkungan kerja, dan rendahnya minat pegawai untuk mengikuti diklat struktural,

30. **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan**

Rendahnya minat ASN untuk mengikuti diklat struktural, dan ASN dengan jabatan fungsional tidak bisa sesegera mendapatkan diklat fungsionalnya karena kuota peserta diklat disediakan penyelenggara terbatas.

31. **Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Sedikit sekali kegiatan penelitian dan atau pengembangan yang di lokuskan dalam wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat, baik dari unit kerja yang membidangnya (Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat) maupun dari instansi/lembaga luar daerah.

Tidak tersedianya tenaga fungsional peneliti (ada satu tenaga fungsional peneliti di Bappeda, tetapi sekarang ini statsunya tidak aktif) dan minimnya dukungan anggaran adalah merupakan beberapa penyebab permasalahan penelitian dan pengembangan di Kab. Tanjung Jabung Barat.

4.2. **Isu Strategis**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

a. Isu Tingkat Internasional

1. Pandemi Corona Virus Disease (covid 19)

Covid 19 melanda hampir diseluruh neagara – negara didunia, baik negara – negara maju maupun sedang berkembang. Sejak nopember 2019 ditemukannya covid 19 di Kota Wuhan – China hingga sekarang ini, negara – negara di dunia masih terus berupaya mencegah penyebaran covid 19. Kerbijakan *lockdown* yang diambil mengakibatkan masyarakat tidak dapat beraktivitas diluar rumah, yang akhirnya menyebabkan perlambatan bahkan ada terhentinya aktivitas – aktivitas ekonomi dan sosial.

Bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dampak Covid 19 cukup berpengaruh pada ekspor hasil laut dan perkebunan, kebijakan *lockdown* pernah dilakukan di beberapa negara tujuan ekspor seperti Hongkong, Singapura, Malaysia, dan India. Dampaknya kegiatan ekspor komoditi hasil perikanan dan perkebunan terhenti hingga kebijakan *lockdown* dicabut.

2. Sustainable Development Goals (SDG's)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Adapun 17 tujuan SDG's tersebut sebagai berikut :

1. Menghapus kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan
4. Pendidikan bermutu
5. Kesetaraan gender
6. Akses air bersih dan sanitasi
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Infrastruktur, Industri, dan inovasi
10. Mengurangi ketimpangan
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13. Penanganan perubahan iklim
14. Menjaga ekosistem laut
15. Menjaga ekosistem darat
16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengamanatkan Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) (5 tahunan). Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

menyelaraskan rencana kerja RAD dengan RPJMD guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

*Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui *distance learning*, pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *fin-tech*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.*

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang sedang berlangsung ini, perlu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan kerangka peraturan sebagai upaya mengadopsi kemajuan teknologi digital agar Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

b. Isu Tingkat Regional / Asean

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC), adalah merupakan perjanjian bersama negara – negara ASEAN, dengan tujuan menjadikan kawasan Asia Tenggara makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi merata di tiap-tiap negara yang menjadi anggotanya. Walaupun MEA sudah berjalan hampir lima tahun sejak diberlakukan di awal tahun 2016. Secara analisis, dengan diberlakukannya MEA, tentu terdapat dampak positif dan negatif terhadap Indonesia begitu juga terhadap Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Beberapa dampak positif :

1. Dari sisi perdagangan, dapat mengurangi hambatan – hambatan perdagangan bahkan tidak ada hambatan, ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan pangsa pasar dan volume ekspor.
2. Dari sisi investasi, menimbulkan ketertarikan minat investor untuk berinvestasi (*foreign direct investment*), ini akan menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Dari sisi ketenagakerjaan, selain penciptaan lapangan kerja baru, akses kerja ke luar negeri (negara – negara anggota ASEAN) lebih mudah.

Beberapa dampak negatif :

- 1. Sisi daya saing, dengan masuknya barang – barang luar negeri dalam jumlah banyak, dapat mengancam produk – produk industri lokal yang kualitas dan harganya dibawah kualitas barang – barang luar negeri.
- 2. Sisi ketenagakerjaan, dari sisi ketenagakerjaan selain terdapat sisi positifnya ada juga sisi negatifnya, dimana tenaga kerja / SDM di beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malasya, dan Filipina mempunyai kualitas, ini memudahkan tenaga asing tersebut diterima menjadi pekerja di Indonesia.
- 3. Eksploitasi sumber daya alam (SDA), negara Indonesia dikenal dengan sumber daya alam yang masih melimpah, dengan kemudahan berinvestasi akan sangat menarik minat investor bidang pertambangan, kelautan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan lainnya untuk memanfaatkan SDA yang tersedia.

c. Tingkat Nasional

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.
Dengan tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”, dan 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu :
 - 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
 - 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
 - 3) Meningkatkan sumber daya manusia dan berdaya saing
 - 4) Membangun budaya dan karakter bangsa
 - 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
 - 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
 - 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sasaran makro pembangunan RPJMN 2020 – 2024, yaitu :

Tabel 4.1
Indikator Sasaran Makro Pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024

No.	Indikator Sasaran Makro Pembangunan	Target
1	Rata – rata peningkatan pertumbuhan ekonomi pertahun	4% – 6,0% pertahun
2	PDB per kapita (akhir tahun 2024)	5,780 – 6,160 USD
3	Tingkat kemiskinan (akhir tahun 2024)	65% – 7,0%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (akhir tahun 2024)	4,0% - 4,6%
5	Rasio Gini (akhir tahun 2024)	0,370 – 0,374
6	Indeks Pembangunan Manusia	75,54

No.	Indikator Sasaran Makro Pembangunan	Target
	(akhir tahun 2024)	
7	Tingkat inflasi (2020 – 2024)	2,0 – 4,0 persen
8	Tingkat investasi (2020 – 2024)	6,9% - 8,1%
9	Pertumbuhan ekspor non migas (2020 – 2024)	9,2% – 11,4%
10	Share industri pengolahan (akhir tahun 2024)	20,1% - 21,3%
11	Pertumbuhan industri pengolahan non migas (2020 – 2024)	5,8% - 7,6%
12	Defisit transaksi berjalan (2020 – 2024)	2,2% – 1,8% PDB

Sumber data : Narasi RPJMN 2020 – 2024 (Revisi)

Dalam pencapaian target sasaran makro pembangunan tersebut diatas perlu mendapat dukungan dari dari daerah baik provinsi maupun kabupaten. Upaya – upaya dukungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui sinkronisasi sasaran pembangunan nasional dengan sasaran kabupaten, yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

Tabel 4.2
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Sumatera

No	Prioritas Nasional	Major Project	Manfaat Proyek
1	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Integrasi pembangunan wilayah Batam-Bintan	Pengembangan Kawasan Batam-Bintan bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan industri dan pariwisata guna meningkatkan daya saing wilayah.
		2. Pengembangan Wilayah Metropolitan (Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar)	Pengembangan wilayah Metropolitan Palembang sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional, serta meningkatkan pembangunan di Selatan Sumatera
2	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pembangunan TolTrans Sumatera	1. Menurunkan ongkos angkut dengan pengurangan waktu tempuh Aceh-Lampung dari 48 jam menjadi 30 jam

No	Prioritas Nasional	Major Project	Manfaat Proyek
			2. Menjadi enabler bagi perkembangan 6 Kawasan Industri (KI Dumai, KI Jambi Kemingking, KI Tenayan, KI Way Pisang, KI Sei Mangkei, KI Tanjung Api-Api)

Sumber data : Narasi RPJMN 2020 – 2024 (Revisi)

d. Tingkat Provinsi

Pada tahun 2021 penyusunan RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 akan bersamaan waktunya dengan penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026. Dalam penyusunan RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 akan memperhatikan RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026. Adapun visi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 adalah “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”, dengan misi sebagai berikut :

- 1. Memantapkan Tata kelola Pemerintah
- 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah
- 3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dirumuskan Pemerintah Provinsi Jambi disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sejalan dalam upaya pencapaian sasaran jangka menengah pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, terdapat beberapa pokok bahasan yang terkait dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :

- 1. Pengembangan kawasan ekonomi Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak) (Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 merupakan prioritas pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jambi;
- 2. Fasilitasi peningkatan infrastruktur penunjang Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, Talang Duku, Muara Sabak, Mendahara, dan Nipah Panjang sebagai strategi dalam mendukung pencapaian Misi 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah;
- 3. Pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRWN adalah merupakan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jambi untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah;
- 4. Penetapan kawasan lindung melalui Sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Sarolangun, untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan adalah juga merupakan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jambi;
- 5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan;

Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan, adalah arahan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, yang didasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada;

6. Mendorong/fasilitasi pembangunan Pelabuhan Kelagian Tungkal Ulu, sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jambi di tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026.

e. Tingkat Kabupaten

1. Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 10,26%, kemiskinan perlu ditangani secara serius dan komprehensif oleh Pemerintah Daerah bersama – sama dengan pemangku kepentingan lainnya.
Permasalahan kemiskinan yang terlalu lama akan menimbulkan permasalahan sosial baru, seperti memicu terjadinya tindak kriminal, tingkat pengangguran bertambah, kemunduran kualitas SDM karena banyak yang tidak mampu bersekolah lebih tinggi, dan angka kematian meningkat karena rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.
2. Perluasan akses pendidikan, percepatan pemerataan kualitas pendidikan, dan peningkatan tata kelola pendidikan. Seiring perkembangan pembangunan daerah dan terus bertambahnya jumlah penduduk terutama di desa – desa, tidak sebanding dengan perkembangan jumlah sekolah dan guru. Banyak permukiman penduduk baru terbentuk dengan sendirinya yang jauh dari akses pendidikan, dan sekolah yang ada di desa – desa dalam keadaan kekurangan guru, ini memberikan dampak buruk terhadap kualitas pendidikan di desa.
3. Pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat
Layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat menjadi tuntutan dasar bagi masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat, dari masyarakat yang tinggal di perkotaan hingga yang tinggal di pelosok desa membutuhkan layanan kesehatan. Terdapat 2 rumah sakit umum daerah, dan 16 puskesmas yang tersebar di 13 kecamatan. Keberadaan puskesmas secara rasio telah memenuhi cakupan pelayanan kesehatan namun berbeda halnya dengan ketercukupan tenaga dokter yang belum terpenuhi, capaian terakhir di tahun 2020 rasio dokter per 2500 penduduk yaitu 0,67 bila dibandingkan dengan rasio Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yaitu 1 dokter : 2500 penduduk maka capaian tersebut masih sangat jauh
4. Belum terpenuhinya layanan dasar air bersih bagi masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat, kesulitan mendapatkan air bersih tentu menjadi beban bagi masyarakat, keterbatasan penggunaan air bersih dalam rumah tangga dapat mengganggu berkehidupan rumah tangga, serta memberikan dampak buruk bagi kesehatan.

5. Pembangunan ruas jalan tol Jambi – Rengat melewati wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat pada 4 kecamatan, yaitu Kec. Muara Papalik (Desa Dusun Mudo), Kec. Tungkal Ulu (Kuala Dasal, Kel. Pelabuhan Dagang, desa Brasau, dan Desa Taman Raja), Kec. Tebing Tinggi (Kel. Tebing Tinggi), dan Kec. Batang Asam (desa Suban).
Dengan Interchange berada di Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian rest area salah satunya terdapat di Desa Brasau dan Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu.
Keberadaan ruas jalan tol Jambi – Rengat yang melewati 4 kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat akan memberikan dampak sosial ekonomi terhadap daerah, dampak positif bisa berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar khususnya dan bagi Kab. Tanjung Jabung Barat.
6. Untuk wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat atau 13 kecamatan, baru terdapat 2 pos pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan (dalam wilayah manajemen kebakaran), yaitu di Kec. Tungkal Ilir dan Kec. Pengabuan. Sejalan bertambahnya jumlah penduduk akan bertambahnya permukiman penduduk, maka resiko kebakaran dan korban kebakaran (harta benda maupun jiwa) akan semakin besar juga. Untuk itu sangat diperlukan pos pelayanan pemadam kebakaran di setiap wilayah kota kecamatan.
7. Masih terdapat desa – desa yang belum mendapat akses layanan telekomunikasi atau sangat kurang, yaitu ada sekitar 54 desa yang terbagi di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang. Desa – desa yang tidak mendapat akses layanan telekomunikasi akan mengalami kelambatan dalam perkembangannya, terutama pada sektor perdagangan dan sektor pendidikan.
8. Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kab. Tanjung Jabung Barat yang masih terbilang banyak, keberadaan PPKS seperti anak jalanan, anak terlantar, lansia terlantar, fakir miskin, pengemis, tuna susila serta lainnya perlu penanganan. Dengan semakin bertambahnya populasi PPKS sudah pasti memunculkan permasalahan baru, seperti meningkatnya potensi terjadinya tindak kejahatan, menularkan pengaruh buruk kepada orang lain, memperburuk keindahan tata kota, dan lainnya.
9. Konflik lahan, konflik lahan yang sampai ini masih terus muncul, dan beberapa kasus konflik lahan berkepanjangan dan masih belum terselesaikan. Mayoritas konflik lahan melibatkan orang dalam jumlah banyak, yang terdiri dari beberapa kelompok masyarakat, perusahaan, dan organisasi masyarakat. Kasus konflik lahan yang lambat ditanganidapat bergejolak hingga pertikaian, yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan daerah dan menghambat pembangunan.
10. Jumlah timbunan sampah rumah tangga dan dunia usaha semakin bertambah setiap tahunnya, disebabkan bertambahnya jumlah

penduduk, perluasan daerah pemukiman penduduk, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Sementara, sarana dan prasarana dalam penanganan sampah tidak memadai

Masalah sampah menjadi salah satu permasalahan yang kompleks, mempunyai dampak bagi ekonomi, sosial dan budaya, seperti memicu timbulnya sumber penyakit, pencemaran lingkungan, merusak keindahan dan kenyamanan lingkungan, menghambat perkembangan pembangunan daerah, dan lainnya.

11. Masih cukup luasnya permukiman kumuh dalam kawasan perkotaan Kuala Tungkal, penanganan permukiman kumuh menjadi salah satu hal yang saat ini menjadi perhatian baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, terdapat banyak permasalahan permukiman kumuh seperti penumpukan sampah, sanitasi yang buruk, kecenderungan membentuk perilaku buruk, dan rendahnya tingkat kesehatan. Keberadaan permukiman kumuh dapat memberikan dampak buruk pada perkembangan sosial dan produktivitas kota.
12. Berkurangnya lahan-lahan pertanian tanaman pangan oleh aktivitas ekonomi masyarakat terutama untuk pengembangan lahan perkebunan, permukiman, pembangunan infrastruktur ataupun industri. Data statistik pertanian menunjukkan bahwa selama tahun 2013 s/d 2020, terjadi konversi lahan sawah menjadi lahan perkebunan maupun lahan non pertanian mencapai ± 9.824 Ha. Terakhir pada tahun 2020 luas lahan baku sawah sebesar 8.611 Ha menurun dari luas 18.435 Ha di tahun 2013, dampaknya produksi padi juga ikut menurun.
13. Isu Pertanian yang saat ini sedang mengemuka dan menjadi program strategis nasional adalah konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan pada suatu kawasan yang terpilih dan ditetapkan. Melalui konsep *Food Estate* ini penanganan program dan kegiatan dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi pada semua sektor yang dilibatkan. Dengan padi sebagai produk utama serta produk-produk perkebunan dan peternakan sebagai produk pendukung. *Food estate* yang merupakan program strategis nasional mensyaratkan penanganan secara terintegrasi. Sektor pertanian, perkebunan dan peternakan ditangani secara sinergis sehingga maksud untuk mewujudkan dan menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang dapat terwujud. Penanganan terhadap sarana dan prasarana naiknya produksi baik pertanian, perkebunan maupun peternakan merupakan sesuatu yang harus dilakukan segera. Perbaikan tanggul, jalan usaha tani, jalan produksi, pencetakan sawah baru dan pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi yang tepat akan menjadi perhatian masa lima tahun ke depan. Permintaan akan daging setiap tahun terus meningkat baik untuk kebutuhan dalam daerah maupun dari luar daerah. Maksud menjadikan Tanjung Jabung Barat menjadi sentra penghasil sapi baik untuk bakalan ternak maupun daging, di laksanakan melalui

kegiatan SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) melalui inseminasi buatan (Kawin Suntik) terhadap betina produktif diharapkan anak-anak hasil IB bisa membantu meningkatkan populasi ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

f. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan (Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021-2026)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Isu Strategis berupa rumusan isu utama dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perumusan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan diperoleh dari hasil identifikasi dan perumusan dengan metode pembobotan yang paling sedikit berkaitan dengan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016, yaitu:

- 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- 2) Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- 3) Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- 4) Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
- 5) Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
- 6) Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
- 7) Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- 8) Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
- 9) Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
- 10) Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Hasil identifikasi dan perumusan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinilai memiliki pengaruh yang besar adalah;

- 1) Permasalahan Limbah
- 2) Permasalahan Sanitasi
- 3) Permasalahan DAS dan Drainase
- 4) Aksesibilitas Infrastruktur
- 5) Kurangnya Kualitas SDM
- 6) Pengembangan Industri dan Eco Wisata
- 7) Perlindungan Kawasan Strategis dan Rawan Bencana

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahunan periode 2021 – 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Barat 2005 – 2025 dan berdasarkan masalah – masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi yang diemban, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2024 :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (*Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis*)

Berkualitas, Sumberdaya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.

Ekonomi maju, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Religius, berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.

Kompetitif, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.

Aman, Suasana aman dan tertib dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

Harmonis, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak**
- 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis**
- 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik**
- 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan**
- 5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota**

Penjelasan :

Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak ;

Sumberdaya manusia dianggap sebagai modal utama pembangunan daerah, perlu dibekali dengan iman, ilmu, dan berahlak, agar mampu menjadi manusia yang berdaya saing, sehat dan berahlak sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sejahtera dan berkah.

Misi 2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis ;

Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis menjadikan rasa nyaman pada masyarakat untuk berktivitas, dan kondusif bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung jabung Barat. Selain itu kondisi harmonis tidak hanya sebatas antar umatberagama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik ;

Menyelenggarakan roda pemerintahan Kabupaten Tanjung abung Barat dengan efektif, efisien, dan akuntabel agar menghasilkan pelayanan publik yang prima, kerja pemerintah yang berorientasi kinerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Misi 4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Seiring perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk, tentunya harus diikuti dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Pengembangan cakupan aktivitas ekonomi lebih luas lagi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta pengangguran. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai upaya skala mikro yang sejalan dengan upaya peningkatan aktivitas perekonomian.

Misi 5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota;

Pembangunan infrastruktur dan penguatan akses bagi seluruh desa dan kota, terutama bagi desa yang tertinggal, ditujukan agar desa – desa dan kota dapat tumbuh berkembang secara bersamaan dan seimbang.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu 5 (lima) tahunan dan dicapai melalui sasaran. Dalam rumusannya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah ini berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok lima tahunan ke empat RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005 – 2025 dan RPJPD Provinsi Jambi 2005 – 2025, dan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan RPJMN 2020 – 2024.

Tujuan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia ;
2. Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok ;

3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel ;
4. Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan;
5. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota.

Sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat
3. Terjaganya kelestarian dan pengembangan budaya daerah
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
6. Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah
7. Pertumbuhan ekonomi kabupaten
8. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
9. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat
10. Memperkuatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Visi : “MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”												
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(13)
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak	1.1. Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia	1.1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,54	67,86	68,18	68,50	68,83	69,15	69,47	69,47
				Angka Harapan Lama Sekolah	12,61	12,79	12,97	13,14	13,32	13,50	13,68	13,68
				Rata – rata lama sekolah	7,70	7,78	7,87	7,95	8,03	8,11	8,20	8,20
				Usia harapan hidup	68,03	68,12	68,21	68,30	68,40	68,49	68,58	68,58
				Pengeluaran per Kapita (Ribu rupiah/Orang/Tahun)	9.480.000,-	9.522.000,-	9.564.000,-	9.606.000,-	9.648.000,-	9.690.000,-	9.732.000,-	9.732.000,-
				Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	Pratama	Pratama	Madya	Nidya	Utama	KLA	KLA
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,68	87,00	87,50	88,50	89,00	89,50	90,00	90,00

Visi : “MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”												
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(13)
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,31	68,50	69,00	69,50	70,00	70,50	71,00	71,00
				Persentase Pemuda berprestasi atau mandiri yang dibina	0	20%	45%	45%	49%	49%	54%	54%
				Indeks Pembangunan Keluarga	56,69	58,20	60,32	62,44	64,56	66,68	68,80	68,80
2	Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis	2.1. Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok		Nilai persepsi rasa aman	-	66,00	67,50	69,00	70,50	72,,00	73,50	73,50
			2.1.1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	80 %	82,65 %	83,65 %	84,01 %	85%	90%	90%	90 %
			2.1.2. Terjaganya kelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	40%	65%	70%	70%	70%	70%	70%	70%

Visi : “MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”												
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(13)
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik	3.1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel		Indeks reformasi birokrasi	47,88	49,00	51,00	53,00	55,00	57,00	59,00	59,00
			3.1.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	56,57	60,01	62,01	64,01	66,01	70,00	72,00	72,00
				Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			3.1.2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,66	80,66	80,68	80,70	80,72	80,74	80,76	80,76
			3.1.3. Meningkatkan kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	4.1. Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan		Laju pertumbuhan ekonomi	-0,64%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%	4,00%
			4.1.1. Pertumbuhan ekonomi kabupaten	PDRB perkapita (juta rupiah)	117,02	119,12	121,22	123,32	125,42	126,52	127,62	127,62

Visi : “MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”												
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			4.1.2. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,22	68,50	68,,60	68,70	68,80	68,90	70,00	70,00
5	Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota	5.1. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota		Indeks Williamson	-	0,495	0,480	0,465	0,450	0,435	0,420	0,420
			5.1.1. Terpenuhi nya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat	Indeks Infrastruktur	59,99%	62,15%	65,44%	67,85%	69,41%	71,22%	73,19%	73,19%
			5.1.2. Memperkuatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan	Indeks Konektivitas (desa – Ibukota Kabupaten)	0,403	0,421	0,439	0,447	0,456	0,464	0,473	0,473

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan desain perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mencapaitujuan dan sasaran misi mewujudkan “Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah” yang telah ditetapkan. Berbagairumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah Kabuapten Tanjung Jabung Barat untuk berkeinginan melayani dan mensejahterakan masyarakat. Srategi diarahkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai bentuk operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunandaerah.

Dalam penyusunannya strategi pembangunan jangka menengah disusun melalui analisis dan evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Analisis sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Analsis gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukurkekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah, menggunakan metode SWOT.
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Pertimbangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026.

Validasi KLHS RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 oleh Gubernur untuk kebijakan, rencana dan/atau program tingkat kabupaten (dalam hal ini diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi), validasi dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Berdasarkan surat Plt.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi nomor S.1029/DLH-2.1/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dengan prihal Validasi KLHS RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun 2021-2026, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut diantaranya :

- ❖ Hasil telaahan terhadap KLHS RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 :
 - a. Proses KLHS RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan kaidah – kaidah pasal 6 -16 PP 46 Tahun 2016 ;
 - b. Tahap pengajian pengaruh, telah sesuai dengan kaidah – kaidah pasal 7 – 13 PP 46 Tahun 2016 ;
 - c. Tahap perumusan alternatif dan rekomendasi KLHS terhadap penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan kaidah – kaidah pasal 15 dan 16 PP 46 Tahun 2016.
- ❖ Hasil telaahan terhadap KLHS RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 :
 - a. Tahap penjaminan kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 telah dilaksanakan secara mandiri dan telah memperhatikan kaidah – kaidah pasal 19- 21 PP 46 Tahun 2016 ;
 - b. Hasil terhadap KLHS RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 telah diintegrasikan kedalam rancangan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026
- ❖ Rekomendasi tindak lanjut KLHS RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 :
 - a. Melakukan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana pasal 13 PP No. 46 Tahun 2016 secara komperhensif dengan memperhatikan keberlangsungan fungsi ekosistem untuk mendapatkan informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan tidak diperbolehkan lagi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Terhadap rekomendasi huruf a tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rencana penyusunan dokumen analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) dimuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang membidangi urusan lingkungan hidup yaitu pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup. Rencana penyusunan dokumen analisis DDDTLH tersebut akan di rencanakan pada tahun 2022 selain itu terdapat juga rencana penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

- b. Melakukan upaya pembangkitan ekonomi melalui titik ungkit dari kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Terhadap rekomendasi huruf b tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB mengalami kontraksi sedalam -0,64%. Penurunan laju pertumbuhan PDRB tersebut disebabkan oleh dampak adanya pandemi covid-19 di Indonesia secara umum dan di Kab. Tanjung Jabung Barat. Sektor pertambangan dan penggalian sejak 2016 sampai sekarang masih menjadi sector penyumbang terbesar pembentukan PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar 38,15% (2019), pada tahun 2020 bergeser ke sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu 30,14% kemudian diikuti sector pertambangan dan penggalian 26,90%. Sedangkan sector Penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi paling besar yaitu -8,14%.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya penanganan dan pemulihan ekonomi dalam masa pandemi Covid-19. Upaya – upaya pemulihan ekonomi yang bersifat cepat masih bertumpu pada usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm), dalam rpjmd, pemberdayaan umkm merupakan pecahan dari focus atau tema pemulihan ekonomi. Peningkatan pemberdayaan kita lakukan masih berupa bantuan produktif usaha berupa modal, sarana dan prasarana, serta pelatihan. Selain itu bantuan sosial masih terus digulirkan, program padat karya pemerintah pusat di bidang pertanian/perkebunan, sanitasi, dan lainnya akan terus dilaksanakan.

Dalam bidang Pertanian Pemerintah Daerah akan memprioritaskan pembangunan usaha tanaman pangan “padi”, dan usaha perkebunan “kelapa dalam” untuk mengungkit ekonomi rakyat. Rencana kegiatan yang telah ditetapkan seperti perbaikan tanggul dan irigasi pertanian, pembangunan jalan usaha tani, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, dan penanggulangan bencana pertanian adalah untuk mendukung pembangunan pertanian daerah, dan hilirisasi pertanian juga menjadi program yang akan didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan ekonomi pelaku usahatani pada umumnya.

- c. Melakukan upaya untuk pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terutama TPB 1(tanpa kemiskinan), 2(tanpa kelaparan), 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), 4 (pendidikan berkualitas), dan 14 (menjaga ekosistem laut);

Terhadap rekomendasi huruf c tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada tahun terakhir 2020, tingkat kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 10,26%, menduduki peringkat ke 10 dari 11 kabuapten / kota yang ada dalam Prov. Jambi. Tingginya kemiskinan menjadi permasalahan pokok daerah dan juga sebagai isu strategis daerah, maka penurunan angka

kemiskinan yang meliputi juga kelaparan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, target penurunan angka kemiskinan dimuat dalam indikator kinerja makro daerah.

Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi turunan sasaran strategis “peningkatan kualitas sumber daya manusia” dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026. Program/kegiatan bidang urusan pendidikan dan kesehatan, dan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah disusun dengan optimal diharapkan mampu mencapai target sasaran peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya menjaga ekosistem laut dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang di ampu oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, dan terdapat tolak ukur untuk melihat tingkat kualitas laut, yaitu “Indeks Kualitas Air laut (IKAL)”

- d. Menggali sumber-sumber pendanaan yang resmi;
- e. Melibatkan pembiayaan multipihak:
 - 1) Dana filantropi
 - 2) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari pemegang izin usaha yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - 3) Dana dari *Non-Governmental Organization (NGO)* yang memungkinkan dan lembaga lainnya (contoh, dana bank dunia melalui program *Bio Carbon Fund (BioCF)*)

Terhadap rekomendasi huruf d sekaligus huruf e tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Melihat struktur pendapatan daerah, terdapat tiga pos besar sumber pendapatan yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang sangat besar peluang untuk ditingkatkan karena dikelola secara otonomi, sedangkan pendapatan transfer hanya pada Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mempunyai peluang untuk ditingkatkan melalui upaya pemenuhan atau pencapaian sasaran tertentu yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Optimalisasi PAD dimuat sebagai “strategi” dan Peningkatan PAD dimuat sebagai “arah kebijakan” dalam RPJMD, upaya – upaya peningkatan PAD secara terus – menerus dilakukan perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, peningkatan kualitas aparatur pemngut pajak, dan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pajak.

Untuk pembiayaan multipihak, yang selama ini terus dilaksanakan adalah pendanaan melalui dana tanggung

jawab sosial dan lingkungan dari pemegang izin usaha yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- f. Melakukan perbaikan kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan;

Terhadap rekomendasi huruf f tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang mana telah diatur urusan, bidang urusan yang mencakup didalamnya program, kegiatan, sub kegiatan. Dengan susunan organisasi perangkat daerah yang ada sekarang ini, hampir sebagian perangkat daerah mengalami adanya ketidaksesuaian beberapa tugas pokok dan fungsi terhadap program/kegiatan yang telah tersedia.

Guna mengikuti peraturan tersebut dan mengoptimalkan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan pembangunan menurut urusannya maka pada tahun 2021 telah dilakukan (dalam proses) penyusunan perangkat daerah yang sesuai dengan wewenangnya, perubahan perangkat daerah dapat berupa perubahan nama perangkat daerah, struktur jabatan, dan tugas pokok dan fungsi.

- g. Meningkatkan nilai konservasi terhadap wilayah yang sudah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

Terhadap rekomendasi huruf g tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Program – program untuk meningkatkan nilai konservasi telah tersusun seperti prgogram Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH, program-program tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

- h. Melakukan penyempurnaan alternatif dan rekomendasi KLHS berdasarkan hasil analisis muatan kajian sebagaimana butir a-g.

Terhadap rekomendasi huruf h tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan, program yang disertai indikator kinerja, target, dan pagu indikatif dalam RPJMD, kemudian Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang juga disertai indikator kinerja, target, dan pagu indikatif dalam Rencana Strategis (RENSTRA)

Perangkat Daerah disusun secara simultan dengan penyusunan/pelaksanaan KLHS RPJMD, dimana rekomendasi-rekomendasi penyempurnaan dipedomani.

- ❖ Kelompok kerja RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 agar:
Mengintegrasikan rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Terhadap rekomendasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Integrasi KLHS terhadap RPJMD dilakukan dari mulai proses penyajian gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, kemudian perumusan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja dan target, dalam perumusan strategi dan arah kebijakan hingga pemilihan program/kegiatan prioritas memperhatikan KLHS.

- ❖ Pemerintah Kabupten Tanjung Jabung Barat agar:
 - a. Menyampaikan kepada publik tentang RPJMD Kabupten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS beserta dokumen KLHS dan surat validasi KLHS sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Terhadap rekomendasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dokumen RPJMD Kabupten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dan dokumen KLHS dipublikasikan melalui media jaringan yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.

- b. Merencanakan pemantauan dan evaluasi KLHS RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta melakukan sistem pengawasan dan ketat dalam pengolahan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup dilokasi perencanaan khususnya pada wilayah yang daya dukung dan daya tampung lingkungannya terindikasi sudah terlampaui;

Terhadap rekomendasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai kegiatan prioritas yang harus terus dilakukan terutama oleh perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup. Untuk itu diperkuat dengan anggaran yang cukup dan personil yang berkompetensi.

- c. Secara proaktif, terus membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat.

Akses informasi baik mengenai lingkungan hidup atau mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum bisa diakses melalui website resmi Pemerintah Daerah dan Website mandiri perangkat daerah. Untuk dialog dilakukan melalui sosialisasi, focus group discussion (FGD),

dan rapat – rapat bersama masyarakat, dialog dilaksanakan disemua perangkat daerah termasuk juga oleh Kepala Daerah dan Wakil serta pejabat pemerintah daerah.

Pertimbangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG's Dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026

Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Adapun 17 tujuan SDG's tersebut sebagai berikut :

1. Menghapus kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan
4. Pendidikan bermutu
5. Kesetaraan gender
6. Akses air bersih dan sanitasi
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Infrastruktur, Industri, dan inovasi
10. Mengurangi ketimpangan
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13. Penanganan perubahan iklim
14. Menjaga ekosistem laut
15. Menjaga ekosistem darat
16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dari 94 sasaran global dan 17 *goals*. Dari 319 indikator TPB Indonesia 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum, sehingga setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya, indikator yang menjadi kewenangan kabupaten berjumlah 220 indikator didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berikut indikator TPB dan tingkat capaiannya pada tabel dibawah ini :

Tabel VI.01
Indikator TPB dan Tingkat Capaiannya

No.TPB	Tujuan TPB	Indikator TPB	Capaian (s.d. Tahun 2020)
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Pada 2020 (10,29%)
		Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	70,44%
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	187664 pekerja formal, 46916 pekerja informal
		Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	13%
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	54%
		Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persalinan Normal di Faskes 72,8 %
		Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	91,72 %
		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	74,35%
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	2.536 Rumah Tangga/ 62,5 %
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	50,50%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	99,50%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	81,75%
		Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	92,00%
		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang	77,39%

		sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	
		Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun
		Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah pada tahun 2020 menjadi 169 daerah (2019 123 daerah)
		Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Jumlah KK yang dibantu dari Tahun 2015 s/d Tahun 2020 = 1.693 KK
		Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2020 menjadi 81,9 ribu (2019 81,5 ribu)
		Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Menurunnya jumlah daerah bencana alam/sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2020
		Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	94,16%
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak tersedia data)
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada
		Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	68%
		Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	39%

2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	79,46
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	2,70%
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	0%
		Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	9,40%
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	3,90%
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	21,81 %
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	2,70%
		Prevalensi anemia pada ibu hamil.	6,7 %
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	66,1 %
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Skor PPH Tanjab Barat 79,45
		Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan	ditetapkan dengan RTRW
		Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	117,83
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Angka Kematian Ibu (AKI).	47,38 Per 100.000 KL
		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	83,80 %
		Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	72,80 %
		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	7,1 / 1000 KLH

	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	7,1 / 1000 KLH
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	7,1 / 1000 KLH
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	91,72 %
	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Kecil dari 0,5 %
	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	399 / 100.000 Penduduk
	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Malaria API <1 / 1000 PDD
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Malaria API telah imunisasi < 1/1.000 PDDT
	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Malaksanakan petugas dini meningkat menjadi 70%
	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	< 0,05 / 18.000 PDDL
	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Belum Eliminasi
	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Sudah Eliminasi
	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	6,4 %
	Prevalensi tekanan darah tinggi.	34 %
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	10 %
	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.	0
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Capaian 7 Puskesmas dari 16 Puskesmas
	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	0,40% (Prov. Jambi)
	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	(tidak tersedia data)
	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	80%

		Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	74,35 %
		Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	3 %
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	69
		Total Fertility Rate (TFR).	5813 (KLH)
		Unmet need pelayanan kesehatan.	
		Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	321.066
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	70,01 %
		Proporsi kematian akibat keracunan.	
		Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	22,64%
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100%
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	8 Puskesmas memenuhi 9 penilaian SDMK, dan 8 belum memenuhi 9 penilaian SDMK
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	
		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	55,70%
		Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	57,03%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	113,12%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	92,51%
		Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	8,87
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	34,50%

		Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	99,50% (SD/Mi), 81,75% (SMP/MTs), 65,51% (SMA)
		Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	98,60%
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	98,73%
		Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	
		Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	67%
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	6
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0,003
		Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	4,80%
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0,008
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100%
		Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin	63,46%

		atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	
		Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	36,54%
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).	69
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	20%
		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	6%
		Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	88%
		Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	16,87%
		Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	63%
		Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	79,54%
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	94,09%
		Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	0,35
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	11/13 kec.
		Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	59%
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	79,08%
		Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	0
		Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> .	79,08%

		Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	
		Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	0
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	0
		Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	0
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	0%
		Kualitas air danau.	NA
		Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	64
		Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	NA
		Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	NA
		Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	0
		Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Kegiatan Sub DAS Batang Asam. Penanaman dengan pola Agroforestry
		Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Terbentuknya Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Kab. Tanjung Jabung Barat
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Bauran energi terbarukan.	7,69%
		Intensitas energi primer.	(belum tersedia data)
8	Meningkatkan Pertumbuhan	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	-12,30%

Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	PDB per kapita.	117.000.000,-
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	-64%
	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	38,11%
	Persentase tenaga kerja formal.	110%
	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	11%
	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	6%
	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp. 17.812,5
	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	15-29 Thn Laki-Laki = 538 15-29 Thn Perempuan = 260 30-34 Thn Laki-laki = 142 30-34 Thn Perempuan = 53 45+Thn Laki-Laki = 6 45+ Thn Perempuan = 6
	Tingkat setengah pengangguran.	2,16%
	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Target 50 Orang Realisasi 71 Orang 142 %
	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	N/A
	Jumlah wisatawan mancanegara.	9 Orang
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jumlah Kunjungan Tamu 2016 - 2020 sebanyak 51.992 Orang
	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat
	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Jumlah karyawan hotel dari tahun 2016 - 2020 (325 Orang)
	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	
	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	

		Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	26%
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Panjang pembangunan jalan tol.	NA
		Panjang jalur kereta api.	NA
		Jumlah dermaga penyeberangan.	14
		Jumlah pelabuhan strategis.	3
		Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	3,18%
		Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	1,35%
		Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	1388 Orang
		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	3,98%
		Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	34%
		Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	0,0107%
		Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	87%
		Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	75,50%
		Proporsi individu yang menggunakan internet	40%
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Koefisien Gini.	0,3
		Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	12,26%
		Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	86 desa berkembang
		Jumlah desa tertinggal.	16 desa Tertinggal
		Jumlah Desa Mandiri.	2 Desa Mandiri
		Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	0,42
		Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	2,07%
		Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	(tidak tersedia data)
		Indeks Kebebasan Sipil.	(Belum dilakukan penilaian)
		Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum	0

		HAM Internasional.	
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	14.521 Jiwa
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	1.967 Unit Rumah
		Penggunaan moda transportasi umum di perkotaan	0
		Optimalisasi sedikitnya 20 kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa	0
		Peran swasta , organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif dalam forum dialog perencanaan pembangunan berkelanjutan	Meningkat
		Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tidak ada
		Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	0
		Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	menurun menjadi 20%
		Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedia Sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak tersedia data)
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	75%
		Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	0
		Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	0
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada

12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH
		Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	14.000 ton
		Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	50%
		Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	0
		Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	0
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada
		Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	terwujudnya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan melalui ketersediaan kebijakan kerangka hukum dan instrumen penataan ruang laut nasional serta terkelolanya 11 wilayah perngelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan hingga tahun 2019 (2015 = 5 WPP)	0
		Meningkatnya produksi ikan tangkap menjadi 6.982.560, ton pada tahun 2019 (2015; 6.299.290 ton)	Menignkat
		Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	Menignkat
		Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan	Menignkat

		mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization</i>	
		Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	69%
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Luas areal Rehabilitasi di Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Bram Itam seluas 5 ha tahun 2019
		Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	0
		Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	0
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	2 kasus
		Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0
		Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	
		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	(Belum tersedia data)
		Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	
		Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	19%
		Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan	0,038

	seksual sebelum umur 18 tahun.	
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	(Belum dilakukan penilaian)
	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	100%
	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	100%
	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	0
	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	100%
	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	0%
	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	100%
	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	8,57%
	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	6,67%
	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	92%
	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	75,00%
	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	91%
	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi	0

		dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	
		Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	0
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	tahun 2016 --> 2,73; tahun 2017 --> 2,77; tahun 2018 --> 3,35; tahun 2019 --> 2,78
		Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	tahun 2016 --> 0,87; tahun 2017 --> 0,76; tahun 2018 --> 0,75; tahun 2019 --> 0,82
		Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	N/A
		Pertumbuhan ekspor produk non migas	5%
		Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	(belum tersedia data)
		Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	84,76%
		Proporsi individu yang menggunakan internet.	39,55%
		Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	NA
		Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	Meningkat
		Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	>10
		Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	belum ada;
		Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang	100%

		merasa puas dengan kualitas data statistik.	
		Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	70%
		Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	12
		Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	84%
		Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	Ada
		Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi melalui website.	23.340
		Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	100%

Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 20 indikator atau sebesar 8,81%, artinya indikator yang belum mencapai target masih lebih banyak dibandingkan yang telah mencapai target. Indikator TPB Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah mencapai target Nasional paling banyak adalah tujuan TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) sebanyak 5 indikator dan TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) dan TPB 5 (Kesetaraan Gender) sebanyak 4 indikator. Sedangkan Indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbesar juga terdapat di TPB 3 (25 indikator), dan TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) sebanyak 17 indikator. Secara keseluruhan sebanyak 57 indikator atau 25,11% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator yang paling banyak dalam kategori ini adalah oleh TPB 6 (air bersih dan sanitasi yang layak) sebanyak 9 (Kota dan Pembangunan berkelanjutan, dan TPB 16 sebanyak 8 indikator.

Pertimbangan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033

Di saat penyusunan RPJMD ini sedang dilakukan, RTRW Kabupaten Tanjung Jabung sedang dalam masa peninjauan kembali. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah upaya untuk melihat konsistensi kesesuaian RTRW Kabupaten Tanjung Barat dengan pelaksanaan pembangunan atau dinamika pembangunan yang memperhatikan kondisi lingkungan strategis wilayah kabupaten dan juga dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Adanya perubahan kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten yang mendasari untuk dilakukan revisi terhadap RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya :

1. Perubahan RPJMN
2. Percepatan proyek strategis nasional

3. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
4. RPJMD
5. Dinamika pembangunan daerah yang berkaitan dengan investasi pariwisata, investasi infrastruktur dan investasi sumber daya alam.
6. Hasil penilaian akhir PK RTRW Tanjung Jabung Barat sebesar 77,98 (artinya, <85, menurut Peraturan Menteri ATR Nomor 6 Tahun 2017 apabila hasil penilaian RTRW berkualitas buruk dan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung tersebut wajib untuk di Revisi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. rencana sistem pusat kegiatan;
- b. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

a. Rencana Sistem Pusat Kegiatan

- Sistem perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) PKW berada di Perkotaan Kuala Tungkal berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, perdagangan dan jasa skala regional, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat industri pengolahan perikanan, pusat peribadatan, dan simpul pelayanan transportasi.
- Sistem perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKL) berada di Perkotaan Serdang Jaya di Kecamatan Betara, Perkotaan Merlung di Kecamatan Merlung, Perkotaan Tebing Tinggi di Kecamatan Tebing Tinggi, yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa sub regional, pusat kesehatan, industri pengolahan, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi.
- Sistem perkotaan yang meliputi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berada di . Perkotaan Dusun Kebun di Kecamatan Batang Asam, Perkotaan Bram Itam Kiri di Kecamatan Bram Itam, Perkotaan Pelabuhan Dagang di Kecamatan Tungkal Ulu, dan . Perkotaan Teluk Nilau di Kecamatan Pengabuan, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga.
- Sistem perdesaan yang meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) berada di Perdesaan Senyerang di Kecamatan Senyerang, Perdesaan Tungkal V di Kecamatan Seberang Kota, Perdesaan Betara Kiri di Kecamatan Kuala Betara, Perdesaan Lubuk Kambing di Kecamatan Renah Mendaluh, Perdesaan Rantau Badak di Kecamatan Muara Papalik, yang berfungsi sebagai transportasi lokal, pasar lokal dan pusat pelayanan fasilitas umum;

b. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem jaringan prasarana utama meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi laut.

Sistem jaringan transportasi darat meliputi :

- Jalan bebas hambatan berada di ruas Jambi – Rengat (Batas Batanghari – Batas Riau).
- Jalan arteri primer meliputi:
 - a. ruas Batas Provinsi Riau – Merlung;
 - b. ruas Merlung – Batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat/Kabupaten Muara Jambi.
 - c. ruas Batas Kabupaten Muara Jambi – Pematang Lumut;
 - d. ruas Pematang Lumut – Batas Kota Kuala Tungkal;
 - e. ruas Jalan Sultan Thaha Kuala Tungkal;
 - f. ruas Jalan Sudirman Kuala Tungkal;
 - g. ruas Jalan Sri Sudewi Kuala Tungkal; dan
 - h. ruas Jalan Akses Pelabuhan Roro Kuala Tungkal.
- Jalan kolektor primer K1 berada di ruas Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Lubuk Kambing – Merlung.
- Jalan kolektor primer K2 meliputi:
 - a. ruas Batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur/Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Kuala Tungkal;
 - b. ruas Sungai Saren – Teluk Nilau – Seyerang;
 - c. ruas Senyerang – Mekarjati/Batas Riau;
 - d. ruas Batas Kabupaten Batanghari/Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Merlung; dan
 - e. Senyerang – Tebing Tinggi – Simpang Kuala Dasal.
- Jalan lokal primer sebagaimana meliputi:
 - a. ruas Simpang Rambutan – Margo Rukun – Mekarjati – Tungkal V – Tungkal IV Desa – Muara Seberang;
 - b. ruas jalan Kuala Tungkal – Teluk Sialang – Sungai Gebar – Batas Tanjung Jabung Timur;
 - c. ruas jalan Tebing Tinggi – Pematang Lumut;
 - d. ruas perkotaan Merlung – Tanjung Benanak;
 - e. ruas perkotaan Pelabuhan Dagang – Purwodadi – Simpang Abadi;
 - f. ruas perkotaan Kemang Manis – Bukit Indah – Intan Jaya – Adi Purwa; dan
 - g. ruas perkotaan Pinang Gading – Bukit Harapan – Lampisi – Cinta Damai –Pulau Pauh.
- Jalan khusus meliputi:
 - a. ruas Batas Kabupaten Batanghari/Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Taman Raja/Pelabuhan Dagang; dan
 - b. ruas Kelagian – Teluk Nilau.

Prasarana lalu lintas meliputi terminal penumpang dan terminal barang, terminal penumpang meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan terminal Tipe B di Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam;
- b. pengembangan terminal tipe C di Kota Kuala Tungkal;

- c. pembangunan dan pengembangan terminal Tipe B di Kota Merlung kecamatan Merlung;
- d. pembangunan dan pengembangan terminal Tipe B di Kota Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi; dan
- e. pembangunan dan pengembangan terminal Tipe C di Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan.

Terminal barang berupa pengembangan terminal barang Desa Bram Itam Raya di Kecamatan Bram Itam.

Pelayanan lalu lintas untuk angkutan penumpang berupa :

- a. Pengembangan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dengan jalur Jawa – Palembang – Jambi – Simpang Tuan -Kuala Tungkal, Kuala Tungkal – Merlung – Pekanbaru, Kuala Tungkal – Jambi Batanghari – Muara Bungo.
- b. Pengembangan Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan jalur Kuala Tungkal – Jambi, Kuala Tungkal – Sialang, Kuala Tungkal – Tebing Tinggi, Kuala Tungkal – Merlung, Kuala Tungkal Pelabuhan Dagang; dan
- c. Pengembangan Angkutan Pedesaan (ANGDES) meliputi:
 - a. Kuala Tungkal – Simpang Abadi;
 - b. Kuala Tungkal – Teluk Nilau;
 - c. Kuala Tungkal – Sialang;
 - d. Kuala Tungkal – Tebing Tinggi;
 - e. Kuala Tungkal – Merlung;
 - f. Kuala Tungkal – Pelabuhan Dagang; dan
 - g. Kuala Tungkal – Betara Kiri;
 - h. Jalur penghubung antar kecamatan lainnya.

Pelayanan lalu lintas untuk angkutan barang berupa :

- a. Pengembangan angkutan barang dengan jalur Kuala Tungkal – Terminal Barang Serdang Jaya – Jambi – Sumatera Selatan;
- b. Pengembangan angkutan barang dengan jalur Kuala Tungkal – Terminal Barang Serdang Jaya – Merlung – Pelabuhan Dagang – Pekanbaru.

Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi meliputi:

- a. pelabuhan penyeberangan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sungai Pengabuan;
- b. pelabuhan Kuatik; dan
- c. pelabuhan Tangga Raja Ulu

Dengan alur pelayaran :

- a. alur Sungai Pengabuan dengan jalur Kuala Tungkal – Teluk Nilau – Senyerang – S. Rambai – Ketapang – Lumahan – sampai ke Taman Raja dan daerah sekitarnya;
- b. alur Sungai Betara dengan jalur Kuala Tungkal – Kuala Sei. Betara – Serdang Jaya Kecamatan Betara; dan
- c. alur Lintas penyebrangan Dabo – Kuala Tungkal.

Sistem Jaringan Transportasi Laut, meliputi :

1. Terminal pengumpul yaitu Pelabuhan Roro Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir.
2. Terminal untuk kepentingan sendiri meliputi:
 - a. Terminal untuk kepentingan sendiri di Kecamatan Tungkal Ulu;
 - b. Terminal untuk kepentingan sendiri Kecamatan Batang Asam;
 - c. Terminal untuk kepentingan sendiri di Kecamatan Tebing Tinggi;
 - d. Terminal untuk kepentingan sendiri Kecamatan Pengabuan;
 - e. Terminal untuk kepentingan sendiri Kecamatan Tungkal Ilir;

Dengan alur pelayaran meliputi meliputi Kuala Tungkal – Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Kepulauan Riau - Provinsi Riau – SIJORI (Singapura, Johor, Riau) dan SIBAJO (Singapura – Batam – Johor), dan alur pelayaran penyeberangan dengan jalur Kuala Tungkal – Kepulaun Riau – Provinsi Riau

Tabel VI.02
Strategi “MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”

Misi 1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1.1. Membentuk sumberdaya manusia yang Berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia	1.1.1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	• Meningkatkan mutu fasilitas pendidikan • Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan • Memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan • Memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan • Meningkatkan mutu metode pembelajaran • Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja • Meningkatkan budaya gemar membaca • Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama • Bantuan pendidikan dan atau beasiswa bagi masyarakat dan ASN
		• Meningkatkan mutu fasilitas kesehatan • Meningkatkan mutu tenaga kesehatan • Memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan • Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan • Optimalisasi pelayanan kesehatan ibu dan anak • Pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu
		• Memenuhi hak – hak anak • Pelaksanaan pengarusutamaan gender • Memfasilitasi keinginan kreasi positif bagi

		pemuda • Mencegah perilaku berisiko pada pemuda • Meningkatkan akses dan peluang terhadap sumber daya ekonomi • Mengambil kebijakan mengenai tanggung jawab dan partisipasi semua pihak ikut terlibat dalam urusan ketahanan keluarga
Misi 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis		
Tujuan	Sasaran	Strategi
2.1. Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	2.1.1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat	• Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan dan norma yang berlaku • Memperkuat peran petugas perlindungan masyarakat • Meningkatkan pelayanan sosial masyarakat
	2.1.2. Terjaganya kelestarian, nilai kejuangan, dan pengembangan budaya daerah	• Menggiatkan aktualisasi nilai kejuangan, dan kebudayaan daerah • Meningkatkan budaya religius
Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi
3.1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	3.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	• Menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pada setiap perangkat daerah • Menggunakan teknologi informasi dalam sistem akuntabilitas kinerja • Penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
	3.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	• Menyederhanakan proses dalam pelayanan publik • Menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan publik • Meningkatkan kualitas sarana dan

		prasarana serta aparatur pelayanan publik
	3.1.3.Meningkatnya kinerja, penganggaran,pengelolaan keuangan dan aset daerah	• Optimalisasi pendapatan daerah • Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset daerah • Penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) • Penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD
Misi 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
4.1. Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan	4.1.1. Meningkatnya perekonomian kabupaten	• Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi • Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif • Meningkatkan produk unggulan daerah Berbasis pemberdayaan masyarakat • Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan Ekonomi kerakyatan yang kreatif, • Memanfaatkan keberadaan rest area di ruas jalan tol jambi–rengat untuk pengembangan ekonomi lokal • Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata • Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif • Mewujudkan ketahanan pangan dan

		Pertanian yang berkelanjutan • Optimalisasi kontribusi pendapatan yang bersumber dari BUMD • Meningkatkan pengolahan sumber daya alam menjadi produk (hilirisasi) dan pemberdayaan masyarakat diberbagai sektor • Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi baru “SENTUSA” (Sengeti – Tungkal – Sabak)
	4.1.2. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	• Menjaga kualitas air • Menjaga kualitas udara • Menjaga kualitas tutupan lahan • Menjaga kualitas air laut • Menjaga kualitas ekosistem gambut • Meningkatkan pengelolaan sampah dengan pola 3R
Misi 5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota		
Tujuan	Sasaran	Strategi
5.1. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	5.1.1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat	• Membangun jalan dan jembatan, termasuk mendukung akses menuju exit tol Jambi-rengat • Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan • Mengoptimalkan layanan air bersih bagi seluruh masyarakat • Meningkatkan akses sanitasi • Meningkatkan akses telekomunikasi • Meningkatkan akses listrik • Membangun saluran air / drainase • Mengentaskan permukiman kumuh

		perkotaan • Bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah • Meningkatkan infrastruktur pendukung akses pendidikan dan kesehatan • Mengoptimalkan sumber dan kapasitas alternatif pembiayaan pembangunan kabupaten (Non APBD)
	5.1.2. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota, dan daerahperbatasan	• Pembangunan jalan dan jembatan konektivitas • Pembangunan dan peningkatan terminal, dermaga, dan pelabuhan • Meningkatkan kerjasama antar daerah dengan kabupaten yang berbatasan untuk kemajuan perekonomian • Fasilitasi Percepatan pembangunan Pelabuhan Kelagian Kec, Tebing Tinggi

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan jangka menengah. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan dirumuskan sebagai kerangka kerja atau kerangka pikir untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan dan mengantisipasi isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Tabel VI.03
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.1. Membentuk sumber daya manusia yang Berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia	1.1.1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	• Meningkatkan mutu fasilitas pendidikan • Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan • Memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan • Memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan • Meningkatkan mutu metode pembelajaran • Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja • Meningkatkan budaya gemar membaca • Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama • Bantuan pendidikan dan atau beasiswa bagi masyarakat dan ASN	✓ Penyediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat ✓ Pemenuhan kebutuhan pasar kerja ✓ Peningkatan kompetensi ASN
		• Meningkatkan mutu fasilitas kesehatan • Meningkatkan mutu tenaga kesehatan • Memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan • Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan • Optimalisasi pelayanan kesehatan ibu dan anak • Pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu	✓ Penyediaan layanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat

		• Memenuhi hak – hak anak • Pelaksanaan pengarusutamaan gender • Memfasilitasi keinginan kreasi positif bagi pemuda • Mencegah perilaku berisiko pada pemuda • Meningkatkan akses dan peluang terhadap sumberdaya ekonomi • Mengambil kebijakan mengenai tanggungjawab dan partisipasi semua pihak ikut terlibat dalam urusan ketahanan keluarga	✓ Tumbuh kembang anak dengan normal ✓ Kesetaraan gender ✓ Kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan ✓ Kemandirian dan keharmonisan keluarga
Misi 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.1. Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	2.1.1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakatserta perlindungan masyarakat	• Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan dan norma yang berlaku • Memperkuat peran petugas perlindungan masyarakat • Meningkatkan pelayanan sosial masyarakat	✓ Tata kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram, dan harmonis mengikuti aturan dan norma yang berlaku
	2.1.2. Terjaganya kelestarian, nilai kejuangan,dan pengembangan budaya daerah.	• Menggiatkan aktualisasinilai kejuangan dan kebudayaan daerah • Meningkatkan budaya religious	✓ Nilai dan pendayagunaan nilai kejuangan dan budaya untuk mendukung proses pembangunan

Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3.1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	3.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	• Menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pada setiap perangkat daerah • Menggunakan teknologi informasi dalam sistem akuntabilitas kinerja • Penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	✓ Efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target –target kinerja
	3.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	• Menyederhanakan proses dalam pelayanan publik • Menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan publik • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta aparatur pelayanan publik	✓ Pelayanan publik yang tepat, efektif dan, efisien
	3.1.3 .Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	• Optimalisasi pendapatan daerah • Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset daerah • Penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) • Penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD	✓ Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ✓ Pengelolaan keuangan dan aset akuntabel ✓ Perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset, dan pengawasan yang terintegrasi

Misi 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4.1. Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan	4.1.1. Meningkatnya perekonomian kabupaten	• Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi • Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif • Meningkatkan produk unggulan daerah Berbasis pemberdayaan masyarakat • Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan Ekonomi kerakyatan yang kreatif, • Memanfaatkan keberadaan rest area di ruas jalan tol jambi–rengat untuk pengembangan ekonomi lokal • Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata • Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif • Mewujudkan ketahanan pangan dan Pertanian yang berkelanjutan • Optimalisasi kontribusi pendapatan yang bersumber dari BUMD • Meningkatkan pengolahan sumber daya alam menjadi produk (hilirisasi) dan pemberdayaan masyarakat diberbagai sektor • Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi baru “SENTUSA” (Sengeti – Tungkal – Sabak)	✓ Peningkatan aktivitas perekonomian yang merata dari desa sampai kota yang lebih ditopang dari sector ekonomi kerakyatan ✓ Percepatan pembangunan dan pengembangan sentra – sentra ekonomi, wilayah – wilayah strategis, dan cepat tumbuh, yang lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi ✓ Pemanfaatan letak strategis yaitu berbatasan dengan Pulau batam, Negara Singapura, dan Malasya, serta berbatasan dengan secara interregional (Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi, Kab. Batang Hari, Kab. Tebo, dan Kab. Inhil-Riau ✓ Mengarahkan koperasi dan UMKM untuk menjadi pelaku ekonomi yang berbasis agribisnis, atau bidang lainnya baik disektor hulu maupun di hilir

	4.1.2. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	• Menjaga kualitas air • Menjaga kualitas udara • Menjaga kualitas tutupan lahan • Menjaga kualitas air laut • Menjaga kualitas ekosistem gambut • Meningkatkan pengelolaan sampah dengan pola 3R	✓ Pembangunan kabupaten yang berkelanjutan
Misi 5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5.1. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	5.1.1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat	• Membangun jalan dan jembatan • Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan • Mengoptimalkan layanan air bersih bagi seluruh masyarakat • Meningkatkan akses sanitasi • Meningkatkan akses telekomunikasi • Meningkatkan akses listrik • Membangun saluran air / drainase • Membangun infrastruktur dasar di permukiman kumuh perkotaan • Bantuan rumah layak huni bagi masyarakatberpenghasilan rendah • Meningkatkan infrastruktur pendukung akses pendidikan dan kesehatan • Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan • Mengoptimalkan sumber dan kapasitas alternatif pembiayaan pembangunan kabupaten (Non APBD)	✓ Penyediaan akses layanan dasar yang merata, memadai, layak, aman, dan terjangkau ✓ Pembangunan infrastruktur yang serasi dengan tata ruang ✓ Pencegahan dan pengentasan permukiman kumuh perkotaan

	5.1.2. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota, dan daerah perbatasan	• Pembangunan jalan dan jembatan konektivitas • Pembangunan dan peningkatan terminal, dermaga, dan pelabuhan • Meningkatkan kerjasama antar daerah dengan kabupaten yang berbatasan untuk kemajuan perekonomian • Fasilitasi Percepatan pembangunan Pelabuhan Kelagian Kec, Tebing Tinggi	✓ Memperlancar mobilitas komoditas unggulan dan penumpang ✓ Mendukung pengembangan wilayah dan ekspansi ekonomi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 :

Membentuk sumberdaya yang sehat, cerdas, terampil, dan berahlak mulia, diantaranya melalui :

- Peningkatan pelayanan kesehatan, melalui perluasan jangkauan layanan kesehatan terutama daerah yang sulit akses kesehatan, dan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki jaminan sosial BPJS
- Pengentasan stunting, kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada lokus daerah yang terdapat kasus stunting.
- Pemerataan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
- Pelaksanaan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kluster kompetensi, dan peningkatan standar hasil pelatihan, dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja yang ada
- Peningkatan lulusan sekolah tingkat tinggi, melalui pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan.
- Penguatan peran da'i, tokoh agama, dan imam masjid dalam meningkat pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- Bantuan bagi sekolah berbasis agama.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kabupaten, diantaranya melalui :

- Mendorong berdirinya atau berkembangnya industri berbasis komoditas lokal pertanian, perkebunan, dan peternakan (hilirisasi).
- Perbaikan aksesibilitas terutama untuk memudahkan akses dari desa ke desa dan menuju kota dengan moda darat ataupun laut. Terdapat beberapa kecamatan dengan akses antar desa dan akses ke kota yang buruk, adalah Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Renah Mendaluh, dan Kec. Muara Papalik.
- Perbaikan jaringan irigasi untuk perkebunan terutama perkebunan kelapa dalam
- Peningkatan kualitas beras melalui penanganan panen dan pasca panen yang tepat untuk mendongkrak nilai jual.
- Pengembangan wisata mangrove Desa Pangkal Babu, dengan memperbaiki akses menuju lokasi dan menata objek agar menarik.
- Pengintegrasian pertanian, perkebunan, dan peternakan disuatu kawasan melalui konsep *food estate*.
- Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di masa pandemi covid-19 untuk upaya pemulihan ekonomi
- Pengembangan batik lokal, mencakup pelatihan, pembuatan, dan pemasarannya.

Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota, diantaranya melalui :

- Pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan
- Perbaikan aksesibilitas terutama untuk memudahkan akses dari desa ke desa dan menuju kota dengan moda darat ataupun laut. Terdapat beberapa kecamatan dengan akses antar desa dan akses ke kota yang buruk, adalah Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Renah Mendaluh, dan Kec. Muara Papalik.
- Peningkatan akses air bersih bagi masyarakat terutama di wilayah perkotaan
- Berupaya mengusulkan dan mendorong PLN untuk memperluas jaringan distribusi listrik ke satuan rumah penduduk yang belum menggunakan energi listrik PLN.
- Berupaya mendorong perusahaan telekomunikasi untuk mendirikan tower telekomunikasi di wilayah dengan kondisi sangat kurang dan *blankspot*. Ada 54 desa yang tersebar di beberapa kecamatan dengan kondisi sangat kurang dan *blankspot*.
- Pelayanan penanganan sampah sampai ke kecamatan – kecamatan.

Tabel VI.04

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif KabupatenTanjung Jabung Barat

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD											
				Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)									
			Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak																								
			1.1. Membentuk sumber daya manusia yang Berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,54	67,86		68,18		68,50		68,83		69,15		69,47											
			1.1.1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Angka Harapan Lama Sekolah	12,61	12,79		12,97		13,14		13,32		13,50		13,68											
				Rata – rata lama sekolah	7,70	7,78		7,87		7,95		8,03		8,11		8,20											
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 4-6 tahun	34,50%	35,54 %	147.352.000.000,-	36,60 %	157.823.000.000,-	37,70 %	165.804.000.000,-	38,83 %	172.163.000.000,-	39,99 %	181.579.000.000,-	41,19 %	191.935.000.000,-	41,19 %	1.016.656.000.000,-	Dinas Dikbud							
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A	102,63%																102,13%	101,63%	101,13%	100,63%	100,00%	100,00%	100,00%
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	92,80%																94,19 %	95,60 %	97,04 %	98,49 %	100,00%	100,00%	100,00%

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B	91,26%	92,17 %		93,09 %		94,03 %		94,97 %		95,92 %		96,87 %		96,87 %		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	65,73%	66,72 %		67,72 %		68,73 %		69,76 %		70,81 %		71,87 %		71,87 %		
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Angka Kelulusan SD/MI	99,36%		1.200.000.000,-	100%	1.290.000.000	100%	1.389.000.000,-	100%	1.498.000.000,-	100%	1.618.000.000,-	100%	1.749.000.000,-	100%	8.744.000.000,-	Dinas Dikbud
				Angka Kelulusan SMP/MTs	98,50%			100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru 1:20	1:19	1 : 20	600,000,000	1 : 20	660,000,000	1 : 20	726,000,000	1 : 20	799,000,000	1 : 20	878,000,000	1 : 20	966,000,000	1 : 20	3.663.000.000,-	
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	100%	8.752.054.088,-	100%	11.411.750.627,-	100%	13.816.000.000,-	100%	15.197.600.000,-	100%	16.717.360.000,-	100%	18.389.096.000,-	100%	84.283.860.715,-	Bag. Kesejahteraan Rakyat-SETDA
				Persentase Kerjasama antar daerah, Lembaga/ Perorangan dalam daerah yang terfasilitasi	100%	100%	570.593.968,	100%	629.599.777	100%	885.000.000	100%	945.000.000	100%	1.005.000.000	100%	1.065.000.000	100%	5.100.193.745,-	Bag. Kerjasama SETDA

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Usia harapan hidup	68,03	68,12		68,21		68,30		68,40		68,49		68,58		68,58		Dinas Kesehatan
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				75.239.504.865		79.189.479.484		80.837.606.878		55.608.507.909		58.494.994.277		60.856.819.108		410.226.912.521	
				Jumlah pemenuhan SPA sesuai standar minimal 70%	7 Puskesmas+2 RS	2 Puskesmas + 2 RS	66.508.118.059	2 Puskesmas+ 2 RS	69.834.870.906	2 Puskesmas +2 RS	71.145.752.322	1 Puskesmas + 2 RS	45.533.779.950	1 Puskesmas + 2RS	48.033.847.670	1 Puskesmas + 2 RS	50.033.847.670	16 Puskesmas + 2 RS	351.090.216.577	
				Angka Kematian Ibu	230 / 100.000 KLH	217/ 100.000 KLH	141.015.000	205/ 100.000 KLH	151.015.000	194/ 100.000 KLH	155.116.500	183/ 100.000 KLH	198.255.000	180/ 100.000 KLH	238.998.000	178/100.000 KLH	250.947.900	178/100.000 KLH	1.135.347.400	
				Angka Kematian Neonatal	12,9 /1000 KLH	12,2/ 1000 KLH	815.627.750	11,6/ 1000 KLH	856.409.138	11/1000 KLH	899.229.594	10/1000 KLH	944.191.074	9/1000 KLH	991.400.628	8/1000 KLH	1.040.970.659	8/1000 KLH	5.547.828.843	
				Pravelensi Stunting	21,8%	20%	815.627.750	18%	890.827.750	17%	935.369.138	16%	982.137.594	15%	1.031.244.474	14%	1.082.806.698	14%	5.738.013.404	
				Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate/SR) TBC	99,3%	100%	126.525.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	976.525.000	
				Persentase masyarakat yang mempunyai i jaminan kesehatan	71,13%	75%	5.987.520.000	77%	6.214.320.000	79%	6.441.120.000	80%	6.667.920.000	82%	6.894.720.000	85%	7.121.520.000	85%	39.327.120.000	
				Persentase Desa Uci	86,60%	90%	150.000.000	93,00 %	165.000.000	95%	173.250.000	95%	181.912.50	95%	191.008.125	95%	200.558.531	95%	1.061.729.156	

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t		Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
												0								
				Angka Kejadian kasus (Incidence Rate/IR) DBD	73,3 Per 100.000 Penduduk	<49 Per 100.000 Penduduk	192.697.800	<49 Per 100.000 Penduduk	202.332.690	<49 Per 100.000 Penduduk	212.449.325	<49 Per 100.000 Penduduk	223.071.791	<49 Per 100.000 Penduduk	234.225.380	<49 Per 100.000 Penduduk	245.936.649	<49 Per 100.000 Penduduk	1.310.713.635	
				Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Usia 15-59 Tahun	38,1%	40%	502.373.506	43%;	704.704.000	46%	705.320.000	49%	707.240.000	53%	709.550.000	55%	710.231.000	55%	4.039.418.506	Dinas Kesehatan
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				17.814.205.000		18.220.205.000		19.187.625.500		19.650.625.500		19.950.625.500		20.350.625.500		115.173.912.000	
				Persentase pemenuhan tenaga kesehatan spesialistik sesuai standar	56,25%	56,25%	8.500.000.000	62,5%	8.700.000.000	68,75%	9.350.000.000	75%	9.550.000.000	81,25%	9.750.000.000	87,5%	9.950.000.000	87,5%	55.800.000.000	
				Persentase pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan	50%	56,25%	9.314.205.000	75%	9.520.205.000	81,25%	9.837.625.500	87,5%	10.100.625.500	93,75%	10.200.625.500	100%	10.400.625.500	100%	59.373.912.000	
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	20%	25%	292.040.000	30%	306.642.000	35%	321.974.100	40%	338.072.805	45%	354.976.445	50%	372.725.268	60%	1.986.430.618	Dinas Kesehatan

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Persentase pengawasa n pre daan post market pangan industri rumah tangga sesuai daftar	20%	25%	182.05 0.000	30%	191.152 .500	35%	200.71 0.125	40%	210.7 45.63 1	45%	221.28 2.913	50%	232.34 7.058	60%	1.238.2 88.228	P3AP2KB
1	0 2	0 5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/ Kelurahan ODF (Open Defecation Free)	16,4%	20,8 %	150.00 0.000	32,83 %	155.000 .000	56,71 %	265.00 0.000	80%	280.0 00.00 0	93%	295.00 0.000	100%	310.00 0.000	100%	1.455.0 00.000	Dinas Kesehatan
1	0 6	0 2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang terampil	66%	23%	80.000. 000,-	82%	345.000 .000	83%	350.00 0.000	87%	373.0 00.00 0	89%	387.00 0.000	100%	387.00 0.000	100%	1.922.0 00.000	Dinas Sosial
1	0 6	0 4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang diberi bantuan	0%	5,24 %	211.98 7.198,-	22,71 %	2.177.0 00.000	39,59 %	1.859.0 00.000	58,37 %	2.526 .000. 000	79,18 %	2.773.0 00.000	100%	2.773.0 00.000	100%	12.319. 987.19 8	Dinas Sosial
				Pengeluara n per Kapita (Ribu rupiah/Or ang/Tahu n)	9.480.0 00,-	9.522 .000,-		9.56 4.00 0,-		9.606 .000,-		9.648 .000,-		9.690 .000,-		9.732 .000,-		9.732 .000,-		
1	0 3	1 1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi terlatih terhadap jumlah kebutuhan	5,63%	-	-	10,63 %	761.900 .000	15,63 %	752.00 0.000	20,63 %	774.0 00.00 0	25,63 %	801.00 0.000	30,63 %	870.00 0.000	30,63 %	3.958.9 00.000	Dinas PUPR
2	0 7	0 2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-	0	1 doku men Makr	184.000 .000	15 doku men Mikro	150.00 0.000	15 doku men Mikro	150.0 00.00 0	15 doku men Mikro	150.00 0.000	15 doku men Mikro	150.00 0.000	1 doku men makr	784.00 0.000	Dinas Tenaga Kerja

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
								o										o / 60 doku men mikro			
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.Persentase tenaga kerja lulus pelatihan(bersertifikat)	100%	100%	655.905.586	100%	1.622.500.000	100%	1.562.500.000	100%	1.562.500.000	100%	1.562.500.000	100%	1.562.500.000	100%	8.528.405.586	Disnaker	
				2. Persentase tenaga kerja yang lulus pelatihan bersertifikat kompetensi	72.65%	74%		75%		80%		85%		90%		95%		95%			
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui mekanisme layanan antar kerja	330 orang	342 orang	149.195.458	350 orang	785.000.000	400 orang	610.000.000	410 orang	610.000.000	420 orang	610.000.000	430 orang	610.000.000	430 orang	3.754.195.458	Disnaker	
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang memenuhi syarat-syarat kerja	66,04%	72%	51.159.035	78%	543.056.000	84%	455.976.000	90%	455.976.000	96%	455.976.000	100%	455.976.000	100%	2.418.119.035	Disnaker	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan/Peternak	10%	20%	320.768.571	25%	605.248.959	30%	696.036.303	35%	800.441.748	40%	920.508.011	45%	1.058.584.212	45%	4.401.587.804	Disbunak	

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t		Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				an																
				Cakupan Bina Kelompok Tani	20%	25%	4.000.000.000	25%	7.042.000.000	25%	7.218.050.000	25%	7.398.501.250	25%	7.583.463.781	25%	11.981.181.977	25%	45.223.197.008	DTPH
				Status Kabupaten Layak Anak (KLA)		Pratama		Pratama		Madya		Nidya		Utama		KLA		KLA		
2	08	05	Program Pengelolaan Sistim Data Gender Dan Anak	Persentase OPD memiliki data pilah berdasarkan jenis kelamin	16%	-	-	100%	280.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	360.000.000	P3AP2KB
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan hak anak yang terpenuhi	35%	40%	162.219.269	43%	400.000.000	46%	440.000.000	49%	450.000.000	53%	460.000.000	54%	460.000.000	54%	2.372.219.269	P3AP2KB
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memperoleh layanan perlindungan khusus	15%	19,9%	-	21,5%	340.000.000,-	23,9%	350.000.000	25,5%	360.000.000	26,9%	360.000.000	27,3%	360.000.000	27,3%	1.770.000.000	P3AP2KB
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,68	87,00		87,50		88,50		89,00		89,50		90,00		90,00		P3AP2KB
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,31	68,50		69,00		69,50		70,00		70,50		71,00		71,00		P3AP2KB
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD dan Desa melaksanakan PPRG	0,67	10%	500.044.065	10%	659.649.607	10%	659.649.607	10%	659.649.607	10%	659.649.607	10%	659.649.607	60%	3.798.292.100	P3AP2KB

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	0	0	Program Perlindungan Perempuan	Persentase layanan penanganan pengaduan kekerasan	100%	100%	27.429.750	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	927.429.750	P3AP2KB
				Persentase pemuda berprestasi atau mandiri yang dibina	0	20%		45%		45%		49%		49%		54%		54%		
2	1	0	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Berprestasi /Mandiri/ Religius yang di bina	0	20%	1.023.485.972	45%	1.445.385.450	45%	1.579.923.995	49%	1.727.916.395	49%	1.890.708.034	54%	2.069.778.837	54%	9.737.198.683	Disparpora
2	1	0	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Perolehan Medali	0	40	5.911.755.958	40	47.050.000.000	10	17.755.000.000	40	48.530.500.000	10	21.383.550.000	40	50.321.905.000	180	190,952.710,958	Disparpora
2	1	0	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Status Organisasi Pramuka	Aktif	Aktif	400.000.000	Aktif	440.000.000	Aktif	484.000.000	Aktif	532.400.000	Aktif	585.640.000	Aktif	644.204.000	Aktif	3,086,244,000	Disparpora
3	2	0	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata yang berkompeten yang di bina	0	7%	64.739.517	19%	720.000.000	27%	792.000.000	38%	871.200.000	50%	958.320.000	58%	1.054.152.000	58%	4.460.411.517	Disparpora
				Indeks Pembangunan Keluarga	56,69	58,20		60,32		62,44		64,56		66,68		68,80		68,80		
2	0	0	Program Peningkatan	Persentase Keluarga	-	-	-	2%	130.000.000	2%	130.000.000	2%	130.000.000	2%	130.000.000	2%	130.000.000	10%	650.000.000	P3AP2KB

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t		Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Kualitas Keluarga	memperoleh edukasi kualitas keluarga								0								
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Design Pengendalian Penduduk	10%	100%	80.000.000	100%	145.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	145.000.000	100%	80.000.000	100%	610.000.000	P3AP2KB
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase tingkat ketidakberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi (Drop Out KB)	19,69%	19,69%	391.405.632,-	19,67%	1.116.000.000	19,64%	1.458.000.000	19,62%	1.644.000.000	19,60%	1.820.000.000	19,58%	2.178.000.000	19,58%	8.607.405.632,-	P3AP2KB
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Poktan yang ber-KB (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	100%	100%	-	100%	560.000.000,-	100%	590.000.000,-	100%	590.000.000	100%	590.000.000	100%	590.000.000	100%	2.920.000.000,-	P3AP2KB
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	59	65	4,483,312,141	68	5,498,000,000	71	6,322,700,000	73	7,271,105,000	75	8,361,770,750	77	8,361,770,750	77	40,298,658,641	BKPSDM
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	6,6%	7,3%		8,2%		9,2%		10,3%		11,6%		12%		12%		
				Persentase	5%	5,9%		7,1%		8,4%		9,7%		11,2%		12,2%		12,2%		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal																
				Persentase penetapan jabatan sesuai kompetensi	91,6%	92%		92%		92%		92%		93%		93%		93%		
				Rasio pejabat fungsional tertentu	51,4%	53,9 %		55,9 %		56,3%		56,7%		56,9%		61%		61%		
				Tingkat penurunan pelanggaran disiplin ASN	50%	25%		25%		25%		25%		25%		50%		50%		
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	status akreditasi perpustakaan	Belum terakrediti	C	4.559.607.000	C	799.766.000	C	753.480.900	B	864.753.035	B	992.540.990	A	1.139.304.639	A	9,109,452,564	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Koleksi Nasional	-	-	-	-	-	2 Naska h	33.000.000	2 Naska h	38.000.000	3 Naska h	44.000,000	3 Naska h	50.000.000	10 Naska h	165,000,000	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan
			Misi 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis																	
			2.1. Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisanmas	Nilai persepsi rasa aman	-	66,00		67,50		69,00		70,50		72,,00		73,50		73,50		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			yarakat, dan kelompok																	
			2.1.1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta perlindunganmasyarakat	Persentase Perda dan Perkada yangditegakan	80 %	82,65 %		83,6 5%		84,01 %		85%		90%		90%		90 %		
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat pelanggaran Perda/Perbup	38%	30%	4.105.665.649	20%	5.078.352.323	20%	5.586.187.555,-	15%	6.144.806.311	15%	6.759.286.942	15%	7.383.972.136	15%	35.058.270.916	Satpol. PP
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	2.653.315.500	100%	3.340.200.000	100%	3.874.220.000,-	100%	3.799.542.000,-	100%	3.886.786.200,-	100%	4.275.464.820,-	100%	21.829.628.520,-	BPBD
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	5.859.130.000	100%	6.963.618.000	100%	4.968.369.800	100%	2.724.196.780	100%	2.814.646.458	100%	2.914.141.104	100%	26.244.102.142	Dinas Damkar
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah berita acara/notulen kesepakatan yang dihasilkan	6	-	-	6	30.000.000,-	6	40.000.000,-	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	220.000.000,-	Kecamatan Tungkal Ulu

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				bersama Forkopinca m																
					6	-	-	-	-	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	60.000.000	Kecamatan Merlung
					6	-	-	6	30.000.000,-	6	33.000.000	6	36.000.000	6	36.000.000	6	36.000.000	6	171.000.000,-	Kecamatan Batang Asam
					6	-	-	6	20.000.000	6	22.000.000	6	24.200.000	6	26.620.000	6	29.282.000	6	122.102.000,-	Kecamatan Tebing Tinggi
					6	-	-	6	30.000.000	6	40.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	220.000.000,-	Kecamatan Renah Mendaluh
					6	-	-	6	45.000.000,-	6	40.000.000,-	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	235.000.000,-	Kecamatan Muara Papalik
					6	-	-	6	40.000.000,-	6	45.000.000,-	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	235.000.000,-	Kecamatan Pengabuan
					6	-	-	6	50.000.000	6	34.540.000,-	6	19.844.000	6	21.828.400	6	24.011.240	6	150.223.640	Kecamatan Senyerang
					6	-	-	6	62.250.000	6	68.475.000	6	75.322.500	6	82.854.750	6	91.140.225	6	380.042.475,-	Kecamatan Tungkal Ilir
					6	-	-	6	30.000.000,-	6	45.000.000,-	6	50.000.000	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	225.000.000,-	Kecamatan Bram Itam
					6	-	-	6	30.000.000,-	6	40.000.000,-	6	50.000.000	6	55.000.000,-	6	60.500.000,-	6	235.500.000,-	Kecamatan Seberang Kota
					6	-	-	6	30.000.000,-	6	40.000.000,-	6	50.000.000	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	220.000.000,-	Kecamatan Betara
					6	-	-	6	20,000,000	6	24,000,000	6	30,000,000	6	33,000,000	6	40.000.000,-	6	147.000.000,-	Kecamatan Kuala Betara
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	95%	100%	6.0.000.000	100%	415.000.000	100%	385.000.000	100%	415.000.000	100%	510.000.000	100%	510.000.000	100%	2.295.000.000	Badan Kesbangpol

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				yang meningkat pemahama nnya																
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi politik masyarakat dan parpol	95%	100%	1.995.000.000	100%	2.500.000.000	100%	1.950.000.000	100%	31.955.000.000	100%	1.955.000.000	100%	1.955.000.000	100%	42.310.000.000	Badan Kesbangpol
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang diberdayakan	95%	100%	25.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	215.000.000	100%	235.000.000	100%	235.000.000	100%	1.110.000.000	Badan Kesbangpol
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi , Sosial Dan Budaya	Persentase Peserta pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosbud yang meningkat pemahama nnya	95%	100%	150.000.000	100%	715.000.000	100%	735.000.000	100%	735.000.000	100%	735.000.000	100%	735.000.000	100%	3.805.000.000	Badan Kesbangpol
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan	Persentase konflik sosial yang ditangani	95%	100%	710.000.000	100%	1.135.000.000	100%	935.000.000	100%	975.000.000	100%	1.025.000.000	100%	1.025.000.000	100%	5.805.000.000	Badan Kesbangpol

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t		Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial																	
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang dilayani	44,94%	45,78 %	470.00 0.000	54,86 %	930.000 .000	64,80 %	965.00 0.000	76,26 %	1.095 .000. 000	87,71 %	1.105.0 00.000	99,16 %	1.105.0 00.000	99,16 %	5.670.0 00.000	Dinas Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan	100%	100%	80.000. 000	100%	275.000 .000	100%	320.00 0.000	100%	350.0 00.00 0	100%	385.00 0.000	100%	385.00 0.000	100%	1.795.0 00.000	Dinas Sosial
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	40%	40%	70.000. 000	55%	500.000 .000	69%	500.00 0.000	86%	600.0 00.00 0	94%	300.00 0.000	100%	200.00 0.000	100%	2.670.0 00.000	Dinas Sosial
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkap an nya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	2.308 Unit	10.83 %	425,00 0,000	32.49 %	950,000 ,000	36.82 %	6,030,0 00,000	41.16 %	1,075 ,000, 000	45.49 %	1,050,0 00,000	49.82 %	1,050,0 00,000	3458 unit	3.458,0 00,000	Dinas Kopperindag
1	03	12	Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang	Jumlah rekomenda si yang diberikan sesuai dengan tata	51 rekomen dasi	-	-	25 reko mend asi	2.757.3 17.000,-	45 rekom endas i	2.314.5 80.000	45 rekom endas i	2.334 .580. 000	45 rekom endas i	2.354.5 80.000	45 rekom endas i	9.761.0 57.000	205 rekom endas i	13.435. 637.00 0	Dinas PUPR

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				ruangnya																
			2.1.2. Terjaganya kelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	40%	65%		70%		70%		70%		70%		70%		70%		
2	2	0	Program Pengembangan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	40%	65%	1,600,000,000	70%	1,680,000,000	70%	1,764,000,000	70%	1,852,000,000	70%	1,945,000,000	70%	2,042,000,000	70%	8.841,000,000	Dinas Dikbud
2	2	0	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah HaKI yang diperoleh	3 Karya	1 Karya	100,000,000	1 Karya	110,000,000	1 Karya	121,000,000	1 Karya	133,000,000	1 Karya	146,000,000	1 Karya	161,000,000	9 Karya	611,000,000	Dinas Dikbud
2	2	0	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Dokumen Sejarah	0	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	116,000,000	1 Dokumen	127,000,000	1 Dokumen	140,000,000	1 Dokumen	154,000,000	6 Dokumen	592,000,000	Dinas Dikbud
2	2	0	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaa n Cagar Budaya	0	12,50 %	300,000,000	25,00 %	330,000,000	37,50 %	363,000,000	50,00 %	399,000,000	62,50 %	439,000,000	75,00 %	483,000,000	75,00 %	1.832,000,000	Dinas Dikbud
			Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik																	
			3.1.Terselenggaraanya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	47,88	49,00		51,00		53,00		55,00		57,00		59,00		59,00		
			3.1.1.Meningkat	Nilai SAKIP	56,57	60,01		62,01		64,01		66,01		70,00		72,00		72,00		

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t		Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			nya akutanbilit as kinerja pemerintah	Kabupaten																
				Maturitas SPIP	Level 2	Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		
X	X	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase penyediaan komponen penunjang	-	100%	653.313.513.005,-	100%	730.384.123.212	100%	738.082.772.575	100%	764.722.667.373	100%	795.518.774.474	100%	825.221.125.717	100%	3.853.929.463.351	Semua Perangkat Daerah
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Tersediany a Layanan Informasi, Telekomun ikasi dan Opini Publik	4 Media Informas i	4 Media Infor masi	2.344.899.850	4 Medi a	5.869.809.000	4 Media	10.180.000.000	4 Media	10.180.000.000	4 Media	10.205.000.000	4 Media	10.205.000.000	4 Media	48.984.708.850	DisKominfo
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tersediany a Dukungan Penyelengg araan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkunga n Pemkab. Tanjab Barat	31 OPD/134 Desa/Ke lurahan/ Aplikasi	31 OPD/134 Desa/ Kelurahan /Ap likasi	1.924.090.000	31 OPD/134 Desa/ Kelurahan /Ap likasi	3.855.050.000	44 OPD/134 Desa/ Kelurahan/ Aplik asi	3.885.050.000	44 OPD/134 Desa/ Kelurahan/ Aplik asi	3.888.650.000	44 OPD/134 Desa/ Kelurahan/ Aplik asi	3.888.650.000	44 OPD/134 Desa/ Kelurahan/ Aplik asi	3.888.650.000	44 OPD	21.330.140.000	DisKominfo
2	20	02	Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral	Jumlah OPD dengan Sistem dan Statistik Data yang	0	0	0	44 OPD	250.000.000	44 OPD	250.000.000	44 OPD	250.000.000	44 OPD	250.000.000	44 OPD	250.000.000	44 OPD	1.250.000.000	Diskominfo

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Terintegrasi																
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sistem Persandian	0	0	0	45%	200.000.000	50%	200.000.000	56%	200.000.000	79%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.000.000.000	Diskominfo
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang arsipnya dikelola sesuai dengan kaidah kearsipan	20% OPD	40 % OPD	36.073.000	60 % OPD	93.461.975	80 % OPD	374.481.271	100% OPD	259.653.462	100% OPD	296.801.481	100% OPD	339.341.703	100% OPD	1,399,812,892	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan	1000 Arsip	-	-	1000 Arsip	55,000,000	1000 Arsip	383,250,000	1000 Arsip	440,737,500	1000 Arsip	506,848,125	1000 Arsip	582,875,344	1000 Arsip	1,968,710,969	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	100%	100%	305.663.400,-	100%	301.438.400,-	100%	632.500.000,-	100%	695.750.000,-	100%	765.325.000,-	100%	841.857.500,-	100%	3.542.534.300,-	Bag. Administrasi Pemerintahan-SETDA
				Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu	100%	100%	788.950.288,-	100%	810.350.298,-	100%	2.626.870.000,-	100%	1.000.000.000,-	100%	1.522.500.288,-	100%	1.325.000.000,-	100%	8.073.670.874,-	Bag. Unit Pelayanan Barang & Jasa-SETDA

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t		Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	01	02	Program Penyelenggaraa n Pengawasan	Persentase ketaatan Perangkat Daerah dalam penyelesaia n tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI)	71,9%	74%	495,850,652	76%	495,850,652	78%	495,850,652	80%	495,850,652	82%	495,850,652	85%	495,850,652	85%	2.975.103.912	Inspektorat
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase rumusan kebijakan yang dilaksana kan, dan kegiatan pendampin gan/asiste nsi yang berhasil	100%	100%	748.994.850	100%	754.994.850	100%	754.994.850	100%	754.994.850	100%	754.994.850	100%	754.994.850	100%	4.523.969.100,00	Inspektorat
4	01	01	Program Administrasi Umum	Nilai Kematanga n Perangkat Daerah	29	29	403.997.473,-	29	1.190.000.000,-	32	1.309.000.000,-	35	1.439.900.000,-	40	1.583.890.000,-	43	2.383.241.500	43	7.105.028.678,-	Bag. Organisasi-SETDA
				Indeks Kepuasan Masyarakat	80,66	80,66		80,66		80,70		80,75		85		88,31		88,31		
				Nilai AKIP Kabupaten	57,33	>59.00		>60,01		>61,50		>62,50		>70,01		>70,50		70,50		
				Persentase penyampaian dokumen	100%	100%	87.425.000,-	100%	94.600.000,-	100%	105.784.250,-	100%	116.362.675,-	100%	127.998.943,-	100%	140.798.837,-	100%	672.969.704,-	Bag. Perencanaan Keuangan-SETDA

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				perencanaan, laporan dan keuangan tepat waktu																
				Persentase administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat terlayani	100%	100%	41.936.199.000	100%	54.974.837.299	100%	57.632.433.213	100%	62.263.929.092,-	100%	67.333.343.041,-	100%	73.522.503.686,-	100%	355.573.262.011,-	Bag. Umum-SETDA
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	100%	100%	1.799.238.669,-	100%	1.433.614.024,-	100%	1.773.923.603,-	100%	2.128.708.323,-	100%	2.554.449.988,-	100%	3.065.339.985,-	100%	12.755.274.592	Bag. Protokol-SETDA
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				10.957.607.020,-		13.608.813.243,-		17.653.900.000,-		19.309.800.000,-		21.059.760.000,-		22.906.296.000,-		105.496.176.263,-	
				Persentase keterisian data IKK	100%	100%	708.161.695,-	100%	708.161.695,-	100%	1.571.900.000,-	100%	1.711.200.000,-	100%	1.806.400.000,-	100%	1.846.200.000,-	100%	8.688.861.695,-	Bag. Tata Pemerintahan-SETDA

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				LPPD																
				Persentase produk hukum daerah yang diundangk an tidak bertentang an dengan peraturan diatasnya	100%	100%	926.79 7.269,-	100%	859.301 .364,-	100%	1.381.0 00.000, -	100%	1.456 .000. 000,-	100%	1.531.0 00.000, -	100%	1.606.0 00.000, -	100%	7.760.0 98.633, -	Bag. Hukum-SETDA
5	01	02	Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penyusuna n Dokumen Perencanaa n,evaluasi dan Pelaporan tepat waktu	100%	100%	776.90 2.750,-	100%	1.071.9 50.000,-	100%	1.145.0 00.000, -	100%	5.573 .852. 750,-	100%	1.365.0 00.000, -	100%	1.215.0 00.000, -	100%	11.147. 705.50 0,-	Bappeda
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasa n Dokumen perencanaan pembangu nan Daerah	92%	92%	403.11 0.000	92%	1.275.8 25.000	92%	1.262.5 00.000	94%	1.490 .500. 000	95%	1.490.5 00.000	95%	1.490.5 00.000	95%	7.412.9 35.000, -	Bappeda
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaa ntugas dan fungsi DPRD dalam pembentuk an Perda, fungsi penganggar	100%	100%	16.740. 749.59 8,-	100%	20.102. 221.317 ,-	100%	21.107. 332.32 8	100%	22.16 2.698 .944	100%	23.270. 833.89 1	100%	24.434. 375.58 5	100%	127,81 8,211,6 63	Sekretariat DPRD

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t		Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				an dan fungsi pengawasa n,																
			3.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,66	80,66		80,68		80,70		80,72		80,74		80,76		80,76		
1	04	06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan Pelayanan, Serifikasi, Kalifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	350.000.000	Dinas Perakim
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Total perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan	6.878 Naskah Izin	2000 Izin	96.029.750	2000 Izin	577.000.0000	2000 Izin	577.000.000	2000 Izin	420.000.0000	2000 Izin	470.000.000	2000 Izin	485.000.000	12000 Izin	2.625.029.750	DPMPTSP
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan	Jumlah sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem	18,060,000	1 sistem	24.000.000	1 sistem	31.000.000	1 sistem	40.000.000	1 sistem	52.000.000	1 sistem	68.000.000	1 sistem	233.060.000	DPMPTSP

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t		Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Sistem Informasi Penanaman Modal	pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterapkan		infor masi		infor masi		infor masi		infor masi		infor masi		infor masi		infor masi		
2	1 2	0 2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP-el, penduduk ber-KTP dan Ber-KIA,	100% perekam an KTP, 100 % kepemili kan KTP, 20% KIA	100% perek aman KTP, 100 % kepe milika n KTP, 30% KIA	555,00 0,000	100% perek aman KTP, 100 % kepe milikan KTP, 40% KIA	664,000 ,000	100% perek aman KTP, 100 % kepe milika n KTP, 50% KIA	704,00 0,000	100% perek aman KTP, 100 % kepe milika n KTP, 60% KIA	731,0 00,00 0	100% perek aman KTP, 100 % kepe milika n KTP, 70% KIA	759,00 0,000	100% perek aman KTP, 100 % kepe milika n KTP, 80% KIA	793,00 0,000	100% perek aman KTP, 100 % kepe milika n KTP, 80% KIA	4.206.0 000.00 0	Dinas Dukcapil
2	1 2	0 3	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilika n akte kelahiran 0-18 tahun	92% Akte kelahira n 0-18 tahun	95% Akte kelahi ran 0-18 tahun ,	400,00 0,000	97% Akte kelah iran 0-18 tahu n,	507,000 ,000	98% Akte kelahi ran 0-18 tahun ,	555,00 0,000	99% Akte kelahi ran 0-18 tahun ,	611,0 00,00 0	100% Akte kelahi ran 0-18 tahun ,	667,00 0,000	100% Akte kelahi ran 0-18 tahun ,	723,00 0,000	100% Akte kelahi ran 0-18 tahun ,	3.463.0 00.000	Dinas Dukcapil
2	1 2	0 4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyediaan data kependudu kan akurat dan terkini	-	20%	240,00 0,000	20%	290,000 ,000	20%	335,00 0 ,000	20%	379,0 00,00 0	20%	423,00 0,000	100%	467,00 0,000	100%	1.509.0 00.000	Dinas Dukcapil
3	3 0	0 2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku usaha yang memperole h izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanja an dan	2.308 pelaku usaha	10.83 %	100,00 0,000,-	10.83 %	110,000 ,000,-	10.83 %	115,00 0,000,-	10.83 %	120,0 00,00 0,-	10.83 %	125,00 0,000,-	10.83 %	130,00 0,000,-	4258 pelak u usaha	700,00 0,000,-	Dinas Kopperindag

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				IUTM/IUTS /SIUP toko swalayan)																
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapata n Asli Daerah terhadap pendapata n daerah	8.13%	7,98 %	2.325.000.000,-	8,06 %	5.281.200.000,-	8,12%	6.075.250.000,-	8,16%	6.463.000.000,-	8,18%	6.747.000.000,-	8,18%	7.023.000.000,-	8,18%	33.914.450.000	Bapenda
7	01	02	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	70	15.028.789,-	72	36.750.000,-	74	40.925.000,-	76	43.425.000,-	78	45.925.000,-	80	48.425.000,-	80	215.450.000,-	Kecamatan Tungal Ulu
					-	70	1.882.899,-	72	5.000.000,-	74	6.000.000,-	76	7.200.000,-	78	8.000.000,-	80	9.000.000,-	80	37.082.899	Kecamatan Merlung
					-	70	9.800.000,	72	49.400.000,-	74	59.280.000,-	76	35.000.000,-	78	35.000.000,-	80	35.000.000,-	80	223.480.000,-	Kecamatan Batang Asam
					-	70	12.100.000	72	34.100.000,-	74	37.510.000,-	76	41.261.000,-	78	45.387.100,-,-	80	49.925.810,-	80	220.283.910,-	Kecamatan Tebing Tinggi
					-	70	3.274.000,-	72	36.750.000	74	40.925.000	76	43.425.000	78	45.925.000	80	48.425.000	80	218.724.800,-	Kecamatan Renah Mendaluh
					-	-	-	73	27.500.000,-	75	31.250.000,-	77	35.000.000,-	79	35.000.000,-	80	35.000.000,-	80	163.750.000,-	Kecamatan Muara Papalik
					-	70	10.350.000,-	72	33.500.000,-	74	37.500.000,-	76	40.000.000,-	78	42.500.000,-	80	42.500.000,-	80	206.350.000,-	Kecamatan Pengabuan
					-	-	-	72	10.000.000,-	74	11.000.000,-	76	12.100.000,-	78	13.310.000,-	80	14.641.000,-	80	71.051.000,-	Kecamatan Senyerang
					73	74	98.845.000	75	160.240.000	76	176.264.000	77	193.890.400	78	213.279.440	80	234.607.384	80	427.357.000,-	Kecamatan Tungal Ilir
					-	70	6.124.800,-	72	27.500.000,-	74	37.500.000,-	76	40.000.000,-	78	42.500.000,-	80	40.500.000,-	80	196.124.800	Kecamatan Bram Itam

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					-	-	-	72	27.500.000,-	74	31.250.000,-	76	35.000.000,-	78	38.500.000,-	80	42.500.000,-	80	237.522.000,-	Kecamatan Seberang Kota
					-	-	-	73	60.000.000,-	74	65.000.000,-	76	70.000.000	78	75.000.000,-	80	80.000.000,-	80	350.000.000,-	Kecamatan Betara
					-	70	12,250,000	72	31,750,000	74	34,925,000	76	38.417.500	78	42.259.250	80	46.485.175	80	206.086.925,-	Kecamatan Kuala Betara
			3.1.3. Meningkatkan kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%	194,334,831,568	100%	204,722,928,042	100%	215,026,371,824	100%	225,778,011,335	100%	237,335,466,151	100%	248,716,172,823	100%	1.325.913.781.743	BKAD
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD	100%	100%	1,535,212,500	100%	1,531,110,000	100%	1,565,100,000	100%	1,602,950,000	100%	1,639,700,000	100%	1,678,000,000	100%	9.552.072.500	BKAD
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	100%	100%	22.875.000,-	100%	62.500.000,-	100%	70.000.000,-	100%	74.000.000,-	100%	74.000.000,-	100%	74.000.000,-	100%	377.375.000,-	Kecamatan Tungkal Ulu

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD			
				Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			si																
				100%	100%	27.189.750,-	100%	62.500.000,-	100%	80.000.000,-	100%	84.000.000	100%	102.500.000,-	100%	102.500.000,-	100%	458.689.750,-	Kecamatan Merlung
				100%	100%	30.650.000,-	100%	107.000.000,-	100%	92.400.000,-	100%	95.000.000	100%	165.000.000,-	100%	95.000.000,-	100%	585.050.000,-	Kecamatan Batang Asam
				100%	100%	35.250.000,-	100%	85.750.000,-	100%	61.325.000,-	100%	87.457.500	100%	114.203.250,-	100%	81.623.575,-	100%	465.609.325,-	Kecamatan Tebing Tinggi
				100%	100%	29.575.000	100%	90.000.000,-	100%	72.500.000,-	100%	95.000.000	100%	115.000.000,-	100%	75.000.000,-	100%	477.075.000,-	Kecamatan Renah Mendaluh
				100%	100%	18.100.000,-	100%	112.000.000,-	100%	70.000.000,-	100%	94.000.000	100%	114.000.000,-	100%	74.000.000,-	100%	482.100.000,-	Kecamatan Muara Papalik
				100%	100%	16.250.000,-	100%	82.500.000	100%	72.500.000,-	100%	76.500.000	100%	156.500.000	100%	76.500.000,-	100%	480.750.000,-	Kecamatan Pengabuan
				100%	100%	33.306.336	100%	41.306.336	100%	48.950.000	100%	53.845.000	100%	59.229.500	100%	65.152.450	100%	301.789.622	Kecamatan Senyerang
				100%	100%	61.120.000	100%	55.175.000	100%	60.692.500	100%	66.761.750	100%	73.437.925	100%	80.781.718	100%	397.968.893	Kecamatan Tungal Ilir
				100%	100%	23.509.600,-	100%	86.500.000,-	100%	72.500.000,-	100%	76.500.000	100%	130.500.000,-	100%	76.500.000,-	100%	388.009.600	Kecamatan Bram Itam
				100%	100%	14.735.000,-	100%	62.500.000,-	100%	70.000.000,-	100%	74.000.000	100%	81.400.000,-	100%	89.540.000,-	100%	387.840.000,-	Kecamatan Seberang Kota
				100%	100%	9.800.000,-	100%	53.000.000,-	100%	27.500.000,-	100%	29.000.000	100%	79.000.000,-	100%	29.000.000,-	100%	227.300.000,-	Kecamatan Betara
				100%	100%	22,270,000	100%	75.000.000,-	100%	44.000.000,-	100%	58.400.000	100%	78.240.000,-	100%	87.500.000,-	100%	365.410.000,-	Kecamatan Kuala Betara

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Misi 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan																	
			4.1. Meningkatkan perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan	Laju pertumbuhan ekonomi	-0,64%	1,50 %		2,00 %		2,50 %		3,00 %		3,50 %		4,00 %		4,00 %		
			4.1.1. Pertumbuhan ekonomi kabupaten	PDRB perkapita (juta rupiah)	117,02	119,12		121,22		123,32		125,42		126,52		127,62		127,62		
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	persentase panjang bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten	-	-	-	45%	52,200,000,000	50%	74,000,000,000	55%	60,600,000,000	60%	60,600,000,000	65%	56,850,000,000	65%	296.250.000.000	Dinas PUPR
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase rata-rata Ketersediaan Pangan Utama terhadap jumlah penduduk (%)	93%	0	0	100%	2,400,000,000	100%	2,390,000,000	100%	2,395,000,000	100%	2,400,000,000	100%	2,400,000,000	100%	11.985.000.000	DKP
2	09	03	Program Peningkatan	Skor PolaPangan	88.00	90.00	36,590,000	91.00	974,500,000	92.00	1,069,950,000	93.00	1,085,745,	94.00	1,101,920,000	95.20	1,054,511,000	95.20	5,323,216,000	DKP

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat								000								
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaa n pangan	79.46	81.00		83.00		85.00		87.00		88.00		90.00		90.00		DKP
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rasio ketersediaan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan /beras	0.93	1.02	373,740,000	1.04	650,000,000	1.06	665,000,000	1.08	676,000,000	1.09	688,000,000	1.09	701,000,000	1.09	3,753,740,000	DKP
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase keamanan sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu	100%	-	-	100%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	225,000,000	DKP
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki izin	12.70%	12.70%	70,000,000	15.18%	73,000,000	15.18%	75,000,000	15.18%	78,000,000	15,18%	85,000,000	13.92%	100,000,000	100%	481,000,000,-	Dinas Kopperindag
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan	Persentase Koperasi yang diawasi	100%	100%	195,000,000	100%	230,000,000	100%	252,900,000	100%	274,500,000	100%	326,000,000	100%	355,000,000	100%	1.633.400.000,-	Dinas Kopperindag

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Koperasi	dan yang patuh terhadap Perundang-undangan																
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya	40.50%	100%	93,225,000	100%	112,825,000,-	100%	125,325,000,-	100%	128,325,000	100%	135,525,000	100%	150,500,000,-	100%	745.725,000	Dinas Kopperindag
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mendapat pelatihan	29.85%	22.38 %	91,718,000	22.38 %	97,018,000	22.38 %	115,000,000,-	22.38 %	120,000,00,-	22.38 %	140,000,000,-	22.38 %	150,000,000,-	100%	713,736.000	Dinas Kopperindag
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas	56.34%	5.60 %	183,140,000,-	2.60 %	2,191,485,000	3%	198,965,000,-	3.73%	1,200,765,000	4.50%	1.204,265,000,-	5.60%	1.220,000,-	81,37 %	6.198.620.000,-	Dinas Kopperindag
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM	8.310 UMKM	2.40 %	914,975,000	2.40 %	2,999,975,000	2.40%	3,172,000,000	2.40%	3,064,500,000	2.40%	3,120,375,000	2.40%	3,135,000,000	9580 UMK M	16.406.825.000	Dinas Kopperindag
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Menjadi wirausaha	1.048 Usaha Kecil	3.33 %	200,000,000	3.33 %	250,000,000	3.33%	275,000,000	3.33%	300,000,000	3.33%	315,000,000	3.33%	325,000,000	1275 Usaha kecil	1.665.000.000,-	Dinas Kopperindag
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kajian Potensi dan peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000,-	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	270.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	90.000.000	6 Dokumen	814.200.000	DPMPSTP

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t		Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Calon Investor	2 Calon Investor	1	45.800.000,-	2	225.000.000	2	175.000.000	2	260.000.000	2	265.000.000	2	275.000.000	11	1.245.800.000	DPMPTSP
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Rencana Investasi	534,43 M	162 M	358.161.925,-	232 M	360.040.000	301 M	359.240.000	370 M	50.400.000	440 M	58.500.000	509 M	69.000.000	509 M	1.255.341.925	DPMPTSP
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	22.442	22,666	1,084,400,000	23.119	15,702,805,000	23.581	20,770,310,000	24,053	18,129,815,000	24,534	27,280,070,000	25,349	28,261,570,000	25,349	111,228,970,000	Dinas Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.135	1.158	1.074.540.000,-	1.187	4.796.500.000,-	1.217	5.075.500.000,-	1.248	4.765.500.000,-	1.280	4.510.500.000,-	1.310	4.645.500.000,-	1.310	24,868,040,000	Dinas Perikanan
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan	13 lokasi	4 lokasi	164.910.000	6 lokasi	165.000.000	6 lokasi	170.000.000	6 lokasi	175.000.000	6 lokasi	180.000.000	6 lokasi	185.000.000	20 lokasi	1,039,910,000	Dinas Perikanan
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	2.100	2.184	1.781.000.000	2.271	1.981.000.000	2.362	2.595.000.000	2.480	6.195.000.000	2.579	2.295.000.000	2.682	6.395.000.000	2.682	21,242,000,000	Dinas Perikanan
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	Persentase Objek dan Even Pariwisata	0	20%	1.653.522.021	20%	15.170.187.843	25%	8.687.206.627	35%	9.555.927.290	40%	10.511.520.019	40%	11.562.672.021	40%	57.141.035.821	Disparpora

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pariwisata	yang dikenal luas																
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Even Pemasaran Pariwisata	0	100%	169.930.000	100%	440.000.000	100%	484.000.000	100%	532.400.000	100%	585.640.000	100%	644.204.000	100%	2.856.174.000	Disparpora
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Inovasi Ekraf yang berprestasi di ruang kreatif	0	-	-	40%	300.000.000	45%	330.000.000	45%	363.000.000	50%	399.300.000	50%	439.230.000	50%	1.831.530.000	Disparpora
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan (%) 2. Angka Kebuntingan Sapi yang di Inseminasi Buatan (IB)	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,03%, karet = 0,1 %, kelapa dalam = 0,7%,kopi = 0,1% pinang = 0,8% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 70 %	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,5%, karet = 0,3 %, kelapa dalam = 0,7%, kopi = 0,3% pinang = 0,9%	1.429.373.696	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,6%, karet = 0,4 %, kelapa dalam = 0,8%, kopi = 0,4% pinang = 0,9%	6.428.722.275	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,7%, karet = 0,5 %, kelapa dalam = 0,9%, kopi = 0,5% pinang = 1,1%	7.360.620.090	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,8%, karet = 0,6 %, kelapa dalam = 1,0%, kopi = 0,6% pinang = 1,2%	8.429.061.525	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,9%, karet = 0,6 %, kelapa dalam = 1,1%, kopi = 0,7% pinang = 1,2%	9.654.204.018	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 2%, karet = 0,6 %, kelapa dalam = 1,1%, kopi = 0,7% pinang = 1,3% 2.	11.059.196.210	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 2%, karet = 0,6 %, kelapa dalam = 1,1%, kopi = 0,7% pinang = 1,3% 2.	44,361,177,814	Disbunak

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
						2. Angka Kebu nting an Sapi = 70 %		1,0% 2. Angk a Kebu nting an Sapi = 71 %		2. Angka Kebu nting an Sapi = 72 %		2. Angka Kebu nting an Sapi = 73 %		2. Angka Kebu nting an Sapi = 74 %		Angka Kebu nting an Sapi = 75 %		Angka Kebu nting an Sapi = 75 %			
				Persentase Peningkata n Produktivit as Tanaman Pangan	2%	2%	311.49 2.000	2%	6.500.0 00.000	2%	6.662.5 00.000	2%	6.829 .062. 500	2%	6.999.7 89.063	2%	7.174.7 83.789	12%	34.166. 135.35 2	DTPH	
				Persentase Peningkata n Produktivit as Hortikultur a	2%	2%		2%		2%		2%		2%		2%		12%			
3	2	0	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks Peningkata n Ketersediaa n Prasarana Perkebuna n/Peternak an sesuai peruntuka nnya	20%	21%	354.23 4.000	22%	2.119.4 16.600	23%	2.160.6 37.250	24%	2.355 .386. 588	25%	2.572.8 81.013	26%	2.816.2 08.924	26%	12.378. 764.37 5	Disbunak
				Indeks Ketersediaa n Prasarana Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan	N/A	62,55 %	102.24 6.000	63,18 %	7.975.0 00.000	63,81 %	10.674. 375.00 0	64,45 %	19.37 8.734 .375	65,55 %	8.588.2 02.734	65,09 %	9.802.9 07.803	65,09 %	56.521. 465.91 2	DTPH	

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				dan Hortikultura yang Sesuai Peruntukan (%)																
3	2	0	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka Kematian Ternak	1.7%	1.7%	592.592.106	1.6%	823.833.899	1.5%	947.408.984	1.4%	1.089.520.331	1.3%	1.252.948.381	1.2%	1.440.890.638	1.2%	6.147.194.339	Disbunak
3	2	0	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Angka Penanggulangan serangan OPT dan gangguan usaha perkebunan	100%	100%	304.886.622	100%	241.201.622	100%	277.381.865	100%	318.989.145	100%	366.837.517	100%	421.863.144	100%	1.931.159.915	Disbunak
				Persentase Pengendalian Bencana Pertanian sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	100%	544.435.100	100%	870.545.978	100%	892.309.627	100%	914.617.368	100%	937.482.802	100%	960.919.872	100%	5.120.310.746	DTPH
3	2	0	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah STDB untuk petani perkebunan yang diterbitkan	4.796 Ha	350 STDB	154.649.874	750 STDB	500.112.259	750 STDB	575.129.098	750 STDB	661.398.463	750 STDB	760.608.232	750 STDB	874.699.467	4.100 STDB	3.526.597.393	Disbunak
3	3	0	Program Peningkatan Sarana	Persentase Pasar yang layak dan	20.83%	2.78 %	2,500,000,000,-	4.17 %	3,850,000,000,-	4.17%	5.900,000,000,-	4.17%	6,000,000,000,-	4.17%	6,100,000,000,-	4.17%	6,200,000,000,-	44,46 %	30,550,000,000	Dinas Kopperindag

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Distribusi Perdagangan	berfungsi																
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah jenis barang dengan harga stabil	18 Jenis Barang	18 Jenis Baran g	250,000,000	18 Jenis Bara ng	730,000,000	18 Jenis Baran g	1.025,000,000	18 Jenis Baran g	1.075,000,000	18 Jenis Baran g	1.155,000,000, -	18 Jenis Baran g	1.240,000,000, -	18 Jenis Baran g	5.475.000.000, -	Dinas Kopperindag
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkata n Nilai Ekspor	USD 173.793.479	5%	1,000,000,000	5%	1,100,000,000	5%	1,200,000,000	5%	1,245,000,000	5%	1,300,000,000	5%	1,325,000,000	USD. 232.899.884	7.170.000.000, -	Dinas Kopperindag
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi/pe masaran produk dalam daerah	0	1 kali	75,000,000,-	2 kali	150,000,000,-	2 kali	175,000,000,-	2 kali	180,000,000,-	2 kali	190,000,000,-	2 kali	200,000,000,-	11 kali	970,000,000,-	Dinas Kopperindag
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkata n Jumlah Industri Kecil	1.420 IK	2.82 %	1.050,000,000, -	2.82 %	1.450.000.000,-	2.82%	1.300.000.000, -	2.82%	1.275.000,-	2.82%	1.040.000.000, -	2.82%	1.040.000.000, -	1677 IK	7.155.000.000, -	Dinas Kopperindag
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase industri yang memiliki izin	29 Industri menenga h besar	10.34 %	75,000,000	10.34 %	105,000,000	10.34 %	120,000,000	10.34 %	150,000,000	10.34 %	150,000,000,-	10.34 %	150,000,000,-	52 Indus tri mene ngah besar	750,000,000,-	Dinas Kopperindag
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Mengukur ketersediaa n informasi secara lengkap dan terkiniindu stri	1.449 IKMB	43 IKMB	75,000,000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100,000,000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100,000,000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100,000,000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100,000,000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100,000,000	1707 IKMB / 10 Buku Profil IKM	575,000,000,-	Dinas Kopperindag

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t		Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				nasional																
4	013	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang ekonomi yang dilaksanak an	100%	100%	7.277.477.298,-	100%	7.714.191.400,-	100%	39.175.000.000,-	100%	34.400.000.000,-	100%	19.550.000.000,-	100%	19.700.000.000,-	100%	127.816.668.698,-	Bag. Ekonomi - SETDA
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks inovasi daerah	-	-	-	Inovatif	97.000.000	Inovatif	106.000.000	Inovatif	445.000.000	Inovatif	445.000.000	Sangat Inovatif	445.000.000	Sangat Inovatif	1.983.000.000	Bappeda
7	013	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	100%	100%	1.756.115.602,-	100%	2.288.225.000,-	100%	2.340.725.000,-	100%	2.358.225.000,-	100%	2.363.725.000,-	100%	2.371.725.000,-	100%	13.478.740.602,-	Kecamatan Tungkal Ulu
					100%	100%	1.729.629.250,-	100%	2.464.200.000.	100%	2.498.200.000	100%	2.517.200.000	100%	2.523.700.000	100%	2.523.700.000	100%	8.248.129.250	Kecamatan Merlung
					100%	100%	2.085.206.026,-	100%	3.030.200.000,-	100%	3.153.200.000,-	100%	3.188.700.000,-	100%	3.188.700.000,-	100%	3.188.700.000,-	100%	17.834.706.026,-	Kecamatan Batang Asam
					100%	100%	2.205.766.291,-	100%	2.783.090.000,-	100%	3.061.399.000,-	100%	3.367.538.900,-	100%	3.704.292.790,-	100%	4.074.722.069,-	100%	19.196.809.505,-	Kecamatan Tebing Tinggi
					100%	100%	1.699.347.394	100%	2.528.225.000,-	100%	2.590.725.000,-	100%	2.608.225.000,-	100%	2.613.725.000,-	100%	2.621.725.000,-	100%	14.661.972.394,-	Kecamatan Renah Mendaluh
					100%	100%	1.751.643.064,-	100%	3.447.938.750,-	100%	2.521.225.000,-	100%	2.535.725.000,-	100%	2.537.725.000,-	100%	2.540.725.000,-	100%	15.334.981.814,-	Kecamatan Muara Papalik
					100%	100%	2.707.949.800,-	100%	3.458.400.000,-	100%	3.588.000.000,-	100%	3.713.500.	100%	3.847.500.00	100%	3.897.500.000,-	100%	20.962.349.80	Kecamatan Pengabuan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD				
				Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
						-				-		000,-		0,-		-		0,-		
				100%	100%	2.285.818.395	100%	2.870.638.119	100%	4.533.314.719	100%	4.826.591.879	100%	5.309.251.067	100%	5.840.176.174	100%	25.665.790.352	Kecamatan Senyerang	
				100%	100%	12.062.058.000	100%	14.371.258.000	100%	15.808.383.800,-	100%	17.389.222.180,-	100%	19.128.144.398,-	100%	21.040.958.838,-	100%	89.365.188.296,-	Kecamatan Tungkal Ilir	
				100%	100%	2.095.087.677	100%	2.743.189.700,-	100%	3.623.500.000,-	100%	3.654.000.000,-	100%	3.693.000.000,-	100%	3.703.000.000,-	100%	19.168.777.377	Kecamatan Bram Itam	
				100%	100%	1.719.074.800,-	100%	2.358.225.000,-	100%	2.379.225.000,-	100%	2.400.725.000,-	100%	2.640.797.500,-	100%	2.904.877.250,-	100%	14.421.047.144,-	Kecamatan Seberang Kota	
				100%	100%	2.507.300.843,-	100%	3.314.987.500,-	100%	3.358.025.000,-	100%	3.379.025.000,-	100%	3.384.025.000,-	100%	3.389.025.000,-	100%	19.297.388.343,-	Kecamatan Betara	
				100%	100%	2,238,380,000,-	100%	3.861.553.000,-	100%	3.066.998.000,-	100%	3.262.984.000,-	100%	3.390.693.000,-	100%	3.466.848.500,-	100%	19.287.456.500,-	Kecamatan Kuala Betara	
			4.1.2. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,22	68,50		68,,60		68,70		68,80		68,90		70,00		70,00		
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	1 dokumen	3 dokumen	442.213.000,-	3 dokumen	520.000.000,-	3 dokumen	700.000.000,-	4 dokumen	750.000.000,-	3 dokumen	850.000.000,-	1 dokumen	250.000.000,-	17 dokumen	3.512.213.000	DLH
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	IKA/IKU/IKTL/IKAL/IKEG	64,3/93,68/52,09/75,8/72,8	64,5/94/55/76,5/73,3	97.550.000,-	65/94,2/55,5/77,1/73,8	925.000.000,-	65,5/94,4/56,77,8/74,4	1.060.000.000,-	66/94,6/56,5/78,4/74,8	940.000.000,-	66,5/94,8/57/78,8/75,2	1.170.000.000	67/95/57,5/79,2/75,6	1.300.000.000	67/95/57,5/79,2/75,6	5.492.550.000	DLH
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase pengelolaan keanekarag	40%	50%	25.750.000,-	70%	4.760.000.000,-	75%	4.660.000.000,-	80%	4.560.000.000,-	85%	4.660.000.000,-	90%	4.760.000.000,-	90%	23.425.750.000,-	DLH

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t		Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			(Kehati)	aman hayati																
2	1	0	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasa nBahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) pada usaha/kegi atan	100%	100%	25.800.000,-	100%	90.000.000,-	100%	100.000.000,-	100%	110.000.000,-	100%	120.000.000,-	100%	130.000.000,-	100%	575.800.000,-	DLH
2	1	0	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasa n Terhadap Izin Lingkunga n Dan Izin Perlindung an Dan Pengelolaa n Lingkunga n Hidup (PPLH)	100%	100%	148.600.000,-	100%	390.000.000,-	100%	460.000.000,-	100%	503.000.000,-	100%	545.000.000,-	100%	358.000.000	100%	2.404.600.000,-	DLH
2	1	0	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Kearifan	Cakupan Masyaraka t Hukum Adat (MHA), Kearifan	20%	60%	18.550.000,-	70%	160.000.000,-	80%	200.000.000,-	90%	240.000.000,-	100%	280.000.000,-	100%	320.000.000,-	100%	1.218.550.000,-	DLH

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH																
2	1	0	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat kecamatan yang meningkat pengetahuan/pemahaman terkait lingkugan hidup	50%	55%	18.550.000,-	70%	130.000.000,-	80%	140.000.000,-	90%	150.000.000,-	100%	160.000.000,-	100%	160.000.000,-	100%	758.550.000,-	DLH
2	1	0	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	45%	50%	13.750.000,-	65%	150.000.000,-	70%	180.000.000,-	80%	200.000.000,-	90%	220.000.000,-	100%	240.000.000,-	100%	1.003.750.000,-	DLH
2	1	1	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklan juti	100%	100%	29.900.000,-	100%	145.000.000,-	100%	160.000.000,-	100%	180.000.000,-	100%	200.000.000,-	100%	220.000.000,-	100%	934.900.000,-	DLH
2	1	1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terkelola	75%	80%	3.839.888.800,-	83%	22.550.000.000,-	85%	16.760.000.000,-	87%	16.005.000.000,-	89%	15.330.000.000,-	90%	15.840.000.000,-	90%	90.324.888.800,-	DLH
4	0	0	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang	100%	100%	438.758.700,-	100%	438.758.700,-	100%	676.500.000,-	100%	744.150.000,-	100%	818.565.000,-	100%	900.421.500,-	100%	4.690.123.604,-	Bag. Sumber Daya Alam-SETDA

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				urusan sumber daya alam yang berjalan dengan efektif																
			Misi 5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota																	
			5.1 Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota	Indeks Williamson	-	0,495		0,480		0,465		0,450		0,435		0,420		0,420		
			5.1.1 Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat	Indeks Infrastruktur	59,99%	62,15%		65,44%		67,85%		69,41%		71,22%		73,19%		73,19%		
1	03	04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Unit pengelolaa n persampahan terhadap kebutuhan pengelolaa n persampahan regional di wilayah kabupaten	7,14%	-	-	29%	4,525,000,000	50%	2,825,000,000	71%	5,325,000,000	86%	4,825,000,000	100%	4,825,000,000	100%	22.325.000.000	Dinas PUPR
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan air limbah	63.11%	-	-	66%	675,000,000	69%	6,825,000,000	72%	825,000,000	75%	825,000,000	78%	825,000,000	78%	9.975,000,000	Dinas PUPR

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten terhadap jumlah kebutuhan drainase dalam kabupaten	17,79%	-	-	42%	13,350,000,000	44%	12,750,000,00	46%	12,750,000,000	48%	12,950,000,00	50%	12,750,000,00	50%	64,550,000,00	Dinas PUPR
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan yang tertata di wilayah kawasan strategis daerah kabupaten	-	-	-	20%	60.000.000.000	40%	60.000.000.00	60%	60.000.000.000	80%	60.000.000.00	100%	60.000.000.00	100%	300.000.000.00	Dinas PUPR
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase RTH, Taman Perkotaan yang dibangun sesuai perencanaan				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase bangunan gedung yang ditata sesuai perencanaan	-	-	-	100%	25.610.000.000,-	100%	25.110.000.00	100%	25.610.000.000,-	100%	25.110.000.00	100%	25.610.000.00	100%	127.050.000.00,-	Dinas PUPR
1	0	0	Program	Persentase	-	10%	-	25%	800.000	50%	3.050.0	75%	3.050	100%	3.050.0	100%	3.050.0	100%	13.000.	Dinas PUPR

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	3	9	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	bangunan dan lingkungan nya yang tertata					.000		00.000,-		.000.000,-		00.000,-		00.000,-		000.000,-	
1	03	10	Program Penyelenggara n Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	33%	43%	-	45%	115.600.000.00	47%	109.200.000.00	49%	112.200.000.000	51%	109.200.000.00	53%	112.200.000.00	53%	558.400.000.00	Dinas PUPR
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah layak Huni untuk Korban Bencana	-	-	-	100%	4.300.000.000	100%	5.110.000.000	100%	5.930.000.000	100%	6.750.000.000	100%	7.570.000.000	100%	29.660.000.000	Dinas Perakim
				Persentase Rumah layak Huni untuk relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah				100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Luasan kawasan permukima n kumuh	SK : 255,2 Ha, Sisa 126,5 Ha	-	-	10%	3.700.000.000	10%	5.220.000.000	10%	5.440.000.000	10%	6.160.000.000	10%	6.780.000.000	63,25 ha	27,300,000,000	Dinas Perakim
1	04	04	Program Perumahan Dan Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan RTLH diluar kawasan kumuh	1.700 Unit	-	-	3,0%	3.200.000.000	3,0%	3.200.000.000	3,0%	3.200.000.000	3,0%	3.200.000.000	3,0%	3.200.000.000	1445 unit	16,000,000,000	Dinas Perakim
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Cakupan peningkata n PSU	-	-	-	100%	4.200.000.000	100%	5.400.000.000	100%	6.520.000.000	100%	7.630.000.000	100%	8.740.000.000	100%	32.490.000.000	Dinas Perakim

Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	
						Targe t	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		Targe t	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			5.1.2 Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota, dan daerah perbatasan	Indeks Konektivitas (desa – Ibukota Kabupaten)	0,403	0,421		0,439		0,447		0,456		0,464		0,473		0,473		
2	15	02	Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tingkat tertib lalu lintas angkutan jalan	-	100%	814.18 0.000,-	100%	3.162.0 00.000,-	100%	2.825,0 00,000,-	100%	1.855 ,000, 000,-	100%	2.950,0 00,015,-	100%	2.705,0 00,000	100%	14.311. 180.01 5,-	Dishub
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Tingkat pemenuha n pelayanan pelayaran	-	100%	553.98 0.000	100%	1.800.3 00.000	100%	6.617.5 00,000,-	100%	5,305 .000, 000,-	100%	3.890,0 00,000,-	100%	3,865,0 00,000,-	100%	22.031. 780.00 0,-	Dishub

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan visi “Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berdaya saing, *Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis*) telah dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang merupakan aspek strategis. Dalam operasionalnya dijalankan dalam bentuk program sebagai upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan serta sub kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pemilihan nomenklatur program menurut urusan/bidang urusan berpedoman pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Tabel VII.01

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 s.d. 2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode			Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
5			BELANJA DAERAH	1.298.220.221.125,-	1.350.149.029.970,-	1.404.154.991.169,-	1.460.321.190.816,-	1.518.734.038.448,-	1.579.483.399.986,-
5	1		BELANJA OPERASI	833.361.284.621,-	866.695.736.005,-	901.363.565.446,-	937.418.108.064,-	974.914.832.386,-	1.013.911.425.682,-
5	1	1	Belanja pegawai	483.263.425.735,-	502.593.962.764,-	522.697.721.275,-	522.697.721.275,-	543.605.630.126,-	565.349.855.331,-
5	1	2	Belanja barang dan jasa	330.054.809.836,-	343.257.002.229,-	356.987.282.319,-	371.266.773.611,-	386.117.444.556,-	401.562.142.338,-
5	1	4	Belanja subsidi	7.043.441.650,-	7.325.179.316,-	7.618.186.489,-	7.922.913.948,-	8.239.830.506,-	8.569.423.726,-
5	1	5	Belanja hibah	12.999.607.400,-	13.519.591.696,-	14.060.375.364,-	14.060.375.364,-	14.622.790.378,-	15.207.701.994,-
5	2		BELANJA MODAL	275.738.203.118,-	286.767.731.242,-	298.238.440.492,-	310.167.978.112,-	322.574.697.237,-	335.477.685.126,-
5	2	2	Belanja modal peralatan dan mesin	48.859.073.332,-	50.813.436.265,-	52.845.973.716,-	54.959.812.665,-	57.158.205.171,-	59.444.533.378,-
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.518.033.698,-	70.218.755.045,-	73.027.505.248,-	75.948.605.458,-	78.986.549.676,-	82.146.011.663,-
5	2	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.739.402.976,-	160.928.979.095,-	167.366.138.259,-	174.060.783.789,-	181.023.215.141,-	188.264.143.746,-
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.621.693.112,-	4.806.560.836,-	4.998.823.270,-	5.198.776.201,-	5.406.727.249,-	5.622.996.339,-
5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	3.888.376.736,-	4.043.911.805,-	4.205.668.278,-	4.373.895.009,-	4.548.850.809,-	4.730.804.841,-
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	3.888.376.736,-	4.043.911.805,-	4.205.668.278,-	4.373.895.009,-	4.548.850.809,-	4.730.804.841,-
5	4		BELANJA TRANSFER	185.232.356.650,-	192.641.650.916,-	200.347.316.953,-	208.361.209.631,-	216.695.658.016,-	225.363.484.337,-
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	3.659.631.950,-	3.806.017.228,-	3.958.257.917,-	4.116.588.234,-	4.281.251.763,-	4.452.501.834,-
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	181.572.724.700,-	188.835.633.688,-	196.389.059.036,-	204.244.621.397,-	212.414.406.253,-	220.910.982.503,-

7.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program Perangkat Daerah

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 6 (enam) urusan wajib terkait pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pada pasal 18 ayat 1 sampai 3 Undang – undang tersebut diatas mengamanatkan penyelenggara pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, untuk pelaksanaannya pelayanan dasar untuk kabupaten/kota berpedoman pada standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Kode	Jenis Pelayanan Dasar Menurut Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Penunjang	Indikator Kinerja SPM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian SPM dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(18)	(19)
		b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	72,8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	87,3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		d. Pelayanan kesehatan balita	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	86,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	19,2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	38,1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		g. Pelayanan kesehatan usia lanjut	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	36,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	40,7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		i. Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Persentase penduduk penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	74,7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	98,2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode			Jenis Pelayanan Dasar Menurut Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Penunjang	Indikator Kinerja SPM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian SPM dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
						Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.		Target / Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(18)	(19)
			k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberklosis	Persentase penduduk terduga tuberculosis yang mendapatkan layanankesehatan	52,1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang bersifat peningkatan /promotif dan pencegahan/prenventif	Persentase penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	70,2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			75.239.504.865	79.189.479.484	80.837.606.878	55.608.507.909	58.494.994.277	60.856.819.108	410.226.912.521	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										Dinas PUPR
			a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	70.84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	63.11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		-	-	22.920000.000,00	22.920.000.000,00	22.920.000.000,00	22.920.000.000,00	22.920.000.000,00	114.600.000,-	

Kode			Jenis Pelayanan Dasar Menurut Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Penunjang	Indikator Kinerja SPM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian SPM dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
						Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.		Target / Rp.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(18)	(19)	
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-		675,000,000	6,825,000,000	825,000,000	825,000,000	825,000,000	9.975.000.000,-		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
			a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perakim	
			b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten.	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	100%	100%	100%	100%	100%		
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	-	-	4.300.000.000,-	5.110.000.000,-	5.930.000.000,-	6.750.000.000,-	7.570.000.000,-	29.660.000.000,-		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
			a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP	
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	4.105.665.649	5.078.352.323,-	5.586.187.555,-	6.144.806.311,-	6.759.286.942,-	7.383.972.136,-	35.058.270.916,-		
			b. Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD	

[illegible]

Kode	Jenis Pelayanan Dasar Menurut Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Penunjang	Indikator Kinerja SPM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian SPM dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.	Target / Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(11)	(13)	(15)	(18)	(19)
			Program Rehabilitasi Sosial	211.987.198,-	2.177.000.000	1.859.000.000	2.526.000.000	2.723.000.000	2.723.000.000	12.319.987.198	
			Program Penanganan Bencana	80.000.000	275.000.000	320.000.000	350.000.000	385.000.000	385.000.000	1.795.000.000	

Tabel VII.03
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
						Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
X																				
X	X X																			
X	X X	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan komponen penunjang	-	100%	653.313.513.005,-	100%	730.384.123.212	100%	738.082.772.575	100%	764.722.667.373	100%	795.518.774.474	100%	825.221.125.717	100%	3.853.929.463.351	Semua Perangkat Daerah
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	0 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	0 1	0 2	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 4-6 tahun	34,50%	35,54 %	147.352.000.000,-	36,60 %	157.823.000.000,-	37,70 %	165.804.000.000,-	38,83 %	172.163.000.000,-	39,99 %	181.579.000.000,-	41,19 %	191.935.000.000,-	41,19 %	1.016.656.000.000,-	Dinas Dikbud
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A	102,63%	102,13%		101,63%		101,13%		100,63%		100,00%		100,00%		100,00%		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	92,80%	94,19 %		95,60 %		97,04 %		98,49 %		100,00%		100,00%		100,00%		

[illegible]

				Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan	71,13%	75%	5.987.520.000	77%	6.214.320.000	79%	6.441.120.000	80%	6.667.920.000	82%	6.894.720.000	85%	7.121.520.000	85%	39.327.120.000	
				Persentase Desa Uci	86,60%	90%	150.000.000	93,00%	165.000.000	95%	173.250.000	95%	181.912.500	95%	191.008.125	95%	200.558.531	95%	1.061.729.156	
				Angka Kejadian kasus (Incidence Rate/IR) DBD	73,3 Per 100.000 Penduduk	<49 Per 100.000 Penduduk	192.697.800	<49 Per 100.000 Penduduk	202.332.690	<49 Per 100.000 Penduduk	212.449.325	<49 Per 100.000 Penduduk	223.071.791	<49 Per 100.000 Penduduk	234.225.380	<49 Per 100.000 Penduduk	245.936.649	<49 Per 100.000 Penduduk	1.310.713.635	
				Persentase Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) Usia 15-59 Tahun	38,1%	40%	502.373.506	43%;	704.704.000	46%	705.320.000	49%	707.240.000	53%	709.550.000	55%	710.231.000	55%	4.039.418.506	Dinas Kesehatan
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				17.814.205.000		18.220.205.000		19.187.625.500		19.650.625.500		19.950.625.500		20.350.625.500		115.173.912.000	Dinas Kesehatan
				Persentase pemenuhan tenaga kesehatan spesialistik sesuai standar	56,25%	56,25%	8.500.000.000	62,5%	8.700.000.000	68,75%	9.350.000.000	75%	9.550.000.000	81,25%	9.750.000.000	87,5%	9.950.000.000	87,5%	55.800.000.000	
				Persentase pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan	50%	56,25%	9.314.205.000	75%	9.520.205.000	81,25%	9.837.625.500	87,5%	10.100.625.500	93,75%	10.200.625.500	100%	10.400.625.500	100%	59.373.912.000	
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman				474.090.000		497.794.500		522.684.225		548.818.436		576.259.358		605.072.326		3.224.718.845	Dinas Kesehatan
				Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	20%	25%	292.040.000	30%	306.642.000	35%	321.974.100	40%	338.072.805	45%	354.976.445	50%	372.725.268	60%	1.986.430.618	

				Persentase pengawasan pre daan post market pangan industri rumah tangga sesuai daftar	20%	25%	182.050.000	30%	191.152.500	35%	200.710.125	40%	210.745.631	45%	221.282.913	50%	232.347.058	60%	1.238.288.228	
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/ Kelurahan ODF (Open Defecation Free)	16,4%	20,8%	150.000.000	32,83 %	155.000.000	56,71 %	265.000.000	80%	280.000.000	93%	295.000.000	100%	310.000.000	100%	1.455.000.000	Dinas Kesehatan
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	persentase panjang bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten	-	-	-	45%	52,200,000,000	50%	74,000,000,000	55%	60,600,000,000	60%	60,600,000,000	65%	56,850,000,000	65%	296.250.000.000	Dinas PUPR
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	persentase rumah tangga terlayani air minum di wilayah kabupaten	70.84%	-	-	72%	22,920,000,000	75%	22,920,000,000	78%	22,920,000,000	81%	22,920,000,000	84%	22,920,000,000	84%	114.600.000.000	Dinas PUPR
1	03	04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Unit pengelolaan persampahan terhadap kebutuhan pengelolaan persampahan regional di wilayah kabupaten	7,14%	-	-	29%	4,525,000,000	50%	2,825,000,000	71%	5,325,000,000	86%	4,825,000,000	100%	4,825,000,000	100%	22.325.000.000	Dinas PUPR

1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan air limbah	63.11%	-	-	66%	675,000,000	69%	6,825,000,000	72%	825,000,000	75%	825,000,000	78%	825,000,000	78%	9.975,000,000	Dinas PUPR
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten terhadap jumlah kebutuhan drainase dalam kabupaten	17,79%	-	-	42%	13,350,000,000	44%	12,750,000,000	46%	12,750,000,000	48%	12,950,000,000	50%	12,750,000,000	50%	64,550,000,000	Dinas PUPR
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan yang tertata di wilayah kawasan strategis daerah kabupaten	-	-	-	20%	60.000.000.000	40%	60.000.000.000	60%	60.000.000.000	80%	60.000.000.000	100%	60.000.000.000	100%	300.000.000.000	Dinas PUPR
				Persentase RTH,Taman perkotaan yang dibangun sesuai perencanaan	-			100%		100%		100%		100%		100%				
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang ditata sesuai perencanaan	-	-	-	100%	25.610.000.000,-	100%	25.110.000.000,-	100%	25.610.000.000,-	100%	25.110.000.000,-	100%	25.610.000.000,-	100%	127.050.000.000,-	Dinas PUPR
1	03	09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata	-	10%	-	25%	800.000.000	50%	3.050.000.000,-	75%	3.050.000.000,-	100%	3.050.000.000,-	100%	3.050.000.000,-	100%	13.000.000.000,-	Dinas PUPR
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	33%	43%	-	45%	115.600.000.000	47%	109.200.000.000	49%	112.200.000.000	51%	109.200.000.000	53%	112.200.000.000	53%	558.400.000.000	Dinas PUPR

1	03	1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi terlatih terhadap jumlah kebutuhan	5,63%	-	-	10,63 %	761.900.000	15,63 %	752.000.000	20,63 %	774.000.000	25,63 %	801.000.000	30,63 %	870.000.000	30,63 %	3.958.900.000	Dinas PUPR
1	03	2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi yang diberikan sesuai dengan tataruangnya	51 rekomendasi	-	-	25 rekomendasi	2.757.317.000,-	45 rekomendasi	2.314.580.000	45 rekomendasi	2.334.580.000	45 rekomendasi	2.354.580.000	45 rekomendasi	9.761.057.000	205 rekomendasi	13.435.637.000	Dinas PUPR
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah layak Huni untuk Korban Bencana	-	-	-	100 %	4.300.000.000	100%	5.110.000.000	100 %	5.930.000.000	100 %	6.750.000.000	100 %	7.570.000.000	100 %	29.660.000.000	Dinas Perakim
				Persentase Rumah layak Huni untuk relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah				100 %		100%		100 %		100 %		100 %		100 %		
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Luasan kawasan permukiman kumuh	SK : 255,2 Ha, Sisa 126,5 Ha	-	-	10%	3.700.000.000	10%	5.220.000.000	10%	5.440.000.000	10%	6.160.000.000	10%	6.780.000.000	63,25 ha	27,300,000,000	Dinas Perakim
1	04	04	Program Perumahan Dan Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan RTLH diluar kawasan kumuh	1.700 Unit	-	-	3,0%	3.200.000.000	3,0%	3.200.000.000	3,0%	3.200.000.000	3,0%	3.200.000.000	3,0%	3.200.000.000	1445 unit	16,000,000,000	Dinas Perakim

1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Cakupan peningkatan PSU	-	-	-	100%	4.200.000.000	100%	5.400.000.000	100%	6.520.000.000	100%	7.630.000.000	100%	8.740.000.000	100%	32.490.000.000	Dinas Perakim
1	04	06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan Pelayanan, Serifikasi, Kalifikasi, Klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	350.000.000	Dinas Perakim
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat pelanggaran Perda/Perbup	38%	30%	4.105.665.649	20%	5.078.352.323	20%	5.586.187.555,-	15%	6.144.806.311	15%	6.759.286.942	15%	7.383.972.136	15%	35.058.270.916	Satpol. PP
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulanga n Bencana	100%	100%	2.653.315.500	100%	3.340.200.000	100%	3.874.220.000,-	100%	3.799.542.000,-	100%	3.886.786.200,-	100%	4.275.464.820,-	100%	21.829.628.520,-	BPBD
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	5.859.130.000	100%	6.963.618.000	100%	4.968.369.800	100%	2.724.196.780	100%	2.814.646.458	100%	2.914.141.104	100%	26.244.102.142	Dinas Damkar
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang terampil	66%	23%	80.000.000,-	82%	345.000.000	83%	350.000.000	87%	373.000.000	89%	387.000.000	100%	387.000.000	100%	1.922.000.000	Dinas Sosial

1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang diberi bantuan	0%	5,24%	211.987.198,-	22,71 %	2.177.000.000	39,59 %	1.859.000.000	58,37 %	2.526.000.000	79,18 %	2.773.000.000	100%	2.773.000.000	100%	12.319.987.198	Dinas Sosial
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang dilayani	44,94%	45,78 %	470.000.000	54,86 %	930.000.000	64,80 %	965.000.000	76,26 %	1.095.000.000	87,71 %	1.105.000.000	99,16 %	1.105.000.000	99,16 %	5.670.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan	100%	100%	80.000.000	100%	275.000.000	100%	320.000.000	100%	350.000.000	100%	385.000.000	100%	385.000.000	100%	1.795.000.000	Dinas Sosial
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	40%	40%	70.000.000	55%	500.000.000	69%	500.000.000	86%	600.000.000	94%	300.000.000	100%	200.000.000	100%	2.670.000.000	Dinas Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-	0	1 doku men Makro	184.000.000	15 doku men Mikro	150.000.000	15 doku men Mikro	150.000.000	15 doku men Mikro	150.000.000	15 doku men Mikro	150.000.000	1 doku men makro / 60 doku men mikro	784.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.Persentase tenaga kerja lulus pelatihan(berse rtifikat)	100%	100%	655.905.586	100%	1.622.500.000	100%	1.562.500.000	100%	1.562.500.000	100%	1.562.500.000	100%	1.562.500.000	100%	8.528.405.586	Dinas Tenaga Kerja

				2. Persentase tenaga kerja yang lulus pelatihan bersertifikat kompetensi	72.65%	74%		75%		80%		85%		90%		95%		95%		
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui mekanisme layanan antar kerja	330 orang	342 orang	149.195.458	350 orang	785.000.000	400 orang	610.000.000	410 orang	610.000.000	420 orang	610.000.000	430 orang	610.000.000	430 orang	3.754.195.458	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang memenuhi syarat-syarat kerja	66,04%	72%	51.159.035	78%	543.056.000	84%	455.976.000	90%	455.976.000	96%	455.976.000	100%	455.976.000	100%	2.418.19.035	Dinas Tenaga Kerja
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD dan Desa melaksanakan PPRG	0,67	10%	500.044.065	10%	659.649.607	10%	659.649.607	10%	659.649.607	10%	659.649.607	10%	659.649.607	60%	3.798.292.100	P3AP2KB
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase layanan penanganan pengaduan kekerasan	100%	100%	27.429.750	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	927.429.750	P3AP2KB
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga	-	-	-	2%	130.000.000	2%	130.000.000	2%	130.000.000	2%	130.000.000	2%	130.000.000	10%	650.000.000	P3AP2KB
2	08	05	Program Pengelolaan Sistim Data Gender Dan Anak	Persentase OPD memiliki data pilah berdasarkan jenis kelamin	16%	-	-	100%	280.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	360.000.000	P3AP2KB

[illegible]

2	1 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
2	1 1	0 2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	1 dokumen	3 doku men	442.213. 000,-	3 doku men	520.000. 000,-	3 doku men	700.000. 000,-	4 doku men	750.000. 000,-	3 doku men	850.000. 000,-	1 doku men	250.000. 000,-	17 doku men	3.512.2 13.000	DLH
2	1 1	0 3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	IKA/IKU/ IKTL/ IKAL/IKEG	64,3/93,68 /52,09/75, 8/72,8	64,5/ 94/55 /76,5 /73,3	97.550.0 00,-	65/94 ,2/55 ,5/77 ,1/73 ,8	925.000. 000,-	65,5/ 94,4/ 56,/7 7,8/7 4,4	1.060.00 0.000,-	66/94 ,6/56 ,5/78 ,4/74 ,8	940.000. 000,-	66,5/ 94,8/ 57/78 ,8/75 ,2	1.170.00 0.000	67/95 /57,5 /79,2 /75,6	1.300.00 0.000	67/95 /57,5 /79,2 /75,6	5.492.5 50.000	DLH
2	1 1	0 4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragam an hayati	40%	50%	25.750.0 00,-	70%	4.760.00 0.000,-	75%	4.660.00 0.000,-	80%	4.560.00 0.000,-	85%	4.660.00 0.000,-	90%	4.760.00 0.000,-	90%	23.425. 750.00 0,-	DLH
2	1 1	0 5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pembinaan dan PengawasanBa han Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun(Limba h B3) pada usaha/kegiata n	100%	100%	25.800.0 00,-	100%	90.000.0 00,-	100%	100.000. 000,-	100%	110.000. 000,-	100%	120.000. 000,-	100%	130.000. 000,-	100%	575.80 0.000,-	DLH
2	1 1	0 6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	100%	148.600. 000,-	100%	390.000. 000,-	100%	460.000. 000,-	100%	503.000. 000,-	100%	545.000. 000,-	100%	358.000. 000	100%	2.404.6 00.000, -	DLH

2	1	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Cakupan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	20%	60%	18.550.000,-	70%	160.000.000,-	80%	200.000.000,-	90%	240.000.000,-	100%	280.000.000,-	100%	320.000.000,-	100%	1.218.550.000,-	DLH
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat kecamatan yang meningkat pengetahuan/pemahaman terkait lingkungan hidup	50%	55%	18.550.000,-	70%	130.000.000,-	80%	140.000.000,-	90%	150.000.000,-	100%	160.000.000,-	100%	160.000.000,-	100%	758.550.000,-	DLH
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	45%	50%	13.750.000,-	65%	150.000.000,-	70%	180.000.000,-	80%	200.000.000,-	90%	220.000.000,-	100%	240.000.000,-	100%	1.003.750.000,-	DLH
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	29.900.000,-	100%	145.000.000,-	100%	160.000.000,-	100%	180.000.000,-	100%	200.000.000,-	100%	220.000.000,-	100%	934.900.000,-	DLH
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terkelola	75%	80%	3.839.888.800,-	83%	22.550.000.000,-	85%	16.760.000.000,-	87%	16.005.000.000,-	89%	15.330.000.000,-	90%	15.840.000.000,-	90%	90.324.888.800,-	DLH

2	1 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL																	
2	1 2	0 2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP-el, penduduk ber-KTP dan Ber-KIA,	100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 20% KIA	100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 30% KIA	555,000,000	100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 40% KIA	664,000,000	100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 50% KIA	704,000,000	100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 60% KIA	731,000.000	100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 70% KIA	759,000,000	100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 80% KIA	793,000,000	100% perekaman KTP, 100 % kepemilikan KTP, 80% KIA	4.206.000.000	Dinas Dukcapil
2	1 2	0 3	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun	92% Akte kelahiran 0-18 tahun	95% Akte kelahiran 0-18 tahun	400,000,000	97% Akte kelahiran 0-18 tahun	507,000,000	98% Akte kelahiran 0-18 tahun	555,000,000	99% Akte kelahiran 0-18 tahun	611,000,000	100% Akte kelahiran 0-18 tahun	667,000,000	100% Akte kelahiran 0-18 tahun	723,000,000	100% Akte kelahiran 0-18 tahun	3.463.000.000	Dinas Dukcapil
2	1 2	0 4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyediaan data kependudukan akurat dan terkini	-	20%	240,000,000	20%	290,000,000	20%	335,000,000	20%	379,000,000	20%	423,000,000	100%	467,000,000	100%	1.509.000.000	Dinas Dukcapil
2	1 2	0 5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang tersaji dalam buku profil kependudukan	-	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	45,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	225.000.000	Dinas Dukcapil
2	1 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
2	1 3	0 2	Program Penataan Desa	Persentase desa yang tertata dengan baik	100%	100%	121,100,000,-	-	-	100%	100.000.000	100%	200.000.000	-	-	-	-	100%	421.100.000,-	PMD

2	1 3	0 3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	13 BKAD	-	-	13 BKAD	150,000,000	13 BKAD	250,000,000	13 BKAD	250,000,000	13 BKAD	150,000,000	13 BKAD	150,000,000	13 BKAD	950.000.000,-	PMD
2	1 3	0 4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 desa	114 desa	383.500.957	114 desa	3.170.485.000	114 desa	2.485.000.000	114 desa	2.190.000.000	114 desa	3.275.000.000	114 desa	1.305.000.000	114 desa	12.808.985.957	PMD
2	1 3	0 5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	100%	100%	977.502.165	100%	1.590.000.000	100%	1.900.000.000	100%	2.310.000.000	100%	2.520.000.000	100%	2.530.000.000	100%	11.827.502.165	PMD
2	1 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
2	1 4	0 2	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Design Pengendalian Penduduk	10%	100%	80.000.000	100%	145.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	145.000.000	100%	80.000.000	100%	610.000.000	P3AP2KB
2	1 4	0 3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase tingkat ketidakberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi (Drop Out KB)	19,69%	19,69%	391.405.632,-	19,67%	1.116.000.000	19,64%	1.458.000.000	19,62%	1.644.000.000	19,60%	1.820.000.000	19,58%	2.178.000.000	19,58%	8.607.405.632,-	P3AP2KB
2	1 4	0 4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Poktan yang ber-KB (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	100%	100%	-	100%	560.000.000,-	100%	590.000.000,-	100%	590.000.000	100%	590.000.000	100%	590.000.000	100%	2.920.000.000,-	P3AP2KB

2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tingkat tertib lalu lintas angkutan jalan	-	100%	814.180.000,-	100%	3.162.000.000,-	100%	2.825,000.000,-	100%	1.855,000.000,-	100%	2.950,000.015,-	100%	2.705,000.000	100%	14.311.180.015,-	Dishub
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Tingkat pemenuhan pelayanan pelayaran	-	100%	553.980.000	100%	1.800.300.000	100%	6.617.500.000,-	100%	5,305.000.000,-	100%	3.890,000.000,-	100%	3,865,000.000,-	100%	22.031.780.000,-	Dishub
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Tersedianya Layanan Informasi, Telekomunikasi dan Opini Publik	4 Media Informasi	4 Media Informasi	2.344.899.850	4 Media	5.869.809.000	4 Media	10.180.000.000	4 Media	10.180.000.000	4 Media	10.205.000.000	4 Media	10.205.000.000	4Media a	48.984.708.850	DisKom info
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Tanjab Barat	31 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi	31 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi	1.924.090.000	31 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi	3.855.050.000	44 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi	3.885.050.000	44 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi	3.888.650.000	44 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi	3.888.650.000	44 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi	3.888.650.000	44 OPD	21.330.140.000	DisKom info
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki izin	12.70%	12.70%	70,000,000	15.18%	73,000,000	15.18%	75,000,000	15.18%	78,000,000	15,18%	85,000,000	13.92%	100,000,000	100%	481,000.000,-	Dinas Kopperindag

2	1 7	0 3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi dan yang patuh terhadap Perundang-undangan	100%	100%	195,000,000	100%	230,000,000	100%	252,900,000	100%	274,500,000	100%	326,000,000	100%	355,000,000	100%	1.633.400.000,-	Dinas Kopperi ndag
2	1 7	0 4	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya	40.50%	100%	93,225,000	100%	112,825,000,-	100%	125,325,000,-	100%	128,325,000	100%	135,525,000	100%	150,500,000,-	100%	745.725,,000	Dinas Kopperi ndag
2	1 7	0 5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mendapat pelatihan	29.85%	22.38 %	91,718,000	22.38 %	97,018,000	22.38 %	115,000,000,-	22.38 %	120,000,000,-	22.38 %	140,000,000,-	22.38 %	150,000.000,-	100%	713,736.000	Dinas Kopperi ndag
2	1 7	0 6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas	56.34%	5.60%	183,140,000,-	2.60%	2,191,485,000	3%	198,965,000,-	3.73%	1,200,765,000	4.50%	1,204,265,000,-	5.60%	1,220,000,-	81,37 %	6.198.620.000,-	Dinas Kopperi ndag
2	1 7	0 7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM	8.310 UMKM	2.40%	914,975,000	2.40%	2,999,975,000	2.40%	3,172,000,000	2.40%	3,064,500,000	2.40%	3,120,375,000	2.40%	3,135,000,000	9580 UMK M	16.406.825.000	Dinas Kopperi ndag
2	1 7	0 8	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Menjadi wirausaha	1.048 Usaha Kecil	3.33%	200,000,000	3.33%	250,000,000	3.33%	275,000,000	3.33%	300,000,000	3.33%	315,000,000	3.33%	325,000,000	1275 Usah a kecil	1.665.000.000,-	Dinas Kopperi ndag
2	1 8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
2	1 8	0 2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kajian Potensi dan peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	1 Doku men	4.200.000,-	1 Doku men	275.000.000	1 Doku men	270.000.000	1 Doku men	85.000.000	1 Doku men	90.000.000	1 Doku men	90.000.000	6 Doku men	814.200.000	DPMP T SP
2	1 8	0 3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Calon Investor	2 Calon Investor	1	45.800.000,-	2	225.000.000	2	175.000.000	2	260.000.000	2	265.000.000	2	275.000.000	11	1.245.800.000	DPMP T SP
2	1 8	0 4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Total perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan	6.878 Naskah Izin	2000 Izin	96.029.750	2000 Izin	577.000.0000	2000 Izin	577.000.000	2000 Izin	420.000.000	2000 Izin	470.000.000	2000 Izin	485.000.000	1200 0 Izin	2.625.029.750	DPMP T SP

2	185	0	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Rencana Investasi	534,43 M	162 M	358.161.925,-	232 M	360.040.000	301 M	359.240.000	370 M	50.400.000	440 M	58.500.000	509 M	69.000.000	509 M	1.255.341.925	DPMPT SP
2	186	0	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterapkan	1 sistem informasi	1 sistem informasi	18.060,000	1 sistem informasi	24.000.000	1 sistem informasi	31.000.000	1 sistem informasi	40.000.000	1 sistem informasi	52.000.000	1 sistem informasi	68.000.000	1 sistem informasi	233.060.000	DPMPT SP
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA																	
2	192	0	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Berprestasi/Mandiri/Religius yang di bina	0	20%	1.023.485.972	45%	1.445.385.450	45%	1.579.923.995	49%	1.727.916.395	49%	1.890.708.034	54%	2.069.778.837	54%	9.737.198.683	Disparpora
2	193	0	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Perolehan Medali	0	40	5.911.755.958	40	47.050.000.000	10	17.755.000.000	40	48.530.500.000	10	21.383.550.000	40	50.321.905.000	180	190,952,710,958	Disparpora
2	194	0	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Status Organisasi Pramuka	Aktif	Aktif	400.000.000	Aktif	440.000.000	Aktif	484.000.000	Aktif	532.400.000	Aktif	585.640.000	Aktif	644.204.000	Aktif	3,086,244,000	Disparpora
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
2	202	0	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Jumlah OPD dengan Sistem dan Statistik Data yang Terintegrasi	0	0	0	44 OPD	250.000.000	44 OPD	250.000.000	44 OPD	250.000.000	44 OPD	250.000.000	44 OPD	250.000.000	44 OPD	1.250.000.000	Diskominfo

2	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
2	2	0	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sistem Persandian	0	0	0	45%	200.000.000	50%	200.000.000	56%	200.000.000	79%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.000.000.000	Diskom info
2	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2	2	0	Program Pengembangan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	40%	65%	1,600,000,000	70%	1,680,000,000	70%	1.764,000,000	70%	1,852,,000,000	70%	1.945,000,000	70%	2.042,000,000	70%	8.841.,000,000	Dinas Dikbud
2	2	0	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah HaKI yang diperoleh	3 Karya	1 Karya	100,000,000	1 Karya	110,000,000	1 Karya	121,000,000	1 Karya	133,000,000	1 Karya	146,000,000	1 Karya	161,000,000	9 Karya	611,000,000	Dinas Dikbud
2	2	0	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Dokumen Sejarah	0	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	116,000,000	1 Dokumen	127,000,000	1 Dokumen	140,000,000	1 Dokumen	154,000,000	6 Dokumen	592,000,000	Dinas Dikbud
2	2	0	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0	12,50 %	300,000,000	25,00 %	330,000,000	37,50 %	363,000,000	50,00 %	399,000,000	62,50 %	439,000,000	75,00 %	483,000,000	75,00 %	1.832,000,000	Dinas Dikbud
2	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
2	2	0	Program Pembinaan Perpustakaan	status akreditasiperpustakaan	Belum terakreditasi	C	4.559.607.000	C	799.766.000	C	753.480.900	B	864.753.035	B	992.540.990	A	1.139.304.639	A	9,109,452,564	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	0	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Koleksi Nasional	-	-	-	-	-	2 Naskah	33.000.000	2 Naskah	38.000.000	3 Naskah	44,000,000	3 Naskah	50.000.000	10 Naskah	165,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
2	2	0	Program Pengelolaan Arsip	Persenatase OPD yang arsipnya dikelolah sesuai dengan kaidah kearsipan	20% OPD	40 % OPD	36.073.0 00	60 % OPD	93.461.9 75	80 % OPD	374.481. 271	100% OPD	259.653. 462	100% OPD	296.801. 481	100% OPD	339.341. 703	100% OPD	1,399,8 12,892	Dinas Perpust akaan dan Kearsip an
2	2	0	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan	1000 Arsip	-	-	1000 Arsip	55,000,0 00	1000 Arsip	383,250, 000	1000 Arsip	440,737, 500	1000 Arsip	506,848, 125	1000 Arsip	582,875, 344	1000 Arsip	1,968,7 10,969	Dinas Perpust akaan dan Kearsip an
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
3	2	0	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produski Perikanan Tangkap (Ton)	22.442	22,66 6	1,084,40 0,000	23.11 9	15,702,8 05,000	23.58 1	20,770,3 10,000	24,05 3	18,129,8 15,000	24,53 4	27,280,0 70,000	25,34 9	28,261,5 70,000	25,34 9	111,22 8,970,0 00	Dinas Perikan an
3	2	0	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produski Perikanan Budidaya (Ton)	1.135	1.158	1.074.54 0.000,-	1.187	4.796.50 0.000,-	1.217	5.075.50 0.000,-	1.248	4.765.50 0.000,-	1.280	4.510.50 0.000,-	1.310	4.645.50 0.000,-	1.310	24,868, 040,00 0	Dinas Perikan an
3	2	0	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang- undangan	13 lokasi	4 lokasi	164.910. 000	6 lokasi	165.000. 000	6 lokasi	170.000. 000	6 lokasi	175.000. 000	6 lokasi	180.000. 000	6 lokasi	185.000. 000	20 lokasi	1,039,9 10,000	Dinas Perikan an
3	2	0	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	2.100	2.184	1.781.00 0.000	2.271	1.981.00 0.000	2.362	2.595.00 0.000	2.480	6.195.00 0.000	2.579	2.295.00 0.000	2.682	6.395.00 0.000	2.682	21,242, 000,00 0	Dinas Perikan an

3	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
3	2	0	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Objek dan Even Pariwisata yang dikenal luas	0	20%	1.653.52 2.021	20%	15.170.1 87.843	25%	8.687.20 6.627	35%	9.555.92 7.290	40%	10.511.5 20.019	40%	11.562.6 72.021	40%	57.141. 035.82 1	Disparp ora
3	2	0	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Even Pemasaran Pariwisata	0	100%	169.930. 000	100%	440.000. 000	100%	484.000. 000	100%	532.400. 000	100%	585.640. 000	100%	644.204. 000	100%	2.856.1 74.000	Disparp ora
3	2	0	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Inovasi Ekraf yang berprestasi di ruang kreatif	0	-	-	40%	300.000. 000	45%	330.000. 000	45%	363.000. 000	50%	399.300. 000	50%	439.230. 000	50%	1.831.5 30.000	Disparp ora
3	2	0	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata yang berkompeten yang di bina	0	7%	64.739.5 17	19%	720.000. 000	27%	792.000. 000	38%	871.200. 000	50%	958.320. 000	58%	1.054.15 2.000	58%	4.460.4 11.517	Disparp ora

3	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
3	2	0	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan (%) 2. Angka Kebuntingan Sapi yang di Inseminasi Buatan (IB)	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,03%, karet = 0,1 %, kelapa dalam = 0,7%,kopi = 0,1% pinang = 0,8% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 70 %	1. Perse ntase Penin gkatan Produ ktivitas Kelap a sawit = 1,5%, karet = 0,3 %, kelapa dalam = 0,7%, kopi = 0,3% pinan g = 0,9% 2. Angka Kebu nting an Sapi = 70 %	1.429.37 3.696	1. Perse ntase Penin gkatan Produ ktivitas Kelap a sawit = 1,6%, karet = 0,4 %, kelapa dalam = 0,8%, kopi = 0,4% pinan g = 1,0% 2. Angka Kebu nting an Sapi = 71 %	6.428.72 2.275	1. Perse ntase Penin gkatan Produ ktivitas Kelap a sawit = 1,7%, karet = 0,5 %, kelapa dalam = 0,9%, kopi = 0,5% pinan g = 1,1% 2. Angka Kebun tingan Sapi = 72 %	7.360.62 0.090	1. Perse ntase Penin gkatan Produ ktivitas Kelap a sawit = 1,8%, karet = 0,6 %, kelapa dalam = 1,0%, kopi = 0,6% pinan g = 1,2% 2. Angka Kebu nting an Sapi = 73 %	8.429.06 1.525	1. Perse ntase Penin gkatan Produ ktivitas Kelap a sawit = 1,9%, karet = 0,6 %, kelapa dalam = 1,1%, kopi = 0,7% pinan g = 1,3% 2. Angka Kebu nting an Sapi = 74 %	9.654.20 4.018	1. Perse ntase Penin gkatan Produ ktivitas Kelap a sawit = 2%, karet = 0,6 %, kelapa dalam = 1,1%, kopi = 0,7% pinan g = 1,3% 2. Angka Kebu nting an Sapi = 75 %	11.059.1 96.210	1. Perse ntase Penin gkatan Produ ktivitas Kelap a sawit = 2%, karet = 0,6 %, kelapa dalam = 1,1%, kopi = 0,7% pinan g = 1,3% 2. Angka Kebu nting an Sapi = 75 %	44,361, 177,81 4	Disbun ak
				Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura			311.492.000		6.500.00 0.000		6.662.50 0.000		6.829.06 2.500		6.999.78 9.063		7.174.78 3.789		34.166. 135.35 2	DTPH
				Padi	42,56 Kw/Ha	1,99%		1,99%		1,99%		1,99%		1,99%		1,99%		50,93 Kw/Ha		

				Jagung	60,78 Kw/Ha	1,97%		1,97%		1,97%		1,97%		1,97%		96,48 Kw/Ha				
				Kacang Tanah	11 Kw/Ha	3%		3%		3%		3%		3%		14,33 Kw/Ha				
				Ubi Kayu	336,73 Kw/Ha	2%		2%		2%		2%		2%		360,57 Kw/Ha				
				Ubi jalar	167,62 Kw/Ha	1,88%		1,88%		1,88%		1,88%		1,88%		171,58 Kw/Ha				
				Duku	7,75 Ton/Ha	1,94%		1,94%		1,94%		1,94%		1,94%		97,01 Ton/Ha				
				Durian	175,7 Ton/Ha	1,93%		1,93%		1,93%		1,93%		1,93%		197,45 Ton/Ha				
				Jeruk	143,6 Ton/Ha	2%		2%		2%		2%		2%		253,21 Ton/Ha				
				Pisang	1046,2 Ton/Ha	1,99%		1,99%		1,99%		1,99%		1,99%		1068,0 Ton/Ha				
				Nanas	4,3 Ton/Ha	2,3%		2,3%		2,3%		2,3%		2,3%		12,72 Ton/Ha				
				Jahe	250 Ton/Ha	1,96%		1,96%		1,96%		1,96%		1,96%		254,90 Ton/Ha				
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks Peningkatan Ketersediaan Prasarana Perkebunan/Pe ternakan sesuai peruntukannya	20%	21%	354.234.000	22%	2.119.416.600	23%	2.160.637.250	24%	2.355.386.588	25%	2.572.881.013	26%	2.816.208.924	26%	12.378.764.375	Disbunak

				Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Sesuai Peruntukan (%)	N/A	62,55 %	102.246.000	63,18 %	7.975.000.000	63,81 %	10.674.375.000	64,45 %	19.378.734.375	65,55 %	8.588.202.734	65,09 %	9.802.907.803	65,09 %	56.521.465.912	DTPH
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka Kematian Ternak	1.7%	1.7%	592.592.106	1.6%	823.833.899	1.5%	947.408.984	1.4%	1.089.520.331	1.3%	1.252.948.381	1.2%	1.440.890.638	1.2%	6.147.194.339	Disbunak
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Angka Penanggulangan serangan OPT dan gangguan usaha perkebunan	100%	100%	304.886.622	100%	241.201.622	100%	277.381.865	100%	318.989.145	100%	366.837.517	100%	421.863.144	100%	1.931.159.915	Disbunak
				Persentase Pengendalian Bencana Pertanian sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	100%	544.435.100	100%	870.545.978	100%	892.309.627	100%	914.617.368	100%	937.482.802	100%	960.919.872	100%	5.120.310.746	DTPH
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah STDB untuk petani perkebunan yang diterbitkan	4.796 Ha	350 STDB	154.649.874	750 STDB	500.112.259	750 STDB	575.129.098	750 STDB	661.398.463	750 STDB	760.608.232	750 STDB	874.699.467	4.100 STDB	3.526.597.393	Disbunak
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dan Informasi Sektor Perkebunan/Pe ternakan	10%	20%	320.768.571	25%	605.248.959	30%	696.036.303	35%	800.441.748	40%	920.508.011	45%	1.058.584.212	45%	4.401.587.804	Disbunak

				Cakupan Bina Kelompok Tani	20%	25%	4.000.00 0.000	25%	7.042.00 0.000	25%	7.218.05 0.000	25%	7.398.50 1.250	25%	7.583.46 3.781	25%	11.981.1 81.977	25%	45.223. 197.00 8	DTPH
3	3 0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
3	3 0	0 2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)	2.308 pelaku usaha	10.83 %	100,000,000,-	10.83 %	110,000,000,-	10.83 %	115,000,000,-	10.83 %	120,000,000,-	10.83 %	125,000,000,-	10.83 %	130,000,000,-	4258 pelaku usaha	700,000,000,-	Dinas Kopperi ndag
3	3 0	0 3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang layak dan berfungsi	20.83%	2.78%	2,500,000,000,-	4.17%	3,850,000,000,-	4.17%	5,900,000,000,-	4.17%	6,000,000,000,-	4.17%	6,100,000,000,-	4.17%	6,200,000,000,-	44,46 %	30,550,000,000	Dinas Kopperi ndag
3	3 0	0 4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah jenis barang dengan harga stabil	18 Jenis Barang	18 Jenis Baran g	250,000,000	18 Jenis Baran g	730,000,000	18 Jenis Baran g	1.025,000,000	18 Jenis Baran g	1.075,000,000	18 Jenis Baran g	1.155,000,000,-	18 Jenis Baran g	1.240,000,000,-	18 Jenis Baran g	5.475.000.000,-	Dinas Kopperi ndag
3	3 0	0 5	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	USD 173.793.479	5%	1,000,000,000	5%	1,100,000,000	5%	1,200,000,000	5%	1,245,000,000	5%	1,300,000,000	5%	1,325,000,000	USD. 232.899.884	7.170.000.000,-	Dinas Kopperi ndag
3	3 0	0 6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	2.308 Unit	10.83 %	425,000,000	32.49 %	950,000,000	36.82 %	6,030,000,000	41.16 %	1,075,000,000	45.49 %	1,050,000,000	49.82 %	1,050,000,000	3458 unit	3.458,000,000	Dinas Kopperi ndag

3	3	0	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi/pemasaran produk dalam daerah	0	1 kali	75,000,000,-	2 kali	150,000,000,-	2 kali	175,000,000,-	2 kali	180,000,000,-	2 kali	190,000,000,-	2 kali	200,000,000,-	11 kali	970,000,000,-	Dinas Kopperi ndag	
3	3	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																		
3	3	0	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil	1.420 IK	2.82%	1.050,000,000,-	2.82%	1.450.000.000,-	2.82%	1.300.000.000,-	2.82%	1.275.000,-	2.82%	1.040.000.000,-	2.82%	1.040.000.000,-	1677 IK	7.155.000.000,-	Dinas Kopperi ndag	
3	3	0	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase industri yang memiliki izin	29 Industri menengah besar	10.34 %	75,000,000	10.34 %	105,000,000	10.34 %	120,000,000	10.34 %	150,000,000	10.34 %	150,000,000,-	10.34 %	150,000,000,-	52 Industri menengah besar	750,000,000,-	Dinas Kopperi ndag	
3	3	0	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini industri nasional	1.449 IKMB	43 IKMB	75,000,000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100,000,000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100,000,000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100,000,000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100,000,000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100,000,000	1707 IKMB / 10 Buku Profil IKM	575,000,000,-	Dinas Kopperi ndag	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	0		Sekretariat Daerah																		
4	0	0	Program Administrasi Umum	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	29	29	403.997.473,-	29	1.190.000.000,-	32	1.309.000.000,-	35	1.439.900.000,-	40	1.583.890.000,-	43	2.383.241.500	43	7.105.028.678,-	Bag. Organisasi-SETDA	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	80,66	80,66		80,66		80,70		80,75		85		88,31		88,31			
				Nilai AKIP Kabupaten	57,33	>59.00		>60,01		>61,50		>62,50		>70,01		>70,50		70,50			

				Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan tepat waktu	100%	100%	87.425.000,-	100%	94.600.000,-	100%	105.784.250,-	100%	116.362.675,-	100%	127.998.943,-	100%	140.798.837,-	100%	672.969.704,-	Bag. Perencanaan Keuangan-SETDA
				Persentase administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat terlayani	100%	100%	41.936.199.000	100%	54.974.837.299	100%	57.632.433.213	100%	62.263.929.092,-	100%	67.333.343.041,-	100%	73.522.503.686,-	100%	355.573.262.011,-	Bag. Umum-SETDA
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	100%	100%	1.799.238.669,-	100%	1.433.614.024,-	100%	1.773.923.603,-	100%	2.128.708.323,-	100%	2.554.449.988,-	100%	3.065.339.985,-	100%	12.755.274.592	Bag. Protokol-SETDA
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				10.957.607.020,-		13.608.813.243,-		17.653.900.000,-		19.309.800.000,-		21.059.760.000,-		22.906.296.000,-		105.496.176.263,-	
				Persentase keterisian data IKK LPPD	100%	100%	708.161.695,-	100%	708.161.695,-	100%	1.571.900.000,-	100%	1.711.200.000,-	100%	1.806.400.000,-	100%	1.846.200.000,-	100%	8.688.861.695,-	Bag. Tata Pemerintahan-SETDA
				Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	100%	8.752.054.088,-	100%	11.411.750.627,-	100%	13.816.000.000,-	100%	15.197.600.000,-	100%	16.717.360.000.-	100%	18.389.096.000,-	100%	84.283.860.715,-	Bag. Kesejahteraan Rakyat-SETDA

				Persentase produk hukum daerah yang diundangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%	100%	926.797.269,-	100%	859.301.364,-	100%	1.381.000.000,-	100%	1.456.000.000,-	100%	1.531.000.000,-	100%	1.606.000.000,-	100%	7.760.098.633,-	Bag. Hukum - SETDA
				Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan dalam daerah yang Terfasilitasi	100%	100%	570.593.968,-	100%	629.599.777,-	100%	885.000.000,-	100%	945.000.000,-	100%	1.005.000.000,-	100%	1.065.000.000,-	100%	5.100.193.745,-	Bag. Kerjasama-SETDA
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan				8.810.849.686,-		9.264.738.798,-		43.110.870.000,-		36.839.900.000,-		22.656.390.288,-		22.767.279.000,-		144.122.997.479,-	
				Persentase kebijakan bidang ekonomi yang dilaksanakan	100%	100%	7.277.477.298,-	100%	7.714.191.400,-	100%	39.175.000.000,-	100%	34.400.000.000,-	100%	19.550.000.000,-	100%	19.700.000.000,-	100%	127.816.668.698,-	Bag. Ekonomi - SETDA
				Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	100%	100%	305.663.400,-	100%	301.438.400,-	100%	632.500.000,-	100%	695.750.000,-	100%	765.325.000,-	100%	841.857.500,-	100%	3.542.534.300,-	Bag. Administrasi Pemerintahan-SETDA
				Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu	100%	100%	788.950.288,-	100%	810.350.298,-	100%	2.626.870.000,-	100%	1.000.000.000,-	100%	1.522.500.288,-	100%	1.325.000.000,-	100%	8.073.670.874,-	Bag. Unit Pelayanan Barang & Jasa-SETDA
				Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang berjalan dengan efektif	100%	100%	438.758.700,-	100%	438.758.700,-	100%	676.500.000,-	100%	744.150.000,-	100%	818.565.000,-	100%	900.421.500,-	100%	4.690.123.604,-	Bag. Sumber Daya Alam-SETDA

[illegible]

5	0 2	0 2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%	194,334, 831,568	100%	204,722, 928,042	100%	215,026, 371,824	100%	225,778, 011,335	100%	237,335, 466,151	100%	248,716, 172,823	100%	1.325.9 13.781. 743	BKAD
5	0 2	0 3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD	100%	100%	1,535,21 2,500	100%	1,531,11 0,000	100%	1,565,10 0,000	100%	1,602,95 0,000	100%	1,639,70 0,000	100%	1,678,00 0,000	100%	9.552.0 72.500	BKAD
5	0 2	0 4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	8.13%	7,98%	2.325.00 0.000,-	8,06%	5.281.20 0.000,-	8,12%	6.075.25 0.000,-	8,16%	6.463.00 0.000,-	8,18%	6.747.00 0.000,-	8,18%	7.023.00 0.000,-	8,18%	33.914. 450.00 0	Bapend a
5	0 3		Kepegawaian																	
5	0 3	0 2	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	59	65	4,483,31 2,141	68	5,498,00 0,000	71	6,322,70 0,000	73	7,271,10 5,000	75	8,361,77 0,750	77	8,361,77 0,750	77	40,298, 658,64 1	BKPSD M
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	6,6%	7,3%		8,2%		9,2%		10,3%		11,6%		12%		12%		
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	5%	5,9%		7,1%		8,4%		9,7%		11,2%		12,2%		12,2%		
				Persentase penetapan jabatan sesuai kompetensi	91,6%	92%		92%		92%		92%		93%		93%		93%		
				Rasio pejabat fungsional tertentu	51,4%	53,9%		55,9%		56,3%		56,7%		56,9%		61%		61%		

[illegible]

7	0	0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	70	15.028.789,-	72	36.750.000,-	74	40.925.000,-	76	43.425.000,-	78	45.925.000,-	80	48.425.000,-	80	215.450.000,-	Kecamatan Tungkail Ulu
	1	2			-	70	1.882.899,-	72	5.000.000,-	74	6.000.000,-	76	7.200.000,-	78	8.000.000,-	80	9.000.000,-	80	37.082.899	Kecamatan Merlung
					-	70	9.800.000,	72	49.400.000,-	74	59.280.000,-	76	35.000.000,-	78	35.000.000,-	80	35.000.000,-	80	223.480.000,-	Kecamatan Batang Asam
					-	70	12.100.000	72	34.100.000,-	74	37.510.000,-	76	41.261.000,-	78	45.387.100,-,-	80	49.925.810,-	80	220.283.910,-	Kecamatan Tebing Tinggi
					-	70	3.274.000,-	72	36.750.000	74	40.925.000	76	43.425.000	78	45.925.000	80	48.425.000	80	218.724.800,-	Kecamatan Renah Mendaluh
					-	-	-	73	27.500.000,-	75	31.250.000,-	77	35.000.000,-	79	35.000.000,-	80	35.000.000,-	80	163.750.000,-	Kecamatan Muara Papalik
					-	70	10.350.000,-	72	33.500.000,-	74	37.500.000,-	76	40.000.000,-	78	42.500.000,-	80	42.500.000,-	80	206.350.000,-	Kecamatan Pengabuan
					-	-	-	72	10.000.000,-	74	11.000.000,-	76	12.100.000,-	78	13.310.000,-	80	14.641.000,-	80	71.051.000,-	Kecamatan Senyering
					73	74	98.845.000	75	160.240.000	76	176.264.000	77	193.890.400	78	213.279.440	80	234.607.384	80	427.357.000,-	Kecamatan Tungkail Ilir
					-	70	6.124.800,-	72	27.500.000,-	74	37.500.000,-	76	40.000.000,-	78	42.500.000,-	80	40.500.000,-	80	196.124.800	Kecamatan Bram Itam

					-	-	-	72	27.500.000,-	74	31.250.000,-	76	35.000.000,-	78	38.500.000,-	80	42.500.000,-	80	237.522.000,-	Kecamatan Seberang Kota
					-	-	-	73	60.000.000,-	74	65.000.000,-	76	70.000.000,-	78	75.000.000,-	80	80.000.000,-	80	350.000.000,-	Kecamatan Betara
					-	70	12,250,000	72	31,750,000	74	34,925,000	76	38.417.500	78	42.259.250	80	46.485.175	80	206.086.925,-	Kecamatan Kuala Betara
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	100%	100%	1.756.115.602,-	100%	2.288.225.000,-	100%	2.340.725.000,-	100%	2.358.225.000,-	100%	2.363.725.000,-	100%	2.371.725.000,-	100%	13.478.740.602,-	Kecamatan Tungkal Ulu
					100%	100%	1.729.629.250,-	100%	2.464.200.000.	100%	2.498.200.000	100%	2.517.200.000	100%	2.523.700.000	100%	2.523.700.000	100%	8.248.129.250	Kecamatan Merlung
					100%	100%	2.085.206.026,-	100%	3.030.200.000,-	100%	3.153.200.000,-	100%	3.188.700.000,-	100%	3.188.700.000,-	100%	3.188.700.000,-	100%	17.834.706.026,-	Kecamatan Batang Asam
					100%	100%	2.205.766.291,-	100%	2.783.090.000,-	100%	3.061.399.000,-	100%	3.367.538.900,-	100%	3.704.292.790,-	100%	4.074.722.069,-	100%	19.196.809.505,-	Kecamatan Tebing Tinggi
					100%	100%	1.699.347..394	100%	2.528.225.000,-	100%	2.590.725.000,-	100%	2.608.225.000,-	100%	2.613.725.000,-	100%	2.621.725.000,-	100%	14.661.972.394,-	Kecamatan Renah Mendaluh
					100%	100%	1.751.643.064,-	100%	3.447.938.750,-	100%	2.521.225.000,-	100%	2.535.725.000,-	100%	2.537.725.000,-	100%	2.540.725.000,-	100%	15.334.981.814,-	Kecamatan Muara Papalik
					100%	100%	2.707.949.800,-	100%	3.458.400.000,-	100%	3.588.000.000,-	100%	3.713.500.000,-	100%	3..847.500.000,-	100%	3.897.500.000,-	100%	20.962.349.800,-	Kecamatan Pengabuan
					100%	100%	2.285.818.395	100%	2.870.638.119	100%	4.533.314.719	100%	4.826.591.879	100%	5.309.251.067	100%	5.840.176.174	100%	25.665.790.352	Kecamatan Senyering

					100%	100%	12.062.058.000	100%	14.371.258.000	100%	15.808.383.800,-	100%	17.389.222.180,-	100%	19.128.144.398,-	100%	21.040.958.838,-	100%	89.365.188.296,-	Kecamatan Tungkal Ilir
					100%	100%	2.095.087.677	100%	2.743.189.700,-	100%	3.623.500.000,-	100%	3.654.000.000,-	100%	3.693.000.000,-	100%	3.703.000.000,-	100%	19.168.777.377	Kecamatan Bram Itam
					100%	100%	1.719.074.800,-	100%	2.358.225.000,-	100%	2.379.225.000,-	100%	2.400.725.000,-	100%	2.640.797.500,-	100%	2.904.877.250,-	100%	14.421.047.144,-	Kecamatan Seberang Kota
					100%	100%	2.507.300.843,-	100%	3.314.987.500,-	100%	3.358.025.000,-	100%	3.379.025.000,-	100%	3.384.025.000,-	100%	3.389.025.000,-	100%	19.297.388.343,-	Kecamatan Betara
					100%	100%	2,238,380,000,-	100%	3.861.553.000,-	100%	3.066.998.000,-	100%	3.262.984.000,-	100%	3.390.693.000,-	100%	3.466.848.500,-	100%	19.287.456.500,-	Kecamatan Kuala Betara
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah berita acara/notulen kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam	6	-	-	6	30.000.000,-	6	40.000.000,-	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	220.000.000,-	Kecamatan Tungkal Ulu
					6	-	-	-	-	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	60.000.000	Kecamatan Merlung
					6	-	-	6	30.000.000,-	6	33.000.000	6	36.000.000	6	36.000.000	6	36.000.000	6	171.000.000,-	Kecamatan Batang Asam
					6	-	-	6	20.000.000	6	22.000.000	6	24.200.000	6	26.620.000	6	29.282.000	6	122.102.000,-	Kecamatan Tebing Tinggi
					6	-	-	6	30.000.000	6	40.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	220.000.000,-	Kecamatan Renah Mendaluh
					6	-	-	6	45.000.000,-	6	40.000.000,-	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	235.000.000,-	Kecamatan Muara Papalik

					6	-	-	6	40.000.000,-	6	45.000.000,-	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	235.000.000,-	Kecamatan Pengabuan
					6	-	-	6	50.000.000	6	34.540.000,-	6	19.844.000,-	6	21.828.400	6	24.011.240	6	150.223.640	Kecamatan Senyering
					6	-	-	6	62.250.000	6	68.475.000	6	75.322.500	6	82.854.750	6	91.140.225	6	380.042.475,-	Kecamatan Tungkal Ilir
					6	-	-	6	30.000.000,-	6	45.000.000,-	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	225.000.000,-	Kecamatan Bramitam
					6	-	-	6	30.000.000,-	6	40.000.000,-	6	50.000.000,-	6	55.000.000,-	6	60.500.000,-	6	235.500.000,-	Kecamatan Seberang Kota
					6	-	-	6	30.000.000,-	6	40.000.000,-	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	50.000.000,-	6	220.000.000,-	Kecamatan Betara
					6	-	-	6	20,000,000	6	24,000,000	6	30,000,000	6	33,000,000	6	40.000.000,-	6	147.000.000,-	Kecamatan Kuala Betara
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	100%	100%	22.875.000,-	100%	62.500.000,-	100%	70.000.000,-	100%	74.000.000,-	100%	74.000.000,-	100%	74.000.000,-	100%	377.375.000,-	Kecamatan Tungkal Ulu
					100%	100%	27.189.750,-	100%	62.500.000,-	100%	80.000.000,-	100%	84.000.000	100%	102.500.000,-	100%	102.500.000,-	100%	458.689.750,-	Kecamatan Merlung
					100%	100%	30.650.000,-	100%	107.000.000,-	100%	92.400.000,-	100%	95.000.000,-	100%	165.000.000,-	100%	95.000.000,-	100%	585.050.000,-	Kecamatan Batang Asam
					100%	100%	35.250.000,-	100%	85.750.000,-	100%	61.325.000,-	100%	87.457.500,-	100%	114.203.250,-	100%	81.623.575,-	100%	465.609.325,-	Kecamatan Tebing Tinggi

					100%	100%	29.575.000	100%	90.000.000,-	100%	72.500.000,-	100%	95.000.000,-	100%	115.000.000,-	100%	75.000.000,-	100%	477.075.000,-	Kecamatan Renah Menduluh
					100%	100%	18.100.000,-	100%	112.000.000,-	100%	70.000.000,-	100%	94.000.000,-	100%	114.000.000,-	100%	74.000.000,-	100%	482.100.000,-	Kecamatan Muara Papalik
					100%	100%	16.250.000,-	100%	82.500.000	100%	72.500.000,-	100%	76.500.000,-	100%	156.500.000	100%	76.500.000,-	100%	480.750.000,-	Kecamatan Pengabuan
					100%	100%	33.306.336	100%	41.306.336	100%	48.950.000	100%	53.845.000	100%	59.229.500	100%	65.152.450	100%	301.789.622	Kecamatan Senyering
					100%	100%	61.120.000	100%	55.175.000	100%	60.692.500	100%	66.761.750	100%	73.437.925	100%	80.781.718	100%	397.968.893	Kecamatan Tungkal Ilir
					100%	100%	23.509.600,-	100%	86.500.000,-	100%	72.500.000,-	100%	76.500.000,-	100%	130.500.000,-	100%	76.500.000,-	100%	388.009.600	Kecamatan Bram Itam
					100%	100%	14.735.000,-	100%	62.500.000,-	100%	70.000.000,-	100%	74.000.000,-	100%	81.400.000,-	100%	89.540.000,-	100%	387.840.000,-	Kecamatan Seberang Kota
					100%	100%	9.800.000,-	100%	53.000.000,-	100%	27.500.000,-	100%	29.000.000,-	100%	79.000.000,-	100%	29.000.000,-	100%	227.300.000,-	Kecamatan Betara
					100%	100%	22,270,000	100%	75.000.000,-	100%	44.000.000,-	100%	58.400.000,-	100%	78.240.000,-	100%	87.500.000,-	100%	365.410.000,-	Kecamatan Kuala Betara

8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01		Kesatuan Bangsa Dan Politik																	
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa yang meningkat pemahamannya	95%	100%	6.0.000.000	100%	415.000.000	100%	385.000.000	100%	415.000.000	100%	510.000.000	100%	510.000.000	100%	2.295.000.000	Badan Kesbangpol
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi politik masyarakat dan parpol	95%	100%	1.995.000.000	100%	2.500.000.000	100%	1.950.000.000	100%	31.955.000.000	100%	1.955.000.000	100%	1.955.000.000	100%	42.310.000.000	Badan Kesbangpol
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang diberdayakan	95%	100%	25.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	215.000.000	100%	235.000.000	100%	235.000.000	100%	1.110.000.000	Badan Kesbangpol
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi , Sosial Dan Budaya	Persentase Peserta pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosbud yang meningkat pemahamannya	95%	100%	150.000.000	100%	715.000.000	100%	735.000.000	100%	735.000.000	100%	735.000.000	100%	735.000.000	100%	3.805.000.000	Badan Kesbangpol
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani	95%	100%	710.000.000	100%	1.135.000.000	100%	935.000.000	100%	975.000.000	100%	1.025.000.000	100%	1.025.000.000	100%	5.805.000.000	Badan Kesbangpol

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Bab V Indikator Kinerja Untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat indikator kinerja makro dan indikator kinerja kunci (IKK) untuk kabupaten/kota yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penilaian terhadap capaian indikator kinerja makro dan IKK tersebut untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing – masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Memperhatikan Permendagri sebagaimana tersebut diatas, maka indikator kinerja makro dan IKK yang termuat dalam Permendagri tersebut akan digunakan dan ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk 2021 – 2026. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel VIII.01. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tabel VIII.02. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel VIII.01
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026

No	Indikator	Target Tahun ke					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,86	68,18	68,50	68,83	69,15	69,47
2	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	Madya	Nidya	Utama	KLA
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,00	87,50	88,50	89,00	89,50	90,00
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,50	69,00	69,50	70,00	70,50	71,00

5	Indeks Pembangunan Keluarga	58,20	60,32	62,44	64,56	66,68	68,80
6	Nilai persepsi rasa aman	-	66,00	67,50	69,00	70,50	72,,00
7	Indeks Reformasi Birokrasi	46,65	48,65	50,65	52,65	54,65	56,65
8	Nilai SAKIP Kabupaten	57,33	60,01	62,01	64,01	66,01	70,00
9	Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
10	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,66	80,68	80,70	80,72	80,74	80,76
11	Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Laju pertumbuhan ekonomi	1,50%	2,00%	2,50%	3.00%	3,50%	4,00%
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,55	69,96	70,37	70,78	71,19	71,60
14	Indeks Williamson	-	0,480	0,465	0,450	0,435	0,420

Tabel VIII.02
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
1.	Indikator Kinerja Makro Daerah								
1.1	Indeks Pembangunan Manusia	67,54	67,86	68,18	68,50	68,83	69,15	69,47	69,47
1.2	Angka Kemiskinan	10,26	9,78	9,31	8,83	8,36	7,89	7,41	7,41
1.3	Angka Pengangguran	2,16	2,05	1,94	1,83	1,72	1,61	1,50	1,50
1.4	Pertumbuhan ekonomi	-0,64%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%	4,00%
1.5	Pengeluaran per Kapita (Ribu rupiah/Orang/Tahun)	9.480.000,-	9.522.000,-	9.564.000,-	9.606.000,-	9.648.000,-	9.690.000,-	9.732.000,-	9.732.000,-
1.6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25
1.7.	Pertumbuhan penduduk	1,27%	1,26%	1,25%	1,24%	1,23%	1,22%	1,21%	1,21%
1.8.	Rasio Elektrifikasi	87,58%	89%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
1.	Pendidikan								
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	34,50%	35,54%	36,60%	37,70%	38,83%	39,99%	41,19%	41,19%
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92,80%	94,19%	95,60%	97,04%	98,49%	100,00%	100,00%	100,00%
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	65,73%	66,72%	67,72%	68,73%	69,76%	70,81%	71,87%	71,87%
1.4	Persentase SD dengan kondisi bangunan baik	37%	37,56%	38,12%	38,69%	39,27%	39,86%	40,46%	40,46%
1.5	Persentase SMP dengan kondisi bangunan baik	44%	44,66%	45,33%	46,01%	46,70%	47,40%	48,11%	48,11%
2.	Kesehatan								
2.1	Prevalensi Stunting	24%	20%	17%	15%	13%	12%	10%	10%
2.2	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	70,47/100.000	95/100.000	100/100.000	105/100.000	110//100.000	115//100.000	120/100.000	120/100.000
2.3	Rasio Perawat per 100.000 penduduk	54,55/100.000	105/100.000	110/100.000	115/100.000	120/100.000	125/100.000	130/100.000	130/100.000
2.4	Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk	28,29/100.000	30/100.000	35/100.000	40/100.000	45/100.000	50/100.000	55/100.000	55/100.000
2.5	Rasio Dokter gigi per 100.000 penduduk	5,01/100.000	9/100.000	10/100.000	11/100.000	12/100.000	13/100.000	14/100.000	14/100.000
2.6	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	1,41/30.000	1,49/30.000	1,49/30.000	1,49/30.000	1,49/30.000	1,49/30.000	1,49/30.000	1,49/30.000
2.7	Rasio Puskesmas Perawatan/ 30. 000 Penduduk	0,44/30.000	0,46/30.000	0,46/30.000	0,84/30.000	0,84/30.000	0,84/30.000	0,84/30.000	0,84/30.000
2.8	Rasio Dokter Spesialist Per 100.000 Penduduk	3,24/100.000	6/100.000	7/100.000	8/100.000	9/100.000	10/100.000	11/100.000	11/100.000
2.9	Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk	0,6/100.000	0,6/100.000	0,6/100.000	0,6/100.000	0,6/100.000	0,6/100.000	0,6/100.000	0,6/100.000
2.10	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	5,09%							
2.11	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	50,00%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
2.12	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	84.36%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.13	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	72.82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	87.32%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	86.40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19.18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	38.14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	36.39%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40.71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.20	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74.71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.21	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	98.18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	52.11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	70,2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pekerjaan Umum Penataan Ruang								
3.1	Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	23,08	23%	21%	19%	17%	15%	13%	13%
3.2	persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	33%	43%	45%	47%	49%	51%	53%	53%
3.3	persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	62,62%	63%	65%	67%	69%	71%	73%	73%
3.4	persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	62%	65%	68%	71%	74%	77%	80%	80%
3.5	proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,perkotaan dan perdesaan	70,84	72%	75%	78%	81%	84%	87%	87%
3.6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	54,02%	56%	58%	60%	62%	64%	66%	66%
3.7	Persentase tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	-	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
3.8	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	75%	77%	80%	83%	86%	89%	92%	92%
3.9	Persentase Kesesuaian Ruang	72%	75%	77%	79%	81%	83%	85%	85%
3.10	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	51.00%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
4.1	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	-	-	150 Unit	150 Unit	150 Unit	150 Unit	150 Unit	750 Unit
4.2	Luasan lingkungan pemukiman kumuh	126,5 Ha	113,85 Ha	102,47 Ha	92,22 Ha	83,00 Ha	74,70 Ha	67,23 Ha	67,23 Ha
4.3	Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	121,34 Ha	109,21 Ha	98,29 Ha	88,46 Ha	79,61 Ha	71,65 Ha	64,49 Ha	64,49 Ha
4.4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	-	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	50 Unit
4.5	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	-	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	50 Unit
4.6	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	18,34 Ha	-	10%	10%	10%	10%	10%	9,17 Ha
4.7	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1.700 Unit	-	3%	3%	3%	3%	3%	1.445 unit
4.8	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100%	100%	100%	100%	100%		25%
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	80 %	82,65%	83,65%	84,01%	85%	90%	90%	90 %
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan	134 Desa/kelurahan
5.5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.6	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
6.	Sosial								
	Persentase PMKS yang ditangani								
6.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	39.58%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Tenaga Kerja								
7.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun;	105 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	18Kasus	16Kasus	14Kasus	13Kasus	101 Kasus

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
7.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB);	32 kasus	10 Kasus	10Kasus	9 Kasus	8Kasus	7 Kasus	7Kasus	51 Kasus
7.3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (BPJS);	4.936 Orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	6.136 orang
7.4	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah;	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;	171 Orang	10 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	410 Orang
7.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;	0	0	0	0	0	0	0	0
7.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan;	10 Orang	-	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	200 Orang
7.8	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	15 Kegiatan	17 Sub Kegiatan	17 Sub Kegiatan	17 Sub Kegiatan	17 Sub Kegiatan	17 Sub Kegiatan	17 Sub Kegiatan	100 %
7.9	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	93 Orang	10 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	410 Orang
7.10	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	10 Perusahaan	20 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	70 Perusahaan
7.11	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	1388 Orang	345 orang	350 orang	400 orang	410 orang	420 orang	430 orang	2.355 Orang
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah;	6%	11%	16%	21%	26%	31%	36%	36%
8.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR;	20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	30%
8.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta;	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Rasio KDRT	0,007	0,006	0,005	0,004	0,003	0,002	0,001	0,001
8.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Pangan								
9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat	88,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,20	95,20
9.2	Rasio ketersediaan pangan masyarakat terhadap kebutuhan	0,93	1,02	1,04	1,06	1,08	1,09	1,09	1,09

[illegible]

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
12.5	Persentase pengentasan desa tertinggal	60,35%	87,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.6	Persentase peningkatan status desa mandiri	0,0%	0,00%	1,10%	1,09%	1,08%	1,07%	1,06%	1,06%
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
13.1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	84,62%	85%	89%	90%	92%	94%	100%	100%
13.2	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,58	2,57	2,56	2,55	2,54	2,53	2,52	2,52
13.3	Ratio akseptor KB	70%	72%	74%	76%	78%	80%	82%	82%
13.4	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	63,44%	80,16%	80,20%	80,25%	80,30%	80,40%	80,50%	80,50%
13.5	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhinya (unmet need)	16,87%	27,05%	25,05%	20,05%	18,05%	17,05%	15,05%	15,05%
13.6	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	9,60%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	17%
13.7	Persentase tingkat ketidak berlangsungan pemakaian kontrasepsi	19,69%	19,68%	19,67%	19,66%	19,65%	19,64%	19,63%	19,63%
13.8	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB	2130	20%	30%	40%	50%	60%	70%	70%
13.9	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber KB	1530	20%	30%	40%	50%	60%	70%	70%
13.10	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	13580	20%	30%	40%	50%	60%	70%	70%
13.11	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	6	7	8	10	12	13	13	13
13.12	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	960	20%	30%	40%	50%	60%	70%	70%
13.13	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	919	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%
13.14	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.15	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	132	145	158	171	184	197	210	210
13.16	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	134	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.17	Rata-rata usia kawin pertama wanita	20	20	20	20	20	20	20	20
13.18	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,00033	0,00043	0,00053	0,00063	0,00073	0,00083	0,00093	0,00093
14.	Perhubungan								
14.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	182160	192000	192500	193000	193500	194000	194500	194500
14.2	Jumlah uji KIR angkutan umum	251	980	1000	1100	1200	1250	1300	1300
14.3	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	0	1	1	1	1	1	1	1
14.4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	10%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
14.5	Pemasangan rambu rambu	0	200	200	200	200	200	200	1.200
14.6	Jumlah orang/barang yang tersangkut angkutan umum	189354	198000	199000	200000	201000	202000	203000	203000
14.7	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal pertahun								
	- Penumpang	182160	192000	193000	194000	195000	196000	197000	197000
	- Barang	7194	6100	6200	6300	6400	6500	6600	6600

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
14.8	V/C Ratio jalan	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,77
14.9	Indeks konektivitas (desa – Kota Kuala Tungkal)	0,404	0,421	0,439	0,447	0,456	0,464	0,473	0,473
15.	Komunikasi dan Informatika								
15.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	9 KIM	3 KIM (pembinaan)	3 KIM (pembentukan)	3 KIM (pembentukan)	3 KIM (pembentukan)	3 KIM (pembentukan)	3 KIM (pembentukan)	15 KIM (pembentukan)
15.2	Jumlah menara telekomunikasi	114 menara	119 menara	122 menara	125 menara	128 menara	132 menara	134 menara	134 menara
15.3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	72.73%	72.73%	75%	80%	90%	95%	100%	100%
15.4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%	80%
16.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
16.1	Persentase Koperasi Aktif	56.34	61,48	64,07	67,04	70,74	75,19	80,74	80,74%
16.2	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	3,36	4,44	5,93	7,04	8,15	9,26	10,37	10,37%
16.3	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	4.73	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	19,98%
17.	Penanaman Modal								
17.1	jumlah investor (PMDN/PMA)	42	42	42	44	47	48	48	48
17.2	Nilai investasi PMA/PMDN	534,43 milyar	162 milyar	232 milyar	301 milyar	370 milyar	440 milyar	509 milyar	509 milyar
17.3	Jumlah penyerapan tenaga kerja terhadap investasi	1376	467	538	608	701	795	935	935
17.4	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	A	A	A	A
17.5	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	17,13%	3,50%	4,83%	5,99%	6,96%	7,72%	8,30%	8,30%
17.6	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah								
	a. Pajak Daerah	11	11	11	11	11	11	11	11
	b. Retribusi Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3
18.	Kepemudaan dan Olahraga								
18.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	26	30	50	90	100	110	120	500
18.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	9	1	2	4	5	6	7	25
18.3	Peningkatan prestasi olahraga	140	40	10	40	10	40	10	150
19.	Statistik								
19.1	Buku “Tanjung Jabung Barat dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
19.2	Buku “ PDRB Kabupaten”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
19.3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	70%	73%	76%	79%	82%	85%	88%	88%

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
19.4	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	70%	73%	76%	79%	82%	85%	88%	88%
20.	Persandian								
20.1	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	1	1	2	3	4	5	6	6
20.2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
21.	Kebudayaan								
21.1	Jumlah Grup Kesenian dan budaya daerah	227	227	228	229	230	231	232	232
21.2	Gedung Kesenian dan budaya	-	-	-	1	1	1	1	1
21.3	Event seni dan budaya	-	2	2	3	3	5	6	6
21.4	Jumlah Tempat Pagelaran Seni Budaya	3	3	3	3	4	4	4	4
21.5	Jumlah budaya yang dilestarikan	10	3	4	5	6	7	8	18
21.6	Terlestarikannya Cagar Budaya	-	1	2	3	4	5	6	6
22.	Perpustakaan								
22.1	Jumlah perpustakaan daerah	1	1	1	1	1	1	1	1
22.2	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	4927	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500
22.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	28098	29098	30098	31098	32098	33098	34098	34098
22.4	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	39%	55%	63,33%	63,50%	63,77%	63,85%	63,95%	63,95%
22.5	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	-	21%	21,5%	21,8%	22%	22,3%	22,7%	22,7%
23.	Kearsipan								
23.1	Jumlah Arsip Daerah yang dilestarikan	-	-	1500	1650	2100	2350	2600	10200
23.2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009]	89,00%	91,00%	92,00%	93,60%	95,00%	96,70%	98,90%	98,90%
23.3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	88,06%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	97,00%	98,00%	98,00%
24.	Kelautan dan Perikanan								
24.1	Produksi Perikanan	23.577	25.071	25.847	26.635	27.447	28.558	29.249	29.249
24.2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.135	1.170	1.229	1.278	1.329	1.395	1.451	1.451
24.3	Produksi Perikanan Tangkap (Laut dan Perairan Umum) (Ton)	22.442	23.901	24.618	25.357	26.118	27.163	27.798	27.798
24.4	Jumlah Rumah Nelayan Diverifikasi Usaha (RTP)	35	40	45	50	55	60	65	65
24.5	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	100	100	100	100	100	100	100	100
24.6	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan/Kemitraan Usaha/Kemudahan Akses Iptek dan Informasi/dan Penguatan Kelembagaan (Orang)	20	40	80	100	100	100	100	100
24.7	Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau Yang diproduksi (Ekor)	764.354	685.000	700.000	735.000	750.000	750.000	750.000	750.000

[illegible]

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
28.3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,1%
28.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	25,42	28,24	31,06	33,87	36,69	39,50	42,32	42,32%
28.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,84%
28.6	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	1.449 IKMB	43 IKMB	43 IKMB	43 IKMB	43 IKMB	43 IKMB	43 IKMB	1.707 IKMB
29.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah (Perencanaan Dan Keuangan)								
29.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.2	Persentase SILPA terhadap APBD	14,8%	14,6%	14,4%	14,2%	14,00%	13,8%	13,6%	13,6%
29.3	Persentase belanja pendidikan (20%)	21,32%	>20%	>20%	>20%	>20%	>20%	>20%	>20%
29.4	Persentase belanja kesehatan (10%)	17,61%	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%
29.5	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
29.6	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	12,67	12,70	12,76	12,82	12,87	12,93	13,00	13,00
29.7	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	28,22	28,27	28,34	28,42	28,47	28,54	58,59	28,59
29.8	Rasio PAD terhadap pendapatan Daerah	6,95%	6,95%	7,00%	7,07%	7,27%	7,68%	8,42%	8,42%
29.9	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah								
	a. Pajak Daerah	11	11	11	11	11	11	11	11
	b. Retribusi Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3
30.	Penelitian dan Pengembangan								
30.1	Persentase Hasil Penelitian Ditindak Lanjuti	-	20%	35%	50%	50%	50%	50%	50%
31.	Pengawasan								
31.1	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI)	71,9%	74%	76%	78	80%	82%	85%	85%
31.2	Auditor Profesionalisme sesuai Kode Etik dan Standar Audit	14 org	19 org	24 org	29 org org	34 org	39 org	44 org	44 org
32.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah (Kepegawaian)								
32.1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6,6%	7,3%	8,2%	9,2%	10,3%	11,6%	12%	12%
32.2	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	34,43%	35%	35,6%	36,3%	36,8%	37,5%	38%	38%
32.3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	37	37	37	37	37	37	37	37
32.4	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534	1534
32.5	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2065	2163	2300	2421	2476	2532	2589	2589

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
32.6	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	69%	71%	74%	77%	80%	82%	85%	85%
32.7	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6,62%	7,89%	13,44%	21,33%	24,68%	28,03%	31,37%	31,37%
32.8	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	70%	85%	85,32%	88,25%	92,02%	95%	95%

BAB IX

P E N U T U P

Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berada dalam tahun 2021 – 2024 atau kurang dari empat tahun), tidak sama dengan periode RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021-2026 atau lima tahun lebih, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kepala Daerah dan Wakil dalam mewujudkan visi **“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah (*Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, dan Harmonis*)”** mengingat permasalahan dan isu strategis serta upaya penuntasan target – target RPJPD Kab. Tanjung Jabung Barat 2005-2025.

Dalam proses penyusunannya selain memperhatikan atau mempedomani dokumen RPJMN 2020-2024, RPJPD Kab. Tanjung Jabung Barat 2005-2025, RTRW Kab. Tanjung Jabung Barat 2013-2033 juga memperhatikan atau mempedomani Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), target – target Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat disusun dengan mempedomani RPJMD.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Tanjung Jabung Barat yang setiap tahunnya disusun merupakan penjabaran RPJMD.

9.2. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Berkenaan dengan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam tahun 2021-2024 maka penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 berpedomanan pada RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021-2026.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT